
DOKUMEN UTAMA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Raden Demang Hardjakusumah, Komplek Perkantoran
Pemkot Cimahi, Kota Cimahi

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Cimahi, Maret 2020

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022

Disusun oleh:



Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Alamat : Jl. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi,
Kota Cimahi, Jawa Barat

Telepon : (022) 6632614

Fax. : (022) 6632614

Email : dlh@cimahikota.go.id

Peringatan

Dokumen KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun dari bulan November 2019 – Maret 2020. Meskipun upaya optimal telah dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan data terkini yang tersedia saat ini, perlu dipahami bahwa data dan informasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada waktu mendatang (masa depan). Dokumen KLHS ini milik POKJA KLHS Kota Cimahi, untuk reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi selaku ketua POKJA KLHS.



Kata Pengantar

Dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, terutama dengan adanya berbagai perubahan kebijakan maupun kebijakan baru Pemerintah Pusat serta kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat berpengaruh pada pembangunan Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan rencana pembangunan, maka Perubahan RPJMD ini diikuti dengan perubahan seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2017-2022.

Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS memiliki pengertian sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 ini disusun untuk meningkatkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan yang dapat mendeteksi permasalahan pada tingkat hulu (kebijakan, rencana, dan/atau program).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh pihak, kami harapkan KLHS ini dapat menjadi panduan agar target-target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Revisi RPJMD ini dapat tercapai sehingga visi Cimahi 2017-2022 "MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA" dapat terwujud.

Cimahi, Juni 2020
WALI KOTA CIMAHI,

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	xiii
1 Pendahuluan	16
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Dasar Hukum.....	18
1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS	20
1.4 Ruang Lingkup	21
1.5 Tahapan Penyusunan KLHS	21
1.6 Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD	23
2 Dasar Teori	28
2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	28
2.1.1 Dasar Hukum KLHS.....	28
2.1.2 Pelaksanaan KLHS	29
2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS.....	29
2.1.4 Mekanisme Penyelenggaraan KLHS.....	29
2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS.....	30
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	31
2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah	31
2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJMD	32
2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	32
2.4 Ekoregion dan Jasa Lingkungan.....	35
2.4.1 Ekoregion	35
2.4.2 Jasa Lingkungan	36
2.5 Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah	38
2.6 Perkembangan Fungsi Kota Cimahi.....	40



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

3	Kondisi Kota Cimahi.....	43
3.1	Kondisi Geografis.....	43
3.1.1	Wilayah Administrasi	43
3.1.2	Topografi.....	44
3.1.3	Hidrologi.....	45
3.1.4	Klimatologi	48
3.1.5	Geologi.....	48
3.1.6	Penggunaan Lahan.....	50
3.2	Kondisi Demografis	52
3.3	Kondisi Lingkungan Hidup	55
3.3.1	Ekoregion di Kota Cimahi.....	55
3.3.2	Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan.....	58
3.3.3	Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	59
3.3.4	Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup.....	69
3.3.5	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	86
3.3.6	Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati.....	92
3.3.7	Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	94
3.4	Gambaran Keuangan Daerah	98
3.4.1	Kinerja Keuangan Kota Cimahi Tahun 2012-2017	99
3.4.2	Kinerja Keuangan Daerah Kota Cimahi dalam Pencapaian Indikator TPB	106
3.5	Aspek Daya Saing Daerah.....	107
3.5.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	108
3.5.2	Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	109
3.5.3	Iklim Berinvestasi	111
3.5.4	Sumber Daya Manusia	113
4	Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cimahi	114
4.1	Kondisi Umum Capaian Target TPB.....	115
4.2	Capaian Target Indikator TPB berdasarkan Pilar	120
4.2.1.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial	120



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

4.2.2.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi	121
4.2.3.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup	122
4.2.4.	Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	123
4.3	Rumusan Isu Prioritas di Kota Cimahi	124
4.3.1	Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas.....	124
4.3.2	Analisis <i>Gap</i> dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada Perubahan RPJMD terhadap Pencapaian TPB	131
4.4	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi TPB	140
5	Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	147
5.1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149
5.2	Sekretariat Daerah	150
5.3	Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat.....	152
5.4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157
5.5	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	158
5.6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	160
5.7	Dinas Lingkungan Hidup.....	162
5.8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	165
5.9	Dinas Kesehatan	171
5.10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	177
5.11	Dinas Pendidikan	178
5.12	Dinas Tenaga Kerja	182
5.13	Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan.....	184
5.14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	187
5.15	Dinas Pangan dan Pertanian	188
5.16	Dinas Perhubungan	190
5.17	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian	192
5.18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194
5.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	197
5.20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	200



5.21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah.....	201
5.22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	203
5.23	Kecamatan.....	204
5.24	Inspektorat	206
5.25	Kesatuan Bangsa	207
5.26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	209
6	Alternatif Skenario dan Rekomendasi.....	211
6.1	Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Kota Cimahi.....	211
6.1.1	Skenario Pencapaian Target Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (TPB 11).....	211
6.1.2	Skenario Pencapaian Target Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6) ...	217
6.1.3	Skenario Pencapaian Target Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)	221
6.1.4	Skenario Pencapaian Target Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10) ...	226
6.1.5	Skenario Pencapaian Target Penanggulangan Perubahan Iklim (TPB 13)	230
6.1.6	Skenario Pencapaian Target Tanpa Kemiskinan (TPB 1).....	233
6.1.7	Skenario Pencapaian Target Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17)	237
6.1.8	Keterkaitan Antar TPB Prioritas dengan TPB lainnya	242
6.2	Rekomendasi KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi	245
6.2.1	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Cimahi.....	245
6.2.2	Rekomendasi Berdasarkan TPB Prioritas Kota Cimahi	248
6.2.3	Integrasi dengan RPJMD	291
	Daftar Pustaka.....	322
	LAMPIRAN	I
	Lampiran A Metode Analisis Spasial Muatan Lingkungan Hidup	II
A.1.	Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan	II
A.2.	Kapasitas Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup	III
1.	Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan.....	III
2.	Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air	V



A.3.	Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	VIII
1.	Tekanan Penduduk.....	VIII
2.	Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja	XI
3.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai	XII
A.4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	XIV
A.5.	Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati	XV
	Lampiran B Peta Jasa Ekosistem di Kota Cimahi.....	XVI
	Lampiran C Capaian Indikator TPB di Kota Cimahi	XXI
C.1.	Indikator TPB Pilar Sosial.....	XXI
	TPB 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	XXI
	TPB 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	XXVII
	TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	XXX
	TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	XXXVII
	TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	XLII
C.2.	Indikator TPB Pilar Ekonomi	XLVI
	TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	XLVI
	TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.....	XLIX
	TPB 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	LI
	TPB 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	LIII
C.3.	Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup	LIX
	TPB 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LIX
	TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	LXIII



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LXVIII
TPB 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.....	LXIX
TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.....	LXX
C.4. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.....	LXXII
TPB 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	LXXII
Lampiran D Rekap Capaian per Target TPB	LXXVIII
D.1. Telah Mencapai Target Nasional	LXXVIII
D.2. Belum Mencapai Target Nasional	LXXX
D.3. Perlu Peningkatan	LXXXII
D.4. Perlu Penurunan	LXXXII
D.5. Tidak Ada Data (N/A)	LXXXIII
Lampiran E Monitoring dan Evaluasi TPB	LXXXV
Lampiran F Usulan Program dan Indikator	CXXIV
F.1. Tabel Target dan Indikator	CXXIV
F.2. Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah	CLXV
F.3. Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non Pemerintah	CCVII

Daftar Gambar

Gambar 2-1	Model Hierarki Kota Losch.....	39
Gambar 2-2	Peta Kota Cimahi dan Kawasan Militer Tahun 1934.....	41
Gambar 2-3	Foto Udara di Sekitar Pusat Militer Kota Cimahi 2017 dan Arah Perkembangannya	42
Gambar 3-1	Wilayah Administrasi Kota Cimahi.....	44
Gambar 3-2	Peta Kemiringan Lereng.....	45
Gambar 3-3	Peta Aliran Sungai di Kota Cimahi.....	46
Gambar 3-4	Peta Daerah Aliran Sungai Citarum	47
Gambar 3-5	Peta Cadangan Air Tanah Cekungan Bandung.....	47
Gambar 3-6	Peta Jenis Batuan di Kota Cimahi.....	49
Gambar 3-7	Peta Jenis Tanah di Kota Cimahi	50
Gambar 3-8	Peta Penggunaan Lahan Kota Cimahi	52
Gambar 3-9	Model Distribusi Penduduk Tahun 2016 di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5"x5"	55
Gambar 3-10	Ekoregion Kota Cimahi.....	56
Gambar 3-11	Ekoregion Jawa Barat.....	56
Gambar 3-12	Hasil Kali IJE dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi.....	59
Gambar 3-13	Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	60
Gambar 3-14	Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	61
Gambar 3-15	Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	62
Gambar 3-16	Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	63
Gambar 3-17	Status DDLH Penyedia Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	63
Gambar 3-18	Grafik Proyeksi Nilai Kebutuhan Pangan Terhadap Nilai Ketersediaan (BAU) di Kota Cimahi.....	64
Gambar 3-19	Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	65
Gambar 3-20	Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	66
Gambar 3-21	Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	66



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Gambar 3-22	Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	67
Gambar 3-23	Status DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	68
Gambar 3-24	Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air dengan Skenario BAU di Kota Cimahi	69
Gambar 3-25	Model Proyeksi Penduduk Tahun: (a) 2020, (b) 2030, (c) 2040, dan (d) 2050 di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5"x5"	70
Gambar 3-26	Potensi Timbulan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	71
Gambar 3-27	Peningkatan Potensi Timbulan Sampah pada Sistem Grid 5"x5 Kota Cimahi	73
Gambar 3-28	Grafik Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2050	73
Gambar 3-29	Potensi Timbulan Lumpur Tinja di Kota Cimahi Tahun 2016 pada Sistem Grid 5"x5"	74
Gambar 3-30	Peningkatan Potensi Timbulan Lumpur Tinja pada Sistem Grid 5"x5" di Kota Cimahi Tahun: (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050	76
Gambar 3-31	Grafik potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016-2050	76
Gambar 3-32	Potensi Beban Pencemar Air Sungai di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"	78
Gambar 3-33	Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016	78
Gambar 3-34	Peningkatan Potensi Beban Pencemar dari Tahun 2016 ke Tahun 2050 di Kota Cimahi	80
Gambar 3-35	Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung	81
Gambar 3-36	Potensi Beban Pencemar Air Sungai di WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung dalam Sistem Grid 30"x30"	82
Gambar 3-37	Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009	84
Gambar 3-38	Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010	85
Gambar 3-39	Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung	85
Gambar 3-40	Peta Lahan Kritis Kota Cimahi	86



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Gambar 3-41	Pola Ruang Kota Cimahi.....	87
Gambar 3-42	Grafik Proporsi Tutupan Lahan pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi	88
Gambar 3-43	Efisiensi Penyediaan Pangan di Kota Cimahi	89
Gambar 3-44	Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah pada Pola Ruang di Kota Cimahi	89
Gambar 3-45	Efisiensi Penyediaan Air Bersih di Kota Cimahi.....	90
Gambar 3-46	Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air pada Pola Ruang di Kota Cimahi	91
Gambar 3-47	Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kota Cimahi	91
Gambar 3-48	Proporsi Luas Tutupan Lahan pada Pola Ruang (a) RTH Perkotaan dan (b) Sempadan Sungai di Kota Cimahi.....	92
Gambar 3-49	Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi dan Sekitarnya....	92
Gambar 3-50	Tingkat Ketahanan dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi	93
Gambar 3-51	Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko banjir di Kota Cimahi	94
Gambar 3-52	Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko cuaca ekstrim di Kota Cimahi	95
Gambar 3-53	Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko kekeringan di Kota Cimahi.....	96
Gambar 3-54	Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi	97
Gambar 3-55	Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi	98
Gambar 3-56	Proporsi Komponen PDRB Kota Cimahi Tahun 2018.....	98
Gambar 3-57	Alokasi Anggaran per TPB di Kota Cimahi Tahun 2018.....	107
Gambar 4-1	Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Cimahi	121
Gambar 4-2	Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Cimahi .	122
Gambar 4-3	Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Cimahi	123
Gambar 4-4	Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Cimahi	124
Gambar 5-1	Grafik Capaian Indikator TPB per OPD di Kota Cimahi	148
Gambar 5-2	Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi	149
Gambar 5-3	Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi	150
Gambar 5-4	Persentase Capaian Indikator TPB pada RSUD Cibabat Kota Cimahi	153



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Gambar 5-5	Persentase Capaian Indikator TPB pada DPUPR Kota Cimahi	157
Gambar 5-6	Persentase Capaian Indikator TPB pada DPMPTSP Kota Cimahi....	158
Gambar 5-7	Persentase Capaian Indikator TPB pada DPKP Kota Cimahi.....	160
Gambar 5-8	Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kota Cimahi	163
Gambar 5-9	Persentase Capaian Indikator TPB pada DinsosP2KBP3A Kota Cimahi	166
Gambar 5-10	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinkes Kota Cimahi.....	171
Gambar 5-11	Persentase Capaian Indikator TPB pada Disbudparpora Kota Cimahi	177
Gambar 5-12	Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdik Kota Cimahi.....	179
Gambar 5-13	Persentase Capaian Indikator TPB pada Disnaker Kota Cimahi.....	182
Gambar 5-14	Persentase Capaian Indikator TPB pada Diskominfoarpus Kota Cimahi	185
Gambar 5-15	Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdukcapil Kota Cimahi	187
Gambar 5-16	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dispangtan Kota Cimahi	189
Gambar 5-17	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dishub Kota Cimahi	191
Gambar 5-18	Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdagkoperin Kota Cimahi	193
Gambar 5-19	Persentase Capaian Indikator TPB pada Bappeda Kota Cimahi	195
Gambar 5-20	Persentase Capaian Indikator TPB pada BPBD Kota Cimahi.....	197
Gambar 5-21	Persentase Capaian Indikator TPB pada BKPSDMD Kota Cimahi ..	200
Gambar 5-22	Persentase Capaian Indikator TPB pada Bappenda Kota Cimahi ..	202
Gambar 5-23	Persentase Capaian Indikator TPB pada BPKAD Kota Cimahi.....	203
Gambar 5-24	Persentase Capaian Indikator TPB pada Kecamatan Kota Cimahi	205
Gambar 5-25	Persentase Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Cimahi	206
Gambar 5-26	Persentase Capaian Indikator TPB pada Kesatuan Bangsa Kota Cimahi	208
Gambar 5-27	Persentase Capaian Indikator TPB pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	209
Gambar 6-1	Skenario Pencapaian Target TPB	211
Gambar 6-2	Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani.....	212
Gambar 6-3	Proyeksi Capaian dan Target: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	213
Gambar 6-4	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Cimahi	213
Gambar 6-5	Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kota Cimahi	217



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Gambar 6-6	Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi yang Layak di Kota Cimahi	218
Gambar 6-7	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Cimahi	219
Gambar 6-8	Proyeksi Capaian dan Target: Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi 222	
Gambar 6-9	Proyeksi Capaian dan Target: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	223
Gambar 6-10	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 3 di Kota Cimahi	224
Gambar 6-11	Proyeksi Capaian dan Target: Koefisien Gini	226
Gambar 6-12	Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Penduduk yang hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	227
Gambar 6-13	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 10 di Kota Cimahi	228
Gambar 6-14	Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang	231
Gambar 6-15	<i>Outcome</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Cimahi	231
Gambar 6-16	Proyeksi Capaian dan Target: Indeks Risiko Bencana pada Pusat-pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi	234
Gambar 6-17	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Cimahi	234
Gambar 6-18	Proyeksi Capaian dan Target: Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB di Kota Cimahi	238
Gambar 6-19	<i>Outcomes</i> dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 17 di Kota Cimahi	239



Daftar Tabel

Tabel 1-1	Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD Kota Cimahi 2017 - 2022.....	23
Tabel 2-1	Klasifikasi Jasa Ekosistem	37
Tabel 3-1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi	43
Tabel 3-2	Lingkup Wilayah Kota Cimahi.....	43
Tabel 3-3	Jenis Penggunaan Lahan Kota Cimahi	51
Tabel 3-4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016	52
Tabel 3-5	Jumlah Penduduk Setiap Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2016	53
Tabel 3-6	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Cimahi dari Tahun 2012-2016	54
Tabel 3-7	Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016	61
Tabel 3-8	Luas Wilayah yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016.....	63
Tabel 3-9	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kota Cimahi	64
Tabel 3-10	Nilai Kebutuhan Lahan dan Kebutuhan Domestik di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016	65
Tabel 3-11	Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan energi air di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016	67
Tabel 3-12	Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016.....	68
Tabel 3-13	Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Cimahi 2016-2050.....	71
Tabel 3-14	Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2050.....	74
Tabel 3-15	Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan di Kota Cimahi	79
Tabel 3-16	Nilai Potensi Beban Pencemar di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung.....	80
Tabel 3-17	Indeks Pencemaran Air Sungai.....	82
Tabel 3-18	Efisiensi Pemanfaatan SDA pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi	87
Tabel 3-19	Proyeksi PDRB Kota Cimahi dan Komponennya Hingga Tahun 2030	99
Tabel 3-20	Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016	100
Tabel 3-21	Rasio Likuiditas	104
Tabel 3-22	<i>Ratio Solvabilitas</i>	104
Tabel 3-23	<i>Debt Ratio</i>	104
Tabel 3-24	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Cimahi	105
Tabel 3-25	Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi.....	111



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Tabel 3-26	Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi	112
Tabel 3-27	Banyaknya Pencari Kerja di Kota Cimahi Tahun 2012-2017	113
Tabel 4-1	Rangkuman Capaian TPB di Kota Cimahi	116
Tabel 4-2	Analisis <i>Gap</i> Capaian TPB di Kota Cimahi.....	125
Tabel 4-3	Analisis <i>Crosscutting</i> TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Cimahi.....	128
Tabel 4-4	Analisis <i>Crosscutting</i> TPB dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.....	129
Tabel 4-5	Peringkat Isu TPB di Kota Cimahi	130
Tabel 4-6	Analisis <i>Gap</i> Kebijakan dan Strategi pada RPJMD terhadap TPB.....	132
Tabel 4-7	Rekapitulasi TPB Hasil Monitoring dan Evaluasi	141
Tabel 5-1	Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD	147
Tabel 5-2	Capaian Indikator TPB pada Sekretariat DPRD	149
Tabel 5-3	Pelaksanaan Indikator TPB pada Sekretariat Daerah.....	151
Tabel 5-4	Capaian Indikator TPB pada RSUD Cibabat.....	153
Tabel 5-5	Capaian Indikator TPB pada DPUPR	157
Tabel 5-6	Capaian Indikator TPB pada DPMPSTSP	159
Tabel 5-7	Capaian Indikator TPB pada DPKP.....	160
Tabel 5-8	Capaian Indikator TPB pada DLH.....	163
Tabel 5-9	Capaian Indikator TPB pada DinsosP2KBP3A	166
Tabel 5-10	Capaian Indikator TPB pada Dinkes	171
Tabel 5-11	Capaian Indikator TPB pada Disbudparpora	177
Tabel 5-12	Capaian Indikator TPB pada Disdik.....	179
Tabel 5-13	Capaian Indikator TPB pada Disnaker	183
Tabel 5-14	Capaian Indikator TPB pada Diskominfoarpus.....	185
Tabel 5-15	Capaian Indikator TPB pada Disdukcapil.....	187
Tabel 5-16	Capaian Indikator TPB pada Dispangtan	189
Tabel 5-17	Capaian Indikator TPB pada Dishub	191
Tabel 5-18	Capaian Indikator TPB pada Disdagkoperin	193
Tabel 5-19	Capaian Indikator TPB pada Bappeda	195
Tabel 5-20	Capaian Indikator TPB pada BPBD	197
Tabel 5-21	Capaian Indikator TPB pada BKPSDMD.....	200
Tabel 5-22	Capaian Indikator TPB pada Bappenda	202
Tabel 5-23	Capaian Indikator TPB pada BPKAD	204
Tabel 5-24	Capaian Indikator TPB pada Kecamatan	205
Tabel 5-25	Capaian Indikator TPB pada Inspektorat.....	207
Tabel 5-26	Capaian Indikator TPB pada Kesatuan Bangsa	208
Tabel 5-27	Capaian Indikator TPB pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	210



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Tabel 6-1	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan Pencapaian TPB 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	214
Tabel 6-2	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak	219
Tabel 6-3	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera	224
Tabel 6-4	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan.....	228
Tabel 6-5	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 13 tentang Penanggulangan Perubahan Iklim.....	232
Tabel 6-6	Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Kemiskinan	235
Tabel 6-7	Arahan Program dan Kebijakan dalam Mewujudkan TPB 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	239
Tabel 6-8	Interaksi Antar TPB.....	242
Tabel 6-9	Rekomendasi terhadap TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) di Kota Cimahi.....	249
Tabel 6-10	Rekomendasi terhadap TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) di Kota Cimahi.....	257
Tabel 6-11	Rekomendasi terhadap TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) di Kota Cimahi.....	263
Tabel 6-12	Rekomendasi terhadap TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) di Kota Cimahi.....	269
Tabel 6-13	Rekomendasi terhadap TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim) di Kota Cimahi	274
Tabel 6-14	Rekomendasi terhadap TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) di Kota Cimahi .	277
Tabel 6-15	Rekomendasi terhadap TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) di Kota Cimahi	284
Tabel 6-16	Matriks Integrasi KLHS dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi	292

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (*climate change*) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air, serta bencana lainnya. Pada akhirnya, kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan ini diimplementasikan salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan RPJMD diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, salah satunya dalam RPJMD. Analisis KLHS memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa KLHS RPJMD perlu dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Aspek dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan hidup namun juga aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dalam indikator-indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pencapaian TPB diimplementasikan berupa kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD agar rencana aksi TPB menjadi terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". TPB terdiri atas 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada

tahun 2015. Pada Perpres No. 59 tahun 2017 disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian RPJMD untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dari pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, indikator TPB yang merupakan kewenangan pemerintah kota adalah sejumlah 184 indikator.

Dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD, dapat dilakukan Perubahan dengan dasar pertimbangan tertentu. Pada Tahun 2019, telah dilakukan evaluasi Hasil RPJMD Kota Cimahi. Berdasarkan rekomendasi evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi, meliputi:

- a. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi memperoleh nilai 63,99 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil tersebut, maka salah satu tindak lanjutnya adalah KemenPAN dan RB melakukan revaluasi terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Renstra PD untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), memperhatikan keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*), serta telah dilakukan *cascade* kinerja. Hasil dari revaluasi tersebut menjadi masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan RPJMD dan Renstra PD.
- b. Dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama beberapa tahun sejak ditetapkannya Perda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah.
- c. Penetapan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 menuntut adanya dukungan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk Kota Cimahi. Dukungan kabupaten/kota diarahkan untuk mencapai visi, misi, target pembangunan, dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.
- d. Substansi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan substansi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini ditandai dengan:
 - i) Belum menyajikan kinerja pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMD periode sebelumnya.

- ii) Belum menyajikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- iii) Belum menyajikan telaahan terhadap kebijakan/isu nasional (antara lain RPJMN); kebijakan/isu regional (antara lain RPJMD Provinsi Jawa Barat, telaahan daerah sekitar); dan kebijakan/isu daerah (antara lain RPJPD Kota Cimahi, RTRW Kota Cimahi), KLHS RPJMD Kota Cimahi.
- iv) Belum mencantumkan indikator kinerja Tujuan.
- v) Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi di RPJMD menyajikan program teknis (terkait urusan/fungsi) yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah. Dengan demikian, tidak jelas indikator kinerja, target dan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah. Seharusnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka sudah jelas kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu, sehingga tidak ditemui sebuah program teknis dilaksanakan oleh lebih dari 1 perangkat daerah.
- vi) Terdapat perbedaan target pada beberapa indikator kinerja sasaran antara yang dimuat pada Tabel Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Cimahi dengan yang dimuat pada Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi dan Tabel Indikator Kinerja.
- vii) Belum mencantumkan indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah.

Dengan uraian di atas, maka RPJMD Kota Cimahi memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, yaitu **adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan kebijakan nasional**. Perubahan kebijakan pemerintah pusat (nasional) atau provinsi akan mengubah kebijakan, rencana, dan/atau program pada RPJMD Kota Cimahi. Oleh karena itu, KLHS perlu disusun kembali untuk memberikan rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, No-Reg Perda Provinsi Jawa Barat: 6-67/2019);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS

Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pada Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Sementara itu, tujuan pembuatan KLHS RPJMD adalah memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian terkait lingkungan hidup telah termuat sebagai dasar penyusunan revisi RPJMD Kota Cimahi. Adapun kajian lingkungan hidup yang dimaksud, yaitu :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah terbentuknya dokumen KLHS RPJMD Kota Cimahi yang telah memuat prinsip -prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian terkait lingkungan hidup sebagai dasar dan terintegrasinya kebijakan, rencana, dan/atau program pada Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi ini mencakup:

1. Kondisi Umum Daerah
Kondisi umum daerah memuat kondisi awal muatan KLHS berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan, geografis, demografis dan keuangan daerah.
2. Capaian Indikator TPB
Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Pembagian Peran
Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.

1.5 Tahapan Penyusunan KLHS

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan KLHS RPJMD, KLHS ini disusun dan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS

Pembentukan tim ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup, beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD, serta melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pembuat KLHS yang dibentuk wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:

- a. Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji;

- b. Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.

Adapun tugas Tim Pembuat KLHS adalah :

- a. Menyusun kerangka acuan kerja;
- b. Melaksanakan konsultasi publik;
- c. Membuat dan melaksanakan KLHS;
- d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- e. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. Melaksanakan pendokumentasian KLHS.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

- a. Kondisi umum daerah, paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah;
- b. Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan, berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
- c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan adalah alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.

4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan:

- a. Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
- c. Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- d. Laporan KLHS RPJMD.

Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD dilakukan pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam laporan KLHS. Laporan KLHS memuat informasi tentang:

- Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian;
- Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi;
- Gambaran pengintegrasian hasil KLHS;
- Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
- Hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
- Ringkasan eksekutif.

Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan, wajib dilakukan validasi oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan kepada:

- Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
- Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Permohonan validasi KLHS dilengkapi dengan:

- Surat permohonan;
- Rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang dilaksanakan KLHS;
- Laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
- Bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.

1.6 Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD

Berikut merupakan ringkasan perubahan dan/atau pemutakhiran (*updating*) yang dilakukan pada penyusunan Dokumen KLHS Revisi RPJMD terhadap Dokumen KLHS RPJMD sebelumnya. Perubahan dan/atau pemutakhiran mencakup beberapa hal, yaitu perubahan/pemutakhiran data dalam muatan wajib KLHS, capaian TPB, isu prioritas, skenario pencapaian TPB prioritas, rekomendasi, dan struktur Dokumen KLHS. Ringkasan perubahan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1-1**.

Tabel 1-1 Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD
Kota Cimahi 2017 - 2022

No.	KLHS RPJMD 2017 - 2022	KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
A	Muatan Wajib KLHS	
1	Muatan LH dianalisis pada tahun dasar 2015	Muatan LH dianalisis pada tahun dasar 2016, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi DDLH dan kondisi muatan LH lainnya karena adanya perubahan penggunaan lahan dan data statistik dasar lainnya.
2	Terdapat analisis daya tampung beban pencemar sungai.	Analisis daya tampung beban pencemar sungai tidak lagi disampaikan karena berdasarkan hasil validasi, model masih <i>under-estimated</i> .

No.	KLHS RPJMD 2017 - 2022	KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
3	Tidak terdapat model proyeksi penduduk dan implikasinya pada proyeksi potensi beban pencemar sungai, proyeksi timbunan sampah, dan proyeksi timbunan lumpur tinja.	Terdapat model proyeksi penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2050, sehingga dapat dimodelkan pula proyeksi potensi beban pencemar sungai, proyeksi timbunan sampah, dan proyeksi timbunan lumpur tinja dari tahun 2016 hingga tahun 2050.
4	Kerentanan terhadap perubahan iklim menggunakan data dari SIDIK KLHK.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim menggunakan data dari InaRISK BNPB. Ditampilkan pula analisis untuk potensi bahaya, kerentanan, dan risiko dari setiap bencana terkait perubahan iklim.
5	Muatan wajib KLHS yang dikaji (3 muatan): - ambang batas & status DDLH pangan dan air; - dampak dan risiko LH (analisis kualitas air sungai dan daya tampung sampah); - kerentanan terhadap perubahan iklim.	Muatan wajib KLHS yang dikaji (6 muatan): - kinerja jasa lingkungan/jasa ekosistem; - ambang batas & status DDLH pangan dan air; - dampak dan risiko LH (proyeksi penduduk, timbunan sampah & lumpur tinja beserta proyeksinya, potensi beban pencemar sungai dan proyeksinya, kualitas air sungai (statistik), penurunan muka tanah, dan lahan kritis) - efisiensi pemanfaatan SDA; - potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati; - kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
B Capaian TPB		
1	Menggunakan data terkait indikator TPB tahun 2016	Menggunakan data terkait indikator TPB tahun 2018
2	Terdapat capaian indikator di setiap OPD.	Capaian indikator dianalisis untuk keseluruhan Kota Cimahi, per pilar TPB dan setiap OPD
C Isu Prioritas dan Skenario Pencapaian		
1	Isu prioritas ditentukan berdasarkan peringkat gap capaian indikator TPB, DDDT, serta urusan wajib pelayanan dasar.	Isu prioritas ditentukan berdasarkan peringkat gap capaian indikator TPB, <i>crosscutting</i> TPB dengan isu dari muatan LH, <i>crosscutting</i> TPB dengan isu dari perubahan RPJMD, yang disandingkan dengan isu dari KLHS RPJMD dan masukan pada saat uji publik.
2	Isu prioritas dianalisis per indikator TPB.	Isu prioritas dianalisis per tujuan TPB.
3	Isu prioritas: 1. TPB 6: Rank 1, 3, 4, 8 (4 indikator) 2. TBP 1: Rank 2, 5, 7, 9, 17, 19, 29 (7 indikator) 3. TPB 10: Rank 6, 11 (2 indikator) 4. TPB 3: Rank 10, 14, 16, 20 (4 indikator) 6. TPB 4: Rank 12, 13, 15, 18 (4 indikator) 7. TPB 2: Rank 21 (1 indikator)	Isu Prioritas: 1. TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 2. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak 3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan 5. TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim 6. TPB 1: Tanpa Kemiskinan 7. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

No.	KLHS RPJMD 2017 - 2022	KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
	8. TPB 8: Rank 22, 25, 28 (3 indikator) 9. TPB 16: Rank 23, 26 (2 indikator) 10. TPB 11: Rank 24 (1 indikator) 11. TPB 17: Rank 27 (1 indikator)	
4	Terdapat isu strategis di setiap OPD.	Peran OPD dianalisis pada TPB yang menjadi isu prioritas saja.
5	Alternatif skenario (dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan) diberikan untuk setiap indikator TPB dan skenario dengan upaya tambahan untuk DDDT.	Skenario diberikan pada Tabel Monev TPB dan dirincikan pada setiap <i>outcomes/target</i> pada TPB yang menjadi isu prioritas.
D Alternatif Rekomendasi		
1	Disusun dengan pilihan berupa alternatif skenario dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan. - Dengan upaya tambahan untuk permasalahan daya dukung dan daya tampung Kota Cimahi, serta indikator TPB yang belum mencapai target atau belum dilaksanakan. - Tanpa upaya tambahan untuk indikator TPB yang telah mencapai target.	Disusun berdasarkan TPB prioritas dengan beberapa rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan KRP pada kebijakan dan strategi Perubahan RPJMD.
E Rekomendasi		
1	Disusun berdasarkan alternatif skenario, yaitu permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung serta 73 indikator TPB yang menjadi isu strategis (belum dilaksanakan, belum tercapai, dan tidak tersedia data)	Disusun berdasarkan isu prioritas TPB dengan beberapa pilihan rumusan yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan KRP pada kebijakan dan strategi Perubahan RPJMD.
2	Rekomendasi terdiri atas rekomendasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.	Setiap gap atau kekurangan yang terdapat pada sasaran visi dan misi Perubahan RPJMD Kota Cimahi memiliki rekomendasi dan tidak dikelompokkan menjadi jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang karena mengikuti periodisasi RPJMD.
F Arahan Kebijakan dan Program		
1	Tidak terdapat arahan kebijakan dan program	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat arahan kebijakan dan arahan program berdasarkan visi misi perubahan RPJMD disertai keterangan bentuk kegiatan dan arahan lokasi pelaksanaan. - Nama program dan kegiatan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
G Struktur Dokumen		
1	Bab 1 Pendahuluan berisi: - latar belakang; dasar hukum; - maksud dan tujuan; ruang lingkup; - sistematika pembuatan KLHS RPJMD.	Bab 1 Pendahuluan berisi: - Latar Belakang; - Dasar Hukum; - Maksud, Tujuan dan Sasaran KLHS;

No.	KLHS RPJMD 2017 - 2022	KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup; - Tahapan Penyusunan KLHS; - Ringkasan Perubahan KLHS Revisi RPJMD terhadap KLHS RPJMD.
2	Bab 2 Dasar Teori berisi: <ul style="list-style-type: none"> - perkembangan fungsi Kota Cimahi; - teori perkembangan aktivitas wilayah. 	Bab 2 Dasar Teori berisi: <ul style="list-style-type: none"> - KLHS; - RPJMD; - TPB; - Ekoregion dan Jasa Lingkungan; - Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah; - Perkembangan Fungsi Kota Cimahi.
3	Bab 3 Kondisi Umum Daerah berisi: <ul style="list-style-type: none"> - kondisi geografis; DDDT; - gambaran keuangan daerah Kota Cimahi dalam pencapaian indikator TPB; - peran para pihak dalam pencapaian TPB. 	Bab 3 Kondisi Kota Cimahi berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Geografis; - Kondisi Demografis; - Kondisi Lingkungan Hidup; - Gambaran Keuangan Daerah; - Aspek Daya Saing Daerah.
4	Bab 4 Analisis TPB berisi: <ul style="list-style-type: none"> - indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target; - indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target; - indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target; - indikator belum memiliki data. 	Bab 4 Analisis Capaian TPB berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Umum Capaian Target TPB; - Capaian Target Indikator TPB berdasarkan Pilar; - Rumusan Isu Prioritas di Kota Cimahi; - Monitoring dan Evaluasi TPB.
5	Bab 5 Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Bab 5 Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah: <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Sekretariat Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak - Dinas Kesehatan - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Pangan dan Pertanian - Dinas Perhubungan - Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian

No.	KLHS RPJMD 2017 - 2022	KLHS Revisi RPJMD 2017 - 2022
		<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Kecamatan - Inspektorat - Kesatuan Bangsa - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Bab 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi berisi: <ul style="list-style-type: none"> - alternatif skenario dan rekomendasi DDDT; - alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan; - skenario tanpa upaya tambahan; - isu strategis prioritas. 	Bab 6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Kota Cimahi <ul style="list-style-type: none"> - Skenario pencapaian target: kota dan permukiman yang berkelanjutan; air bersih dan sanitasi layak; kehidupan sehat dan sejahtera; berkurangnya kesenjangan; penanggulangan perubahan iklim; kemitraan untuk mencapai tujuan; - Keterkaitan antar TPB prioritas dengan TPB lainnya. b. Rekomendasi KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi. <ul style="list-style-type: none"> - Arah kebijakan perubahan RPJMD; - Rekomendasi berdasarkan TPB prioritas; - Integrasi dengan RPJMD.
7	Bab 7 Kesimpulan	-

Sumber: hasil analisis (2020)

2 Dasar Teori

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. KLHS merupakan amanat yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Kunci dalam penyelenggaraan KLHS adalah analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

KLHS memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan mempertimbangkan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertimbangan dalam menyusun KRP. Beberapa kemanfaatan yang diharapkan dari KLHS, antara lain: (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat;
2. Memperkuat implementasi pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Membantu proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; serta
4. Membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat KRP, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan.

Pelaksanaan KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh KRP yang sedang disusun. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan meliputi: yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari KRP dan yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan dengan substansi KRP. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.1.1 Dasar Hukum KLHS

Dasar hukum penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

2.1.2 Pelaksanaan KLHS

KLHS dapat dilaksanakan sebelum, bersamaan, atau setelah penyusunan *draft* KRP. KLHS untuk rencana pembangunan (RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD) dilakukan sebelum dokumen tersebut disusun, atau diistilahkan sebagai *ex-ante*. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.1.3 Prinsip Penyelenggaraan KLHS

KLHS bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam melakukan pembangunan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*) di antara pilar dan isu di atas. (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1. Keterkaitan (*interdependency*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial-ekonomi.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

3. Keadilan (*justice*)

Bertujuan supaya penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu dalam masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

2.1.4 Mekanisme Penyelenggaran KLHS

Mekanisme penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS

Dilakukan oleh penyusun KRP dengan membuat kelompok kerja (Pokja) yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah (biasanya perwakilan organisasi perangkat daerah) dan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya. Para pihak lainnya dapat berasal dari tokoh masyarakat, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, atau dunia usaha yang dianggap kompeten dalam KRP yang sedang disusun. Dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS, kelompok kerja dapat didampingi oleh tenaga ahli dalam penyusunan KLHS.

2. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS

Dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja), penyusun KRP, dan pimpinan daerah. Penjaminan kualitas terdiri atas proses penilaian mandiri dan integrasi KLHS terhadap KRP. Proses penilaian mandiri adalah proses penilaian terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan oleh Pokja, apakah proses yang dilakukan sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari KLHS. Proses integrasi KLHS terhadap KRP adalah proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh penyusun KRP terhadap rekomendasi dari KLHS dan mengintegrasikannya dalam KRP, apakah rekomendasi KLHS sudah diakomodasi atau diintegrasikan dalam KRP. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS kemudian akan dijamin kualitasnya oleh penyusun KRP dan pimpinan daerah.

3. Validasi KLHS

Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tingkat nasional dan Gubernur untuk tingkat daerah. Untuk KLHS pada tingkat nasional dan provinsi, dilakukan validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk KLHS pada tingkat kabupaten dan kota, dilakukan validasi oleh Gubernur. Proses validasi adalah proses untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.5 Muatan Analisis dalam KLHS

Analisis dalam KLHS bertujuan untuk merumuskan isu pada wilayah kajian KRP. Analisis dilakukan terhadap kondisi umum dan kondisi khusus dari wilayah tersebut, atau disebut dengan baseline kondisi. Data baseline kondisi yang dimaksud antara lain berupa: (DLH Provinsi Jawa Barat, 2019)

1. Kondisi umum wilayah kajian.

Muatan ini antara lain menjelaskan tentang kondisi geografis dan administratif dari wilayah yang dikaji, kondisi kependudukan, kondisi fisik wilayah, dan sebagainya.

2. Karakteristik ekoregion.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan: berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas (*constraint*) dalam pengelolaan lahan. Karakteristik ekoregion di setiap pulau/kepulauan telah dideskripsikan dalam Buku Deskripsi Ekoregion Pulau/Kepulauan.

3. Enam (6) muatan wajib kondisi lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup.
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem.

- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
 - e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
4. Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Kondisi baseline indikator TPB meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan.
- a. Kondisi sosial meliputi berbagai urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan; kesehatan; pangan; ketenagakerjaan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; administrasi kependudukan dan catatan sipil; komunikasi dan informatika; serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Kondisi ekonomi mencakup energi dan sumber daya mineral; keuangan; perindustrian; koperasi, usaha kecil dan menengah; pariwisata; penanaman modal; komunikasi dan informatika; statistik; dan sosial (terkait rasio gini).
 - c. Kondisi lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta kehutanan.
 - d. Hukum dan tata kelola kelembagaan mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif; statistik; administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan komunikasi dan informatika.

Pembahasan lebih detail terkait TPB terdapat pada subbab 2.3.

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Penyusunan RPJMD di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunan RPJMD, diperlukan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan.

2.2.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah memiliki dua orientasi, yaitu orientasi proses dan substansi. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah serta bawah atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

2.2.2 Tata Cara Penyusunan RPJMD

Terdapat empat tahap penyusunan RPJMD, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, perumusan rancangan RPJMD, dan penetapan RPJMD.

1. Persiapan RPJMD

Tahap persiapan RPJMD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

3. Perumusan rancangan RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMDtA

4. Penetapan RPJMD.

RPJMD provinsi ditetapkan oleh gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. RPJMD kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Brundtland dari PBB, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Agenda pembangunan berkelanjutan dibuat untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

- TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
- TPB 2 : Tanpa Kelaparan
Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- TPB 5 : Kesetaraan Gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

- TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- TPB 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan
Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- TPB 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- TPB 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- TPB 14 : Ekosistem Laut
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- TPB 15 : Ekosistem Darat
Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
- TPB 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 319 Indikator. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam pencapaian TPB/SDGs sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional sehingga harus terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Tahapan dan proses pencapaian TPB/SDGs di daerah merupakan bagian dari tahapan dan proses pembangunan daerah itu sendiri, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

2.4 Ekoregion dan Jasa Lingkungan

2.4.1 Ekoregion

Ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara sederhana ekoregion adalah geografis ekosistem, yaitu pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan wilayah geografis. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan ekoregion sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem dalam satu wilayah ekoregion. Suatu ekoregion dapat terletak di dalam beberapa wilayah administrasi, sehingga salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lainnya dari penetapan ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan-pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan, dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung, meskipun dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora, fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam berbagai tujuan, yaitu¹:

- a. Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
- c. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan lingkungan hidup.
- d. Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam

¹ Sumber utama deskripsi ekoregion pada bagian ini adalah buku Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan (KLH, 2013) dan buku Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia (KLH, 2013), kecuali terdapat sitasi tersendiri

satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan ekoregion dilakukan dengan pendekatan konsep bentang lahan. Menggunakan konsep tersebut, ekoregion dapat dipetakan berdasarkan kesamaan ciri morfologi dan morfogenesis bentuk lahan yang ada pada sistem lahan. Aspek morfologi mencirikan bentuk permukaan lahan yang dicerminkan oleh ketinggian relief lokal dan kelerengan. Sedangkan aspek morfogenesis mencirikan proses asal usul terbentuknya bentuklahan. Klasifikasi lahan dengan konsep sistem lahan dilakukan berdasarkan prinsip ekologi yang mengasumsikan adanya hubungan erat yang saling mempengaruhi antara agroklimat, tipe batuan, bentuk lahan, tanah, kondisi hidrologi, dan organisme. Dengan diintegrasikan dengan peta iklim dan tipe vegetasi, peta ekoregion dengan pendekatan bentang lahan dapat mencerminkan sebaran spasial batas ekosistem yang mendekati definisi ekosistem sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan suatu peta ekoregion dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data, yaitu peta sistem lahan, peta rupa bumi, peta geomorfologi, citra SRTM, peta curah hujan, dan data sumber daya hayati. Berbagai data tersebut kemudian digunakan dalam proses pembuatan peta ekoregion yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan dari pembuatan peta ekoregion yaitu pengkajian data sistem lahan, klasifikasi lahan, kompilasi data, pengisian/pelengkapan data atribut, dan yang terakhir penyajian peta.

Proses pengkajian data sistem lahan dimaksudkan untuk memperoleh klasifikasi lahan berdasarkan aspek morfologi dan morfogenesis dengan menggunakan berbagai data pendukung, yaitu definisi ekoregion berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai acuan utama pendefinisian ekoregion, peta rupa bumi sebagai peta dasar untuk penyajian ekoregion, citra SRTM dan DTM, serta peta geomorfologi yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi morfogenesis bentuk lahan. Pada tahapan ini, karakteristik sistem lahan yang dicermati adalah geometri batas sistem lahan, tipe bentuk lahan, litologi, jenis tanah, pola drainase, dan morfologi lahan. Karakteristik sistem lahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi morfologi dan morfogenesis bentuklahan yang digunakan sebagai satuan pemetaan ekoregion.

Proses klasifikasi bentuk lahan dilakukan dengan berdasarkan morfologi dan morfogenesis sistem lahan. Morfologi bentuk lahan diidentifikasi dengan data atribut sistem lahan ketinggian relief lokal dan kelerengan, sedangkan morfogenesis dengan data atribut tipe lahan, litologi (jenis batuan), jenis tanah, dan pola drainase. Hasil identifikasi morfogenesis tersebut kemudian diverifikasi dengan peta geomorfologi. Morfologi bentuklahan diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu 1) dataran, 2) perbukitan, dan 3) pegunungan. Sedangkan morfogenesis bentuk lahan diklasifikasikan menjadi delapan kelas, yaitu 1) marin/pantai, 2) fluvial yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses sedimentasi karena aliran air sungai, 3) fluviovulkanik, 4) karst yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari hasil pelarutan batu gamping, 5) organik/koral, 6) struktural yaitu bentuk lahan yang terbentuk dari proses tektonik, 7) vulkanik yaitu bentuklahan yang terbentuk dari hasil letusan gunung berapi, 8) denudasional yaitu bentuklahan yang terbentuk dari proses gradasi dan degradasi yang umumnya pada lahan berbatuan sedimen.

2.4.2 Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangible*). Jasa lingkungan dapat merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Hal ini berarti bahwa DDDTLH

merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Semakin tinggi atau baik DDDLH suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa ekosistemnya (Riqqi, et al., 2019). Setiap wilayah ekoregion dapat memiliki lebih dari satu tipe ekosistem penghasil jasa lingkungan.

Menurut MEA, jasa lingkungan terdiri dari empat kelompok, yaitu layanan penyediaan, pengaturan, kultural, dan pendukung (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*). Layanan penyedia (*provisioning services*) berupa jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetica, makanan, air, dll. Layanan pengaturan (*regulating services*) berupa manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll. Layanan kultural (*cultural services*) berupa manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan. Layanan pendukung (*supporting services*) berupa jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll. Penjelasan klasifikasi dari keempat kelompok jasa lingkungan ini ditunjukkan pada **Tabel 2-1**.

Tabel 2-1 Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata

Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi Operasional
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*)

2.5 Teori Perkembangan Aktivitas Wilayah

Dalam perkembangan wilayah, pembangunan berkelanjutan mengambil peran sebagai sarana untuk memberikan arahan dalam perkembangan kewilayahan. Karena pada prinsipnya perkembangan ini dapat membentuk pola yang teratur ataupun sebaliknya. Perkembangan wilayah dapat terjadi dalam proses yang berkesinambungan. Wilayah yang berkembang pada awalnya akan mengalami beberapa proses. Terjadinya perkembangan suatu wilayah dipicu oleh berbagai faktor, yang umumnya didominasi oleh aktivitas ekonomi. Teori kewilayahan lahir karena dilatarbelakangi oleh pertanyaan ekonomi yang berupaya untuk menjawab, dimana lokasi lahan yang paling optimal dari segi ekonomi. Karena besarnya pengaruh ekonomi terhadap kewilayahan, muncul dua model deliniasi wilayah; (1) wilayah secara fungsional; (2) wilayah secara administratif. Secara politis, wilayah dapat dideliniasi dalam batasan administrasi yang telah ditetapkan. Namun dari aspek lainnya, wilayah yang memiliki homogenitas tidak dapat dipisahkan dan dideliniasi secara langsung mengikuti batasan administrasi. Hal tersebut yang menciptakan pendeliniasian wilayah secara fungsional.

Kota Cimahi telah mengalami pertumbuhan aktivitas yang cukup pesat hingga saat ini. Secara administrasi, jumlah penduduk Kota Cimahi tercatat lebih dari 500 ribu penduduk. Namun secara fungsional, jumlah tersebut dapat terhitung lebih besar. Beberapa bagian wilayah Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu bagian dari Kawasan Metropolitan Bandung Raya. Terbentuknya wilayah secara fungsional bukan hanya sebagai bentuk proses yang alami karena unsur kesamaan entitas pada satu wilayah, namun juga dapat muncul karena pergerakan aktivitas.

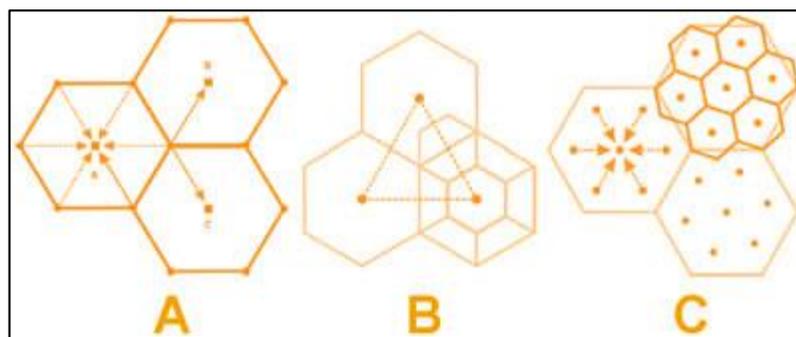
Perkembangan wilayah Cimahi saat ini telah mengalami transformasi yang sangat berbeda dengan apa yang dahulu direncanakan pada masa kolonial. Kota taman dengan konsep ekologis yang dipertahankan bergeser menjadi kota yang mengeksploitasi lahan secara masif. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan wilayah yang terbatas menjadikan Kota Cimahi rawan akan isu *sprawl*. Fenomena tersebut umumnya ditandai dengan perkembangan permukiman skala kecil dengan jumlah yang besar pada wilayah-wilayah pinggiran. Ludlow (2008) menjelaskan dampak dari *sprawl* tersebut akan cenderung negatif, seperti peningkatan konsumsi energi, konsumsi lahan dan air, polusi udara serta banyak dampak lain yang mungkin akan terjadi. Fenomena tersebut terjadi karena adanya respon dari perkembangan wilayah secara fungsional.

Tulisan dari Wijaya (2015) menunjukkan bahwa, wilayah Metropolitan Bandung Raya telah mengalami ekspansi lahan terbangun yang sangat pesat. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan berdasarkan citra satelit Landsat, eksploitasi lahan telah terjadi hingga mengalihfungsikan lahan-lahan hutan serta sebagian besar lahan pertanian. Dampak yang sangat terlihat dari adanya isu *sprawl* saat ini di Kota Cimahi adalah dari kemacetan yang mulai menyebar di beberapa titik, perubahan struktur ruang,

peningkatan volume buangan dan juga eksploitasi sumber daya yang melebihi daya tampung. Isu ekologis yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya adalah hal yang paling kritis bagi Kota Cimahi.

Banyak peneliti di dunia yang telah mengangkat isu mengenai *sprawl* dan berupaya memberikan saran terbaik untuk penanganan isu tersebut. Beberapa tulisan menunjukkan bahwa langkah yang banyak diambil oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan konsep yang berlawanan, yakni kota kompak. Konsep kota kompak adalah penerapan pemanfaatan lahan yang efisien, dengan menerapkan pemanfaatan lahan campuran. Jarak dengan pusat-pusat aktivitas dipangkas dan disediakan fasilitas transportasi yang memadai.

Tulisan dari Dieleman dan Wegner (2004) menjelaskan bahwa Kota Portland, Amerika Serikat berhasil keluar dari permasalahan *sprawl* dengan menerapkan kota kompak. Mereka berupaya menekan pertumbuhan perumahan yang tidak tertata dan tanpa fasilitas dasar dan penunjang. Setiap perkembangan hunian akan diintervensi dengan penerapan kota kompak. Penyediaan fasilitas dasar dan penunjang serta pusat-pusat aktivitas diupayakan untuk dapat menekan pergerakan dan eksploitasi lahan berlebihan untuk fungsi hunian. Struktur ruang perkotaan harus diperhatikan untuk menempatkan setiap fungsi-fungsinya. Penerapan sistem kota kompak dapat ditunjang dengan konsep hirarki kota pusat oleh Losch (1938) Teori tersebut membagi sistem layanan wilayah ke dalam beberapa hirarki, dengan beberapa fungsi yang disesuaikan dengan skala pelayanannya



Gambar 2-1 Model Hierarki Kota Losch

- Hirarki pertama akan diperuntukkan sebagai fungsi layanan lingkungan. fasilitas yang tersedia adalah fasilitas untuk skala lingkungan terkecil, seperti pasar lingkungan, sekolah dasar, dan beberapa fasilitas lainnya;
- Hirarki kedua akan diperuntukkan sebagai layanan untuk fungsi yang lebih besar, dimana fasilitas yang disediakan dapat melayani beberapa wilayah pada hirarki pertama, seperti hotel, pusat perbelanjaan, bank dan beberapa pusat hiburan;
- Hirarki ketiga diperuntukkan sebagai wilayah dengan tingkat layanan tertinggi. Pelayanan tersebut akan mencakup dua hirarki di bawahnya. Pelayanan seperti sekolah tingkat atas dan tinggi, rumah sakit, pusat bisnis dan beberapa aktivitas skala kota lainnya.

Bentuk yang diilustrasikan oleh Losch adalah bentuk segi enam untuk setiap hirarkinya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing segi enam tersebut akan diisi oleh beberapa bidang yang lebih kecil, sehingga sistem layanan dari setiap hirarki dapat maksimal. Bentuk segi enam juga memungkinkan tidak adanya gap antar pelayanan yang dapat ditinggalkan, karena keseluruhan ruang telah terisi oleh bidang yang lain. Selain itu, hal lain yang diperhatikan adalah intervensi terhadap pasar tanah. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah menjalankan fungsi ruang terbuka publik dan hijau oleh pemerintah (Tim Peneliti Prodi PWK UGM).

Industri dan permukiman yang berkembang pada daerah pinggiran Kota Cimahi memungkinkan konsep kota kompak untuk dikembangkan. Konsep kota kompak pada Kota Cimahi dapat dimulai dengan mulai mengembangkan penggunaan lahan campuran pada daerah-daerah pinggiran kota, wilayah yang disinyalir mengalami *sprawl* terbesar. Pengamanan lahan untuk ruang-ruang terbuka hijau dan ruang publik akan meningkatkan kekompakan bentuk ruang Cimahi, dan akan mengembalikan fungsi kota taman seperti yang dahulu dirancang. Penataan aktivitas dengan konsep penggunaan lahan campuran dibarengi dengan pengawasan terhadap struktur ruang kawasan yang telah ditetapkan di dalam dokumen rencana penataan ruang. Hal ini agar hirarki fungsi dari Kota Cimahi tidak menyebar tanpa aturan. Fungsi-fungsi dari setiap hirarki harus diperjelas. Agar ekspansi aktivitas dari satu wilayah tidak serta merta terjadi.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas pada Kota Cimahi secara konstan akan mempengaruhi daya dukung lahan, dan pada akhirnya akan terlampaui. Daya dukung merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan dengan berorientasi pada keberlanjutan. Pengertian (konsep) dan ruang lingkup daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

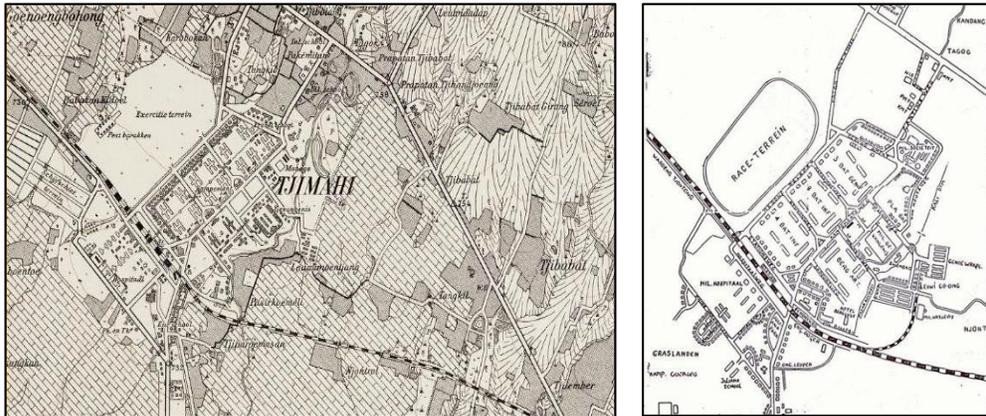
Permasalahan turunan yang sangat tampak pada Kota Cimahi adalah terkait dengan eksploitasi sumberdaya, khususnya sumber daya air. Perkembangan aktivitas dan pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan air bersih di Kota Cimahi. Eksploitasi yang berlebihan terhadap air bersih adalah salah satu dampak turunan yang dibawa oleh tidak efektifnya perencanaan dan pengendalian pembangunan. Tulisan dari Wijitkosum (2008) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan secara langsung antara pengendalian pembangunan dengan efektivitas pemanfaatan sumber daya air. Pertumbuhan pembangunan yang direncanakan dengan matang akan memberikan pen jagaan terhadap sumber daya. Selain itu tulisan tersebut juga memberikan saran melalui tiga poin utama untuk dapat mengimbangi pemanfaatan air bersih dalam proses pertumbuhan wilayah: (1) penggunaan air yang efektif dengan memperhatikan kepentingan penggunaannya; (2) memperbesar cadangan air dengan berupaya meningkatkan sumber-sumber penghasil (3) reformasi struktur harga untuk dapat menunjang poin sebelumnya.

Dengan menerapkan konsep pengembangan wilayah yang kompak dan pengamanan terhadap sumber daya, permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh perkembangan wilayah pada Kota Cimahi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Selain itu juga permasalahan yang tengah terjadi dapat ditasi secara bertahap.

2.6 Perkembangan Fungsi Kota Cimahi

Kota Cimahi mengalami proses transformasi yang panjang dalam hal perkembangan kewilayahan. Cimahi telah dikenal sebagai kota garnisun sejak masa kolonialisme Belanda. Salah satu momentum titik awal perkembangan Kota Cimahi dimulai dari adanya rencana dari Gubernur Herman Willem Daendels, yang memerintahkan pembangunan jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang melewati Kota Cimahi. Realisasi pembangunan jalan Anyer-Panarukan tersebut berhasil merubah gaya hidup masyarakat di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk Cimahi. Karena akses yang langsung

terhubung dengan Batavia. Pembangunan kawasan-kawasan komersil disepanjang wilayah Bandung dan sekitarnya berhasil merubah karakteristik Kota Tradisional di wilayah Bandung dan sekitarnya (Siregar, 1990).



Gambar 2-2 Peta Kota Cimahi dan Kawasan Militer Tahun 1934

Pembukaan akses sepanjang barat hingga timur Pulau Jawa tersebut ikut melewati Kota Cimahi. Pasca kekelahan perang yang diderita oleh Belanda atas Inggris, pemerintah Belanda bergerak cepat untuk mengembangkan pangkalan militer. Kota Cimahi dipilih sebagai pusat militer Belanda dengan pertimbangan wilayahnya yang sedikit tersembunyi, namun memiliki akses yang baik dari Batavia, serta adanya tiga jalur kereta api dan jalan raya pos. Pangkalan militer ini dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, seperti kompleks perumahan perwira, markas militer, pusat pendidikan militer, barak dan tangsi. Dengan berkembangnya aktivitas di Cimahi, pemerintah Belanda berupaya mengembangkan fasilitas penunjang aktivitas militer di Cimahi, seperti industri, sekolah dan tempat ibadah.

Pada masa pendudukan Belanda di Cimahi, pihak kolonial menerapkan perencanaan wilayah dengan prinsip yang sama dengan negara Eropa pada umumnya. Salah satu *urban planner* pada era kolonialisme adalah Thomas Karsten. Karsten mengadopsi sistem perencanaan yang sama dengan kota-kota di Eropa, dengan penyesuaian kondisi wilayah. Sistem yang diterapkan oleh Karsten adalah tuinstadkarakter. Model kota taman yang umum digunakan di Eropa. Sistem tersebut dengan rinci membagi pemanfaatan lahan dengan efisien dan aman. Terdapat dokumen-dokumen yang mengatur jarak antar bangunan, untuk menyediakan ruang terbuka. Sempadan antar bangunan juga tinggi bangunan juga dipertimbangkan. Aturan tersebut bukan hanya meningkatkan nilai estetika, namun juga memberi perlindungan ekologi bagi wilayah. Pada masa kolonialisme Belanda, perkembangan hunian yang alami oleh masyarakat terus diawasi. Hal ini bertujuan untuk mengamankan lahan pertanian yang tersedia agar tidak tergerus habis. Dalam sistem jaringan, perencanaan wilayah direncanakan mengikuti sistem hirarkial fungsi kawasan. Jalan-jalan utama akan menjadi pusat aktivitas (hirarki tertinggi), lalu menyebar ke jaringan-jaringan yang semakin mengecil yang berbanding lurus dengan tingkatan hirarkinya.



Gambar 2-3 Foto Udara di Sekitar Pusat Militer Kota Cimahi 2017 dan Arah Perkembangannya

Pasca masa kolonialisme, hampir seluruh wilayah di Indonesia fokus terhadap pembangunan kualitas manusia. Aspek perencanaan wilayah sedikit terlupakan. Termasuk Kota Cimahi. Ketika rezim orde baru, pembangunan di Indonesia terjadi secara sporadis dan terkesan tak terarah. Hal tersebut berdampak kepada sektor primer yang semakin tergeser, hilangnya kontrol lingkungan dan munculnya fenomena-fenomena “tanah tidur” (Firman, 1999). Hal yang sama terjadi pada Kota Cimahi, dimana ekspansi pembangunan semakin luas terjadi. Hal tersebut cenderung mengarah pada fenomena *sprawl* di Kota Cimahi.

Hingga saat ini Kota Cimahi cenderung berkembang menjadi kota industri dan komersial lainnya. Terjadi perubahan fungsi kota yang dahulu ditetapkan sebagai garnisun. Pemanfaatan lahan untuk industri dan permukiman adalah yang terbesar di Kota Cimahi dengan persentase yang telah melebihi 50% dari total luas Cimahi sementara untuk kawasan militer hanya menyisakan sekitar 2% dari total luas Kota Cimahi. Kecenderungan kota yang mengalami pergeseran fungsi menjadi kota komersial umumnya ditandai dengan adanya peningkatan eksploitasi lahan non terbangun dengan menggeser aktivitas primer yang ada di dalamnya.

Peningkatan aktivitas komersil di suatu kota akan mendorong terjadinya peningkatan pemanfaatan sumber daya untuk melayani aktivitas tersebut. Sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada Kota Cimahi, terjadinya peningkatan pemanfaatan lahan untuk permukiman pasti akan terjadi karena adanya aktivitas komersial yang cukup besar di wilayahnya. Aktivitas komersial yang membutuhkan sumber daya manusia, secara langsung menjadi magnet aktivitas bagi penduduk. Adanya kantong-kantong aktivitas di Kota Cimahi tersebut akan dipenuhi oleh masyarakat, baik masyarakat asli maupun pendatang. Peningkatan aktivitas yang semakin masif terjadi di Kota Cimahi, akan membawa eksternalitas pembangunan yang apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik akan membawa dampak negatif.

3 Kondisi Kota Cimahi

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kota Cimahi berada pada koordinat 107°30'38.12" – 107°34'32.15" BT dan 6°55'59.77" – 6°49'55.53" LS dengan luas wilayah 4.248,10 Ha. Wilayah administrasi di Kota Cimahi terdiri atas 3 Kecamatan dengan 15 Kelurahan, yaitu: Kecamatan Cimahi Utara dengan 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan dengan 5 Kelurahan. Luas serta lingkup wilayah kecamatan di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Tabel 3-1** dan

Tabel 3-2. Wilayah administrasi Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-1.**

Tabel 3-1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Cimahi Selatan	16,9
2	Cimahi Tengah	10,0
3	Cimahi Utara	13,3
Jumlah		40,2

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka 2018 (BPS, 2018)

Tabel 3-2 Lingkup Wilayah Kota Cimahi

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Cimahi Selatan	5	115	688
2	Cimahi Tengah	6	110	571
3	Cimahi Utara	4	87	469
Jumlah		15	212	1.728

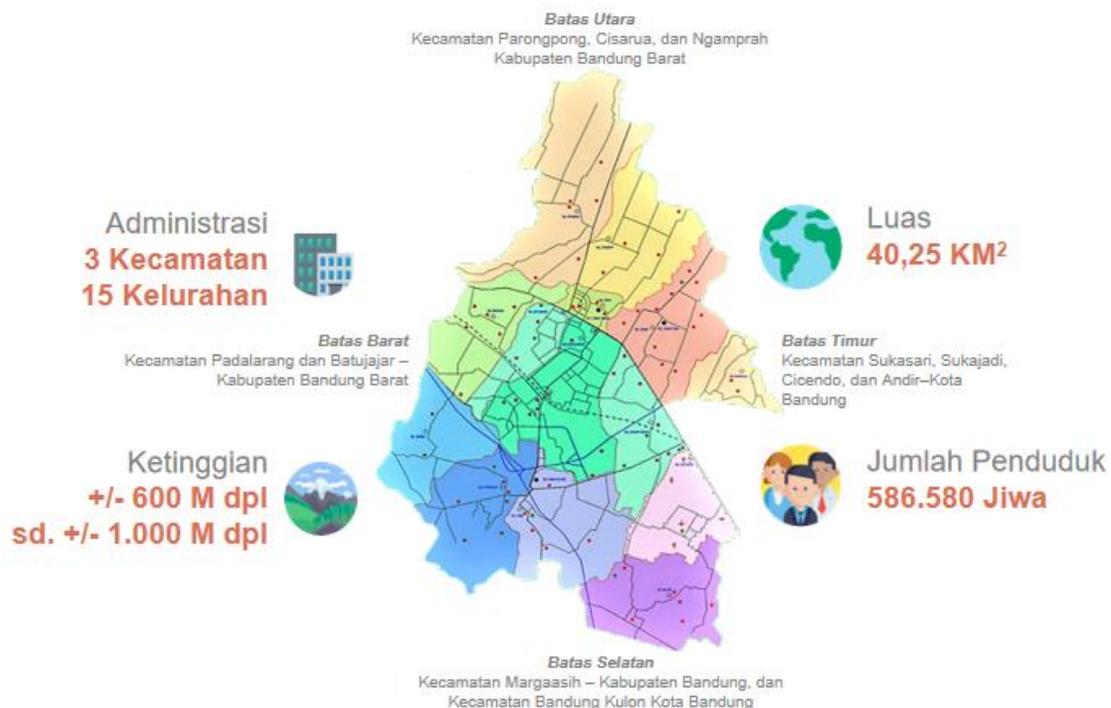
Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2018 (BPS, 2018)

Kota Cimahi terletak ±11 km di sebelah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Pada awalnya Kota Cimahi merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, kemudian pada tahun 1975 statusnya ditingkatkan dari kecamatan menjadi Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Cimahi, sejak tahun 2001 status Cimahi kembali ditingkatkan dari Kota Administratif menjadi Daerah Otonom Kota yang terpisah dari Kabupaten Bandung berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Batas wilayah administratif Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

- Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
- Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 3-1 Wilayah Administrasi Kota Cimahi

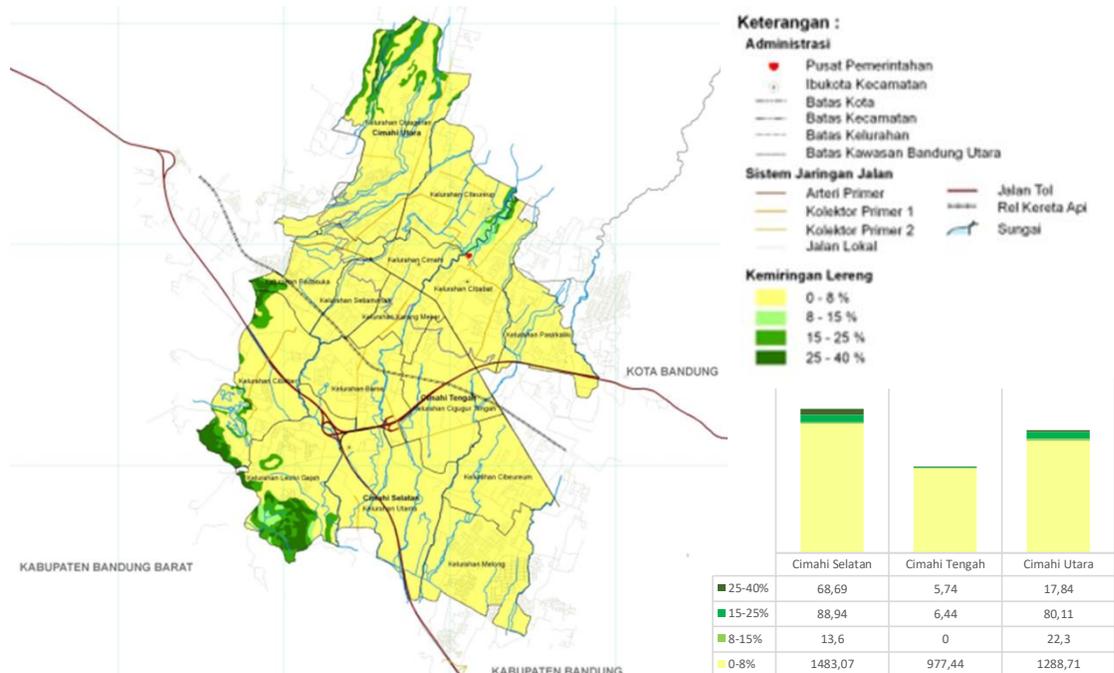
3.1.2 Topografi

Wilayah Kota Cimahi memiliki topografi berupa lembah cekungan yang relatif melandai ke arah selatan selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian wilayah bagian utara mencapai 1.040 m dpl (Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara), yang merupakan lereng kaki kompleks pegunungan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Sementara ketinggian wilayah bagian selatan sekitar \pm 685 m dpl (Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Secara umum, kondisi topografi dan kemiringan lahan Kota Cimahi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

- a. Tingkat kemiringan (0 – 8)%, terletak di kawasan seluruh Kota Cimahi yang berada pada ketinggian antara 700 – 850 m dpl.
- b. Tingkat kemiringan (8 – 15)%, berada di kawasan utara Kota Cimahi, yaitu di Kel. Cipageran dengan ketinggian 850 – 1.075 m dpl.
- c. Tingkat kemiringan (15 – 40)%, terletak di kawasan Kec. Cimahi Selatan, tepatnya di perbukitan Gunung Bohong, Kel. Cibeber dan Kel. Leuwigajah pada ketinggian 725 – 800 m dpl.

Sebagian besar wilayah Kota Cimahi (92,58%) berada di daerah dataran dengan kemiringan sekitar 0-8% dan hanya sebagian kecil wilayahnya (2,27%) yang memiliki kelereng curam pada kisaran 25-40%. Kondisi wilayah yang landai ini berarti bahwa Kota Cimahi memiliki kemampuan lahan yang tinggi dari

sisi kelerengan dan sesuai dikembangkan untuk berbagai jenis kegiatan seperti pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, dan sebagainya. Sedangkan untuk wilayah dengan kelerengan curam berarti bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan lahan yang rendah dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan terbatas atau ditetapkan sebagai kawasan lindung karena rawan terhadap ancaman longsor. Peta kemiringan lereng ditunjukkan pada **Gambar 3-2**.

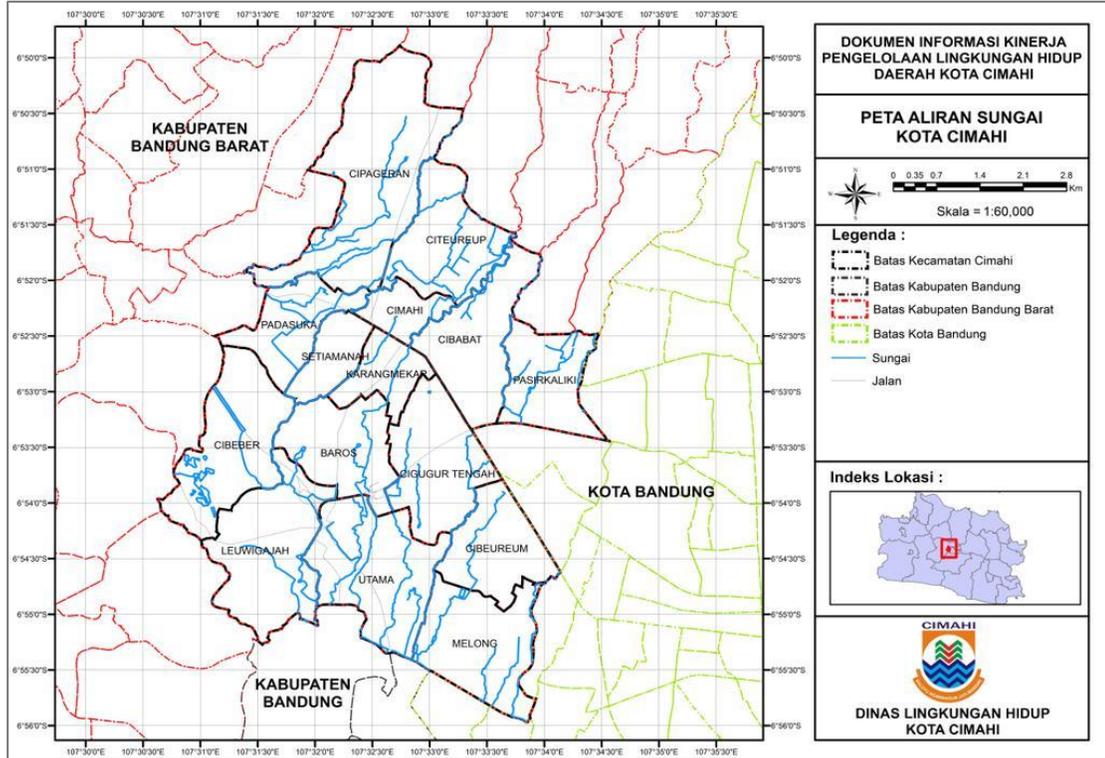


Gambar 3-2 Peta Kemiringan Lereng

3.1.3 Hidrologi

Air merupakan sumberdaya yang terbarui, tetapi ketersediaannya tidak selalu sesuai dengan waktu, ruang, jumlah, dan mutu yang dibutuhkan. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan air baik domestik maupun guna lahan, serta kuantitas maupun kualitas (Diba, 2015). Berdasarkan Pusair (2012), sumber daya air diklasifikasikan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah).

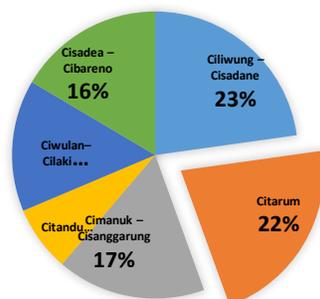
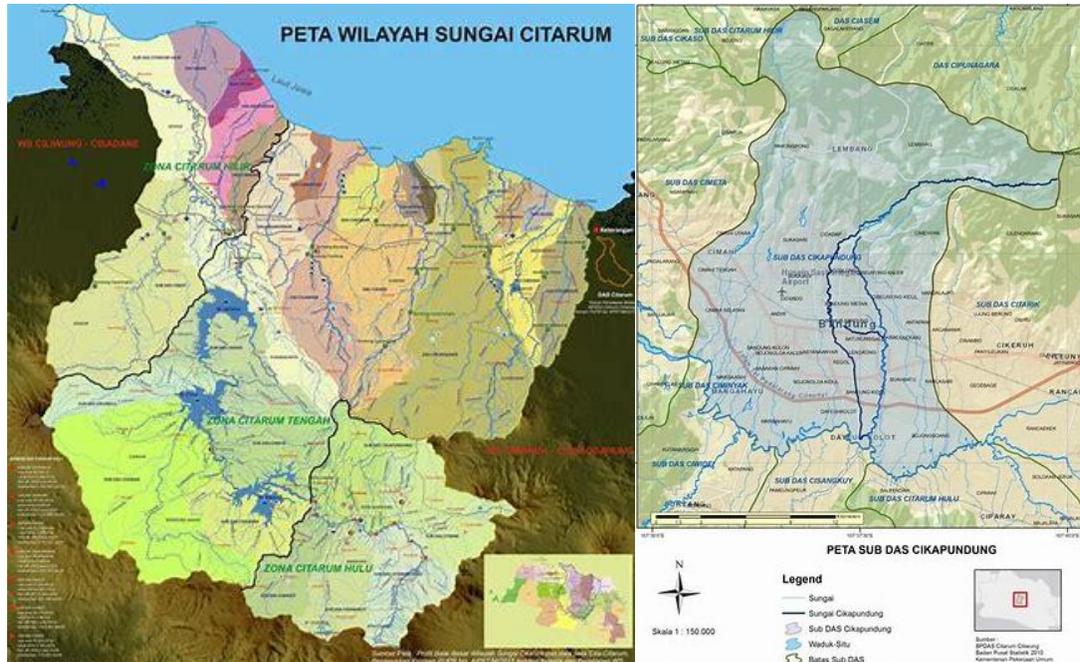
Kota Cimahi terletak di bagian hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari daerah cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Kota Cimahi dilalui beberapa sungai yaitu Sungai Cimahi, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum dan Kali Cisangkan, serta terdapat dua mata air yaitu mata air Cikuda dan mata air Cisintok. Peta aliran sungai Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-3**.



Gambar 3-3 Peta Aliran Sungai di Kota Cimahi

Kota Cimahi diproyeksikan memiliki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m³ per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m³ dan air tanah sebesar 13,612 juta m³ atau sekitar 0,07% dari potensi air di Jawa Barat.

Untuk air permukaan, potensi Kota Cimahi dapat dilihat berdasarkan Wilayah Aliran Sungai (WAS) Citarum yang juga mencakup beberapa wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3-4.



Potensi DAS di Jawa Barat berdasarkan WAS

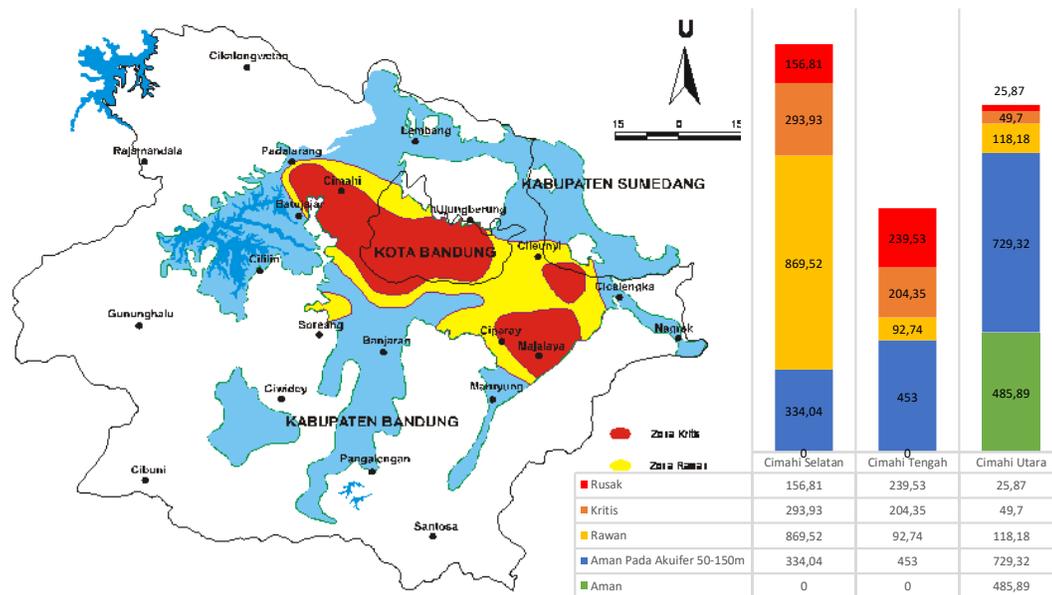
Wilayah Sungai	Potensi (milyar m ³ /tahun)
Cisadea – Cibareno	16%
Ciwulan– Ciliki...	16%
Citandun	17%
Cimanuk – Cisarungarung	17%
Cilungung – Cisdane	23%
Citarum	22%

Ciliwung – Cisadane	8
Citarum	7.6
Cimanuk – Cisanggarung	5.9
Citanduy	2.6
Ciwulan – Cilaki	5.2
Cisadea – Cibareno	5.8

Gambar 3-4 Peta Daerah Aliran Sungai Citarum

Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologis Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Potensi air tanah CAT Bandung-Soreang diperkirakan mencapai 795 juta m³ air bebas (*free water*) dan 117 juta m³ air tertekan (*confined water*) (Badan Geologi 2005).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah (Pemerintah Indonesia, 2008). Zona konservasi air tanah terdiri atas: (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 zona, yaitu: zona aman, zona aman pada akuifer 50-150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi saat ini didominasi oleh zona pemanfaatan rawan, kritis, dan rusak yang mencakup 50,6% dari total zona pemanfaatan air tanah, sebagaimana tercantum dalam Gambar 3-5.



Gambar 3-5 Peta Cadangan Air Tanah Cekungan Bandung

(Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jabar dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Berdasarkan Gambar di atas diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150 m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2050,63 ha atau mencakup 50,60% dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi. Pada tabel di atas dijelaskan bahwa pemanfaatan air tanah pada zona ini dibatasi untuk air minum dan rumah tangga dengan debit yang berbeda untuk kedalaman yang berbeda pada kisaran 90-260 m³/hari/sumur. Pemanfaatan air tanah pada zona terbatas ini harus diperhatikan untuk cadangan air tanah yang berkelanjutan, karena sumber air tanah merupakan sumber air yang terbatas dengan waktu *recharge* yang lama dan sulit direhabilitasi ketika sudah terjadi kerusakan.

3.1.4 Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi $\pm 700-850$ mdpl, curah hujan bervariasi antara 1700-3000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan ($+3000$ m) curah hujan mencapai 3000-4000 mm/tahun.

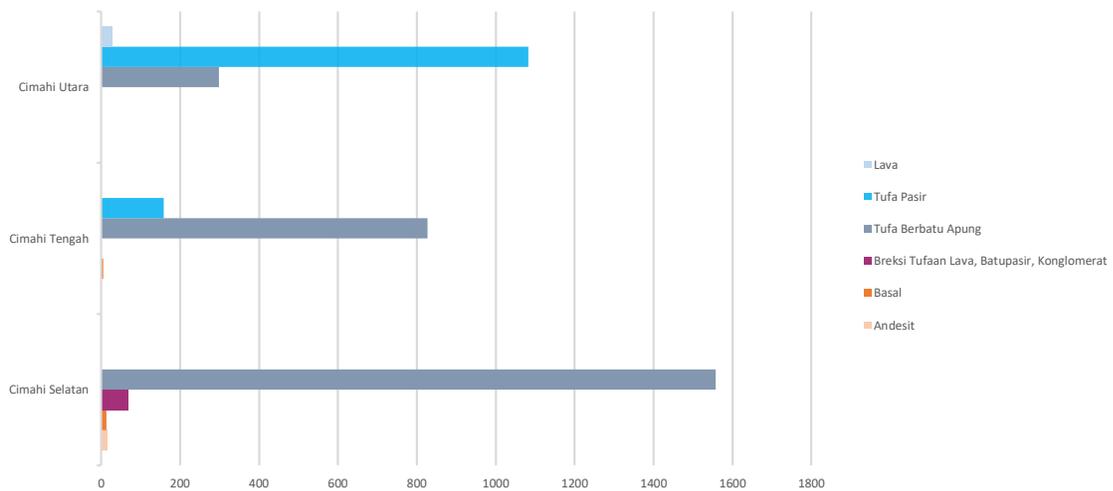
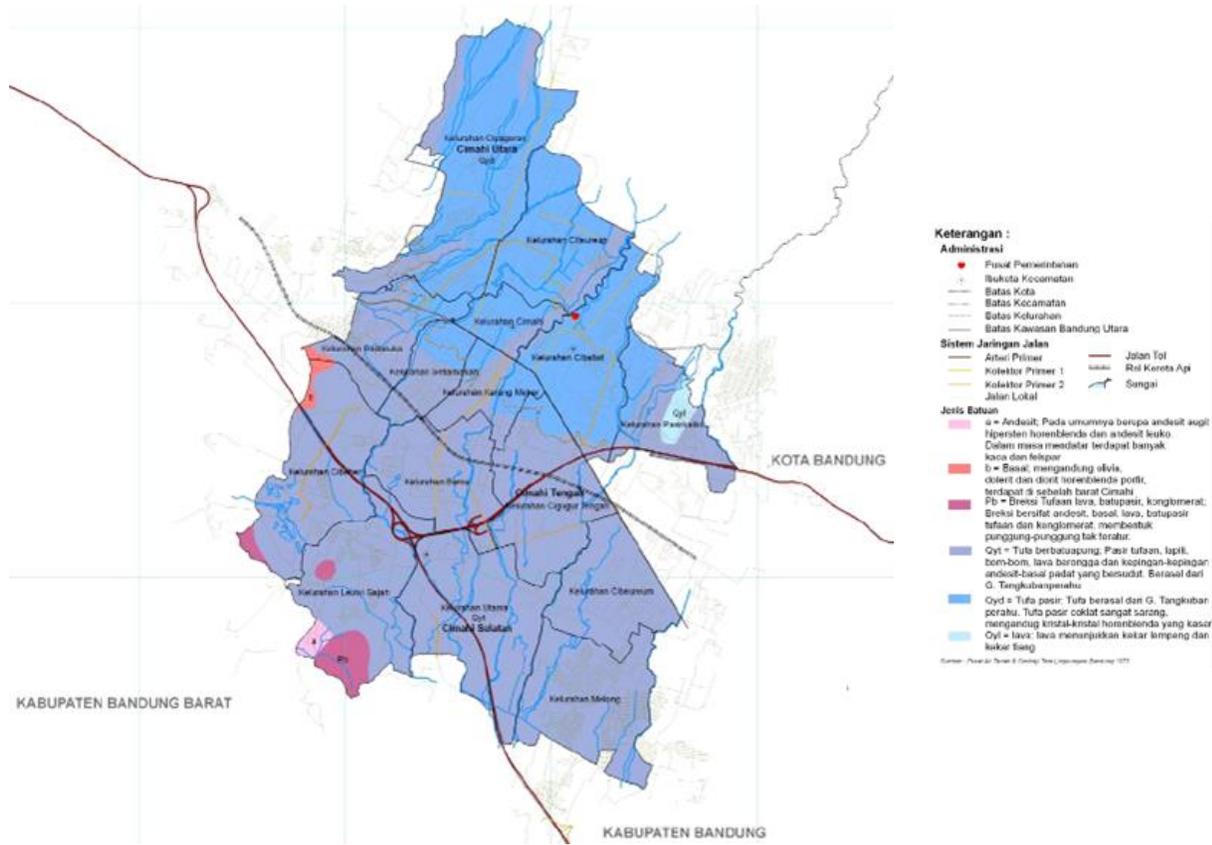
Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar $22,70$ °C - $23,20$ °C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0.6 °C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan, 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1700–4000 mm per tahun dan luar wilayah 4.052,88 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m³ per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

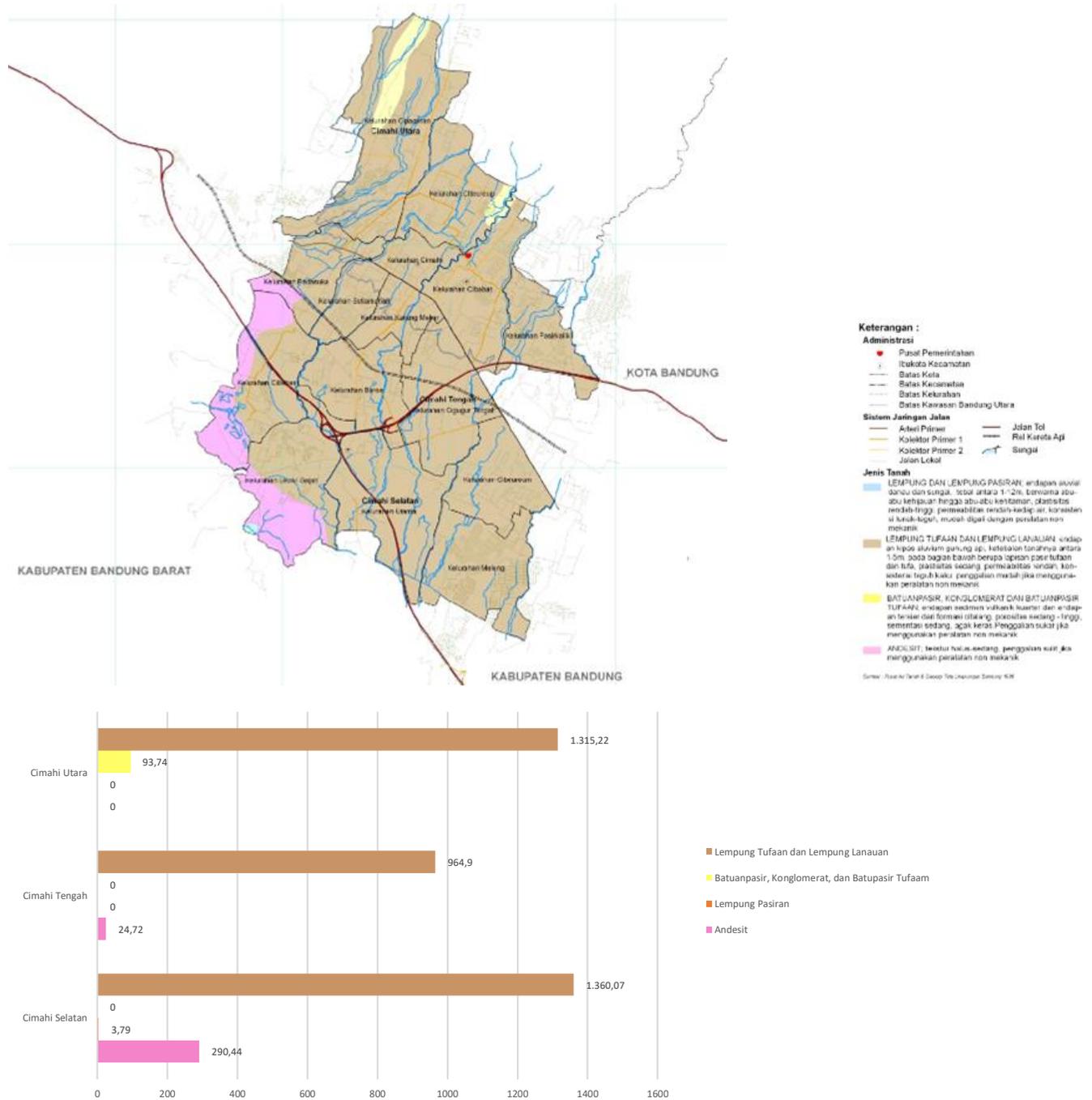
3.1.5 Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufa Lava, Batupasir, Konglomerat. Kota Cimahi didominasi oleh jenis batuan Tufa Berbatu apung dengan luas sebesar 2.682,59 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis batuan ini memiliki kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufa lava, batupasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufa, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesitbasal padat bersudut yang berasal dari Gunung Tangkuban Parahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 1973). Peta jenis batuan Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-6**.

Berdasarkan data dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Bandung tahun 1996, jenis tanah yang terdapat di Kota Cimahi sangat beragam diantaranya berupa jenis batuan andesit, lempung dan lempung pasiran, batupasir, konglomerat dan batu pasir tufa, serta lempung tufa dan lempung lanauan. Sebaran luasan jenis tanah yang terdapat di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-7**.



Gambar 3-6 Peta Jenis Batuan di Kota Cimahi
(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Tahun 2019 (DLH , 2019))



Gambar 3-7 Peta Jenis Tanah di Kota Cimahi

(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka, 2019)

3.1.6 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi tahun 2012-2037 penggunaan lahan Kota Cimahi terbagi ke dalam 15 jenis guna lahan, di antaranya: kebun, belukar, tanah kosong, kolam, ladang, lapangan, sawah, taman, pemukiman, industri, gedung, gudang, komersial, kuburan, dan rumput.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebesar 61,99% lahan di Kota Cimahi telah terbangun. Sisanya 38,01% merupakan areal terbuka yang belum terbangun. Pada lahan terbangun, penggunaan lahan

terbesar adalah permukiman yang meliputi 42,37% dari total luas lahan Kota Cimahi. Adapun penggunaan lahan paling kecil adalah sarana perhubungan sebesar 0,06%. Di lahan terbangun terdapat penggunaan lahan untuk sarana pertahanan dan keamanan sebesar 115,40 ha. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada zaman penjajahan Belanda, Kota Cimahi diperuntukkan sebagai Kota Garnisun yang merupakan pusat pertahanan untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Saat ini areal tersebut dijadikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang pertahanan dan keamanan.

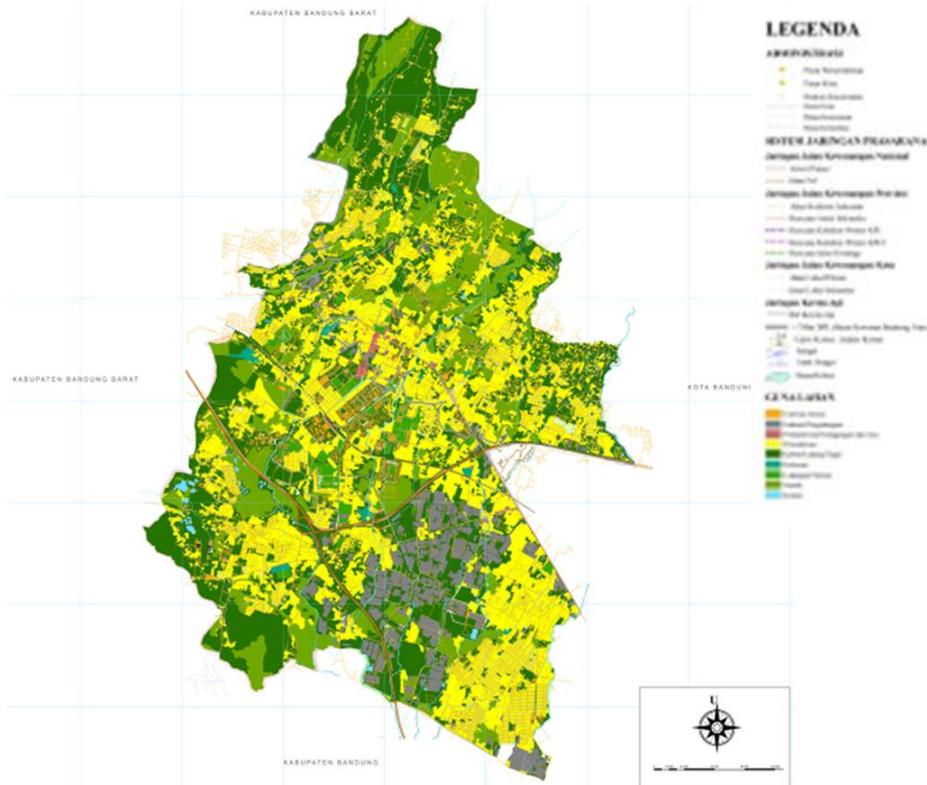
Tabel 3-3 Jenis Penggunaan Lahan Kota Cimahi

Jenis Penggunaan Lahan	Kode	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
Terbangun	PK	Permukiman	1.676,82	41,37
	PM	Sarana Perkantoran dan Pelayanan Masyarakat	26,19	0,65
	PM8	Sarana Pertahanan dan Keamanan	115,40	2,85
	SI	Sarana Industri/Pergudangan	487,32	12,02
	SK	Sarana Kesehatan	16,34	0,40
	SM	Sarana Komersial (Perdagangan dan Jasa)	39,57	0,98
	SO	Sarana Olahraga	45,60	1,13
	SP	Sarana Pendidikan	89,29	2,20
	TI	Sarana Tempat Ibadah	8,19	0,20
	TP	Sarana Perhubungan	2,43	0,06
	TW	Sarana Tempat Wisata	5,20	0,13
Jumlah			2.512,34	61,99
Non Terbangun	KB	Kebun	257,34	6,35
	KR	Kuburan	27,67	0,68
	LD/TG	Ladang/Tegalan	452,81	11,17
	PR1	Jalan	238,23	5,88
	PR4	Sungai	8,25	0,20
	PR5	Tubuh Air	22,42	0,55
	PR6	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	0,81	0,02
	SB/PR	Semak Belukar/ Padang Rumput	143,99	3,55
	SW	Sawah	178,51	4,40
	TK	Tanah Kosong/Ruang Terbuka	193,37	4,77
	TM	Taman	17,15	0,42
Jumlah			1.540,54	38,01
Total			4.052,88	100

Sumber: RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Pada lahan non-terbangun, penggunaan lahan terbesar berupa ladang/tegalan yang mencakup 11,17% dari total luas lahan Kota Cimahi. Adapun penggunaan lahan di areal belum terbangun yang paling kecil adalah tempat pembuangan sampah sebesar 0,02%. Penggunaan lahan yang merupakan sumber produksi pangan di Kota Cimahi terdiri atas kebun seluas 257,34 ha, ladang/tegalan seluas 452,81 Ha dan sawah seluas 178,51 Ha. Total keseluruhan lahan sumber produksi pangan ini adalah 888,66 Ha. Ruang terbuka hijau di Kota Cimahi berupa taman seluas 17,15 Ha. Selain taman, penggunaan lahan yang memiliki fungsi ekologis seperti taman adalah kebun seluas 257,34 Ha. Kedua penggunaan lahan ini memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap polusi udara dan daerah resapan air.

Berdasarkan fungsi kota secara umum, jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk perumahan, pendidikan, dan pelayanan umum. Jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi Tengah diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, serta pendidikan. Jenis kegiatan di Kecamatan Cimahi Selatan diarahkan untuk industri, perumahan, pendidikan, dan pelayanan umum. Peta penggunaan lahan Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-8**.



Gambar 3-8 Peta Penggunaan Lahan Kota Cimahi

(Sumber: Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Tahun 2019 (DLH , 2019))

3.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, jumlah penduduk Kota Cimahi pada tahun 2016 sebanyak 531.393 jiwa (**Tabel 3-4** dan **Tabel 3-5**). Kecamatan Cimahi Selatan merupakan daerah terluas mencapai 16,9 km² dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 224.864 jiwa. Kecamatan Cimahi Tengah merupakan kecamatan dengan luas terkecil sekitar 10 km² dengan jumlah penduduk sebesar 154.826 jiwa. Sementara Cimahi Utara memiliki jumlah penduduk mencapai 151.703 jiwa. Kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dua kecamatan lainnya yaitu mencapai 15.483 jiwa/km². Kecamatan Cimahi Tengah memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di pusat perkotaan Cimahi dengan keanekaragamannya.

Tabel 3-4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Cimahi Selatan	16,9	224.864	13.306
2	Cimahi Tengah	10,0	154.826	15.483
3	Cimahi Utara	13,3	151.703	11.406
Jumlah		40,2	531.393	13.219

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (2019)

Tabel 3-5 Jumlah Penduduk Setiap Kelurahan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2016 (jiwa)
CIMAHI SELATAN	CIBEBER	26.370
	CIBEUREUM	59.088
	LEUWIGAJAH	43.227
	MELONG	62.534
	UTAMA	33.645
	Kec. Cimahi Selatan	224.864
CIMAHI TENGAH	BAROS	20.273
	CIGUGUR TENGAH	45.901
	CIMAHI	12.629
	KARANGMEKAR	15.809
	PADASUKA	37.609
	SETIAMANAH	22.605
	Kec. Cimahi Tengah	154.826
	CIMAHI UTARA	CIBABAT
CIPAGERAN		45.448
CITEUREUP		36.398
PASIR KALIKI		17.916
Kec. Cimahi Utara		151.703
KOTA CIMAHI	531.393	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (2019)

Kota Cimahi mengalami pertumbuhan penduduk yang positif pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Cimahi setiap tahunnya adalah 1,31 persen. Jumlah yang dihitung masih tinggi, jika dibandingkan dengan luasan wilayah Cimahi yang hanya sebesar 4.248,10 Ha dan jumlah penduduk yang telah lebih dari 500 ribu penduduk. Jumlah tersebut menjadikan Kota Cimahi sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi per kilometer di Indonesia. Pada tahun 2045, jumlah penduduk di Kota Cimahi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tekanan penduduk terhadap lingkungan di Kota Cimahi diperkirakan akan semakin besar. Tekanan populasi akan menyebar di seluruh wilayah di Kota Cimahi. Perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada **Tabel 3-6**.

Tabel 3-6 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Cimahi dari Tahun 2012-2016

URAIAN		2012	2013	2014	2015	2016
CIMAHI SELATAN	L	121,105	122,549	124,274	125,934	125,934
	P	120,269	123,440	126,063	128,431	128,431
	TOTAL	241,374	245,989	250,337	254,365	254,365
	SEX-R	100.7	99.28	98.58	98.06	98.06
CIMAHI TENGAH	L	85,559	86,229	87,234	88,012	88,012
	P	81,531	82,195	82,442	82,904	82,904
	TOTAL	167,090	168,424	169,676	170,916	170,916
	SEX-R	104.94	104.99	105.81	106.16	106.16
CIMAHI UTARA	L	78,136	79,233	80,517	81,762	81,762
	P	75,697	77,275	78,484	79,537	79,537
	TOTAL	153,833	156,508	159,001	161,299	161,299
	SEX-R	103.22	102.53	102.59	102.80	102.80
KOTA CIMAHI	L	284,800	288,011	292,025	295,708	295,708
	P	277,497	282,910	286,989	290,872	290,872
	TOTAL	562,297	570,921	579,014	586,580	586,580
	SEX-R	102.63	101.80	101.75	101.66	101.66

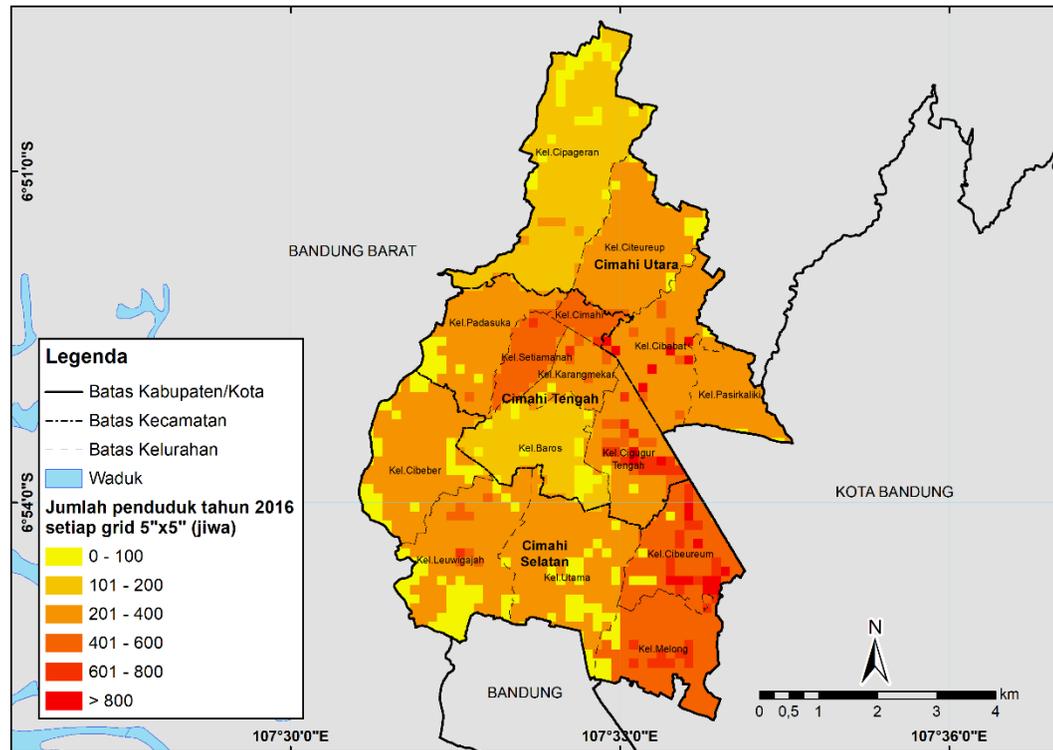
Sumber: Dokumen RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Berdasarkan rumus Indeks Kepadatan Penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi yang ideal adalah sebanyak 389.077 jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil perhitungan antara luas wilayah dengan perbandingan penduduk kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk eksisting dan luas wilayahnya, Kota Cimahi sudah tidak lagi ideal untuk menampung jumlah penduduk saat ini. Selisih jumlah daya tampung penduduk Kota Cimahi dengan jumlah penduduk eksisting adalah sebesar 178.780 jiwa. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengikuti perkembangan aktivitas di Cimahi, khususnya aktivitas perkotaan.

Selama kurun waktu 2012 – 2016 Jumlah penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatan dari 562.297 jiwa menjadi 586.580 jiwa yang terdiri dari 295.708 penduduk laki-laki dan 290.872 penduduk perempuan. Pada periode Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31 persen. Dengan luas wilayah sekitar 40,20 Km² maka kepadatan penduduk tahun 2015 mencapai 14,592 jiwa/Km² naik sebesar 1,31 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 14.403 jiwa/km², kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Cimahi Tengah dengan kepadatan penduduk 17.092 jiwa/km² angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 16.967 jiwa/km². Hal ini terjadi karena karakteristik perekonomian Kota Cimahi yang didominasi oleh sektor Industri menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang.

Statistik jumlah penduduk di setiap kelurahan (

Tabel 3-5) selanjutnya didistribusikan secara spasial ke dalam sistem grid dengan resolusi 5"x5" (± 150 m x 150 m). Model distribusi penduduk di Kota Cimahi tahun 2016 ini ditunjukkan pada **Gambar 3-9**. Berdasarkan hasil pemodelan, dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki jumlah penduduk per grid atau kepadatan penduduk yang tinggi berada di wilayah pusat kota dan sekitarnya, yaitu di Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi juga berada di wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, khususnya di wilayah Tenggara Kota Cimahi, meliputi Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum di Kecamatan Cimahi Selatan.

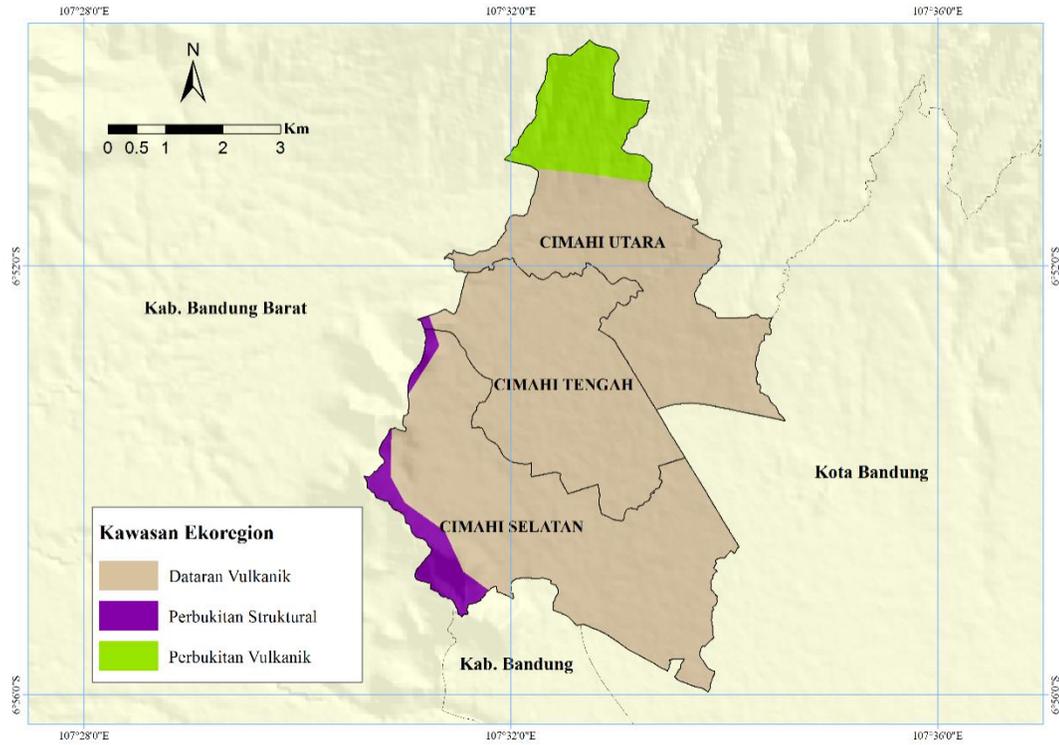


Gambar 3-9 Model Distribusi Penduduk Tahun 2016 di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

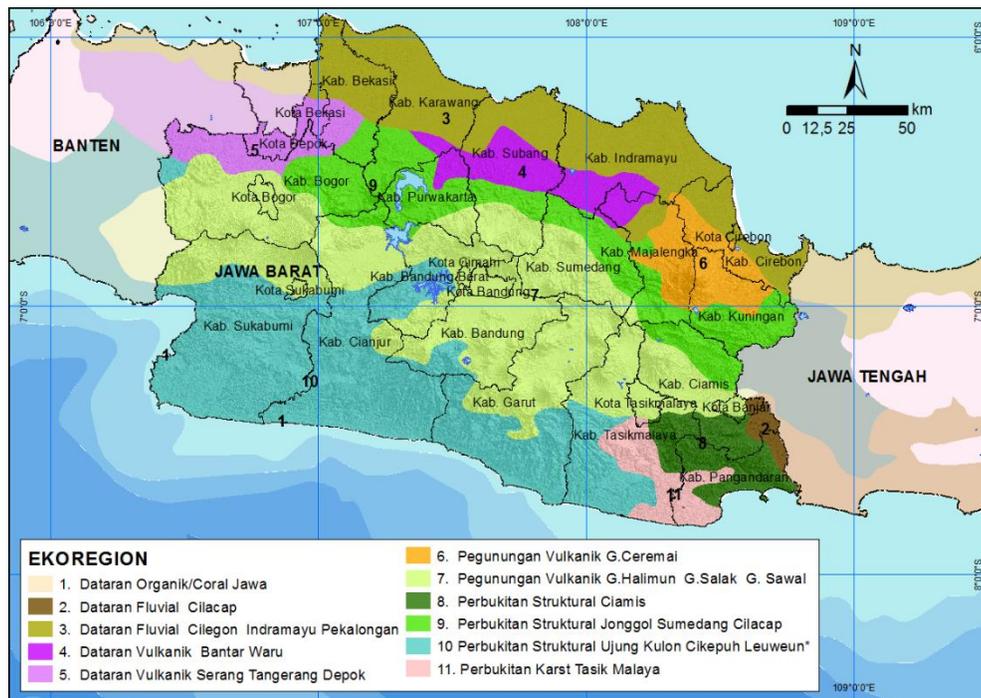
3.3 Kondisi Lingkungan Hidup

3.3.1 Ekoregion di Kota Cimahi

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik (**Gambar 3-10**). Ketiga jenis ekoregion tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal (**Gambar 3-11**).



Gambar 3-10 Ekoregion Kota Cimahi



Gambar 3-11 Ekoregion Jawa Barat

Pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal merupakan daerah yang berupa kerucut vulkanik. Ekoregion ini tersusun dari produk letusan gunung berapi berupa perselingan batuan beku ekstrusif dan material piroklastik. Hasil letusan gunung berapi membentuk bentuk lahan bertopografi bergunung, berlereng terjal, kemiringan lereng rata-rata 45% dan amplitudo relief > 300 m. Ekoregion ini dapat ditemukan di bagian tengah dan selatan Jawa Barat.

Ekoregion ini umumnya beriklim tropika basah dengan suhu rata-rata 16-20°C. Curah hujan tahunan berkisar antara 3.000-4.500 mm. Ekoregion ini memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah yang

melimpah sepanjang tahun, sehingga pegunungan vulkanik berperan sebagai sumber cadangan air yang sangat besar. Aliran sungai dengan pola radial atau semiradial mengalir sepanjang tahun. Pada tekuk lereng bawah atau lereng kaki banyak dijumpai mata air artesis dan air terjun. Jenis tanah yang dominan adalah andosol, latosol, dan litosol. Jenis tanah andosol dan latosol tergolong subur.

Sebagian besar kawasan ekoregion ini masih berhutan lebat. Meskipun begitu, karena kondisi tanah yang tergolong subur, sebagian kecil wilayah pada beberapa daerah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kondisi iklim yang sejuk dan tanah yang subur menjadikan pemanfaatan lahan di ekoregion ini berupa pertanian yang didominasi tanaman sayuran dan buah-buahan.

Ekoregion ini berasosiasi dengan jajaran pegunungan vulkanik di Jawa Barat. Sebagian besar kawasan ekoregion ini masih berhutan lebat dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena sebagian besar wilayah ekoregion ini berstatus sebagai kawasan konservasi, yaitu Cagar Alam (CA), Taman Wisata Alam (TWA), Suaka Margasatwa (SM), dan Taman Nasional (TN).

Sebagian besar ekosistem alami pada ekoregion pegunungan vulkanik Jawa Barat adalah hutan hujan dataran rendah. Namun di Kota Cimahi sebagian besar ekosistem berupa hutan pegunungan pada tempat tinggi. Ekosistem tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan ketinggian tempatnya, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi secara berurutan adalah hutan hujan dataran rendah (kurang dari 1.000 m), hutan sub-pegunungan (1.000-1.500 m), hutan pegunungan (1.500-2.400 m), dan hutan sub-alpin (lebih dari 2400 m).

Kondisi ekosistem hutan tersebut memiliki pola yang menarik seiring dengan bertambahnya ketinggian. Dari segi struktur hutannya, secara umum tinggi pepohonan yang menyusun hutan akan semakin pendek seiring dengan bertambahnya ketinggian, sementara jumlah individu pohon atau kerapatan hutan akan meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian. Ukuran diameter batang pohon cenderung semakin kecil seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat. Sementara itu, dari segi keanekaragaman jenis vegetasi, jumlah jenis/spesies tumbuhan akan semakin sedikit seiring dengan bertambahnya ketinggian tempat dan seiring dengan bertambahnya ketinggian terjadi perubahan komposisi jenis tumbuhan (Van Steenis, 2006).

Jenis dan jumlah fauna yang dapat ditemukan di ekosistem hutan-hujan dataran rendah menuju hutan pegunungan juga semakin sedikit seiring dengan bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan oleh penurunan suhu yang terjadi seiring dengan bertambahnya ketinggian sehingga kehadiran fauna ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap suhu. Fauna dari kelompok herpetofauna (amfibi, reptil, dan ular) yang merupakan hewan berdarah dingin banyak ditemukan pada hutan dataran rendah, namun jarang ditemukan pada lokasi yang tinggi karena tidak dapat beradaptasi terhadap suhu dingin. Berbagai jenis serangga, burung, dan mamalia dapat ditemukan pada ekosistem hutan pegunungan. Jenis mamalia arboreal seperti lutung jawa dan owa jawa serta karnivora langka seperti macan tutul (*Panthera pardus* melas) serta spesies babi hutan hanya dapat ditemukan hingga hutan subpegunungan, namun beberapa jenis tikus dapat ditemukan hingga hutan subalpine (Whitten, Soeriaatmadja, & Afiff, 1996).

Hutan sub-pegunungan terdapat pada ketinggian 1.000-1.500 m, memiliki kondisi vegetasi pepohonan yang tinggi dan terdiri atas beberapa lapisan tajuk, banyak dijumpai jenis anggrek, liana/tumbuhan perambat, dan paku-pakuan yang menempel pada batang pepohonan. Zona hutan subpegunungan biasanya didominasi oleh berbagai jenis tumbuhan dari famili Fagaceae (*Quercus*, *Lithocarpus*, *Castanopsis*) Lauraceae, serta jenis Puspa (*Schima wallichii*), Ki Hujan (*Engelhardia spicata*), dan

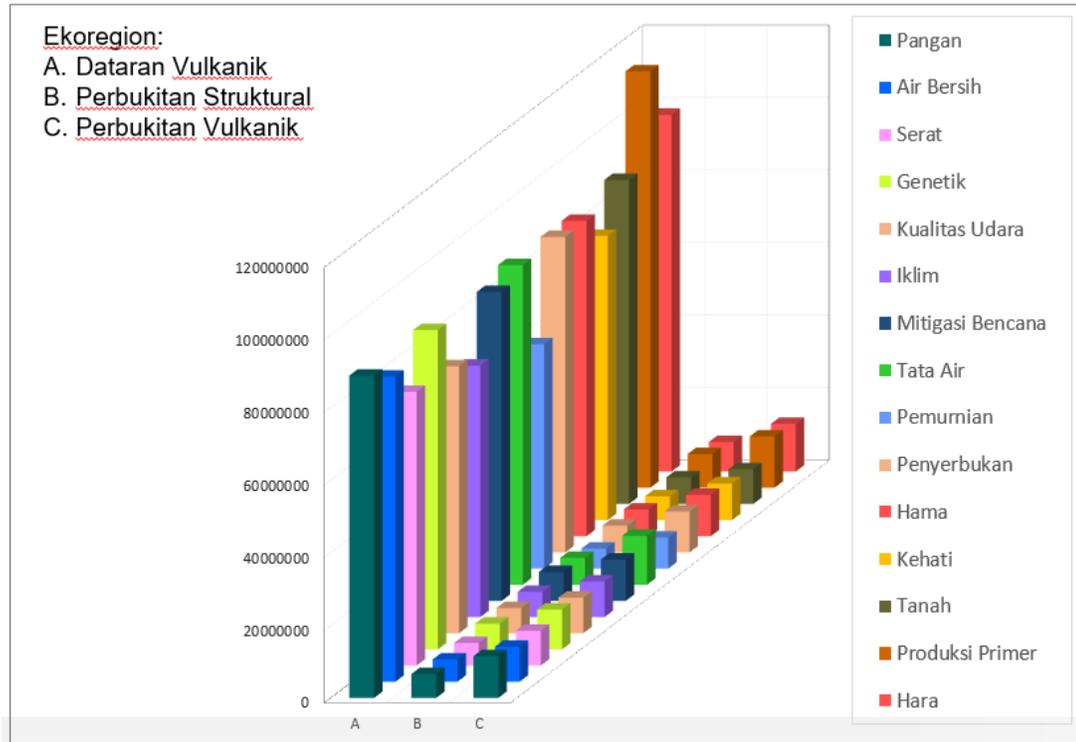
Rasemala (*Altingia excelsa*). Selain itu dapat ditemukan pula spesies-spesies lainnya seperti berbagai jenis dari famili Myrtaceae (BPLHD Jawa Barat, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, 2008).

Hutan pegunungan terdapat pada ketinggian 1.500-2.400 m, memiliki kondisi vegetasi pepohonan yang tinggi dan terdiri atas beberapa lapisan tajuk namun lebih pendek dibandingkan pepohonan di hutan sub-pegunungan. Pada zona ini struktur hutan lebih rapat dengan jumlah individu pepohonan lebih banyak dibandingkan hutan subpegunungan, namun batang pohon secara umum lebih kecil dan mulai ditutupi oleh lumut. Jumlah total jenis tumbuhan yang ditemukan lebih sedikit jika dibandingkan dengan hutan sub-pegunungan. Sedangkan tumbuhan dominan yang ditemukan di zona ini diantaranya adalah Jamuju (*Dacrycarpus imbricatus*) dan beberapa jenis dari famili Myrtaceae. Selain itu pada zona ini juga dapat mulai ditemui jenis-jenis tumbuhan yang mengisi zona sub-alpin seperti *Eurya obovata*, *Rhododendron retusum*, *Segel (Myrsine affinis)* (BPLHD Jawa Barat, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, 2008) sehingga zona ini dapat dikatakan zona peralihan komposisi jenis vegetasi (van Steenis, 2006).

Formasi hutan yang terdapat pada zona paling tinggi adalah hutan sub-alpin (> 2.400 m). Hutan sub-alpin tersusun atas pepohonan dengan ukuran batang yang kecil, pendek, dan ditutupi oleh lumut yang tebal, serta hanya terdiri dari satu lapisan tajuk. Keanekaragaman jenis pada zona ini paling rendah dibandingkan dua zona hutan di bawahnya. Jenis yang mendominasi hutan sub-alpin diantaranya Cantigi (*Vaccinium spp*), *Segel (Myrsine affinis)*, dan *Jirak (Symplocos)*. Sedangkan jenis tumbuhan lain yang dapat ditemukan di hutan sub-alpin hanya sedikit, diantaranya *Leptospermum flavescens*, *Myrica javanica*, dan *Eurya obovata*. Tumbuhan-tumbuhan tersebut biasanya teradaptasi untuk dapat bertahan hidup dengan cekaman berupa gas sulfur yang berasal dari kawah. Selain itu pada zona sub-alpin di beberapa gunung biasanya ditemukan padang rumput yang berasosiasi tumbuhan perdu Edelweis Jawa (*Anaphalis javanica*) yang terkenal sebagai bunga abadi (BPLHD Jawa Barat, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2008, 2008)

3.3.2 Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Nilai setiap jasa lingkungan disebut dengan Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Perhitungan dan persebaran IJE untuk setiap jasa lingkungan di Kota Cimahi secara lebih detail dapat dilihat pada **Lampiran A.1**. Setiap satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan yang dominan. Jasa lingkungan dominan dapat dilihat dengan melakukan pemetaan jasa lingkungan maksimum. Jasa lingkungan maksimum dihasilkan dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di dalam wilayah ekoregion tersebut. Nilai yang maksimum dari hasil perkalian tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem dominan untuk satu unit wilayah ekoregion (BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2017). Hasil kali IJE dengan luas setiap ekoregion di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 3-12**. Peta tiap jenis jasa lingkungan Kota Cimahi ditampilkan pada **Lampiran B**.



Gambar 3-12 Hasil Kali IJE dengan Luas Setiap Ekoregion di Kota Cimahi
(Sumber: Hasil analisis 2019)

Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung memiliki nilai jasa lingkungan sangat tinggi karena wilayahnya yang sangat luas sekitar 85% dari Kota Cimahi. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, regenerasi tanah, penyedia pangan, dan pengaturan air dan banjir. Jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa di Kota Cimahi adalah produksi primer, siklus hara, pengaturan mitigasi bencana, pengaturan air dan bajir, dan regenerasi tanah. Sedangkan jasa lingkungan dominan pada Ekoregion Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang – Merapi – Raung di Kota Cimahi adalah produksi primer, pengaturan air dan banjir, siklus hara, penyedia pangan, dan pengendalian hama.

3.3.3 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

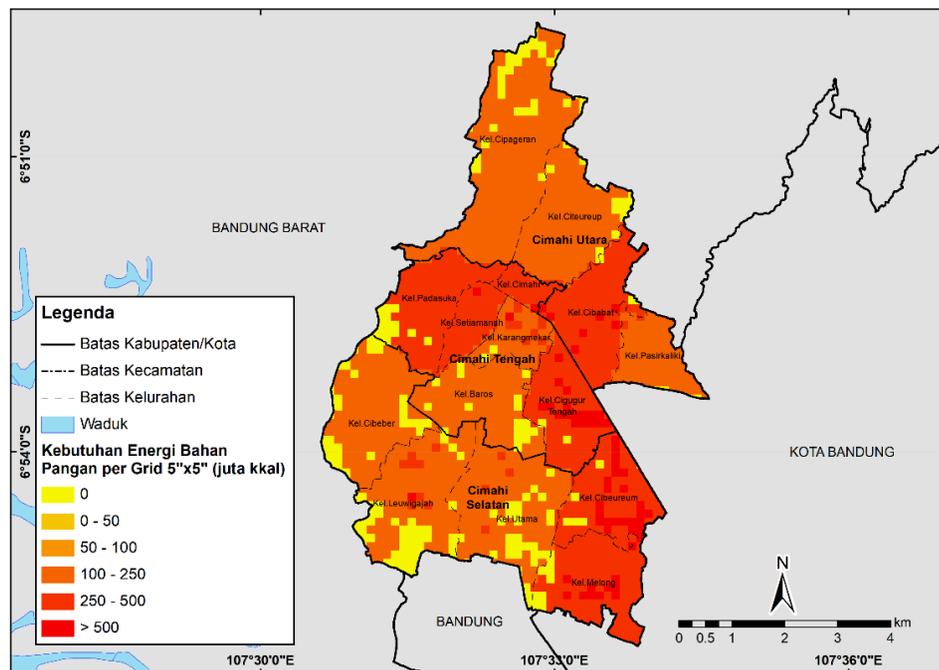
3.3.3.1 Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Ambang batas dan status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan dimodelkan secara kuantitatif melalui beberapa tahapan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan pangan, ketersediaan bahan pangan, dan selisih ketersediaan. Dari ketiga hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan ambang batas untuk menentukan status daya dukung terhadap penyedia pangan. Metode perhitungan ambang batas dan status DDLH penyedia pangan secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran A.2.**

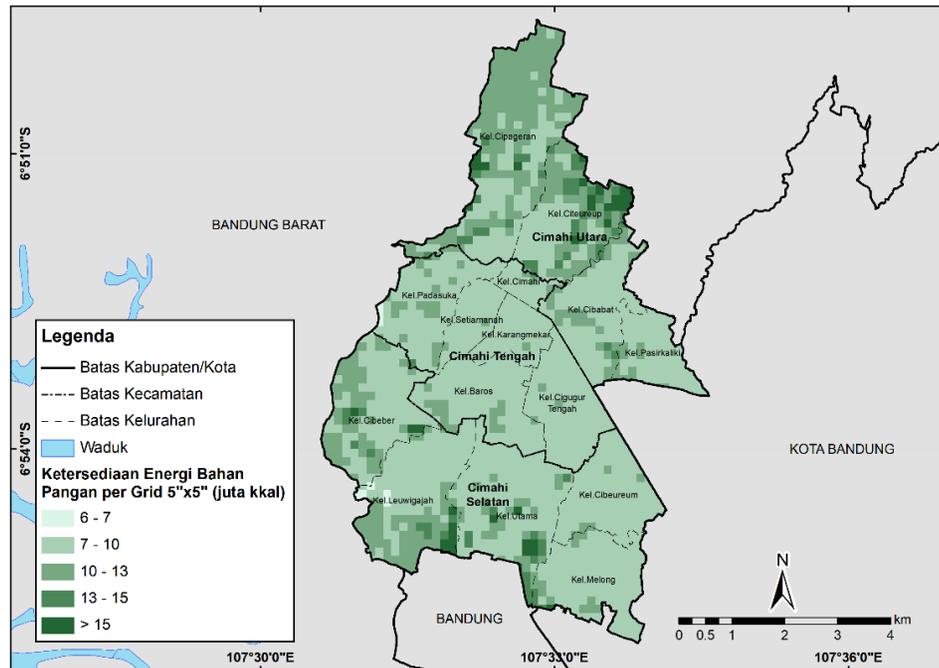
Kebutuhan bahan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). **Gambar 3-13** menunjukkan sebaran kebutuhan energi bahan pangan di Kota Cimahi tahun 2016. Berdasarkan peta sebaran kebutuhan tersebut, Kota Cimahi memiliki kebutuhan pangan yang cukup tinggi dan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Cimahi. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena

tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Kawasan dengan nilai kebutuhan nol adalah kawasan dengan tutupan lahan berupa perkebunan atau sawah/ladang. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi berada di sekitar pusat Kota Cimahi dan wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung, diantaranya adalah Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan.

Ketersediaan pangan diperoleh melalui perhitungan menggunakan data produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hasil peternakan. Peta sebaran ketersediaan pangan pada Kota Cimahi ditunjukkan oleh **Gambar 3-14**. Hampir seluruh wilayah di Kota Cimahi memiliki nilai ketersediaan rendah, terutama pada Kecamatan Cimahi Tengah sebagai pusat Kota. Wilayah dengan sebaran ketersediaan pangan dengan nilai tinggi berada bagian utara dan selatan Kota Cimahi. Wilayah ini didominasi oleh tutupan lahan berupa sawah, ladang, dan perkebunan, dengan nilai ketersediaan pangan tertinggi berada pada kawasan sawah. Ketersediaan pangan cukup tinggi berada di Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.



Gambar 3-13 Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)



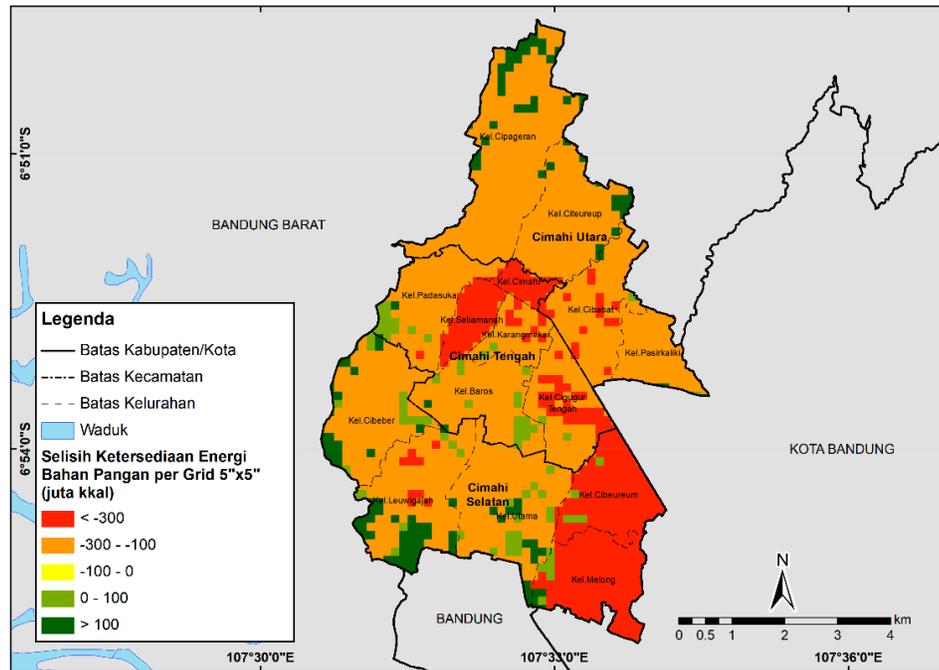
Gambar 3-14 Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. **Gambar 3-15** menunjukkan peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi. Pada perhitungan hasil selisih ketersediaan, Kota Cimahi didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai negatif, terutama pada Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan bahan pangan juga dihitung pada setiap kecamatan di Kota Cimahi yang ditunjukkan oleh **Tabel 3-7**. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara akumulasi, selisih ketersediaan bahan pangan di Kota Cimahi bernilai negatif di setiap kecamatan. Selisih negatif menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Tabel 3-7 Nilai Ketersediaan, Kebutuhan, dan Selisih Ketersediaan Energi Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016

KECAMATAN	Energi Bahan Pangan (juta kkal)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Kecamatan Cimahi Selatan	7.776,54	176.579,74	-168.803,20
Kecamatan Cimahi Tengah	4.244,33	121.506,77	-117.262,43
Kecamatan Cimahi Utara	7.190,34	119.114,85	-111.924,50

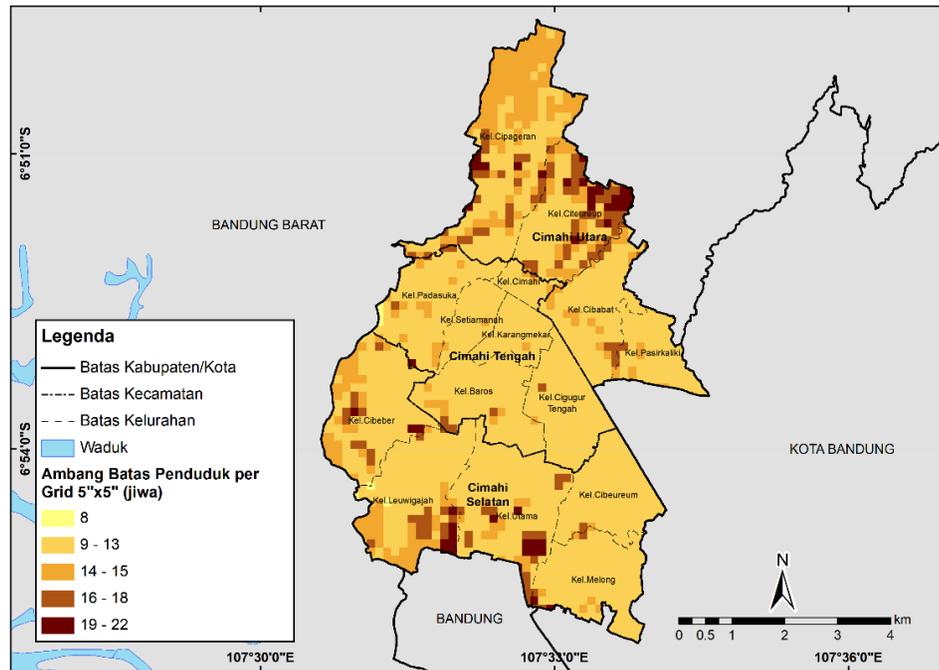
Sumber: hasil analisis (2019)



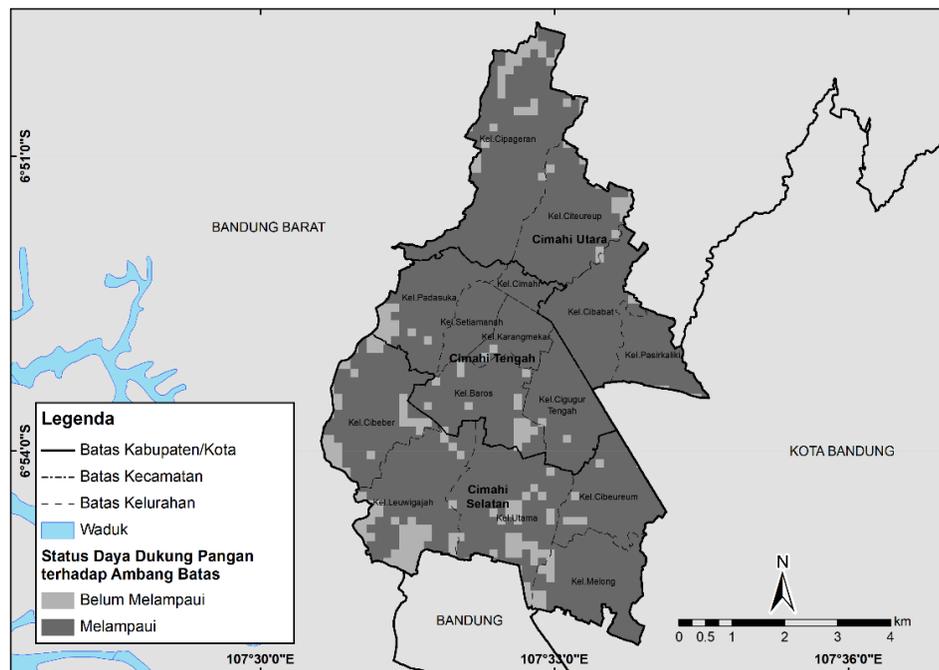
Gambar 3-15 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kota Cimahi. Sebaran nilai ambang batas penduduk untuk bahan pangan terdapat pada **Gambar 3-16**. Sebagian besar Kota Cimahi memiliki nilai ambang batas rendah, yaitu pada angka 8 hingga 13 jiwa. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan bahan pangan, namun terdapat kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan di Kota Cimahi.

Nilai ambang batas digunakan untuk menentukan status daya dukung Kota Cimahi terhadap penyediaan bahan pangan. Status ini ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk yang terdapat pada lokasi tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, maka lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, atau yang disebut dengan melampaui ambang batas, maka lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Seperti yang terlihat pada **Gambar 3-17**, status daya dukung penyedia pangan sebagian besar telah melampaui ambang batas.



Gambar 3-16 Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)



Gambar 3-17 Status DDLH Penyedia Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Tabel 3-8 Luas Wilayah yang Masih Mendukung Penyedia Bahan Pangan di Kota Cimahi Tahun 2016

KECAMATAN	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
Kecamatan Cimahi Selatan	1.739,95	268,57	15,43%
Kecamatan Cimahi Tengah	1.099,48	81,01	7,36%
Kecamatan Cimahi Utara	1.404,69	105,31	7,49%

KECAMATAN	Luas Kecamatan (Ha)	Luas Mendukung	
		Ha	%
KOTA CIMAHI	4.244,11	454,89	10,71%

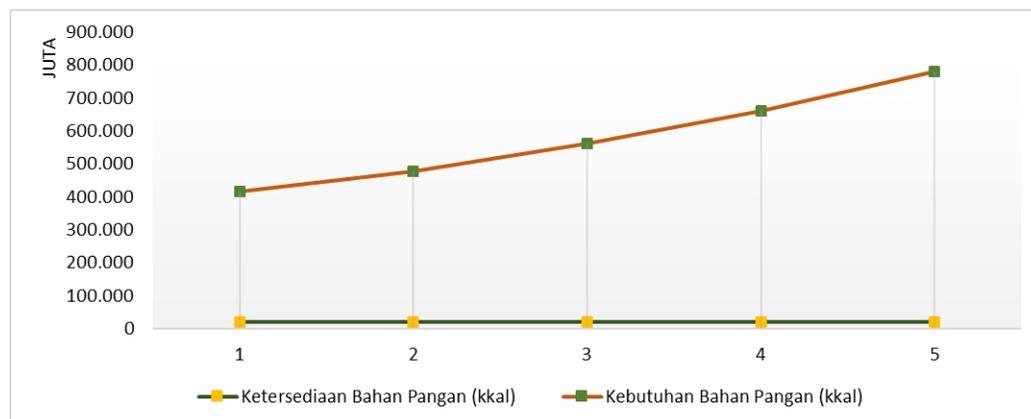
Sumber: hasil analisis (2019)

Dengan adanya tekanan atau penambahan jumlah penduduk di Kota Cimahi, maka kebutuhan terhadap bahan pangan juga akan mengalami peningkatan. Dengan menggunakan asumsi bahwa ketersediaan pangan bernilai tetap (*Business As Usual* BAU), dilakukan proyeksi nilai kebutuhan pangan berdasarkan nilai tekanan penduduk yang dibahas pada subbab 3.3.4. Nilai hasil proyeksi kebutuhan pangan setiap kecamatan di Kota Cimahi terdapat pada **Tabel 3-9** dengan grafik yang ditunjukkan pada **Gambar 3-18**. Sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil proyeksi, tahun 2020 sudah tidak terdapat lahan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam penyediaan pangan dengan status daya dukung penyediaan pangan yang telah melampaui di semua daerah.

Tabel 3-9 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kota Cimahi

Kecamatan	Proyeksi Nilai Kebutuhan Pangan (kkal)				
	2016	2020	2030	2040	2050
Kec. Cimahi Selatan	7.776,54	176.579,74	212.172,07	245.704,44	283.038,92
Kec. Cimahi Tengah	4.244,33	121.506,77	125.839,37	142.511,38	161.761,30
Kec. Cimahi Utara	7.190,34	119.114,85	140.537,74	174.380,87	217.235,28
KOTA CIMAHI	19.211	417.201	478.549	562.597	662.036

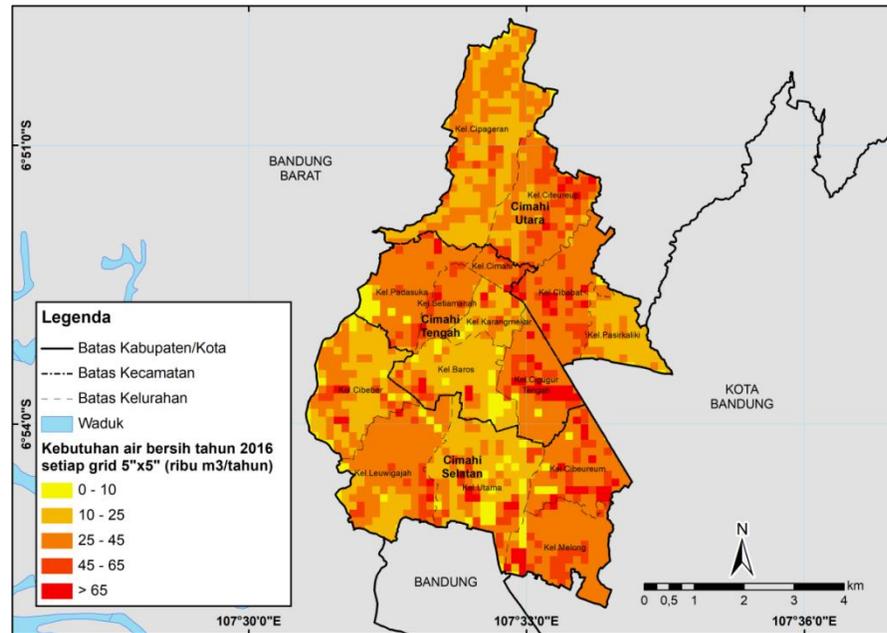
Sumber: hasil analisis (2020)



Gambar 3-18 Grafik Proyeksi Nilai Kebutuhan Pangan Terhadap Nilai Ketersediaan (BAU) di Kota Cimahi

3.3.3.2 Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Ambang batas dan status DDLH jasa ekosistem penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Metode perhitungan ambang batas dan status DDLH penyedia air secara lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran A.2**. Perhitungan didahului dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem air bersih yang hasil analisisnya menunjukkan tingkat kebutuhan (**Gambar 3-19**) dan ketersediaan air bersih (**Gambar 3-20**). Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan. Kebutuhan domestik Kota Cimahi lebih besar dibandingkan kebutuhan lahan. Kebutuhan air bersih yang tinggi tersebar di tiga kecamatan dimana sebagian besar terdapat di Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Cibabat.



Gambar 3-19 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

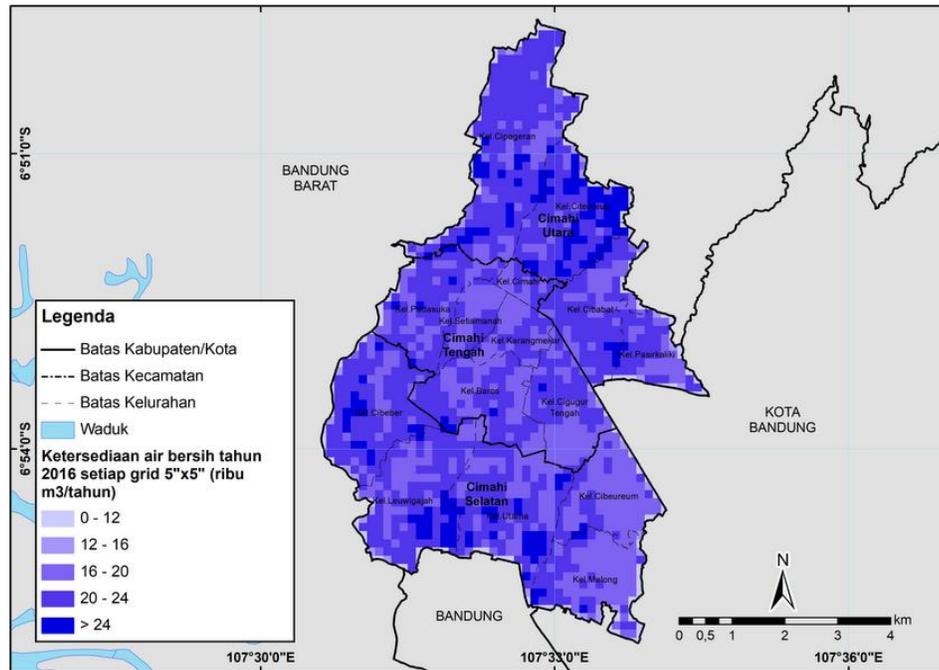
Tabel 3-10 Nilai Kebutuhan Lahan dan Kebutuhan Domestik di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016

Kecamatan	Kebutuhan (m3/tahun)		
	Kebutuhan Lahan	Kebutuhan Domestik	Kebutuhan Total
Kecamatan Cimahi Selatan	6.577.634,05	19.441.209,60	26.018.843,65
Kecamatan Cimahi Tengah	2.266.119,00	13.377.744,00	15.643.863,00
Kecamatan Cimahi Utara	6.265.883,28	13.114.396,80	19.380.280,08
Kota Cimahi	15.109.636,33	45.933.350,40	61.042.986,73

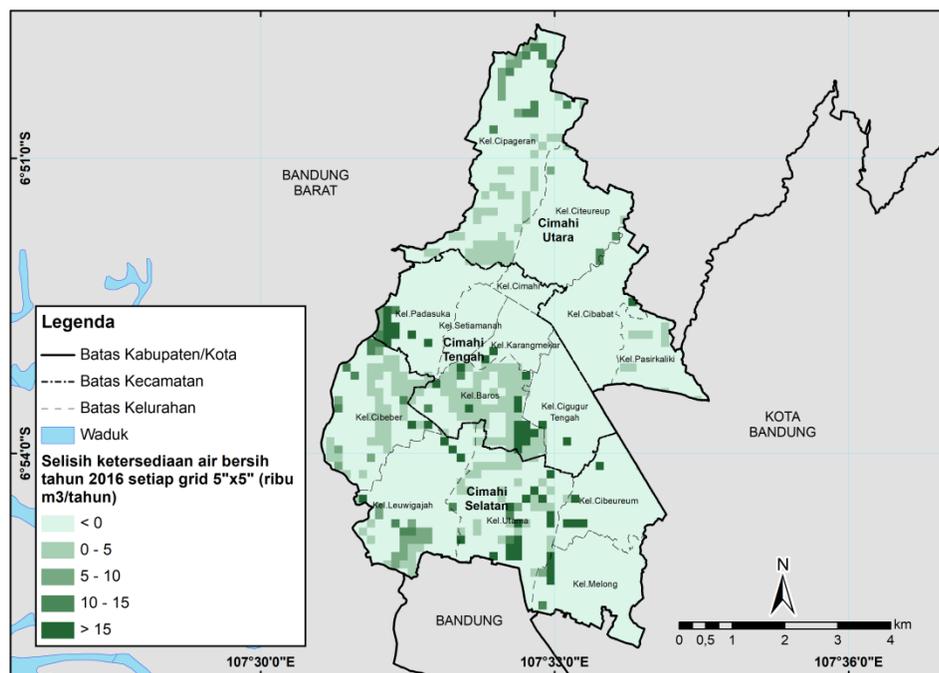
Sumber: hasil analisis (2019)

Ketersediaan air bersih Kota Cimahi memiliki pola distribusi yang hampir berkebalikan dengan pola kebutuhan air bersih. Wilayah dengan ketersediaan air bersih tinggi sebagian besar terletak di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara tepatnya di Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwihgajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar dibanding wilayah kelurahan lainnya. Sementara wilayah dengan ketersediaan air bersih rendah didominasi oleh tutupan lahan terbangun.

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih selanjutnya dapat diperoleh nilai selisih ketersediaan air bersih yang ditunjukkan pada **Gambar 3-21**. Sebagian besar selisih ketersediaan air bersih di wilayah Kota Cimahi bernilai negatif. Sedangkan selisih ketersediaan air bersih positif paling banyak tersebar wilayah bagian selatan seperti di kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Leuwihgajah.



Gambar 3-20 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)



Gambar 3-21 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016
dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

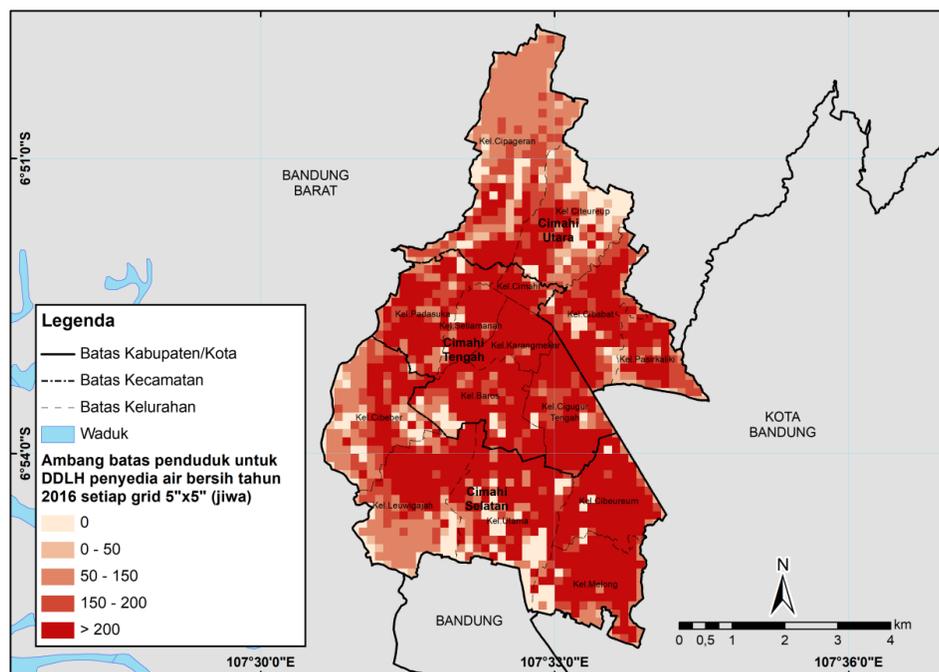
Nilai akumulasi dari kebutuhan, ketersediaan, dan selisih akumulatif air bersih di setiap kecamatan Kota Cimahi ditunjukkan pada **Tabel 3-11**. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua kecamatan di Kota Cimahi memiliki selisih ketersediaan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif selisih ketersediaan air bersih Kota Cimahi sudah defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air bersih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan air bersih sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjang kebutuhan air bersih. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Cimahi tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain.

Tabel 3-11 Akumulasi ketersediaan, kebutuhan, dan selisih ketersediaan energi air di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016

Kecamatan	Air Bersih (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan Total	Selisih Ketersediaan
Kec. Cimahi Selatan	15.235.680,03	26.018.843,65	-10.783.163,61
Kec. Cimahi Tengah	9.523.542,07	15.643.863,00	-6.120.320,93
Kec. Cimahi Utara	12.579.185,59	19.380.280,08	-6.801.094,49
Kota Cimahi	37.338.407,69	61.042.986,73	-23.704.579,04

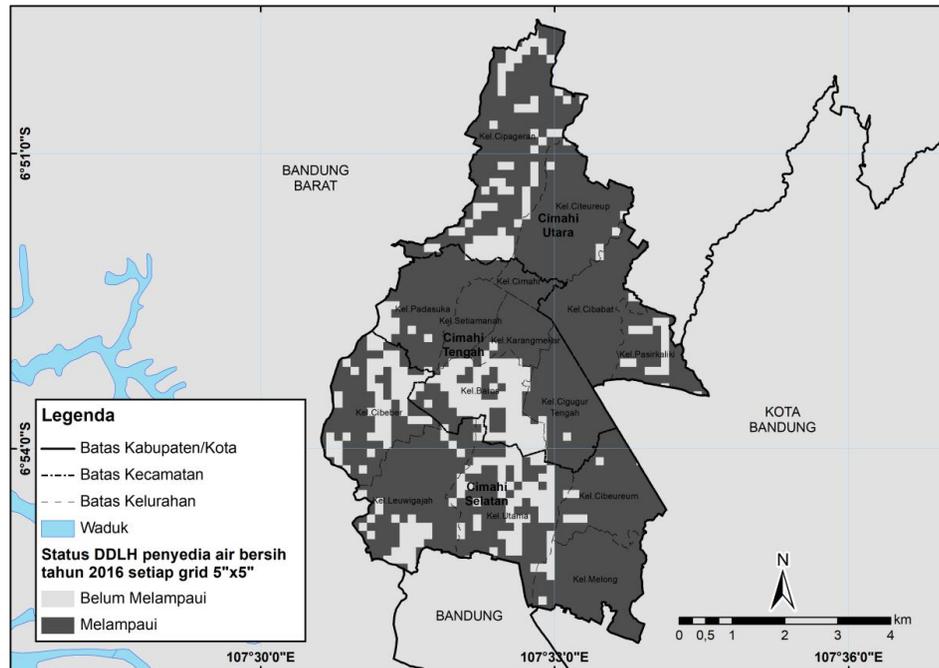
Sumber: hasil analisis (2019)

Dari nilai kebutuhan dan ketersediaan air bersih, selanjutnya dapat dihitung nilai ambang batas dan setatus DDLH penyedia air bersih Kota Cimahi. Ambang batas dihitung melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air lahan. Peta ambang batas ditunjukkan pada **Gambar 3-22**. Peta ambang batas menunjukkan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air dari ketersediaan yang ada di wilayah itu sendiri (*closed system*).



Gambar 3-22 Ambang Batas Penduduk untuk DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Status daya dukung DDLH penyedia air bersih dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif menunjukkan ambang batas air bersih dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih ditunjukkan pada **Gambar 3-23**.



Gambar 3-23 Status DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Tabel 3-12 Luas Wilayah yang Belum Melampai Ambang Batas DDLH Penyedia Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2016

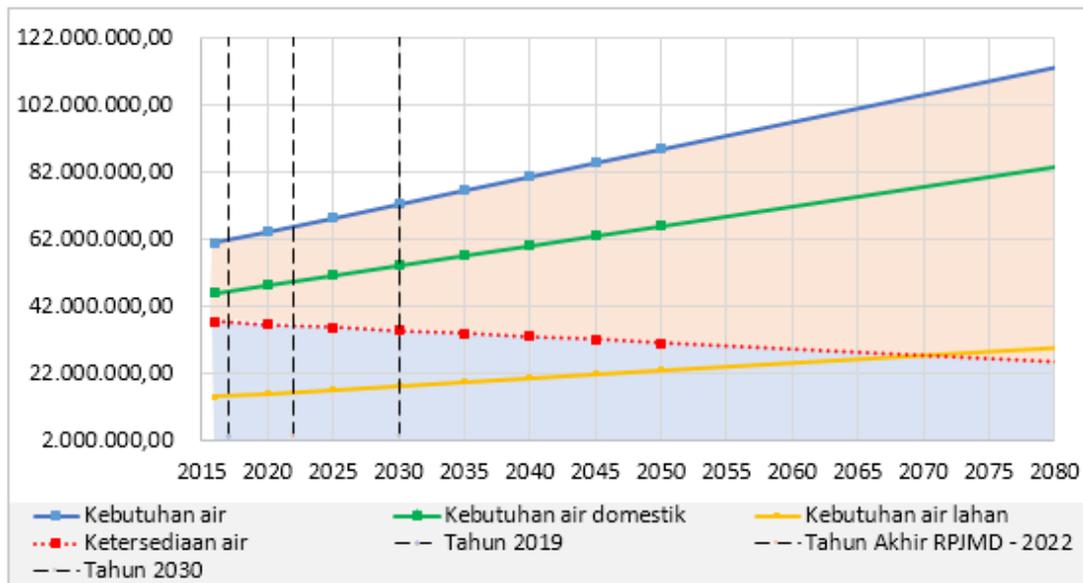
Kecamatan	Luas Kecamatan	Luas Belum Melampai	
	(Ha)	(Ha)	(%)
Kec. Cimahi Selatan	1.739,95	405,50	23,31%
Kec. Cimahi Tengah	1.099,48	240,18	21,84%
Kec. Cimahi Utara	1.404,69	217,64	15,49%
KOTA CIMAHI	4.244,11	863,32	20,34%

Sumber: hasil analisis (2019)

Berdasarkan peta status daya dukung air pada **Gambar 3-23** diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi (lihat **Tabel 3-12**). Wilayah belum melampaui sebagian besar terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki. Wilayah dengan status daya dukung telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Sehingga wilayah yang belum melampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain.

Berdasarkan skenario BAU (*Business as Usual*) dari data DDLH penyedia air tahun 2045 yang diadopsi dari "*Background Study Kehutanan RPJMN 2019-2024*", diperoleh hasil proyeksi hingga pada tahun 2030 Kota Cimahi masih mengalami defisit ketersediaan air atau jumlah kebutuhan melebihi jumlah ketersediaan (**Gambar 3-24**). Pada grafik tersebut terlihat bahwa selisih atau defisit ketersediaan air ini semakin besar dari tahun ke tahun karena ketersediaan air permukaan semakin berkurang, sementara kebutuhannya terus meningkat. Penurunan ketersediaan air permukaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah hujan dan tutupan vegetasi seperti hutan. Kebutuhan air yang diperhitungkan meliputi ketersediaan air untuk domestik dan untuk lahan. Kebutuhan air untuk domestik di Kota

Cimahi lebih besar daripada kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air lahan dan kebutuhan air domestik diproyeksikan terus meningkat dari tahun ketahun. Hingga pada tahun 2070, jumlah kebutuhan air untuk lahan dapat melebihi jumlah ketersediaan air atau mengalami kondisi surplus.

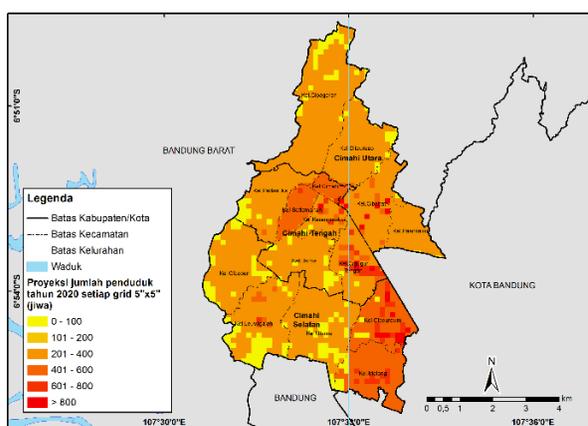


Gambar 3-24 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air dengan Skenario BAU di Kota Cimahi
(Sumber: modifikasi dari *Background Study* Kehutanan RPJMN 2019-2024)

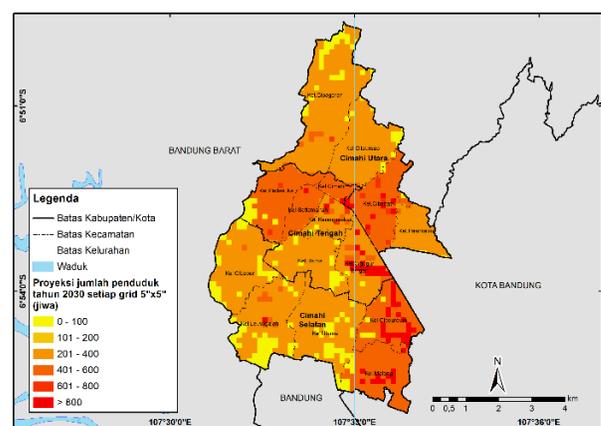
3.3.4 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

(a) Tekanan Penduduk

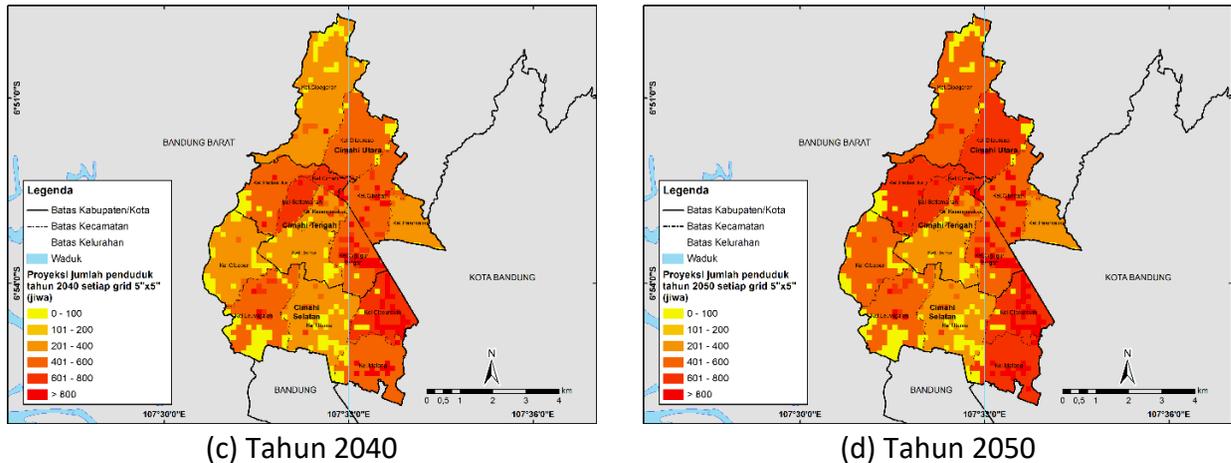
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis tekanan terhadap lingkungan hidup diawali dengan analisis tekanan atau pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu, yaitu berupa model spasial proyeksi penduduk tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050 (**Gambar 3-25**). Model proyeksi penduduk ini diturunkan dari model distribusi penduduk pada tahun 2016 sebagai tahun dasar, dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kelurahan di Kota Cimahi. Metode pemodelan tekanan penduduk ini dijelaskan pada **Lampiran A.3**.



(a) Tahun 2020



(b) Tahun 2030



Gambar 3-25 Model Proyeksi Penduduk Tahun: (a) 2020, (b) 2030, (c) 2040, dan (d) 2050 di Kota Cimahi dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Berdasarkan hasil pemodelan proyeksi penduduk dari tahun 2016 ke 2020 hingga 2050, peningkatan jumlah penduduk banyak terjadi di sekitar pusat Kota Cimahi, yaitu di sekitar Kelurahan Cimahi (Kecamatan Cimahi Tengah); serta di sekitar wilayah Tenggara Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kota Bandung, yaitu di Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong (Kecamatan Cimahi Selatan). Kondisi ini dapat merepresentasikan pola tekanan penduduk yang menyebar dari wilayah pusat kota dan dari wilayah yang berbatasan dengan Kota Bandung sebagai kawasan penyangga dari Kota Bandung. Dengan kata lain, pola tekanan penduduk ini menyebar ke sekitar wilayah yang pada dasarnya telah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Tekanan penduduk di Kota Cimahi ini memberikan dampak tekanan terhadap kondisi lingkungan hidup di waktu mendatang. Berikut ini, diuraikan beberapa proyeksi dampak tekanan penduduk terhadap kondisi lingkungan, yaitu dalam hal timbulan sampah, timbulan lumpur tinja, dan potensi beban pencemar di Kota Cimahi; serta analisis mengenai status daya tampung beban pencemar sungai dan analisis penurunan muka air tanah di Kota Cimahi.

3.3.4.1 Potensi Timbulan Sampah

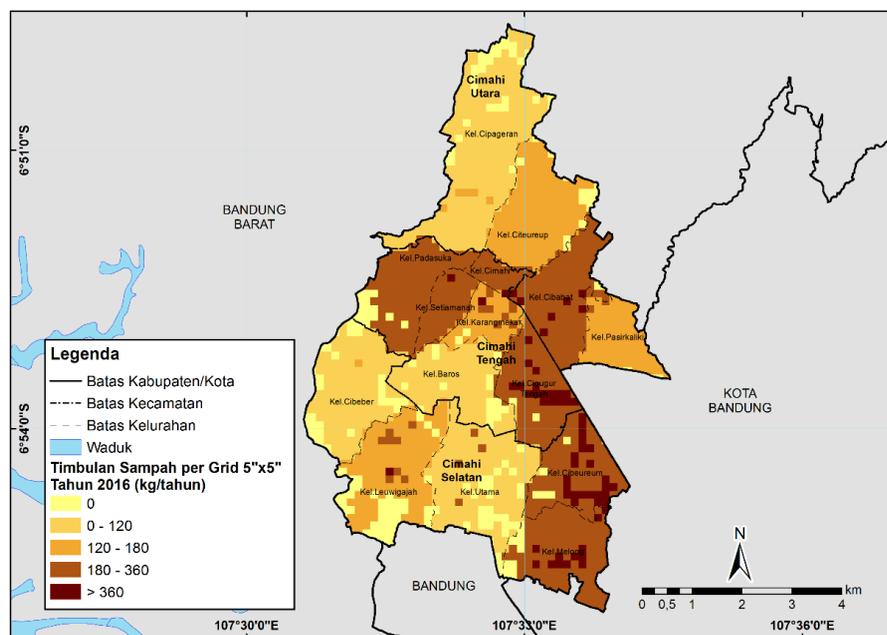
Dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana persampahan yang terbatas dapat menimbulkan permasalahan, seperti masalah kesehatan, bahaya banjir, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, dan permasalahan lingkungan lainnya. Kota Cimahi menghasilkan sampah hingga 300 ribu ton setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, angka timbulan sampah perkapita untuk kawasan permukiman Kota Cimahi dari hasil sampling ditetapkan sebesar 2,49 liter/org/hari atau 0,48 kg/org/hari dengan berat jenis sampah sebesar 195,57 kg/m³. Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non permukiman hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar di karenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya.

Sebaran potensi timbulan sampah dimodelkan dengan menggunakan distribusi penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah Kota Cimahi, yaitu 0,544 kg/orang/hari. Metode

perhitungan potensi timbulan sampah dijelaskan pada **Lampiran A.3**. Hasil pemodelan dari potensi timbulan sampah di wilayah Kota Cimahi ditunjukkan oleh **Gambar 3-26**.

Pola sebaran dari potensi timbulan sampah bergantung pada pola distribusi penduduk, karena pemodelan timbulan sampah hanya mempertimbangkan sampah yang bersumber dari domestik. Secara spasial, timbulan sampah yang cukup tinggi di Kota Cimahi terdapat di Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum. Terdapat pula timbulan sampah yang cukup tinggi di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Padasuka; serta di Kecamatan Cimahi Utara yaitu seluruh Kelurahan Cibabat, khususnya di Kelurahan Cibabat yang lokasinya berdekatan dengan Kecamatan Cimahi Tengah. Jika dilihat dari tutupan lahan, timbulan sampah yang tinggi berada pada wilayah permukiman. Sementara itu, dihasilkan bahwa pada Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki timbulan sampah yang kecil.



Gambar 3-26 Potensi Timbulan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Dengan jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat, nilai potensi timbulan sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Pemodelan potensi timbulan sampah juga dapat diproyeksikan ke tahun 2020, 2030, 2040, dan 2050, dengan nilai yang terlihat pada **Tabel 3-13**. Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi timbulan sampah paling besar. Meskipun secara spasial terlihat bahwa hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan sampah yang tinggi, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan sampah di kecamatan Cimahi Selatan lebih besar.

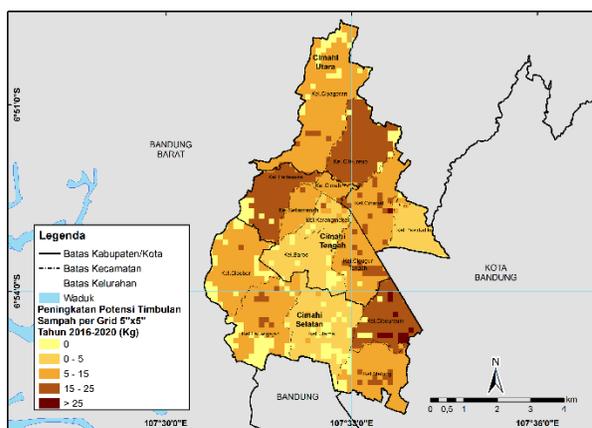
Tabel 3-13 Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Cimahi 2016-2050

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	14374,66	15854,88	20364,64	26109,28	33556
	Cibeureum	32161,28	34212,16	39923,07	46572,38	54287
	Leuwi Gajah	23514,94	24941,86	28789,02	33254,18	38430

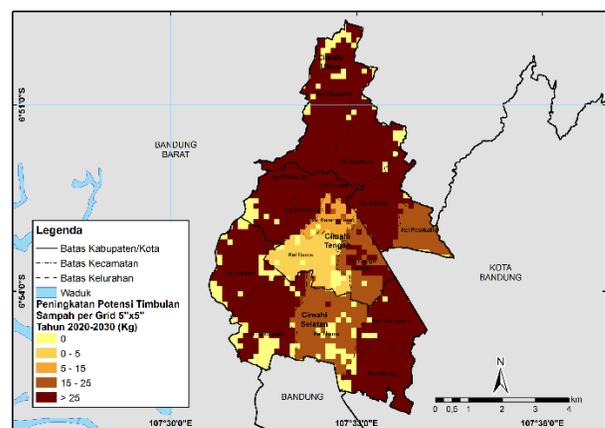
Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Sampah (kg/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
	Melong	34030,46	35610,24	39827,33	44525,86	49809
	Utama	18326,27	19177,63	21659,9	24443,55	27635
	Total	122407,6	129796,8	150564	174905,2	203717
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	11038,3	11264,06	11763,46	12318,34	12954
	Cigugur Tengah	24984,83	26023,87	28857,02	31994,82	35464
	Cimahi	6870,72	7245,536	8256,288	9409,024	10735
	Karangmekar	8589,76	8888,96	9681,024	10540,54	11502
	Padasuka	20438,62	22160,38	27119,49	33176,93	40569
	Setiamanah	12308	12903,14	14532,42	16368,42	18443
	Total	84230,24	88485,95	100209,7	113808,1	129667
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	28279,3	29709,47	33810,14	38392,8	43706
	Cipageran	24718,82	27707,55	36718,37	48597,15	64489
	Citeureup	19827,71	22047,23	28853,76	37805,82	49606
	Pasirkaliki	9746,304	10231,55	11599,17	13143,04	14916
	Total	82572,13	89695,81	110981,4	137938,8	172717
Total		289210	307978,5	361755,1	426652,1	506101

Sumber: Hasil analisis (2019)

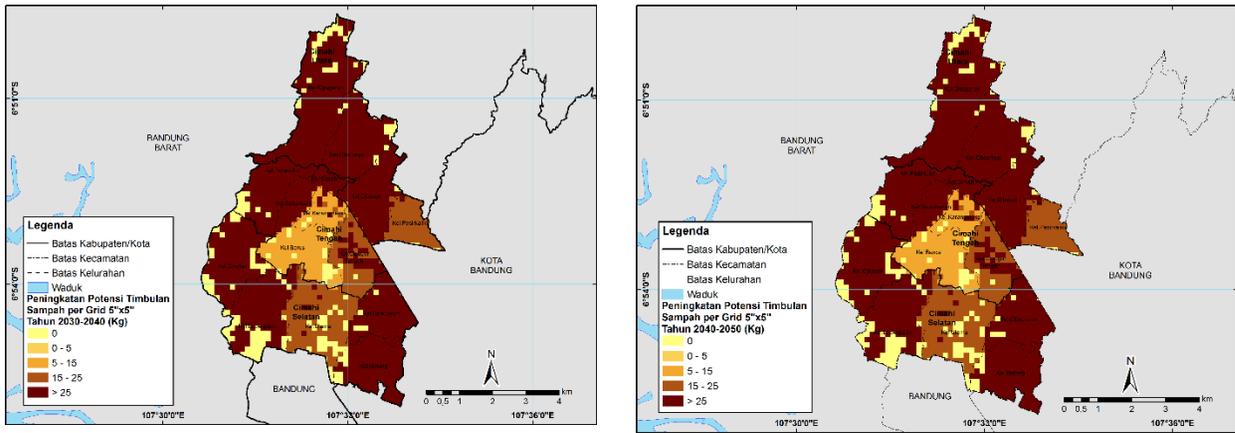
Dari tahun 2016 ke tahun 2020, timbulan sampah di Kota Cimahi mengalami peningkatan sebesar 6,48%. Sementara itu, secara rata-rata, peningkatan timbulan sampah dari tahun 2020 ke tahun 2050 yang dihitung dengan periode per 10 tahun adalah sebesar 17,87%. Secara spasial, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Utara mengalami peningkatan timbulan sampah yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2020. Jika dilihat dari nilai potensi timbulan sampah per kecamatan, peningkatan potensi timbulan sampah paling tinggi terjadi pada tahun 2040 ke tahun 2050 (18,62%). Secara lebih detail, sebaran dari peningkatan timbulan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 3-27**, serta statistik nilai potensi timbulan sampah dari tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2040 pada setiap kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 3-28**.



(a) Tahun 2015-2020



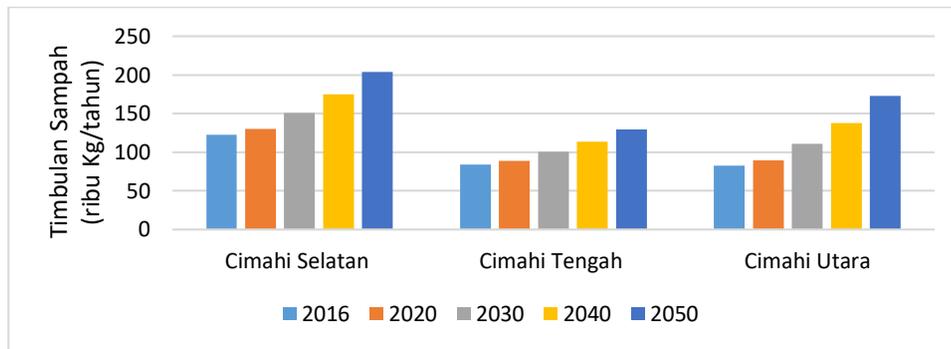
(b) Tahun 2020-2030



(c) Tahun 2030-2040

(d) Tahun 2040-2050

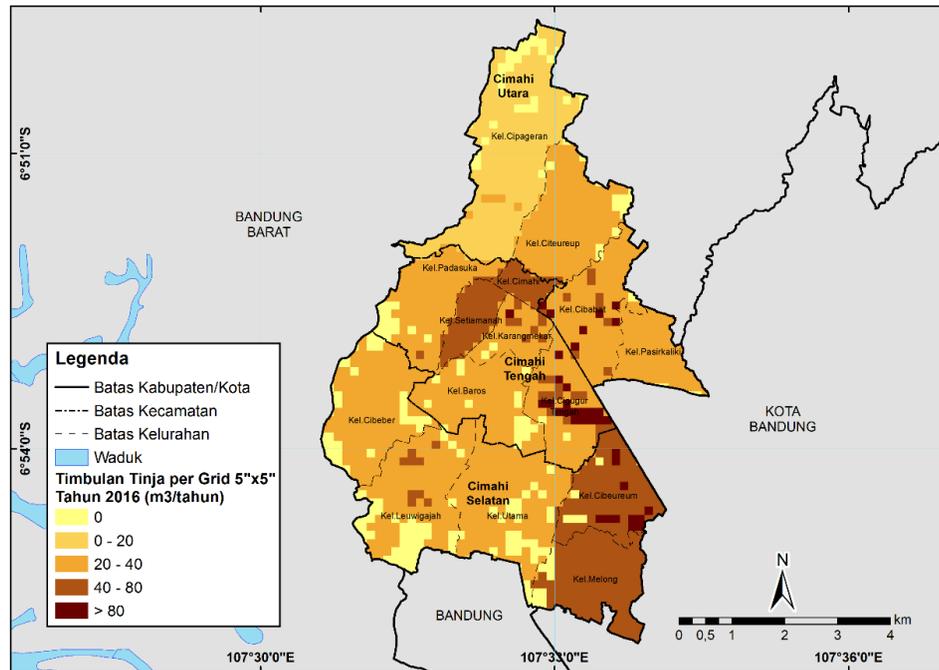
Gambar 3-27 Peningkatan Potensi Timbulan Sampah pada Sistem Grid 5"x5 Kota Cimahi Tahun: (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050 (Sumber: Hasil analisis, 2019)



Gambar 3-28 Grafik Potensi Timbulan Sampah Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2050 (Sumber: Hasil analisis, 2019)

3.3.4.2 Potensi Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m³/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk. Dengan menggunakan hasil pemodelan distribusi penduduk dan tekanan penduduk, maka timbulan lumpur tinja beserta nilai proyeksinya dapat dimodelkan. Metode perhitungan potensi timbulan lumpur tinja dijelaskan pada **Lampiran A.3. Gambar 3-29** merupakan sebaran dari potensi timbulan lumpur tinja di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2016.



Gambar 3-29 Potensi Timbulan Lumpur Tinja di Kota Cimahi Tahun 2016 pada Sistem Grid 5"x5"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Jika dilihat berdasarkan pola sebarannya, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan yaitu Kelurahan Melong dan Cibeureum; serta Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Cigugur, Karangmekar, Setiamanah, dan Cimahi memiliki potensi timbulan lumpur tinja yang tinggi. Selain itu, sebagian kecil pada Kelurahan Cimahi Utara terdapat juga potensi timbulan lumpur tinja pada Kelurahan Cibabat.

Dengan menggunakan tekanan penduduk, potensi timbulan lumpur tinja diproyeksikan ke tahun 2020 hingga 2050 dengan periode per 10 tahun. **Tabel 3-14** menunjukkan nilai dari potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja terbesar adalah Kecamatan Cimahi Selatan. Walaupun secara spasial sebagian besar wilayah di Kecamatan Cimahi Utara memiliki peningkatan timbulan lumpur tinja yang besar, namun apabila diakumulasikan, peningkatan jumlah timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Selatan lebih besar. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Tengah adalah kecamatan yang memiliki timbulan lumpur tinja paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Cimahi.

Tabel 3-14 Timbulan Lumpur Tinja Per Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016-2050

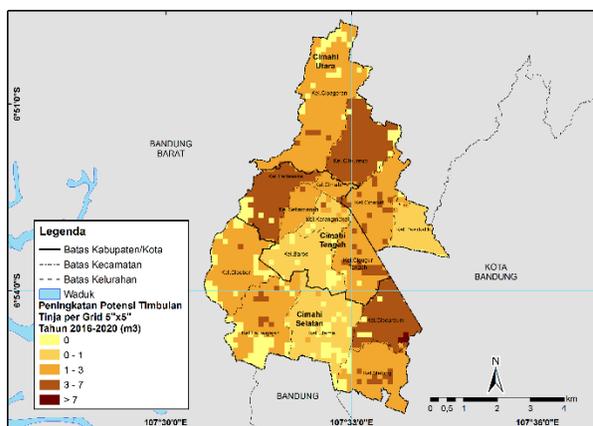
Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m3/tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
Kecamatan Cimahi Selatan	Cibeber	2893,428	3191,377	4099,133	5255,452	6750,894
	Cibeureum	6473,64	6886,455	8035,986	9374,404	10934,12
	Leuwi Gajah	4733,247	5020,465	5794,85	6693,625	7732,452
	Melong	6849,882	7167,87	8016,714	8962,466	10032,72
	Utama	3688,836	3860,204	4359,852	4920,164	5561,943
	Total		24639,03	26126,37	30306,53	35206,11
Kecamatan Cimahi Tengah	Baros	2221,865	2267,307	2367,828	2479,518	2602,377
	Cigugur Tengah	5029,116	5238,261	5808,537	6440,133	7145,423

Kecamatan	Kelurahan	Timbulan Tinja (m ³ /tahun)				
		2016	2020	2030	2040	2050
	Cimahi	1382,985	1458,431	1661,882	1893,912	2160,764
	Karangmekar	1729,005	1789,23	1948,662	2121,672	2312,859
	Padasuka	4114,025	4460,592	5458,794	6678,076	8156,655
	Setiamanah	2477,438	2597,231	2925,183	3294,746	3711,174
	Total	16954,43	17811,05	20170,89	22908,06	26089,25
Kecamatan Cimahi Utara	Cibabat	5692,248	5980,124	6805,534	7727,963	8790,879
	Cipageran	4975,571	5577,164	7390,922	9781,963	12969,29
	Citeureup	3991,056	4437,816	5807,88	7609,812	9973,807
	Pasirkaliki	1961,802	2059,476	2334,759	2645,52	3000,519
	Total	16620,68	18054,58	22339,1	27765,26	34734,49
Total		58214,14	61992	72816,51	85879,43	101835,9

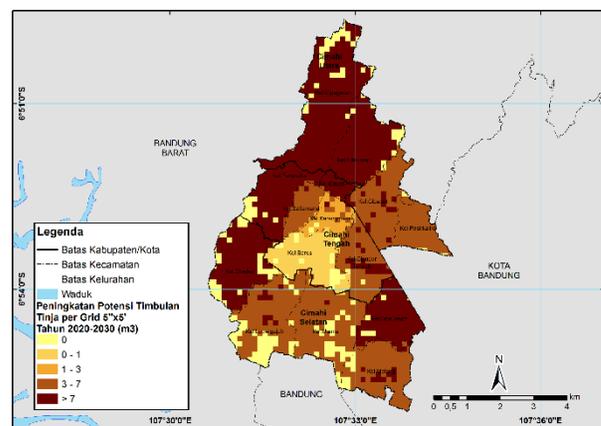
Sumber: hasil analisis (2019)

Kota Cimahi mengalami peningkatan timbulan lumpur tinja sebesar 6,48% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Selanjutnya, dari tahun 2020 hingga tahun 2050, rata-rata besarnya peningkatan timbulan lumpur tinja dengan periode waktu per 10 tahun adalah 17,87%. Peningkatan timbulan lumpur tinja paling tinggi terjadi antara tahun 2040 dan 2050, yaitu sebesar 18,62%. Peningkatan potensi lumpur tinja ini tersebar dengan pola seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 3-30**.

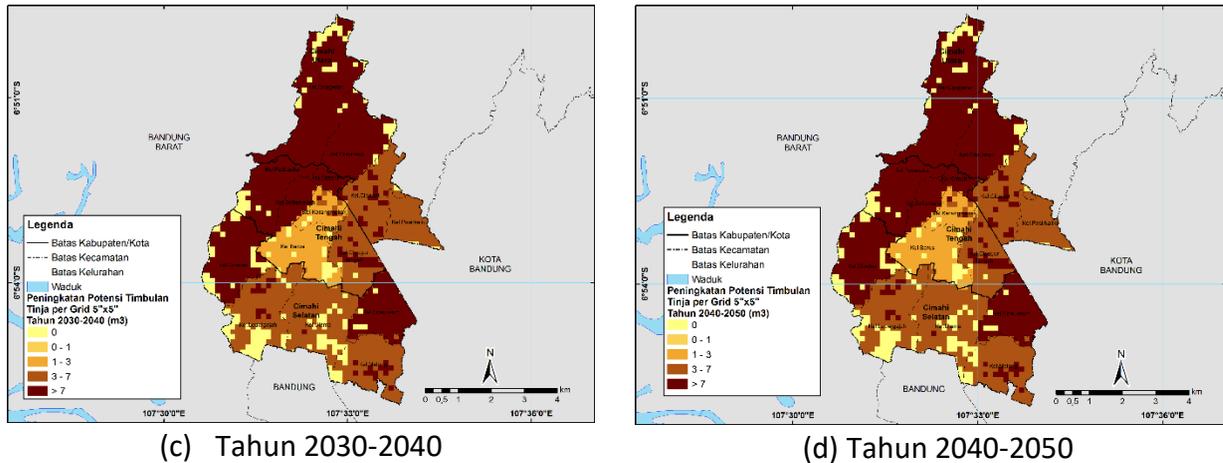
Peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja terlihat signifikan terjadi di Kecamatan Cimahi Utara. Dari tahun 2016 ke tahun 2020, peningkatan timbulan tinja di Kecamatan Cimahi Utara adalah 8,62%, sedangkan dari peningkatan rata-rata dari tahun 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun adalah 24,37%. Grafik nilai timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi di tahun 2015, 2020, 2030, 2040, dan 2050 ditunjukkan pada **Gambar 3-31**.



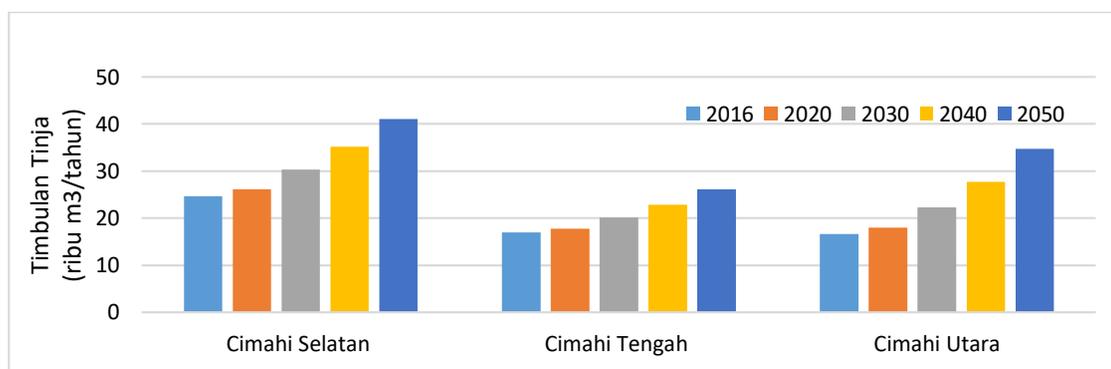
(a) Tahun 2016-2020



(b) Tahun 2020-2030



Gambar 3-30 Peningkatan Potensi Timbulan Lumpur Tinja pada Sistem Grid 5”x5” di Kota Cimahi Tahun: (a) 2016 – 2020, (b) 2020 – 2030, (c) 2030 – 2040, dan (d) 2040 – 2050
(Sumber: Hasil analisis, 2019)



Gambar 3-31 Grafik potensi timbulan lumpur tinja setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016-2050
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.4.3 Potensi Beban Pencemar Air Sungai

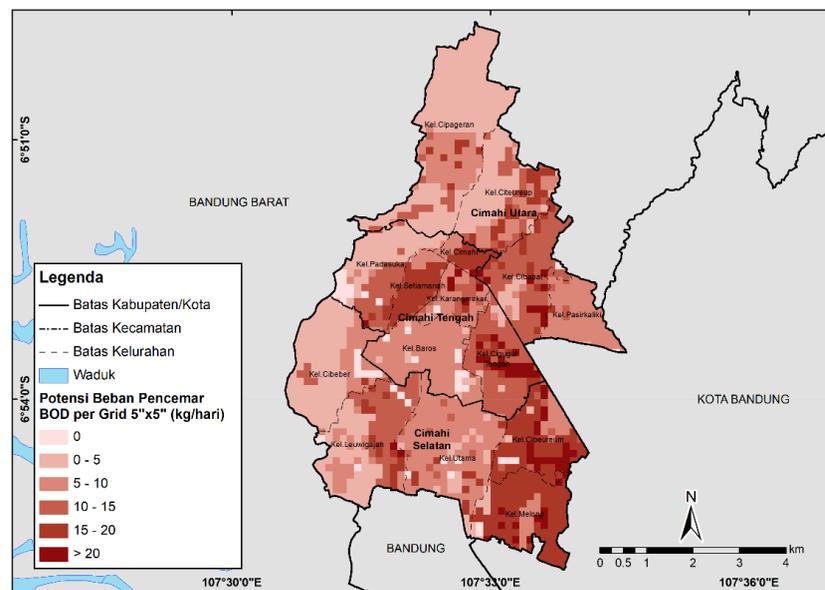
Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi Tahun 2019, sebanyak 100.029 rumah tangga dari 164.903 rumah tangga di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (60,65%), sementara 4.874 rumah tangga (39,34%) tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Hal ini dapat memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi masyarakat. tahun 2017 mengalami peningkatan fasilitas tempat buang air besar sendiri yang sebelumnya adalah 41% meningkat menjadi 61%.

Potensi beban pencemar yang dimodelkan pada dokumen ini adalah potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar, berasal dari sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat beban pencemar yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS untuk sumber domestik dan pertanian, serta BOD dan COD untuk sumber penggunaan lahan. Metode pemodelan potensi beban pencemar yang lebih detail terdapat pada **Lampiran A.3**.

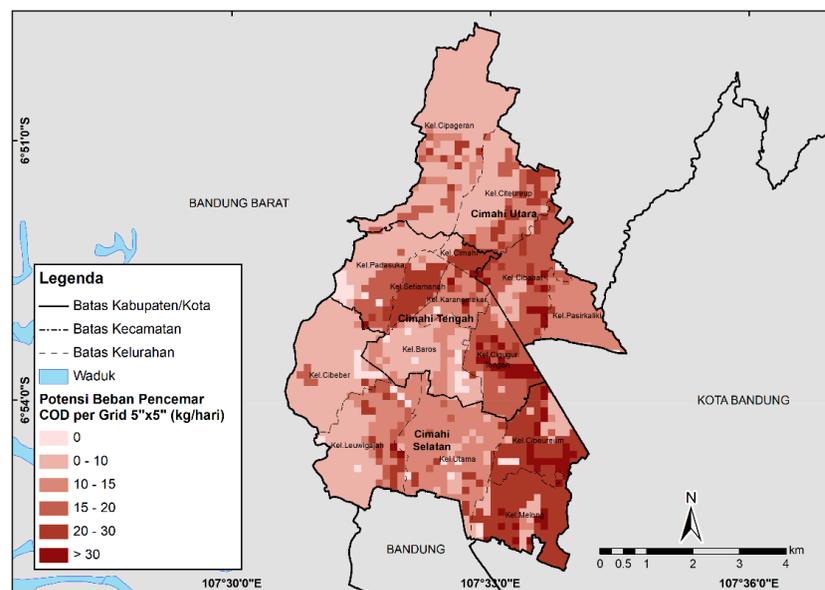
Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil pemodelan distribusi penduduk di setiap grid dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar pertanian dan penggunaan lahan (non-titik) dianalisis berdasarkan pemodelan luas lahan di setiap grid dan faktor emisi zat pencemar untuk setiap jenis lahan. Lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Untuk lahan pertanian, yang digunakan

adalah sawah dan perkebunan/ladang. Potensi beban pencemar total pada masing-masing zat pencemar BOD, COD, dan TSS diperoleh berdasarkan akumulasi beban pencemar sumber domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. **Gambar 3-32** menunjukkan peta sebaran potensi beban pencemar untuk zat BOD, COD, dan TSS di Kota Cimahi tahun 2016.

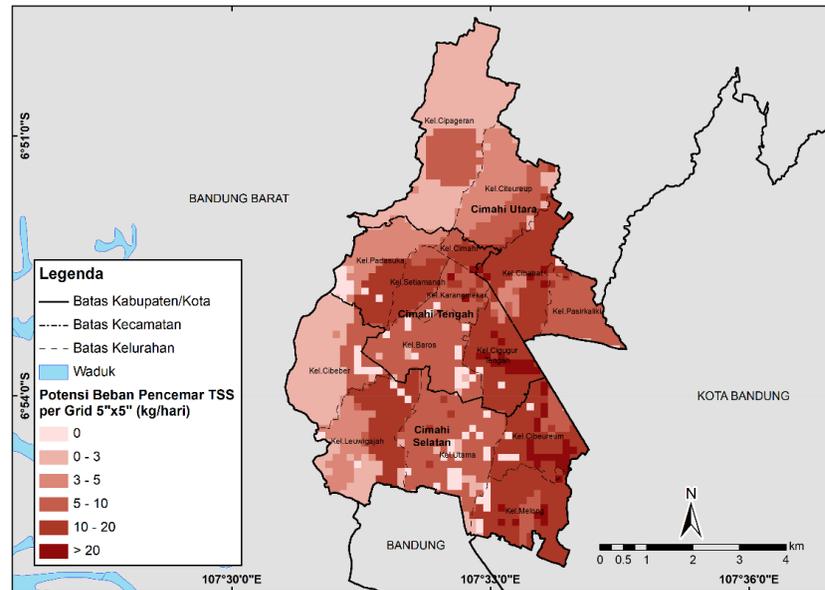
Hasil pemodelan menunjukkan bahwa zat pencemar BOD dan COD memiliki pola sebaran yang serupa, dan sedikit berbeda dengan pola sebaran zat pencemar TSS. Zat BOD dan COD dengan potensi tinggi berada di beberapa kelurahan, seperti Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, sebagian wilayah Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cigugur Tengah di Kecamatan Cimahi Tengah, Kelurahan Cibabat dan sebagian wilayah Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara, serta Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, dan sebagian wilayah Kelurahan Leuwigajah di Kecamatan Cimahi Selatan. Sedangkan untuk zat pencemar TSS, nilai tinggi hampir tersebar merata di seluruh kelurahan kecuali pada sebagian besar wilayah Kelurahan Cipageran di Kecamatan Cimahi utara dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan.



(a) Parameter BOD



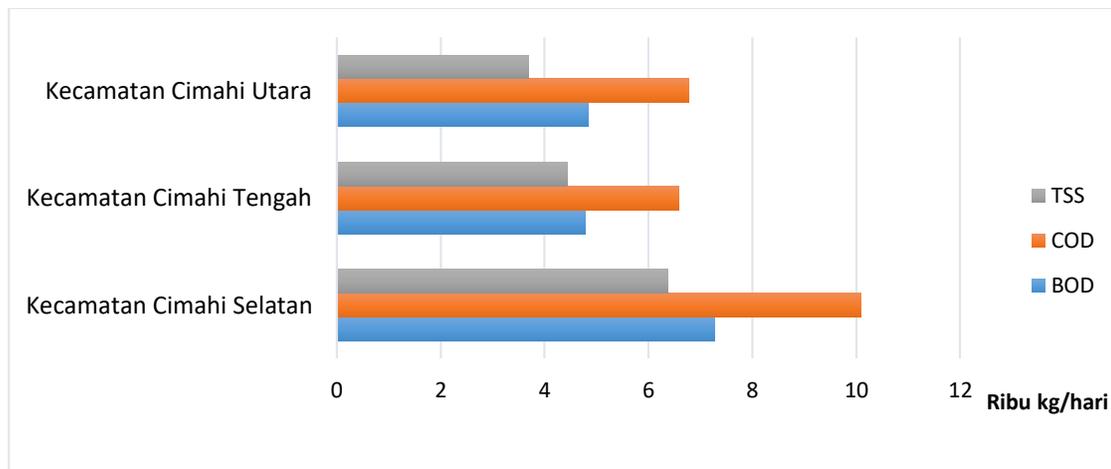
(b) Parameter COD



(c) Parameter TSS

Gambar 3-32 Potensi Beban Pencemar Air Sungai di Kota Cimahi Tahun 2016 dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Grafik pada **Gambar 3-33** menunjukkan nilai akumulasi setiap zat pencemar di setiap kecamatan di Kota Cimahi tahun 2016. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Cimahi Selatan memiliki nilai potensi beban pencemar paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk zat pencemar, COD merupakan zat pencemar yang berpotensi memiliki nilai paling tinggi dibandingkan zat pencemar lainnya untuk setiap kecamatan di Kota Cimahi.



Gambar 3-33 Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Setiap Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2016
(Sumber: Hasil analisis 2019)

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, potensi beban pencemar Kota Cimahi juga berpotensi mengalami peningkatan, terutama beban pencemar yang bersumber dari domestik. Peningkatan potensi beban pencemar di Kota Cimahi dimodelkan untuk tahun 2016 hingga 2050, yaitu dari 2016 ke 2020 dan 2020 hingga 2050 dengan periode perhitungan per 10 tahun. Dari tiga kecamatan yang terdapat di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki potensi beban pencemar yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara untuk jenis zat pencemar, zat COD merupakan zat pencemar dengan angka tertinggi pada ketiga kecamatan yang ada.

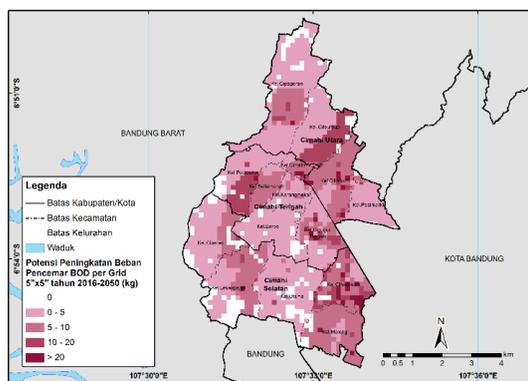
Secara lebih detail, nilai potensi beban pencemar setiap zat pencemar pada setiap kecamatan di Kota Cimahi terdapat pada **Tabel 3-15**.

Walaupun memiliki nilai tertinggi, pada perhitungan rata-rata peningkatan potensi beban pencemar dari tahun 2020 hingga 2025 dengan periode per 10 tahun, zat COD justru memiliki nilai persentasi peningkatan paling kecil dibandingkan zat yang lain. Zat yang mengalami presentasi peningkatan tertinggi pada ketiga kecamatan di Kota Cimahi adalah zat pencemar TSS. Peningkatan zat pencemar TSS tertinggi terjadi di Kecamatan Cimahi Utara dengan persentasi sebesar 14,84%. Pada Kecamatan Cimahi Selatan, nilai persentasi peningkatan zat BOD, COD, dan TSS masing-masing secara berurutan adalah 10,97%; 10,92%; dan 11,55%. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, nilai persentasi peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 9,75%; 9,73%; dan 9,90%. Sementara di Kecamatan Cimahi Utara, nilai persentasi peningkatan zat BOD, COD, dan TSS adalah 13,16%; 13,03%; dan 14,84%. Pola sebaran dari peningkatan potensi beban pencemar terdapat dalam peta pada **Gambar 3-34**.

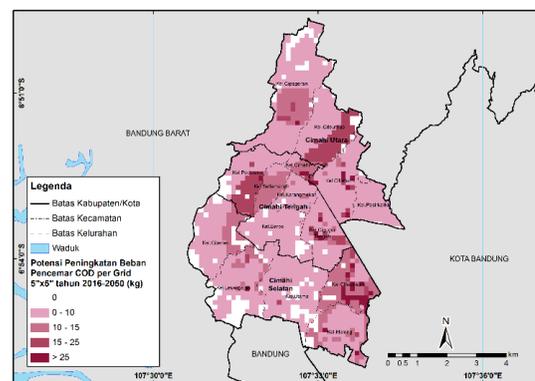
Tabel 3-15 Nilai Potensi Beban Pencemar Per Kecamatan di Kota Cimahi

Kecamatan	Zat Pencemar (kg/hari)	Tahun		
		2016	2020	2050
Cimahi Selatan	BOD	7279,37	7663,34	11422,06
	COD	10081,89	10609,83	15778,07
	TSS	6372,07	6736,93	10307,72
Cimahi Tengah	BOD	4783,05	4999,59	7066,12
	COD	6590,25	6887,93	9729,41
	TSS	4442,48	4648,68	6611,87
Cimahi Utara	BOD	4847,30	5144,92	8502,30
	COD	6787,25	7196,48	11812,88
	TSS	3690,05	3972,78	7162,30

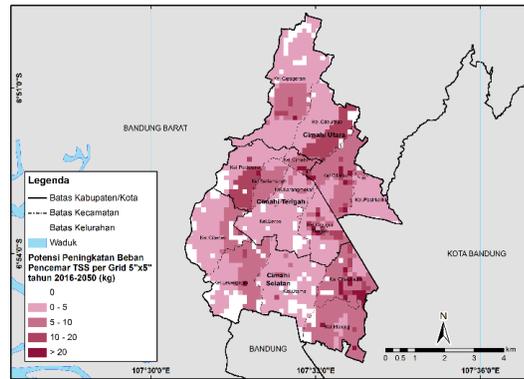
Sumber: Hasil analisis, 2019



(a) Zat BOD



(b) Zat TSS



(c) Zat TSS

Gambar 3-34 Peningkatan Potensi Beban Pencemar dari Tahun 2016 ke Tahun 2050 di Kota Cimahi

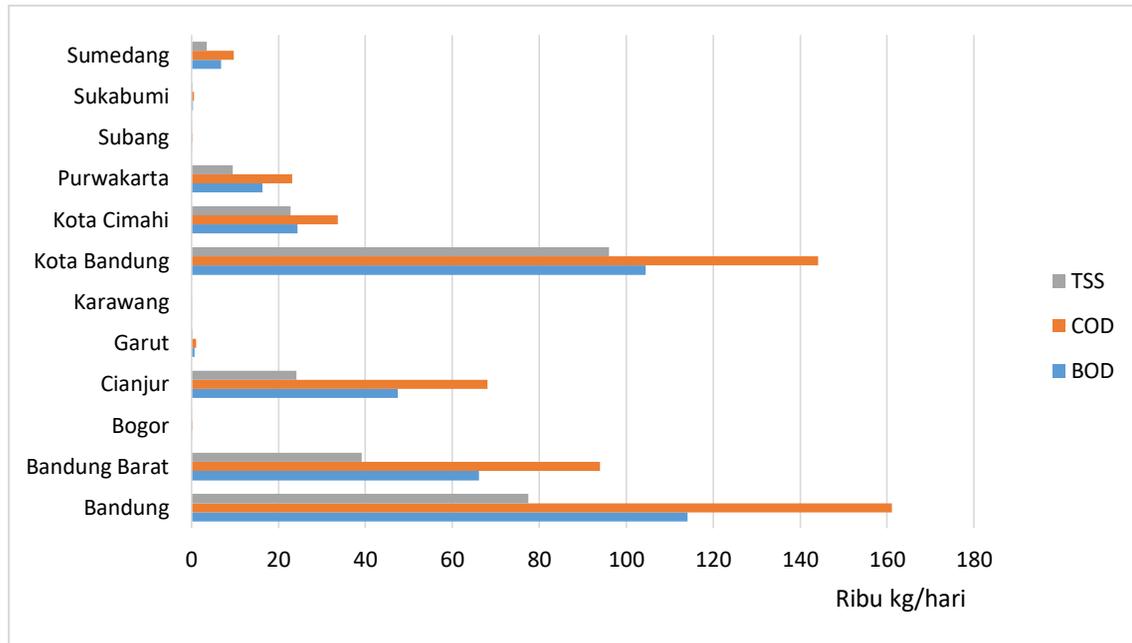
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Dari seluruh luasan Kota Cimahi, luasan WD Citarum Tengah lebih mendominasi yaitu sekitar 99% dengan hanya 1% dari luasan Kota Cimahi merupakan bagian dari WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini juga mencakup beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang untuk WD Cekungan Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, dan sebagian Kabupaten Purwakarta untuk WD Citarum Tengah. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut. **Tabel 3-16** menunjukkan nilai akumulasi dari potensi beban pencemar dari beberapa kabupaten/kota yang wilayahnya tercakup oleh WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Sementara sebagai perbandingan tinggi rendahnya potensi beban pencemar setiap kabupaten/kota tersebut dapat dilihat pada grafik di **Gambar 3-35**.

Tabel 3-16 Nilai Potensi Beban Pencemar di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung

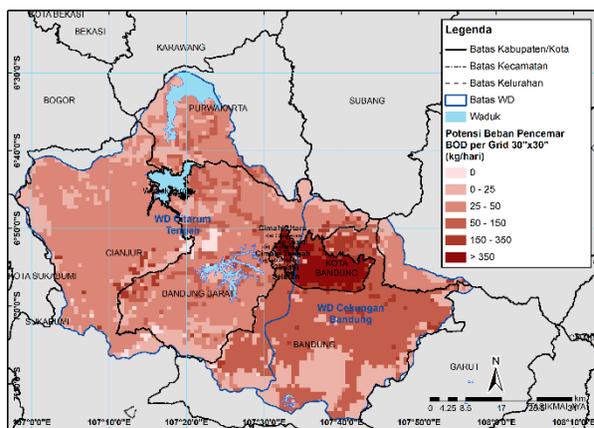
KABUPATEN	Zat Pencemar (kg/hari)		
	BOD	COD	TSS
Bandung	114.150	161.055	77.477
Bandung Barat	66.106	94.025	39.200
Bogor	128	186	45
Cianjur	47.503	68.100	24.127
Garut	688	1.003	223
Karawang	51	76	-
Kota Bandung	104.500	144.108	96.099
Kota Cimahi	24.403	33.604	22.810
Purwakarta	16.299	23.212	9.433
Subang	128	188	26
Sukabumi	382	543	228
Sumedang	6.762	9.686	3.490
TOTAL	381.101	535.787	273.158

Sumber: Hasil analisis (2019)

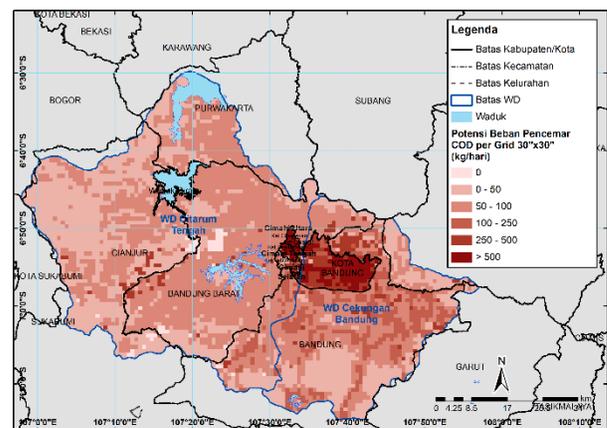


Gambar 3-35 Grafik Potensi Beban Pencemar Setiap Zat di Wilayah Kabupaten/Kota yang Berada dalam WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung (Sumber: hasil analisis, 2019)

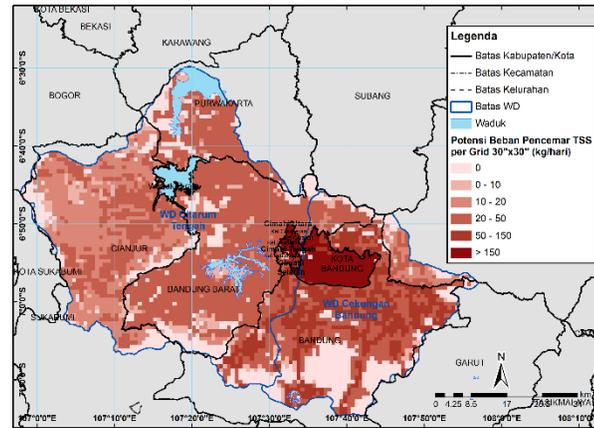
Dari hasil rekapitulasi nilai potensi beban pencemar beserta grafiknya, terlihat bahwa nilai potensi beban pencemar tertinggi bersumber dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kedua wilayah ini berada dalam cakupan WD Cekungan Bandung. Sementara dalam cakupan WD Citarum Tengah yang mendominasi wilayah di Kota Cimahi, potensi beban pencemar dengan nilai tinggi berada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian di posisi ketiga ditempati oleh Kota Cimahi. **Gambar 3-36** menunjukkan sebaran dari potensi beban pencemar yang ada di masing-masing WD. Apabila dilihat dari sebarannya, nilai potensi beban pencemar tinggi untuk setiap gridnya justru berada di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namun, apabila diakumulasikan, karena luasan kedua kota ini tergolong kecil, total nilai potensi beban pencemarnya menjadi kecil pula.



(a) Parameter BOD



(b) Parameter COD



(c) Parameter TSS

Gambar 3-36 Potensi Beban Pencemar Air Sungai di WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung dalam Sistem Grid 30"x30"
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.4.4 Kualitas Air Sungai

Berdasarkan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, dilakukan pengukuran lapangan pada lima sungai di Kota Cimahi untuk dilakukan analisis kualitas air sungai pada musim pancaroba dan kemarau. Pengambilan sampling untuk musim pancaroba dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2019 dan untuk musim kemarau dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019.

Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) dihitung dengan menggunakan selisih antara beban pencemaran aktual dengan beban pencemaran maksimum. Beban pencemar aktual Sungai Citarum dari Kota Cimahi dihitung berdasarkan konsentrasi pencemar dari anak-anak sungai yang masuk ke DAS Citarum. Berdasarkan hasil perhitungan tidak semua parameter dapat ditentukan nilai DTBPA karena ada beberapa parameter yang tidak memiliki baku mutu atau nilai hasil analisis di lapangan konsentrasinya nol. Angka DTBPA yang negatif menunjukkan bahwa daya tampung beban pencemaran di sungai sudah melebihi untuk parameter tersebut.

Pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019, disampaikan hasil pemantauan di Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum pada musim kemarau dan pancaroba di bagian hulu, tengah, dan hilir terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu diantaranya yaitu TDS, TSS, NO₂, Zn, BOD₅, COD, DO, Total P, dan Fecal coli dll. Mutu air berdasarkan hasil perhitungan pada musim pancaroba dan kemarau dengan menggunakan nilai indeks pencemaran air Sungai Cimahi, Cisangkan, Cibabat, Cibaligo, dan Cibeureum di bagian hulu, tengah, dan hilir termasuk katagori cemar sedang berat. **Tabel 3-17** menunjukkan indeks pencemaran dari sungai di Kota Cimahi.

Tabel 3-17 Indeks Pencemaran Air Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Cimahi	Hulu	1.101	Cemar Berat	341,72	Cemar Berat
		Tengah	241	Cemar Berat	7.128,16	Cemar Berat
		Hilir	1.102	Cemar Berat	21.455,38	Cemar Berat
2	Cisangkan	Tengah	461	Cemar Berat	24.217,17	Cemar Berat
		Hulu	1.102	Cemar Berat	23.612,94	Cemar Berat
		Hilir	119	Cemar Berat	17.349,97	Cemar Berat
3	Cibaligo	Hulu	1.102	Cemar Berat	21.450,97	Cemar Berat

No	Nama Sungai	Lokasi Pemantauan	Musim Pancaroba		Musim kemarau	
			Nilai IP	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air
		Tengah	1.102	Cemar Berat	13.015,45	Cemar Berat
		Hilir	1.103	Cemar Berat	72.770,91	Cemar Berat
		Hulu	461	Cemar Berat	11.884,16	Cemar Berat
4	Cibeureum	Tengah	241	Cemar Berat	7.710,91	Cemar Berat
		Hilir	461	Cemar Berat	24.217,92	Cemar Berat
		Hulu	1.102	Cemar Berat	1.170,08	Cemar Berat
5	Cibabat	Tengah	1.102	Cemar Berat	20.997,65	Cemar Berat
		Hilir	1.101	Cemar Berat	77.091,97	Cemar Berat

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi 2019

Hasil perhitungan DTBPA pada Sungai Cimahi menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD₅, COD, TSS, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cimahi terdiri dari: TDS, TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Klorin bebas, Zink, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cisangkan menunjukkan hasil bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, dan fenol. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung terdiri dari: TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Sulfat, Klorin bebas, Barium, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

DTBPA pada Sungai Cibeureum menunjukkan bahwa pada musim pancaroba parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, minyak dan lemak, dan fenol. Pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibeureum terdiri dari: TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Klorin bebas, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Perhitungan DTBPA pada Sungai Cibabat menunjukkan bahwa pada musim pancaroba, parameter yang telah melebihi daya tampungnya yaitu: BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Nitrit, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibabat terdiri dari: TDS, TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Zink, Nitrit, Nitrat, Flourida, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

Pada Sungai Cibaligo, parameter yang telah melebihi daya tampungnya pada musim pancaroba yaitu: TDS, TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Tembaga, Timbal, Zink, Sulfida, Sianida, Nitrit, Flourida, klorin bebas, fenol, dan detergen sebagai MBAS. Sementara pada musim kemarau, parameter yang sudah melebihi daya tampung di Sungai Cibaligo terdiri dari: TSS, BOD₅, COD, Fosfat, Timbal, Zink, Sulfida, Nitrit, Klorin bebas, Sulfat, Fenol dan detergen sebagai MBAS.

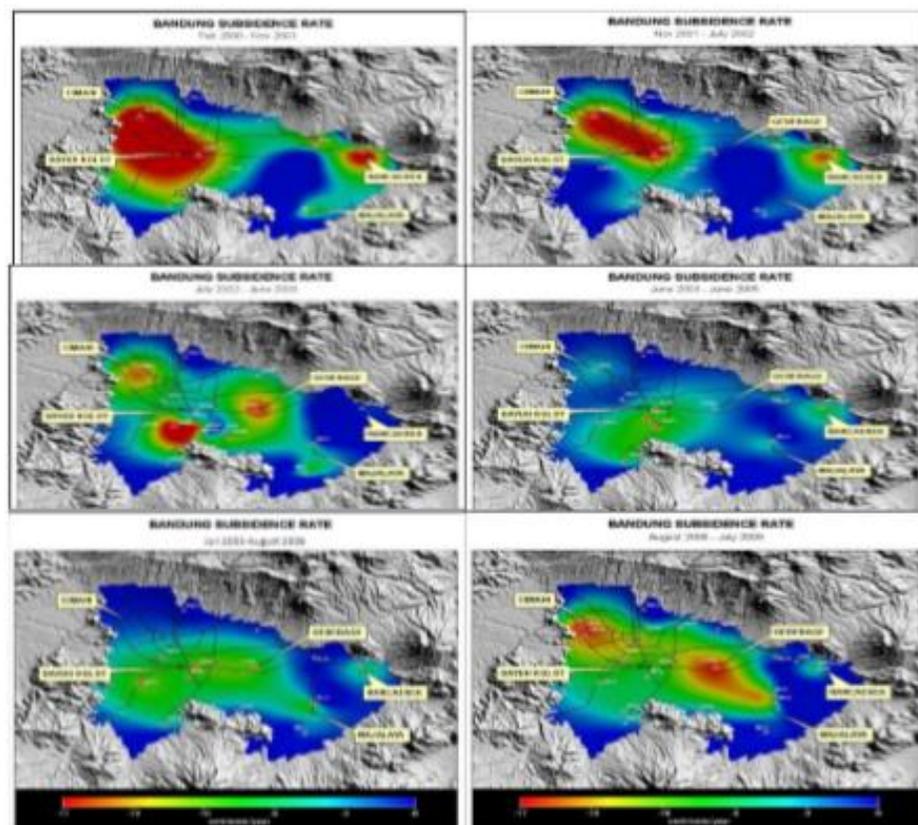
Detail untuk nilai dari DTBPA setiap Sub DAS Citarum yang berada di Kota Cimahi yaitu Sungai Cibereum, Cibaligo, Cibabat, Cimahi, dan Cisangkan dapat dilihat pada Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Cimahi tahun 2019.

3.3.4.5 Penurunan Muka Tanah (*Land Subsidence*)

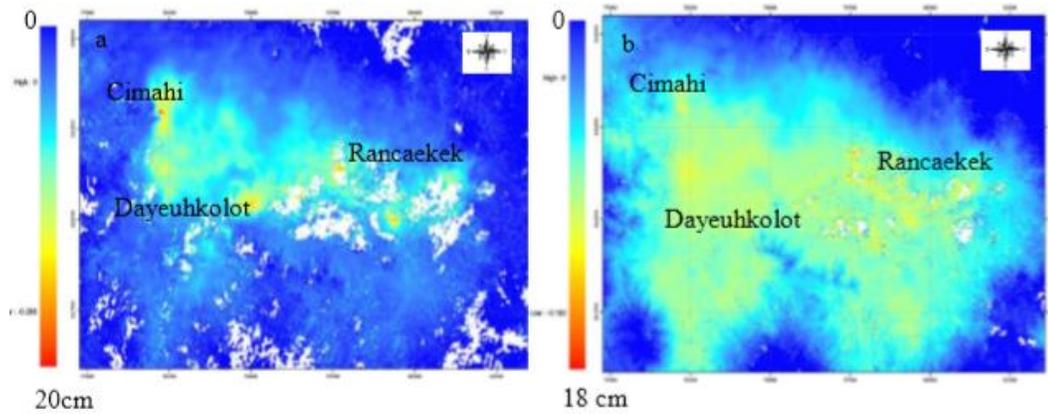
Penurunan muka tanah atau *land subsidence* adalah fenomena penurunan dari permukaan atau topografi tanah. Turunnya permukaan tanah biasanya terjadi disebabkan karena pengambilan air tanah

yang berlebihan. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Wilayah Cekungan Bandung cukup rentan terhadap penurunan muka tanah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Kota Cimahi masuk dalam wilayah cekungan ini. Penurunan muka tanah di wilayah Cekungan Bandung diduga diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan (Abidin, et al., 2008). Tercatat hampir semua industri di wilayah Cekungan Bandung menggunakan bahan baku berupa air tanah (Gumilar, et al., 2012). Terdapat beberapa penelitian terkait penurunan muka tanah di Cekungan Bandung. Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kota Cimahi memiliki laju penurunan muka tanah yang signifikan.

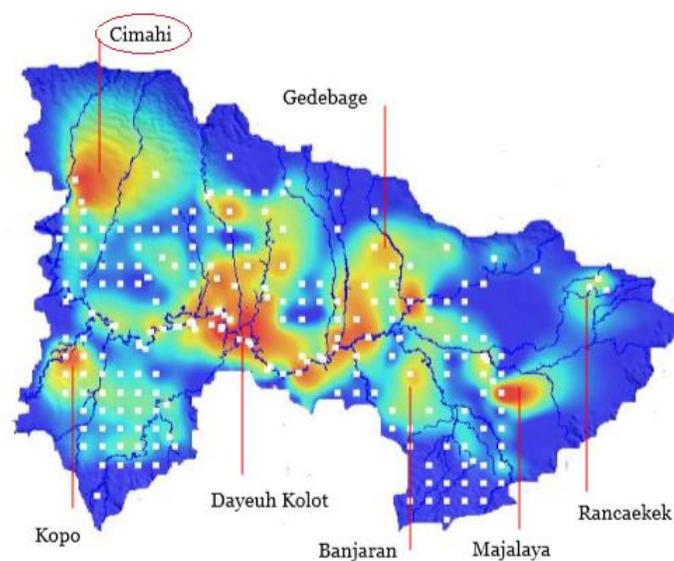
Gumilar et al., (2012) meneliti penurunan muka tanah di Cekungan Bandung dengan menggunakan metode survei GPS dan InSAR. Peta penurunan tanah ditunjukkan pada Gambar 3-37 dan **Gambar 3-38**. Berdasarkan hasil pengolahan data GPS dari tahun 2000-2009, wilayah Kota Cimahi khususnya wilayah Leuwigajah mengalami penurunan cukup besar hingga mencapai 14 cm per tahun. Wilayah tersebut merupakan kawasan industri yang diduga mengambil banyak air tanah (artesis). Sedangkan berdasarkan pengolahan data InSAR pada kurun waktu Januari 2009 - Desember 2010, wilayah Kota Cimahi juga mengalami penurunan muka tanah yang sangat besar sekitar 12 cm. Pengolahan data InSAR masih memiliki ketelitian dibawah GPS. Berdasarkan penelitian dari Heri Andreas tahun 2018, laju penurunan muka tanah di wilayah Kota Cimahi sangat besar sekitar 15-20 cm per tahun (**Gambar 3-39**) (Andreas, et al., 2018).



Gambar 3-37 Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung berdasarkan Data GPS Tahun 2000-2009
(Sumber: Gumilar et al., 2012)



Gambar 3-38 Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung berdasarkan Pengolahan Data InSAR pada (a) Januari 2009-Desember 2009 dan (b) Desember 2009-Mei 2010
(Sumber: Gumilar et al., 2012)



Gambar 3-39 Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung
(Sumber: Andreas et al., 2018)

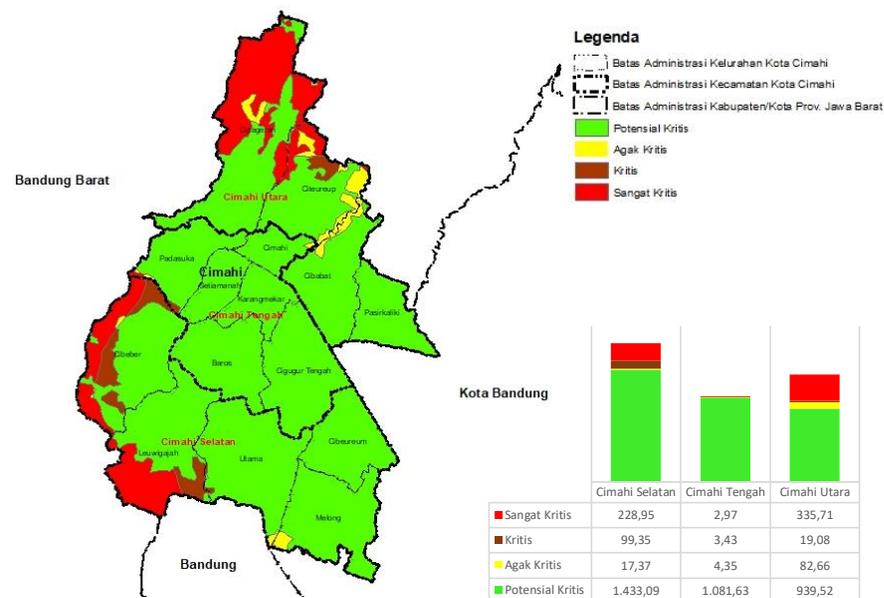
Dikutip dalam *tempo.co* pada 2 Desember 2019, menurut Irwan Gumilar (ketua Tim Riset ITB terkait penurunan muka tanah di Bandung), penurunan muka tanah per 1 meter akan berdampak pada penurunan air tanah dalam atau minus 20 meter. Total penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Bandung termasuk Leuwigajah Kota Cimahi ada yang mencapai 3-4 meter, yang artinya penurunan air tanah berkisar 60-80 meter. Dengan batas minimal minus 45 meter, maka kondisi air tanah dalam daerah tersebut sudah tergolong rusak. Kerusakan air tanah dalam waktu yang lama akan menyebabkan air tanah menjadi krisis dan habis.

3.3.4.6 Lahan Kritis

Terbentuknya lahan kritis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, jenis tanah, tingkatan erosi, dan tutupan vegetasi. Unsur-unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap timbulnya lahan kritis adalah kemiringan lereng. Selain itu, panjang lereng, dan bentuk lereng akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran lahan, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya lahan kritis, yaitu lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Kemiringan lereng terutama akan berpengaruh terhadap erosi yang terjadi, semakin besar persentase kemiringan lereng akan memberikan daya erosivitas pada hujan yang semakin besar, sehingga mempengaruhi material kesuburan dan sifat fisika tanah melalui pelepasan yang terjadi di permukaannya.

Luas lahan kritis di Kota Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional terdiri atas empat kriteria, dengan luas lahan sangat kritis sebesar 567,62 Ha atau 13,36% dari luas wilayah, dan luas lahan kritis sebesar 121,86 Ha atau 2,87% dari luas wilayah Kota Cimahi. Luas dan sebaran lahan kritis di Kota Cimahi selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 3-40**.



Gambar 3-40 Peta Lahan Kritis Kota Cimahi

3.3.5 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

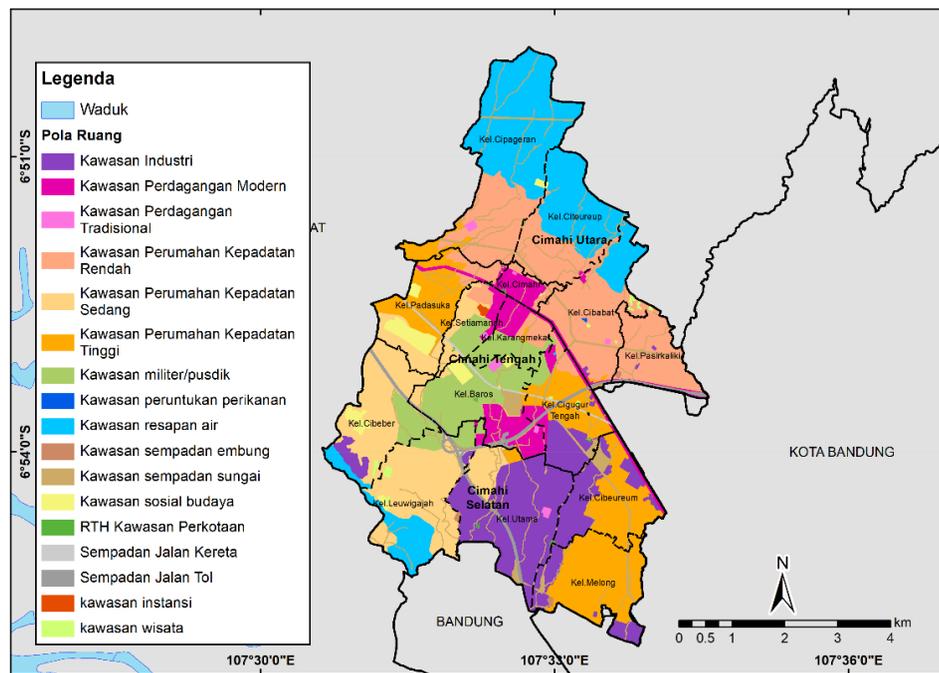
Penilaian efisiensi dilakukan untuk melihat seberapa optimal suatu sumber daya alam telah dimanfaatkan. Nilai efisiensi diperoleh dengan membandingkan pola ruang yang direncanakan dengan kondisi tutupan lahan eksisting yang direpresentasikan melalui Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Terdapat tiga jenis efisiensi yang dinilai pada kajian ini, yaitu efisiensi penyedia pangan, efisiensi penyedia air dan efisiensi pengaturan tata air. Metode perhitungan efisiensi pemanfaat sumber daya alam terdapat pada **Lampiran A.4**. Peta pola ruang di Kota Cimahi terlihat pada **Gambar 3-41**. Sementara, hasil penilaian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kota Cimahi terdapat pada **Tabel 3-18**.

Nilai efisiensi yang tinggi akan diperoleh pada pola ruang yang memiliki kesesuaian dengan kondisi tutupan lahan eksisting. Hal yang perlu diperhatikan adalah nilai efisiensi tinggi bukanlah suatu indikasi bahwa wilayah tersebut memiliki nilai IJE penyedia pangan, air, atau pengaturan tata air dan banjir yang tinggi, namun nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pola ruang di wilayah tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

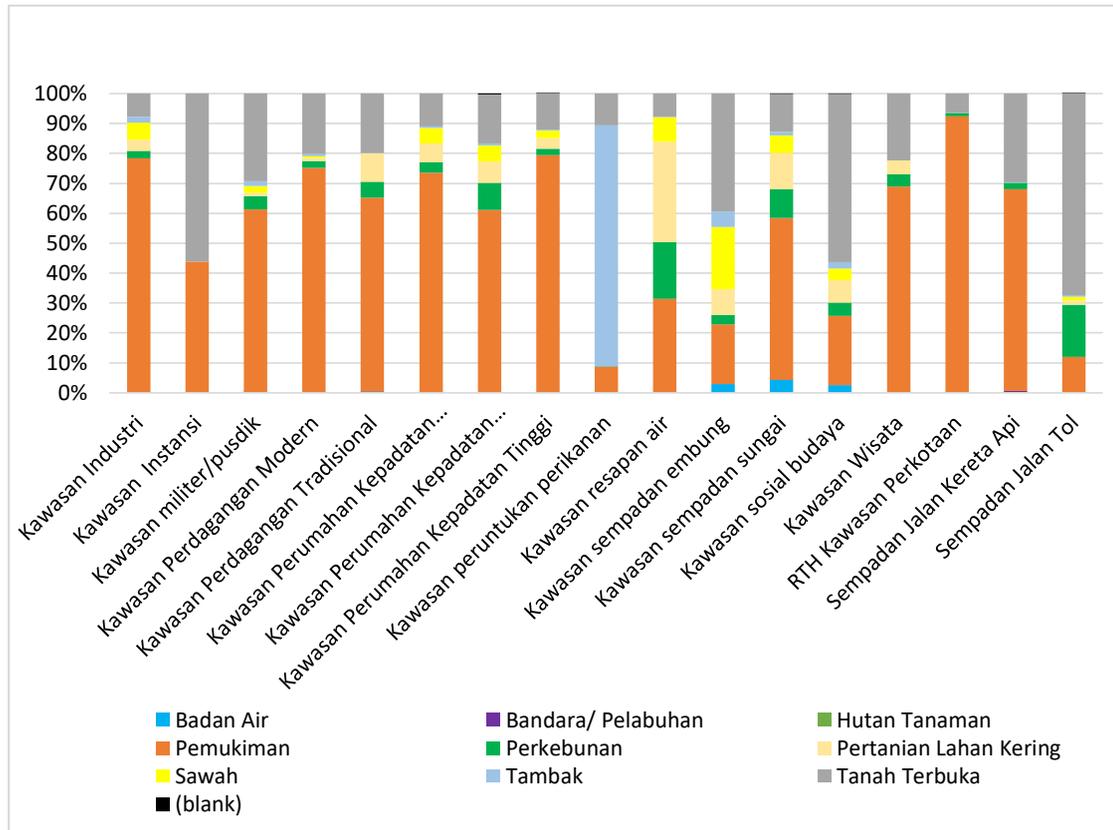
Tabel 3-18 Efisiensi Pemanfaatan SDA pada Setiap Pola Ruang Kota Cimahi

Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Kawasan Industri	53,17%	50,54%	51,38%
Kawasan Instansi	100,00%	100,00%	90,61%
Kawasan militer/pusdik	51,37%	49,68%	53,76%
Kawasan Perdagangan Modern	49,32%	48,59%	51,53%
Kawasan Perdagangan Tradisional	51,91%	50,00%	54,54%
Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah	53,31%	50,58%	52,56%
Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang	53,92%	50,88%	54,35%
Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi	50,80%	49,33%	51,26%
Kawasan peruntukan perikanan	89,88%	93,15%	80,82%
Kawasan resapan air	61,52%	53,15%	66,03%
Kawasan sempadan embung	65,56%	57,62%	60,93%
Kawasan sempadan sungai	58,17%	54,12%	58,77%
Kawasan sosial budaya	54,06%	51,77%	59,86%
Kawasan Wisata	49,40%	65,77%	71,23%
RTH Kawasan Perkotaan	55,39%	48,04%	49,03%
Sempadan Jalan Kereta Api	48,53%	65,19%	70,73%
Sempadan Jalan Tol	53,49%	50,67%	61,70%

Sumber: hasil analisis (2019)



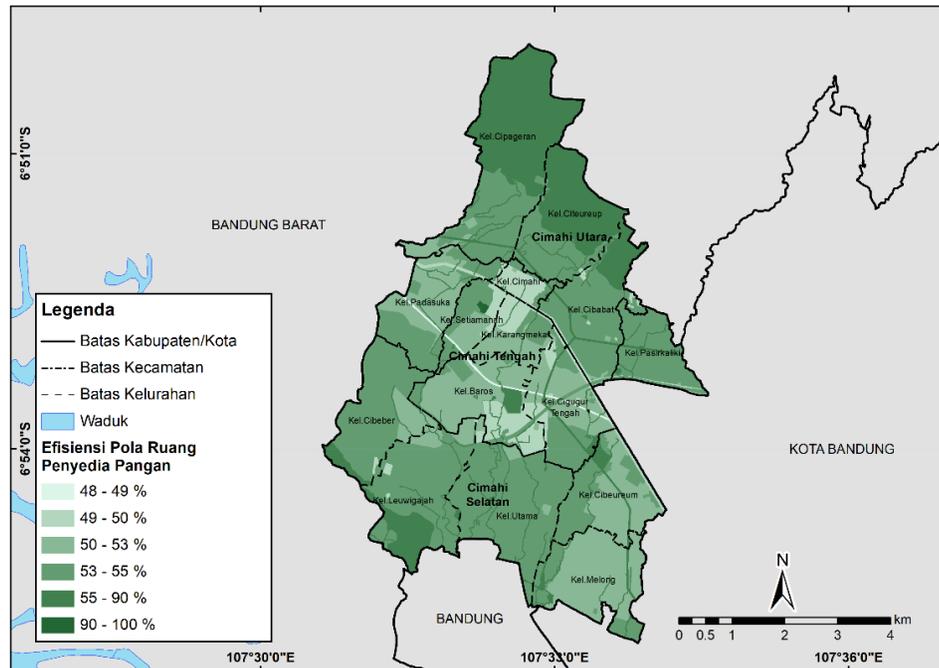
Gambar 3-41 Pola Ruang Kota Cimahi



Gambar 3-42 Grafik Proporsi Tutupan Lahan pada Setiap Jenis Pola Ruang di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

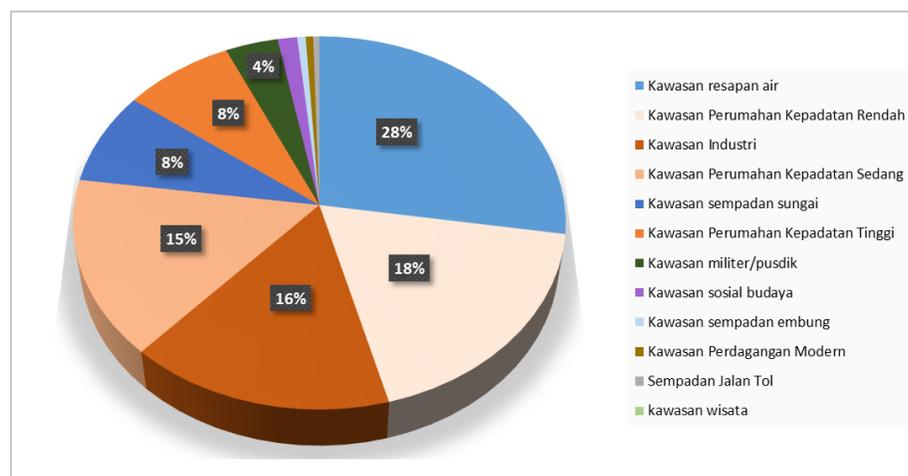
(a) Efisiensi Penyediaan Pangan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi berada pada kisaran nilai antara 49% hingga 55%, yang tersebar merata hampir pada semua wilayah di Kota Cimahi. Sementara untuk nilai efisiensi tinggi yang lebih dari 60% tersebar pada sebagian kecil wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu Kelurahan Baros dan Kelurahan Setiamanah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber. **Gambar 3-43** menunjukkan sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 3-43 Efisiensi Penyediaan Pangan di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Sawah merupakan salah satu tutupan lahan yang memiliki potensi tinggi dalam hal penyediaan pangan di Kota Cimahi. Namun, apabila dilihat dari pola ruangnya, tutupan lahan sawah ini tersebar dalam beberapa pola ruang seperti kawasan resapan air, kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan industri, dan beberapa kawasan lain seperti yang terlihat pada **Gambar 3-44**. Nilai efisiensi penyediaan pangan (**Tabel 3-18**) pada kawasan resapan air yang memiliki proporsi luasan sawah terbesar diantara kawasan lainnya adalah 61,52%. Sementara untuk kawasan lain yang juga memiliki luasan sawah cukup besar seperti kawasan perumahan kepadatan rendah dan kawasan industri, memiliki nilai efisiensi penyediaan pangan sebesar 53,31% dan 53,17%. Walaupun terbilang cukup tinggi, namun nilai efisiensi ini belum optimum. Sehingga jenis tutupan lahan pada setiap pola ruang perlu diperhatikan kembali, misalnya sawah yang memiliki proporsi luasan cukup besar pada kawasan industri.

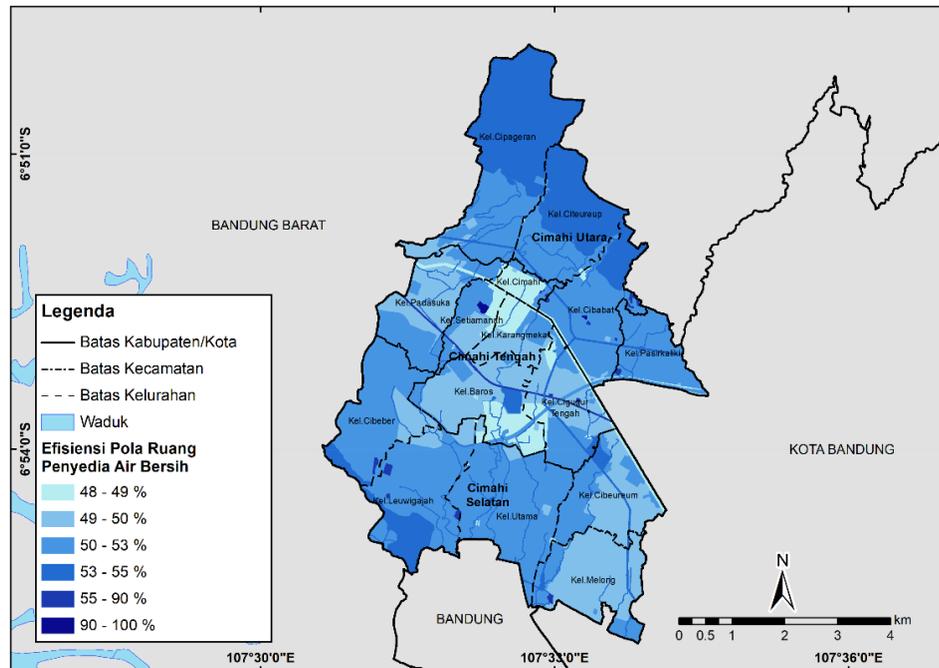


Gambar 3-44 Proporsi Luas Tutupan Lahan Sawah pada Pola Ruang di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.5.1 Efisiensi Penyediaan Air

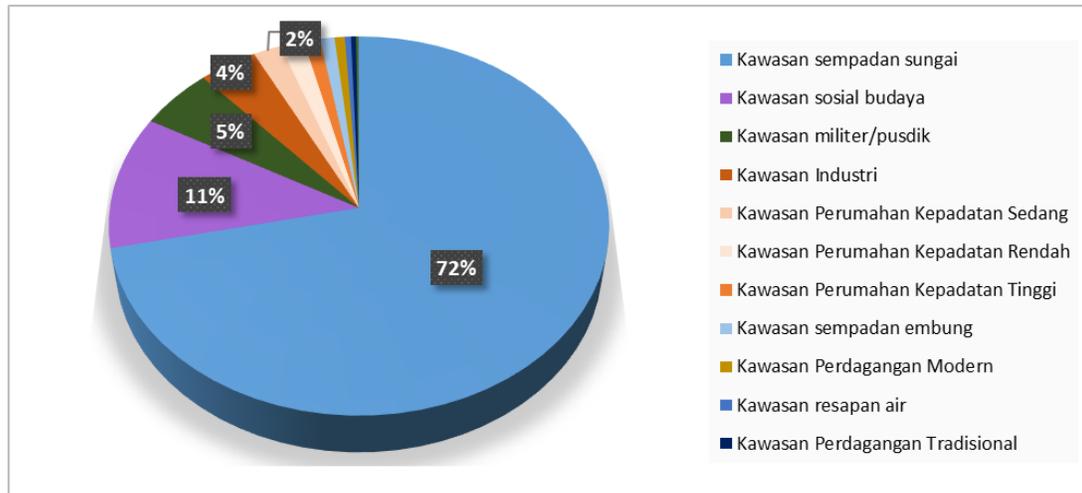
Sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan air bersih di Kota Cimahi memiliki pola yang sama dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk penyediaan pangan.

Nilai rata-rata yang mendominasi efisiensi penyediaan air bersih juga berkisar antara 49% hingga 55%, dengan nilai efisiensi tertinggi yaitu 100% yang dimiliki oleh pola ruang kawasan Instansi dan 93,15% untuk kawasan peruntukan perikanan. Pada peta sebaran di **Gambar 3-45**, juga masih terlihat nilai efisiensi tinggi di bagian utara dan barat daya Kota Cimahi yang berada pada pola ruang resapan air. Sementara untuk nilai efisiensi rendah di Kecamatan Cimahi Tengah yang dimiliki oleh pola ruang kawasan perdagangan modern. Pola ruang dengan nilai efisiensi penyedia air yang tinggi bukan merupakan indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki potensi yang tinggi pula dalam hal penyediaan air di Kota Cimahi. Nilai efisiensi tinggi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan secara faktual pada suatu pola ruang sesuai dengan yang direncanakan.



Gambar 3-45 Efisiensi Penyediaan Air Bersih di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

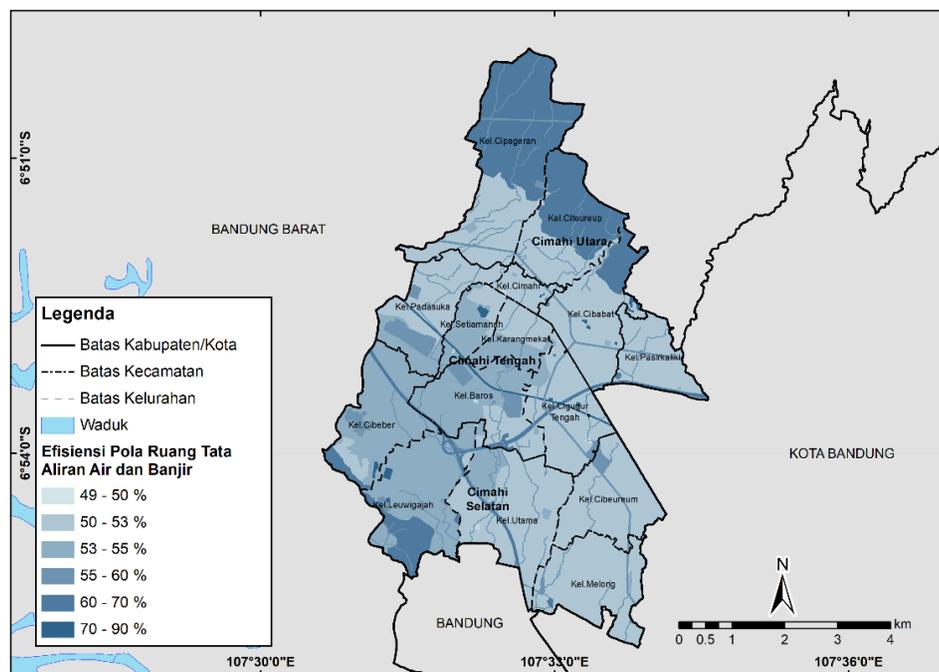
Potensi penyediaan air yang tinggi terdapat pada tutupan lahan berupa badan air. Seperti halnya efisiensi penyediaan pangan, luasan tutupan lahan badan air tersebar pada beberapa pola ruang (**Gambar 3-46**), dengan kawasan sempadan sungai yang paling mendominasi dengan proporsi luas 72%. Namun, kawasan sempadan sungai memiliki nilai efisiensi penyediaan air sebesar 54,12%. Untuk kawasan peruntukan perikanan, pemanfaatan dari tutupan lahannya telah sesuai dengan adanya badan air yang mendominasi kawasan ini.



Gambar 3-46 Proporsi Luas Tutupan Lahan Badan Air pada Pola Ruang di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.5.2 Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

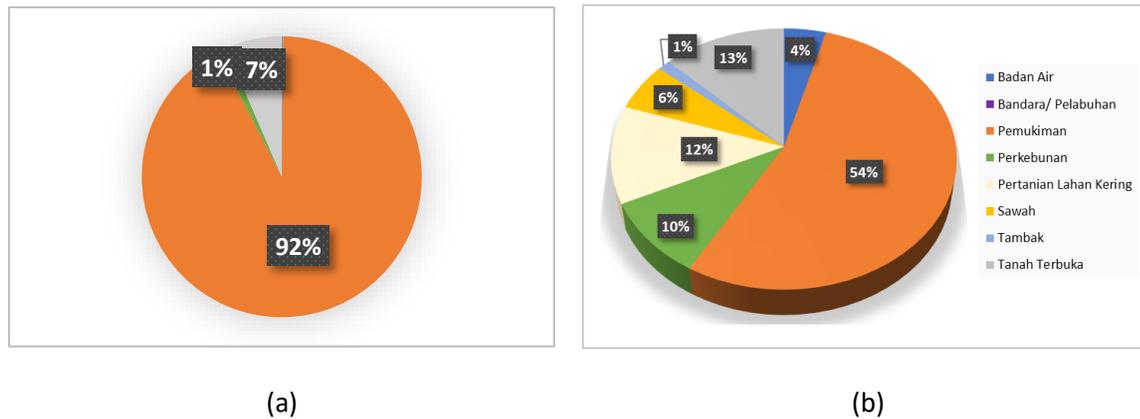
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk pemanfaatan tata air dan banjir di Kota Cimahi juga memiliki nilai yang tersebar hampir merata, yaitu 49% hingga 55% hampir di semua wilayah, serta lebih dari 60% di sebagian kecil Kelurahan Setiamanah pada Kecamatan Cimahi Tengah, di bagian utara Kecamatan Cimahi Utara, yaitu sebagian wilayah pada Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cibabat, serta bagian barat daya dari Kecamatan Cimahi Selatan, yaitu sebagian kecil pada Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber. Pola sebaran nilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam untuk pengaturan tata air dan banjir berada pada **Gambar 3-47**.



Gambar 3-47 Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Pada efisiensi pengaturan tata air dan banjir, rencana pola ruang yang harus diperhatikan efisiensinya terutama adalah kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan embung, dan kawasan RTH perkotaan. Pada kawasan tersebut, masing-masing memiliki nilai efisiensi pengaturan tata air dan banjir sebesar 66,03%, 58,77%, 60,93%, dan 49,03%. Proporsi tutupan lahan pada kawasan tersebut harus diperhatikan. Pada kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan

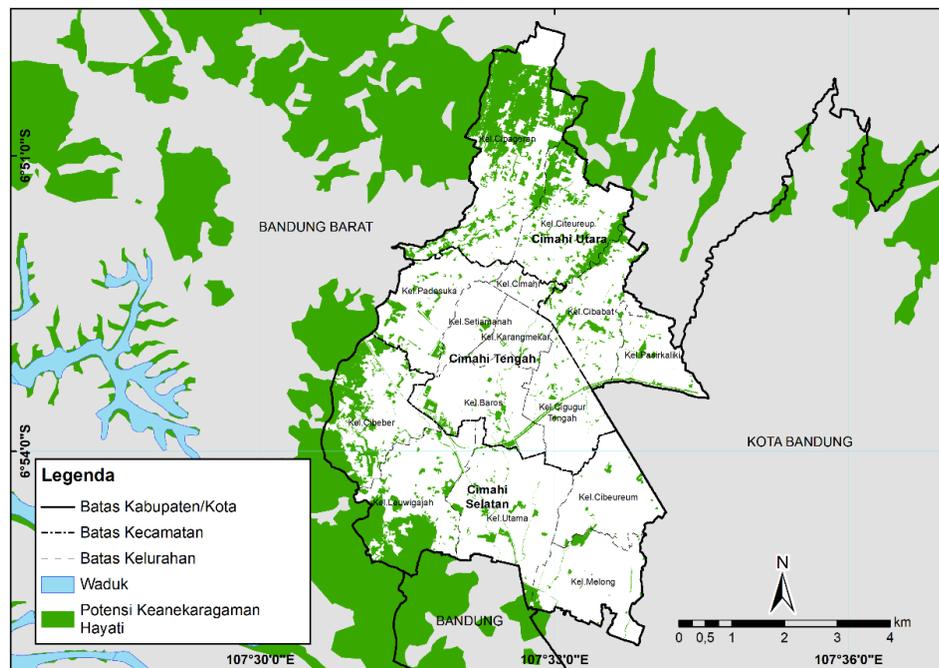
embung, dan kawasan RTH perkotaan, tutupan lahan yang mendominasi adalah permukiman. Sebagai contoh, **Gambar 3-48** menunjukkan proporsi luasan tutupan lahan pada pola ruang RTH perkotaan dan sempadan sungai.



(a) (b)
Gambar 3-48 Proporsi Luas Tutupan Lahan pada Pola Ruang (a) RTH Perkotaan dan (b) Sempadan Sungai di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

3.3.6 Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

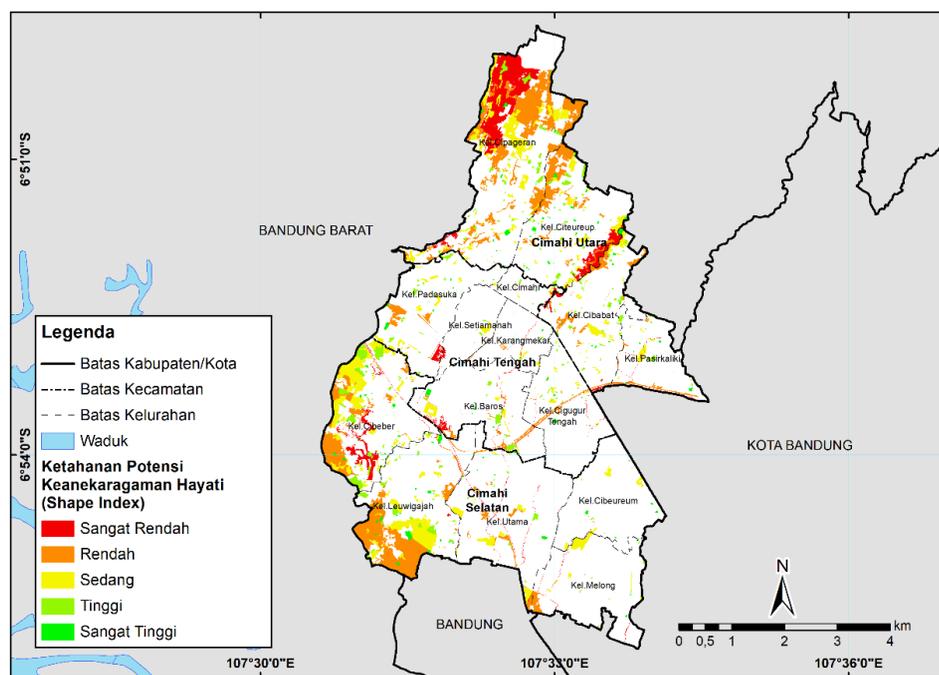
Gambar 3-49 menunjukkan bahwa seluruh Kota Cimahi mempunyai potensi keanekaragaman hayati. Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibeber dan Leuwigajah memiliki potensi keanekaragaman hayati paling banyak.



Gambar 3-49 Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi dan Sekitarnya
(Sumber: hasil analisis, 2019)

Ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati didapat dari melihat bentuk geometris wilayah dengan melihat nilai *shape index* dari sebuah kawasan yang memiliki nilai jasa ekosistem yang tinggi. Metode perhitungan *shape index* ini dijelaskan pada **Lampiran A.5**. Apabila **Gambar 3-50** ditinjau, secara umum Kota Cimahi memiliki ketahanan potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang mayoritas sangat rendah dan rendah, selain itu terdapat potensi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang memiliki ketahanan sedang hingga tinggi. Indeks

jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang sangat tinggi hingga rendah ini terutama tersebar di wilayah Ekoregion Perbukitan Vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara, bagian utara wilayah Ekoregion Dataran Vulkanik yang berhubungan dengan Perbukitan Vulkanik, dan sisi barat Cimahi yang merupakan perpaduan wilayah Ekoregion Perbukitan Struktural dan Dataran Vulkanik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa perbukitan vulkanik di sisi utara Kota Cimahi masih sedikit-banyak terhubung dengan ekosistem alami di kawasan hutan lindung dan cagar alam Gunung Burangrang dan Tangkuban Parahu. Indeks jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di bagian utara wilayah ekoregion perbukitan vulkanik di Kecamatan Cimahi Utara bukan merupakan kawasan yang terpisah batas administrasi namun sebagai kesatuan kawasan dengan kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi/kerja sama antara Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wilayah yang berpotensi sebagai pendukung keanekaragaman hayati tersebut.



Gambar 3-50 Tingkat Ketahanan dari Potensi Keanekaragaman Hayati di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2019)

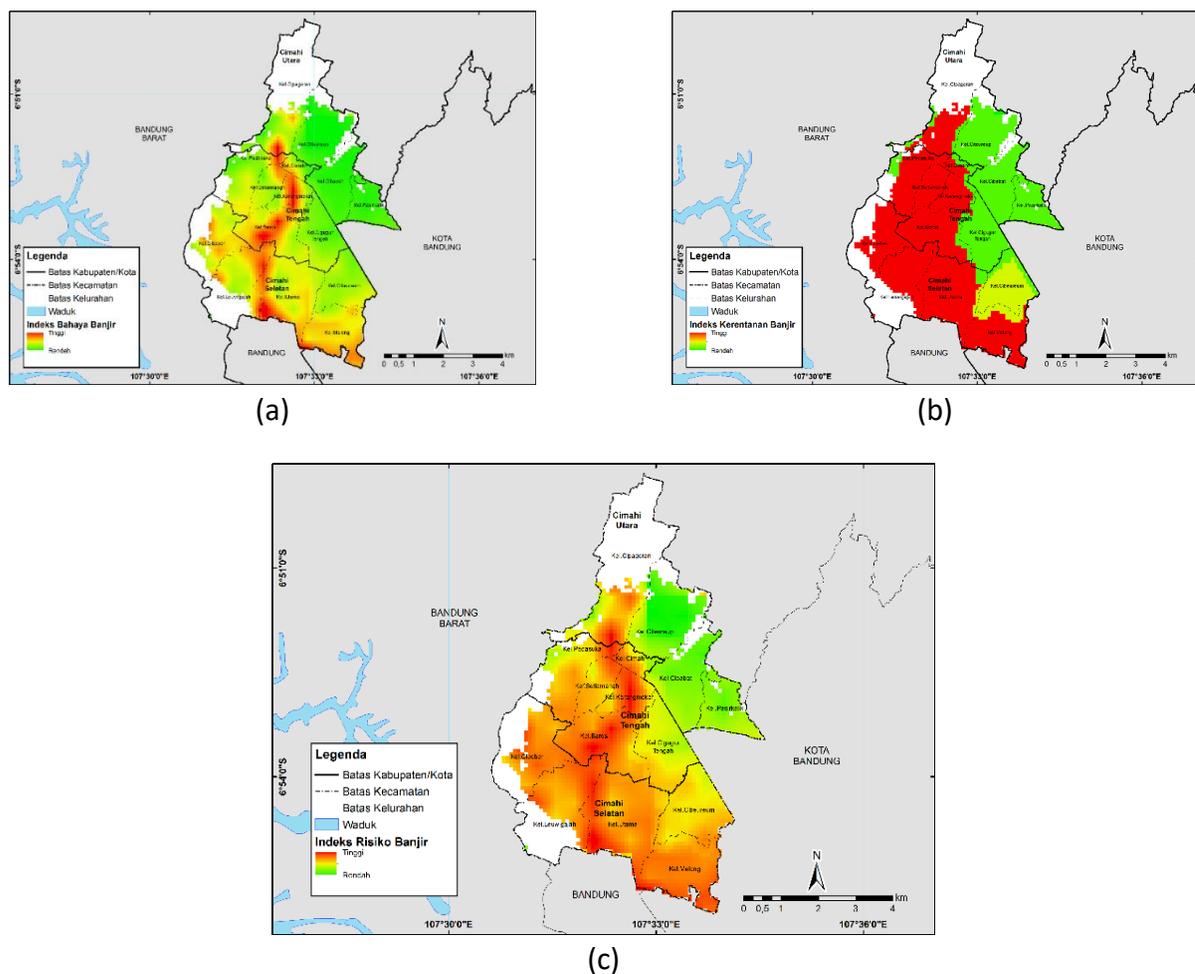
Nilai yang sangat rendah tersebut didapat pada wilayah yang memiliki bentuk yang memanjang ataupun menjari (bentuk yang tidak *compact*) sehingga mudah terganggu. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena di Kota Cimahi tercatat ditemukan jenis-jenis burung yang memiliki status dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 (Noerdjito & Maryanto, 2001), namun dengan status *Least Concerned* berdasarkan data IUCN. Adapun jenis burung yang dilindungi tersebut adalah Burung Manintin (*Enicurus spp*), Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*), Cekakak (*Halycon spp.*; burung-burung dari suku Alcedinidae), dan Sriganti (*Nectarinia jugularis*) (DLH Kota Cimahi, 2015). Dari jenis-jenis burung tersebut, sebagian besar memiliki sebaran habitat di daerah pegunungan dan dataran tinggi, khususnya di daerah riparian, dengan pakan utama serangga (manintin), fauna darat dan air (cekakak), dan nektar bunga (sriganti). Kuntul kerbau, di sisi lain, hidup di daerah persawahan dan lahan basah, serta mengkonsumsi serangga di area tersebut. Oleh karena itu, jenis-jenis burung ini memiliki peran penting di dalam pengendalian populasi hama dan penyerbukan alami.

3.3.7 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

(a) Banjir

Dalam Perka BNPB No. 7 Tahun 2012, didefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Tercatat 22 kejadian banjir yang terjadi di Kota Cimahi pada tahun 2016. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 33 kali. BNPB melakukan penilaian terhadap indeks bahaya banjir berdasarkan kemiringan lereng dan jarak lokasi rawan banjir terhadap sungai (RBI, 2016). Peta indeks bahaya banjir untuk Kota Cimahi terdapat pada **Gambar 3-51(a)**.

Kota Cimahi memiliki indeks bahaya banjir mulai dari kelas tinggi hingga rendah, namun didominasi oleh kelas sedang dan rendah. Indeks bahaya banjir tinggi berada di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah dan sebagian kecil di Kecamatan Cimahi Utara. Untuk indeks bahaya banjir rendah mayoritas berada pada Kecamatan Cimahi Utara yaitu pada Kelurahan Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki dan Cipageran. Selain itu, terdapat indeks bahaya banjir rendah pada sebagian wilayah di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Kelurahan Padasuka, Setiamanah, Cimahi, Karangmekar dan Cigugur Tengah.



Gambar 3-51 Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko banjir di Kota Cimahi
(Sumber: InaRISK BNPB)

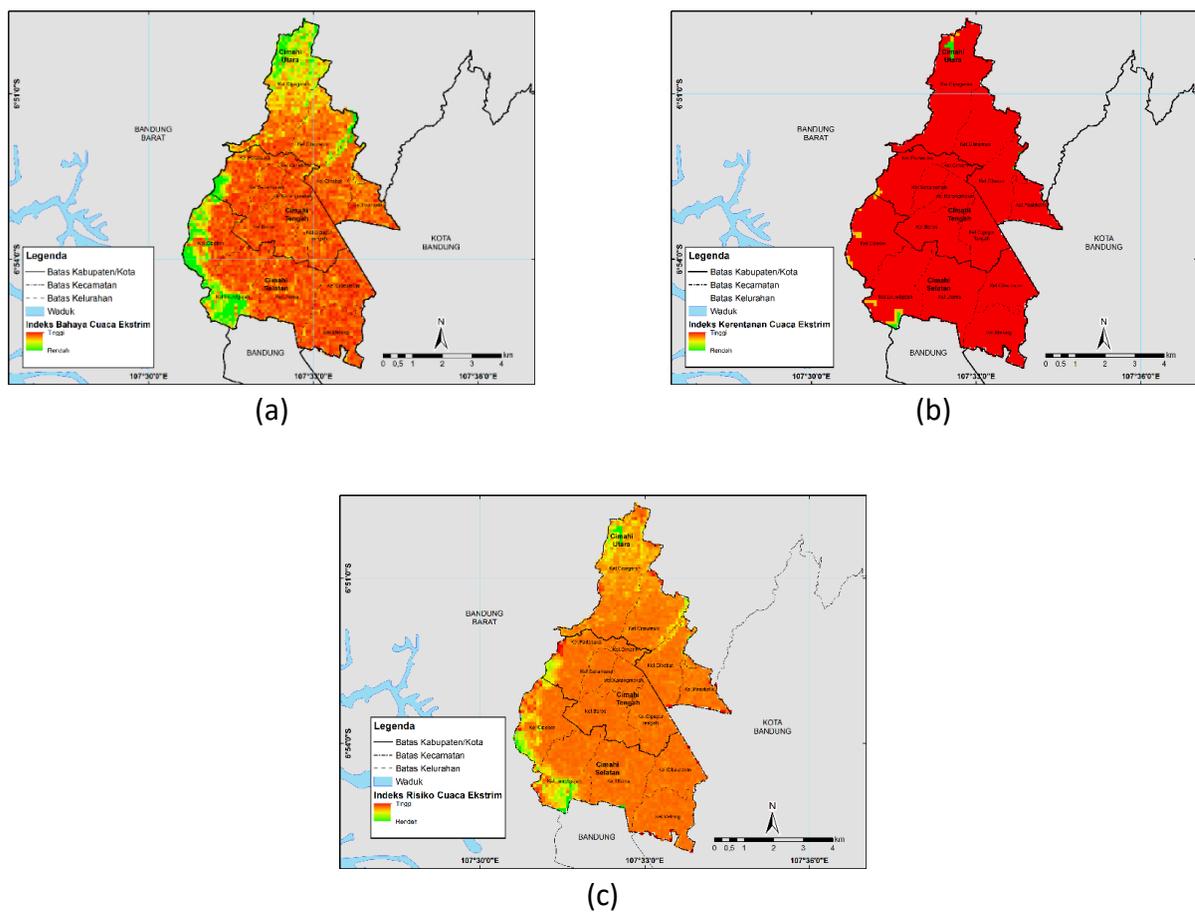
Sebaran nilai indeks kerentanan banjir di Kota Cimahi terdapat pada **Gambar 3-51(b)**. Indeks kerentanan banjir pada wilayah ini bernilai tinggi hingga rendah, dengan kelas tinggi mendominasi. Kerentanan tingkat tinggi berada pada kawasan dengan indeks bahaya banjir yang tinggi hingga rendah,

sedangkan untuk indeks kerentanan sedang hanya terdapat pada Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan.

3.3.7.1 Cuaca Ekstrem

Indeks bahaya cuaca ekstrim dibuat dengan menggunakan tiga parameter, yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan (RBI, 2016). Keterbukaan lahan yang dipertimbangkan meliputi beberapa jenis lahan, seperti hutan, kebun/perkebunan, tegalan/ladang, sawah, dan lahan terbuka. Gambar adalah peta indeks bahaya cuaca ekstrim di Kota Cimahi. Indeks bahaya cuaca ekstrim tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Cimahi dengan indeks tinggi hingga rendah (**Gambar 3-52(a)**). Indeks bahaya cuaca ekstrim yang dominan di wilayah ini adalah indeks pada kelas tinggi.

Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan cuaca ekstrim (**Gambar 3-52(b)**). Berbeda dengan indeks bahaya, indeks kerentanan cuaca ekstrim di Kota Cimahi didominasi oleh indeks tinggi dengan pola persebaran yang merata pada Kota Cimahi. Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks sedang hingga rendah. Dari kondisi potensi bahaya dan kerentanan tersebut, peta indeks risiko cuaca ekstrim dinilai dengan sebaran risiko seperti yang terlihat pada **Gambar 3-52(c)**.

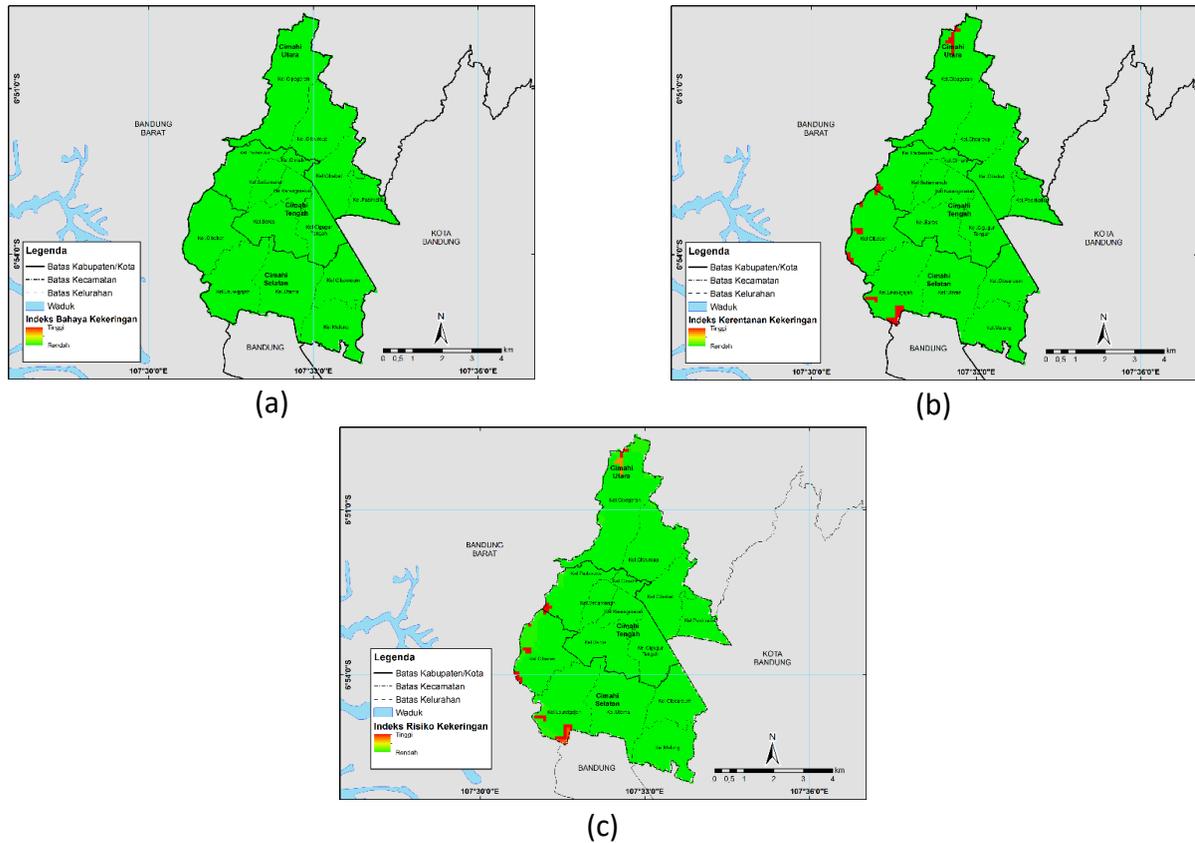


Gambar 3-52 Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko cuaca ekstrim di Kota Cimahi
(Sumber: InaRISK BNPB)

3.3.7.2 Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan dapat terjadi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Indeks bahaya kekeringan yang dapat dilihat pada **Gambar 3-53(a)**, menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya

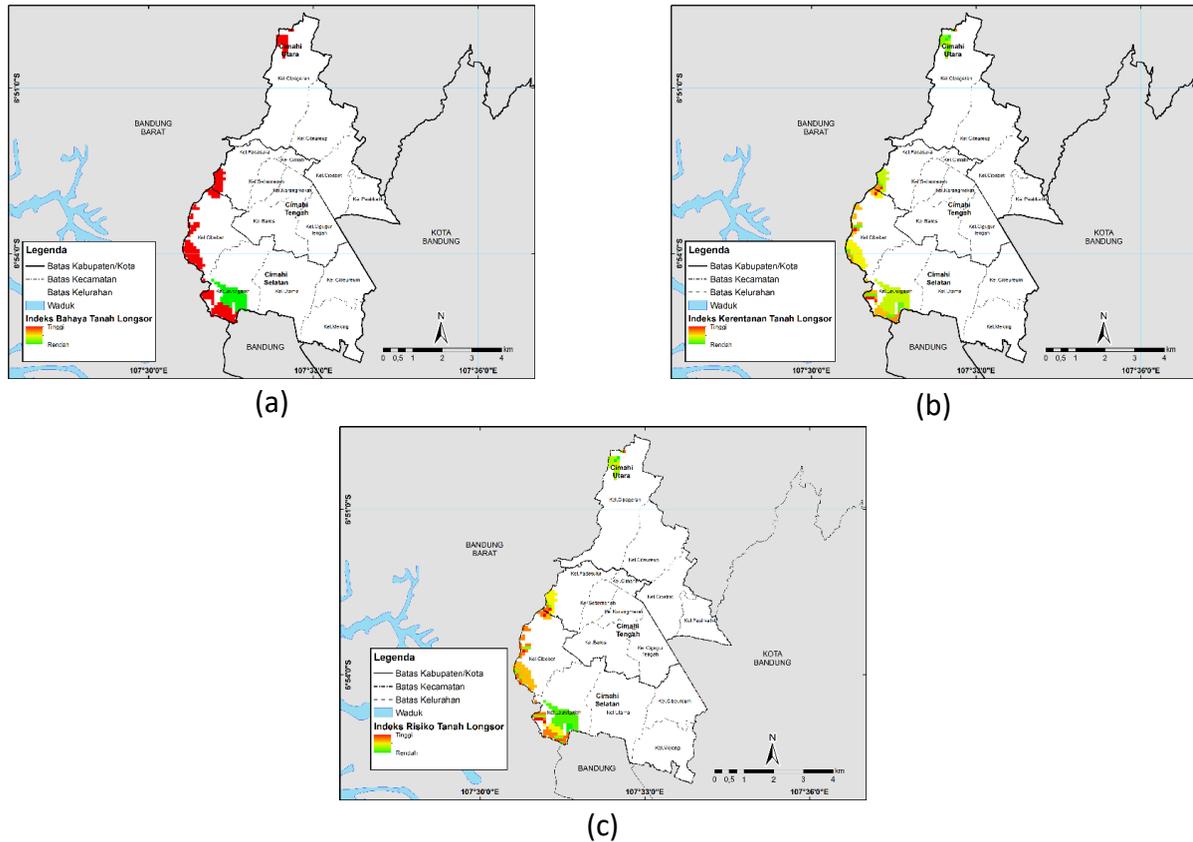
kekeringan pada kelas rendah yang tersebar merata di seluruh kelurahan. Seperti indeks bahaya kekeringan, kelas kerentanan rendah mendominasi Kota Cimahi (**Gambar 3-53(b)**). Namun, terdapat pada sebagian kecil di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah memiliki indeks kerentanan kekeringan tinggi.



Gambar 3-53 Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko kekeringan di Kota Cimahi
(Sumber: InaRISK BNPB)

3.3.7.3 Tanah Longsor

Potensi bahaya tanah longsor hanya dapat terjadi di sebagian wilayah Kota Cimahi. Indeks tanah longsor yang dapat dilihat pada **Gambar 3-54(a)**, menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi bahaya tanah longsor pada kelas tinggi hingga rendah pada sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat yaitu di Kecamatan Cimahi utara yaitu Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Padasuka, dan Kecamatan Cimahi Selatan Cipageran dan Leuwigajah. Pada lokasi yang sama, digambarkan nilai indeks kerentanan tanah longsor (**Gambar 3-54(b)**), yang memiliki nilai indeks kerentanan tinggi hingga rendah.

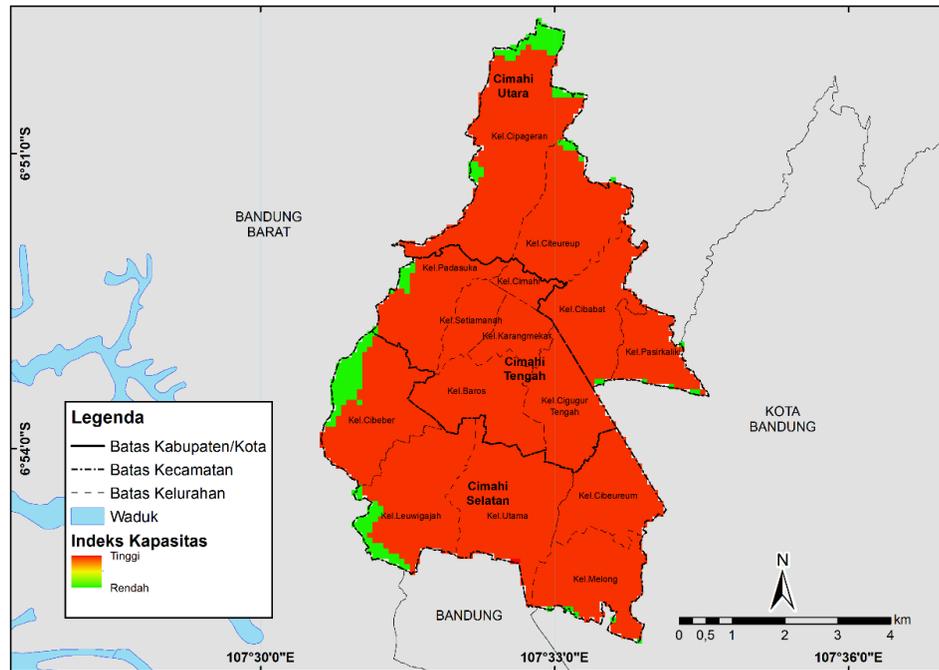


Gambar 3-54 Peta Indeks (a) bahaya; (b) kerentanan; dan (c) risiko Tanah Longsor di Kota Cimahi
(Sumber: InaRISK BNPB)

3.3.7.4 Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Indeks jasa ekosistem mitigasi bencana adalah salah satu hal yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas adaptasi suatu wilayah dalam menghadapi bencana. Kapasitas adaptasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk berubah, dalam hal ini kemampuan atau potensi suatu sistem untuk menyesuaikan dengan kerusakan, mengambil keuntungan dari suatu kesempatan, dan merespon suatu konsekuensi (IPCC, 2007). Jasa ekosistem mitigasi bencana mengindikasikan adanya infrastruktur dari alam untuk melindungi dan mencegah terjadinya bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai IJE yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam pada wilayah tersebut mampu menjadi pelindung alami dari suatu bencana, dan sebaliknya.

Adaptasi merupakan proses, aksi, atau luaran dalam suatu sistem untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi, mengelola, atau menyesuaikan terhadap perubahan kondisi, tekanan, bahaya, risiko atau kesempatan (Smit & Wandel, 2006). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BNPB (2016), Kota Cimahi memiliki indeks kapasitas adaptasi yang tinggi (**Gambar 3-55**). Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi bencana di Kota Cimahi, maka Kota Cimahi dapat dengan cepat melakukan penyesuaian dan berusaha untuk kembali pada keadaan semula, sebelum terjadi bencana. Mitigasi bencana merupakan indikasi adanya infrastruktur yang terbentuk dari alam untuk melindungi dan mencegah beberapa bencana, seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, dan longsor. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi alam di wilayah tersebut mampu menjadi pelindung terhadap bencana, dan sebaliknya.

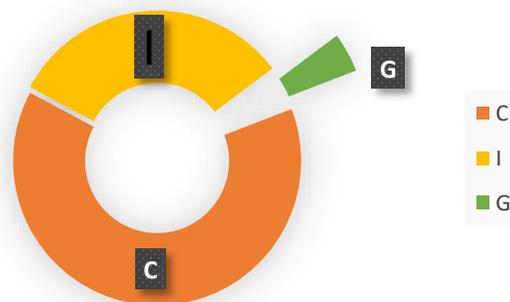


Gambar 3-55 Peta Indeks Kapasitas Daerah Kota Cimahi
(Sumber: InaRISK BNPB, 2019)

3.4 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan Kota Cimahi diidentifikasi menggunakan *Keynesian Model*. Dalam konsep *Keynesian Model*, total pendapatan (Y) sama dengan jumlah pengeluaran. Pengeluaran tersebut dihitung berdasarkan 4 komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan selisih ekspor dan impor (X-M). Komponen Y menggunakan nilai PDRB Kota Cimahi sebagai total pendapatan (*income*). Rumus untuk menghitung PDRB tersebut adalah sebagai berikut.

$$PDRB = C + I + G + (X - M)$$



Gambar 3-56 Proporsi Komponen PDRB Kota Cimahi Tahun 2018

Berdasarkan grafik proporsi komponen PDRB Kota Cimahi tahun 2018, proporsi terbesar dalam PDRB Kota Cimahi adalah komponen konsumsi (C), yakni sebesar 64%. Sedangkan komponen terkecil dalam proporsi tersebut yaitu pengeluaran pemerintah (G) sebesar 4%. Berikut merupakan rincian PDRB Kota Cimahi beserta komponennya dan proyeksinya hingga tahun 2030.

Tabel 3-19 Proyeksi PDRB Kota Cimahi dan Komponennya Hingga Tahun 2030

Tahun	Y (juta rupiah)	C (juta rupiah)	I (juta rupiah)	G (juta rupiah)	X-M (juta rupiah)
2018	20,864,470.56	15,356,090.72	7,705,744.37	1,064,456.52	-3,261,821.06
2019	21,856,484.72	15,937,391.81	8,022,948.58	1,085,509.01	-3,189,364.68
2020	22,848,498.89	16,518,692.90	8,340,152.79	1,106,561.51	-3,116,908.31
2021	23,840,513.05	17,099,993.99	8,657,357.00	1,127,614.00	-3,044,451.93
2022	24,832,527.21	17,681,295.07	8,974,561.20	1,148,666.49	-2,971,995.56
2023	25,824,541.37	18,262,596.16	9,291,765.41	1,169,718.98	-2,899,539.18
2024	26,816,555.53	18,843,897.25	9,608,969.62	1,190,771.47	-2,827,082.81
2025	27,808,569.69	19,425,198.33	9,926,173.83	1,211,823.96	-2,754,626.43
2026	28,800,583.85	20,006,499.42	10,243,378.03	1,232,876.46	-2,682,170.06
2027	29,792,598.02	20,587,800.51	10,560,582.24	1,253,928.95	-2,609,713.68
2028	30,784,612.18	21,169,101.60	10,877,786.45	1,274,981.44	-2,537,257.30
2029	31,776,626.34	21,750,402.68	11,194,990.65	1,296,033.93	-2,464,800.93
2030	32,768,640.50	22,331,703.77	11,512,194.86	1,317,086.42	-2,392,344.55

Berdasarkan tabel proyeksi PDRB Kota Cimahi dan komponennya hingga tahun 2030, PDRB Kota Cimahi tahun 2018 sebesar Rp 20.864.470.560.000. Sehingga agar PDRB tersebut tercapai, maka kontribusi anggaran non pemerintah yang harus diprogramkan sebesar Rp 7.705.744.370.000. Total anggaran non pemerintah tersebut berada pada komponen investasi dalam rumus perhitungan PDRB $\{ I = PDRB - C - G - (X - M) \}$. Proyeksi PDRB Kota Cimahi Tahun 2030 sebesar Rp32.768.640.000.000 dengan asumsi pertumbuhan linear, maka kontribusi non pemerintah tahun 2030 diperkirakan sebesar Rp Rp. 11.512.194.000.000 (35%). Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai komponen pengeluaran pemerintah (G) di Kota Cimahi.

Jika dilihat dari sisi makro ekonomi kota, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi relatif stabil pada kisaran 5-5,5. Nilai pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi berada pada angka yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kota Cimahi relatif terus berkembang.

Apabila dibandingkan dengan kondisi ketimpangan melalui indeks gini, tingkat ketimpangan di Kota Cimahi termasuk ke dalam kelas sedang. Indeks gini Kota Cimahi berada di angka 3,6. Kelas sedang dari aspek ketimpangan ekonomi berarti kondisi ketimpangan Cimahi tidak condong ke arah pemerataan sempurna namun juga tidak condong ke dominansi ekonomi oleh satu pihak (tidak merata sempurna). Tingkat indeks gini di Kota Cimahi masih harus diturunkan. Apabila mengacu pada target RPJMN tahun 2019, indeks gini Kota Cimahi masih memiliki selisih target sebesar 0,06%. Apabila mengikuti Teori Kuznet, pertumbuhan ekonomi yang tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan (kenaikan koefisien gini) akan dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi Kota mampu melampaui angka 6,5%

3.4.1 Kinerja Keuangan Kota Cimahi Tahun 2012-2017

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 mengubah pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tetap mengatur aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja pencapaian pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah serta struktur dan akurasi belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Pada bagian ini, kinerja keuangan Kota Cimahi akan dibahas berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD Kota Cimahi dan neraca daerah.

3.4.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Cimahi

Dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, data yang dianalisa mengacu pada kepada kinerja Pelaksanaan APBD Kota Cimahi sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, sebagai landasan (*baseline*) dan penetapan arah pengembangan (*trend*) pengelolaan keuangan daerah lima tahun ke depan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Tabel 3-20 Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	872.552.563.936,00	975.350.197.043,09	1.117.121.948.297,56	1.186.804.131.668,44	1.219.010.271.220,34
1,1	Pendapatan Asli Daerah	144.540.602.338,00	191.599.456.904,09	227.949.120.180,56	268.816.074.332,44	286.065.226.486,34
1.1.1	Pajak Daerah	63.753.989.389,00	91.644.684.568,00	91.795.256.385,00	112.124.306.126,00	112.060.908.223,00
1.1.2	Retribusi Daerah	9.229.402.032,00	10.226.084.489,00	12.317.132.901,00	9.865.337.459,00	10.085.859.119,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.351.501.520,00	7.120.225.840,00	8.122.400.000,00	7.446.400.000,00	8.819.200.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	65.205.709.397,00	82.608.462.007,09	115.714.330.894,56	139.380.030.747,44	155.099.259.144,34
1,2	Dana Perimbangan	541.183.364.963,00	570.893.914.266,00	625.410.201.264,00	628.232.060.766,00	783.781.903.794,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	73.406.987.963,00	56.075.572.266,00	61.103.333.264,00	45.907.112.766,00	68.092.972.794,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	440.860.307.000,00	489.174.792.000,00	537.371.615.000,00	548.703.908.000,00	586.582.418.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.916.070.000,00	25.643.550.000,00	26.935.253.000,00	33.621.040.000,00	129.106.513.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	186.828.596.635,00	212.856.825.873,00	263.762.626.853,00	289.755.996.570,00	149.163.140.940,00
1.3.1	Hibah					2.444.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	49.978.422.754,00	78.724.546.055,00	90.980.991.590,00	103.608.830.930,00	107.318.950.820,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	81.110.429.000,00	114.336.010.000,00	141.501.002.000,00	146.009.580.000,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	54.216.029.168,00	17.576.334.315,00	28.398.507.790,00	36.433.091.640,00	34.400.190.120,00
1.3.6	Dana Alokasi Cukai	1.523.715.713,00	2.219.935.503,00	2.882.125.473,00	3.704.494.000,00	
1.3.7	Dana Insentif Daerah					5.000.000.000,00

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1.3.9	Dana Pengembalian dari Pusat					
	BELANJA (Rencana)		1.090.405.761.121,10	1.282.252.417.802,86	1.411.339.250.907,86	1.670.183.881.701,70
	BELANJA	833.411.877.047,00	922.343.621.547,00	1.042.608.970.972,00	1.074.961.450.668,00	1.358.761.627.001,00
			168.062.139.574,10	239.643.446.830,86	336.377.800.239,86	311.422.254.700,70
	Banding Blj		(18,22)	(22,98)	(31,29)	(22,92)
A	Belanja Tidak Langsung	456.188.340.476,00	491.918.784.507,00	524.447.426.206,00	526.116.891.003,00	607.627.563.859,00
1	Belanja Pegawai	419.231.811.376,00	468.117.089.185,00	512.129.234.945,00	522.500.128.253,00	553.346.545.361,00
2	Belanja Bunga	1.113.034.255,00	901.181.666,00	814.185.273,00	748.094.650,00	893.522.830,00
3	Belanja Subsidi					
4	Belanja Hibah	34.975.700.439,00	21.699.330.000,00	9.559.070.313,00	2.200.000.000,00	52.345.818.800,00
5	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	50.000.000,00	175.840.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil					
7	Belanja Bantuan Keuangan	781.833.656,00	781.833.656,00	733.672.675,00	618.668.100,00	723.393.018,00
8	Belanja Tidak Terduga	60.960.750,00	369.350.000,00	1.035.423.000,00		158.283.850,00
B	Belanja Langsung	377.223.536.571,00	430.424.837.040,00	518.161.544.766,00	548.844.559.665,00	751.134.063.142,00
1	Belanja Pegawai	72.608.278.603,00	85.729.394.837,00	79.365.866.807,00	79.014.364.196,00	95.107.639.784,00
2	Belanja Barang dan Jasa	192.770.220.766,00	223.962.477.736,00	287.349.176.601,00	289.047.103.053,00	380.857.789.689,00
3	Belanja Modal	111.845.037.202,00	120.732.964.467,00	151.446.501.358,00	180.783.092.416,00	275.168.633.669,00
	SURPLUS/DEFISIT	39.140.686.889,00	53.006.575.496,09	74.512.977.325,56	111.842.681.000,44	(139.751.355.780,66)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	69.054.335.874,22	101.524.712.963,61	152.373.929.801,31	226.705.454.887,26	346.012.066.667,31
3,1	Penerimaan Pembiayaan	71.232.108.218,22	108.233.360.399,61	154.492.950.821,31	227.694.153.357,26	346.867.574.887,31
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	71.232.108.218,22	108.233.360.399,61	154.492.950.821,31	226.925.244.765,26	338.548.135.887,31
3.1.4	Pinjaman Daerah				768.908.592,00	8.319.439.000,00
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	2.177.772.344,00	6.708.647.436,00	2.119.021.020,00	988.698.470,00	855.508.220,00
3.2.2	Penyertaan Modal		1.551.000.000,00	1.000.000.000,00		
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.177.772.344,00	5.157.647.436,00	1.119.021.020,00	988.698.470,00	855.508.220,00
	SILPA Tahun Berkenaan	108.195.022.763,22	154.531.288.459,70	226.886.907.126,87	338.548.135.887,70	206.260.710.886,65
	APBD	941.606.899.810,22	1.076.874.910.006,70	1.269.495.878.098,87	1.413.509.586.555,70	1.565.022.337.887,65

Sumber : BPKAD Kota Cimahi, tahun 2017, data diolah oleh Bappeda Kota Cimahi

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Cimahi selama kurun waktu 2012-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,69% per tahunnya. Walaupun demikian pertumbuhan Pendapatan Daerah ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Terdapat 3 komponen pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kontribusi komponen pendapatan daerah, Kota Cimahi sebagian besar masih disumbang dari Dana Perimbangan, yakni sebesar 59,9% dengan pertumbuhan nilai sebesar 9,18%. Posisi tertinggi

kedua yaitu dari PAD sebesar 20,70% dengan pertumbuhan sebesar 14,08%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 19,4% dengan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan.

Komponen terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 81,1% dengan pertumbuhan sebesar 5,6%. Sementara itu untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat pola yang terbalik dibandingkan dengan DAU. Walau DAK membentuk komponen yang lebih kecil sebesar 9,5%, akan tetapi kecenderungannya untuk tumbuh secara signifikan, sebesar 69,3% per tahunnya. Untuk Lain – lain Pendapatan yang sah sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, yaitu sebesar 45,2%.

Berdasarkan data realisasinya, PAD Kota Cimahi memberikan kontribusi sebesar 20,7% terhadap total pendapatan kota dan telah tumbuh sebesar 14% pertahunnya. Adapun komponen penyusun PAD tersebut yaitu:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Dari keempat komponen tersebut, komponen yang memberikan kontribusi terbesar bagi PAD Kota Cimahi berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, yakni sebesar 49,6% dengan pertumbuhan sebesar 17,98%. Jika besarnya kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dibandingkan dengan komponen sektor riil (retribusi, pajak dan kekayaan daerah) yang dipisahkan, maka teridentifikasi bahwa pertumbuhan PAD Kota Cimahi belum memaksimalkan potensi dari sektor riil. Komponen kedua terbesar yang menyumbang PAD adalah Pajak Daerah yaitu sebesar 42,38% dengan pertumbuhan cukup baik yaitu sebesar 13,08%. Akan tetapi, dengan kontribusi yang kecil sebesar 4,57%, angka realisasi retribusi mengalami perlambatan sebesar -0,59%.

2. Belanja Daerah

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Jika dibandingkan dengan pendapatan, belanja di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Belanja Kota Cimahi tersebut tumbuh sebesar 13,17% lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatannya yang hanya sebesar 7,69%. Komponen belanja di Kota Cimahi cenderung meningkat, sedangkan komponen pendapatannya cenderung menurun setiap tahunnya.

Belanja Tidak Langsung memberi kontribusi sebesar 48,75% terhadap total belanja kota dan tumbuh sebesar 6,43% per tahun. Sementara itu, komposisi Belanja Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung dengan proporsi sebesar 51,25% dan tumbuh sebesar 19,71%. Sebagian besar komponen pembentuk Belanja Tidak Langsung berasal dari Belanja Pegawai PNS sebesar 95,14%. Sedangkan kontribusi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung hanya sebesar 15,51%. Dengan diberlakukannya peraturan administrasi pengelolaan keuangan yang baru, maka nilai Belanja Pegawai pada Belanja Langsung akan berkurang.

Untuk Belanja Langsung, kontribusi Belanja Barang dan Jasa sebesar 51,8%, serta kontribusi Belanja Modal sebesar 32,74% dan tumbuh sebesar 27,44%. Besarnya komponen Belanja Barang dan Jasa disebabkan oleh pergeseran pos anggaran untuk narasumber yang dihitung sebagai belanja jasa sejak

tahun 2015. Untuk itu, perlu didorong oleh kontribusi belanja modal yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengadaan atau peremajaan aset dalam rangka tugas pelayanan publik.

Kinerja realisasi keuangan pada periode 2012-2017 menunjukkan adanya perbedaan data yang signifikan antara anggaran dengan realisasi. Perbedaan tersebut menunjukkan angka defisit pada anggaran murni, sehingga anggaran perubahan atau realisasi di akhir tahun masih mencerminkan serapan yang tidak maksimal. Walaupun telah dilakukan penyuntikan Dana Penyerahan Modal, pembiayaan pemerintah daerah yang hanya tumbuh sebesar 35,44% masih mengindikasikan belum meningkatnya kinerja Perusahaan Daerah Kota Cimahi (Perusda Kota Cimahi). Dalam RPJMD dapat dilakukan revitalisasi usaha Perusda agar dapat menjadi sumber penghasil utama PAD Kota Cimahi. Selain itu, walaupun defisit anggaran semakin turun, tetapi angka SILPA justru semakin meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,2%. Jika membandingkan angka realisasi belanja perubahan (melalui perubahan anggaran atau ABT) pada akhir tahun dengan angka yang direncanakan pada anggaran murni selama lima tahun terakhir selalu terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu selalu lebih kecil, yakni sebesar 23,85%. Angka ini memiliki korelasi dengan tren kenaikan SILPA sebesar 20,2%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat kegiatan yang tidak diserap dalam anggaran, tetapi kegiatan tersebut tetap dimasukkan sebagai SILPA.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD dengan kontribusi sebesar 46,8%. Pendapatan BLUD khususnya yang berasal dari Rumah Sakit Daerah Cibabat sebesar 36,72%, serta Pendapatan Kapitasi JKN menyumbang 5,64%. Jika angka Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Pendapatan BLUD dan Retribusi Pelayanan Kesehatan dijumlahkan, maka teridentifikasi bahwa peran sektor kesehatan, terutama Rumah Sakit Daerah Cibabat dan puskesmas-puskesmas di Kota Cimahi, telah memberikan rata-rata kontribusi hampir setengah dari total PAD. Rata-rata kontribusi BLUD terhadap total PAD tersebut sebesar 44,1% dengan kecenderungan kontribusi sebesar 5,6%. Pada tahun 2016-2017 sektor kesehatan ini teridentifikasi memberikan kontribusi sebesar 48-49% terhadap PAD Kota Cimahi.

Pendapatan Pajak Daerah memberikan kontribusi sebesar 44,9% per tahun dengan pertumbuhan sebesar 7,8%. Komponen terbesar Pajak daerah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar 25,77%. Sumbangan terbesar kedua berasal dari komponen Pajak Daerah. Pajak Daerah ini berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar 13,6%. Secara umum, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame hanya menyumbang 4,02% terhadap PAD Kota Cimahi dengan tingkat pertumbuhan 16,66%.

Pelayanan pemerintah dapat terlihat dari besar dan pertumbuhan angka realisasi sumber PAD berupa Retribusi Daerah. Kontribusi Retribusi masih sebesar 4,6% dengan kecenderungan kontribusi menurun sebesar 0,14%. Sedangkan pelayanan dari sektor kesehatan menduduki peringkat tertinggi yaitu sebesar 1,8% per tahun nya. Jika data keuangan tersebut dibandingkan dengan data capaian makro ekonomi melalui angka PDRB sektoral, maka kontribusi sektor perdagangan dan jasa teridentifikasi sebesar 6,4%. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 18% per tahun ini belum diikuti pencapaian realisasi Retribusi pasar sebesar 0,11%, bahkan kontribusinya pun terus mengalami penurunan sebesar 1,15%. Sehingga teridentifikasi bahwa besarnya kontribusi sektor perdagangan di Kota Cimahi bukan berasal dari pasar tradisional tetapi dari pasar modern, serta pengadaan barang/jasa sebagian besar masih bersumber dari luar Kota Cimahi.

3.4.1.2 Neraca Daerah

Subbab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perkembangan neraca daerah Kota Cimahi, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Tabel 3-21 Rasio Likuiditas

Tahun	Current Ratio	Quick Ratio
2012	14,15	13,14
2013	33,97	32,70
2014	47,75	46,13
2015	28,07	27,41
2016	17,84	16,99
Rata-rata	28,36	27,27

Sumber : BPKAD Kota Cimahi 2017

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan/entitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Secara umum untuk menghitung Rasio Likuiditas dilakukan dengan menghitung current ratio dan quick ratio. Nilai *current* rasio Kota Cimahi adalah setiap Rp.1 utang lancar dijamin oleh Rp. 28,36 harta lancar atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang lancar adalah 28,36 : 1.

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Nilai *quick ratio* adalah sebesar 27,27 yang berarti keadaannya sangat baik karena kota dapat membayar hutang walaupun sudah dikurangi persediaan.

Ratio Solvabilitas adalah kemampuan sebuah entitas organisasi (pemerintah/ perusahaan) untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan/ entitas perekonomian dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.

Tabel 3-22 Ratio Solvabilitas

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
<i>Total debt to equity ratio</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,012
<i>Total Debt to Total Asset Ratio</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,011

Sumber : BPKAD Kota Cimahi 2017

Secara umum besarnya nilai rasio solvabilitas baik menggunakan Total debt to equity ratio maupun *Total debt to total asset ratio* cenderung sama yaitu sebesar 0,012 dan 0,011 atau 1,1%, hal ini menunjukkan Kota Cimahi baru bisa menutupi hutang sebesar 0,011 dari total nilai asetnya.

Debt Ratio menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Secara umum besarnya nilai kewajiban hutang masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai aset kota dengan kecenderungan yang semakin besar dengan rata-rata sebesar 0,62%.

Tabel 3-23 Debt Ratio

Tahun	Rasio
2012	0,66
2013	0,50
2014	0,41
2015	0,70
2016	0,85
Rata-rata	0,62

Sumber : BPKAD Kota Cimahi 2017

Bila dilihat dari rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, nilai Aset terus mengalami penurunan yaitu rata-rata sebesar 1,07% per tahun nya. Dari komponennya, Aset Lancar Kota Cimahi tumbuh sangat cepat yaitu sebesar 26,25%. Hal ini berbanding lurus dengan nilai Aset Tetap yang mengalami penurunan sebesar 0,67%. Bahkan nilai Investasi Jangka Panjang turun dengan sangat signifikan yaitu sebesar 25,14%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai Kewajiban maka pertumbuhan nilai Aset Kota yaitu sebesar 13,63%. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja pengelolaan aset, termasuk dalam pengelolaan aset investasi jangka panjang dan penyusunan strategi agar aset Kota Cimahi memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan daerah, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi kota.

Secara rata-rata nilai Aset Lancar memberikan kontribusi sebesar 15,58% dengan nilai pertumbuhan 26,25% berasal dari Aset lancar Berupa Uang Kas. Jika dibandingkan dengan Aset Lancar atau aset jangka pendek yang tumbuh sangat cepat, nilai investasi jangka panjang Pemerintah daerah Kota Cimahi justru cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 25,14%. Menurunnya nilai investasi jangka panjang sangat berkaitan dengan profesionalisme organisasi pengelolaan investasi publik. Perlu dilakukan perbaikan tata kelola prioritas investasi pemerintah daerah dan penataan lembaga pengelolaan investasi jangka panjang. Pola yang sama juga terjadi pada Aset Tetap Kota yang turun sebesar 0,67%. Aset tetap merupakan komponen terbesar pembentuk Aset yaitu sebesar 80,83%.

Berdasarkan jenis Aset Tetap Aset berupa Tanah merupakan komponen terbesar dari total Aset Tetap yaitu sebesar 36,52% atau sebesar 29,3% dari total Aset Keseluruhan. Besarnya nilai Aset Tanah Pemerintah Kota Cimahi telah tumbuh sebesar 12,17% per tahun nya. Adapun komponen terbesar kedua pembentukan Aset Tetap adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 27,50% terhadap nilai Aset Tetap atau 21,83% dari Seluruh Total Aset Kota. Akan tetapi, komponen Aset Tetap tersebut mengalami kecenderungan yang negatif sebesar 7,49%. Kecenderungan menurunnya nilai aset mengindikasikan sudah semakin membaiknya kualitas infrastuktur jalan ataupun mengindikasikan tekanan ruang kota. Pada posisi ketiga, komposisi Aset Tetap berasal dari gedung dan bangunan dengan kontribusi sebesar 26,34% dari Total Aset Tetap atau sebesar 21,04% dari seluruh total Aset Kota. Pertumbuhan nilai Gedung dan Bangunan tersebut tergolong positif. Namun apabila aset daerah tersebut tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka dapat menjadi *cost center*.

Nilai kewajiban Kota Cimahi telah tumbuh hampir 2,5 kali besarnya pertumbuhan nilai aset yaitu sebesar 13,63%. Kewajiban ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Kewajiban Jangka Pendek dengan kontribusi sebesar 53,23% dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar 46,37%. Pertumbuhan nilai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang tidak terlalu berbeda secara signifikan. Masing-masing telah tumbuh sebesar 17,35% dan 17,38%.

Tabel 3-24 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Cimahi

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
01.00	ASET	5,82
01.01	ASET LANCAR	26,25
01.01.01	Kas	26,80
01.01.02	Piutang	77,93
01.01.03	Persediaan	9,72
	Biaya Dibayar Dimuka	(31,31)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	(25,14)
	Investasi Non permanen	(47,29)
	Dana Bergulir	(30,98)
	Investasi Permanen	(24,91)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	(24,91)
	Pinjaman Jangka Panjang	
01.02	ASET TETAP	6,54
01.02.01	Tanah	12,17

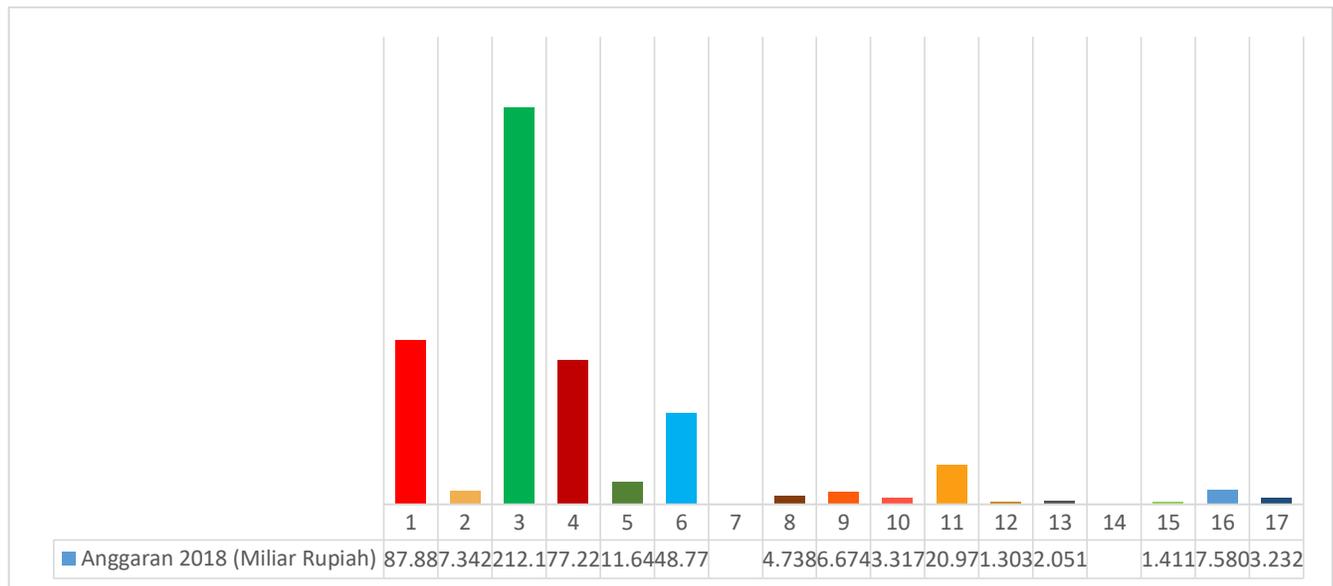
No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
		(%)
01.02.02	Peralatan dan mesin	13,83
01.02.03	Gedung dan bangunan	9,24
01.02.04	Jalan, irigasi, dan jaringan	18,20
01.02.05	Aset tetap lainnya	33,35
01.02.06	Konstruksi dalam pengerjaan	(27,42)
01.02.07	Akumulasi Penyusutan	0,28
01.03	ASET LAINNYA	3,32
01.03.01	Tagihan penjualan angsuran	
01.03.02	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	
01.03.03	Kemitraan dengan pihak kedua	
	Kemitraan dengan pihak ketiga	
01.03.04	Aset tak berwujud	63,34
	Akumulasi Amortisas	
00.03.05	Aset Rusak Berat	(13,48)
01.03.06	Built, Operate, and Transfer - B O	(33,33)
	Aset Lain-Lain	
	JUMLAH ASET DAERAH	5,22
02.00	KEWAJIBAN	13,63
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17,35
02.01.01	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	(22,92)
02.01.02	Bagian Lancar Utang Pengelolaan Persampahan	
	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	-
02.01.03	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Persampahan	
02.01.04	Bagian Lancar Utang Bunga Utang Pemerintah Pusat	(0,98)
	Pendapatan Diterima Dimuka	
	Utang Belanja	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	Utang Lain-lain	(42,96)
02.01	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	17,38
02.01.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	17,38
02.01.02	Utang Jangka Panjang - Utang Persampahan	
03.00	EKUITAS DANA	6,75
03.01	EKUITAS DANA LANCAR	11,90
03.01.01	SILPA	(3,45)
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	1.944,82
03.01.02	Cadangan piutang	72,34
03.01.03	Cadangan persediaan	(26,83)
03.01.04	Cadangan Biaya Dibayar Dimuka	(32,65)
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	(42,14)
03.02	EKUITAS DANA INVESTASI	8,23
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
03.02.01	Diinvestasikan dalam aset tetap	(27,10)
03.02.02	Diinvestasikan dalam aset lainnya	(18,72)
03.02.03	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Panjang	(39,14)
	EKUITAS	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	35,21

Sumber : BPKAD Kota Cimahi 2017

3.4.2 Kinerja Keuangan Daerah Kota Cimahi dalam Pencapaian Indikator TPB

Pada bagian ini dijelaskan mengenai ketercapaian keuangan daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan indikator TPB. Dalam hal ini, anggaran yang dapat dilihat untuk mencapai indikator TPB adalah penggunaan anggaran pada belanja langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah yang merupakan *tools* untuk mencapai indikator TPB. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi anggaran belanja langsung Kota Cimahi yang digunakan untuk melaksanakan indikator TPB. Tabel ini merupakan

rekapitulasi dari Tabel D-2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dan total dari anggaran yang digunakan untuk melaksanakan indikator TPB untuk seluruh OPD di Kota Cimahi.



Gambar 3-57 Alokasi Anggaran per TPB di Kota Cimahi Tahun 2018

Berdasarkan anggaran tahun 2018, Kota Cimahi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 388.799.153.808,00 atau sebesar 37,22% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.044.552.791.294 yang tersebar di seluruh OPD. Alokasi anggaran TPB terbesar adalah untuk pelaksanaan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, yaitu sebesar Rp. 212.144.140.125,00 atau sebesar 54,55% dari anggaran TPB, diikuti dengan anggaran pelaksanaan TPB 1 Tanpa Kemiskinan sebesar Rp. 87.882.868.811,00 atau sebesar 22,66% dari anggaran TPB. Adapun alokasi anggaran TPB terkecil adalah untuk pelaksanaan TPB 12 Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab, yaitu sebesar Rp. 1.303.728.000 atau sebesar 0,36% dari anggaran TPB, diikuti Rp. 1.411.581.000 atau sebesar 0,39% dari anggaran TPB.

3.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing sebuah bangsa dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas daya pembangunan sebuah bangsa diantaranya adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan wilayah. Indikator lain yang dapat digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks kemampuan daya beli, indeks pendidikan dan indeks kesehatan.

Selain kedua indikator di atas, dalam era globalisasi ini dalam rangka reformasi daya saing, untuk mengukur capaian peningkatan daya saing, *The World Economic Forum* setiap tahunnya telah menerbitkan sebuah indeks yang disebut Indeks Daya Saing. Indeks ini memiliki 114 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 12 pilar. Salah satu dari indikator tersebut adalah inovasi dan faktor-faktor kemajuan usaha (*business sophistication factors*).

Inovasi biasanya berkembang dalam kluster-kluster industri karena di dalam kluster industri ini lah akan terjadi penyebaran dan penyerapan pengetahuan dan inovasi (*knowledge spillover and innovation*

difusion). Kota Cimahi dari sejak tahun 2012 mencoba mengarahkan pembangunan ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan membangun sentra. Pada sentra-sentra inilah inovasi akan tumbuh dan menghasilkan produk-produk unggulan yang inovatif. Jika saja pembangunan sentra-sentra ataupun klaster-klaster ini dipadukan dengan pembangunan sektor lainnya seperti fisik infrastruktur/ lingkungan hidup, pendidikan (formal/ informal), sosial, budaya dan kesehatan maka pembangunan sentra-sentra ini akan terjadi dengan lebih cepat dan lebih berkesinambungan. Kolaborasi antara banyak sektor (*stakeholder*) dalam proses pembangunan klaster/ sentra ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan SIDa, Kota Cimahi membangun Gedung BITC (*Baros Information Technology Creative*). Gedung ini diharapkan dapat memicu bangkitnya aktifitas ekonomi kota khususnya klaster industri telematika dan animasi. Strategi pengembangan klaster industri telematika dan animasi berorientasi kepada lahirnya pelaku usaha-pelaku usaha baru (*start upfirms*), serta komunitas- komunitas wanita, anak muda dan pengguna internet (*women, youth, netizen*). Pengembangan kawasan BITC juga diharapkan dapat menjadi brand image bagi identitas lokal kota. Lahirnya pelaku usaha - pelaku usaha baru ini akan menjadi cermin dari daya tarik investasi di Kota Cimahi. Khusus untuk klaster industri telematika dan animasi, sejak tahun 2011 pembinaan *start up-start upfirms* dilakukan melalui kegiatan inkubasi industri dan pemberian kemudahan perizinan berusahadan sesuai dengan program Nawa Cita Presiden RI tahun 2014 - 2019 Kota Cimahi akan mengembangkan sebuah Taman Teknologi (*Technopark*). Keberadaan Cimahi Technopark diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan inovasi melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang tepat guna (bukan berorientasi kepada penemuan ilmiah baru).

3.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

3.5.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Cimahi periode 2012 - 2016 dapat tetap tumbuh di atas 5 persen. Setelah selama 4 (empat) tahun terakhir Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi mengalami perlambatan dari 6,24% di tahun 2012 menjadi 5,43% di tahun 2015, pada tahun 2016 mulai mengalami penguatan sebesar 0,19 poin menjadi 5,62%.

Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori informasi dan komunikasi yang selalu tumbuh di atas 10 persen setiap tahunnya dan pada kategori seluruh jasa. Sedangkan untuk kategori ekonomi yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali sektor pertanian. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

3.5.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Berdasarkan data BPS Kota Cimahi selama periode Tahun 2011-2015, pengeluaran perkapita rumah tangga di Kota Cimahi secara nominal mengalami peningkatan yang menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat Kota Cimahi semakin meningkat. Hal ini terlihat dari nilai pengeluaran rata-rata per kapita sebulan yang mencapai Rp 1.153.348,- pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 10,49% dari tahun sebelumnya. Persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 42,15% dan pengeluaran bukan makanan sebesar 57,85%.

3.5.1.3 *Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita*

Pola konsumsi penduduk non pangan Kota Cimahi per kapita per bulan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung terus meningkat dan selalu lebih besar daripada konsumsi pangan yaitu sebesar 57,85 persen pada tahun 2015. Selain persentasenya lebih besar daripada konsumsi pangan, pertumbuhannya pun lebih besar yaitu 10,92% untuk periode tahun 2014 - 2015. Pola konsumsi penduduk Kota Cimahi Tahun 2015 pada konsumsi non pangan menunjukkan bahwa konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga adalah yang terbesar, yaitu mencapai 33,34%, dalam hal ini termasuk perkiraan rumah milik sendiri.

3.5.2 **Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur**

Infrastruktur wilayah di Kota Cimahi melayani perhubungan darat. Peranan perhubungan darat sangat dominan terutama untuk menyalurkan produk-produk industri ke berbagai daerah. Selain itu, perhubungan darat sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk menunjang perhubungan darat ini keberadaan terminal sangat penting. Terminal yang ada di Kota Cimahi merupakan terminal tipe C yang sedikitnya melayani 25 trayek, yang terdiri dari trayek internal dalam Kota Cimahi yaitu sebanyak 3 (tiga) trayek yang beroperasi, dan selebihnya adalah trayek yang melintas serta trayek yang hanya asal dan tujuannya di Kota Cimahi. Sedangkan kondisi perparkiran di Kota Cimahi masih didominasi dengan parkir di badan jalan (*onstreet*) dengan pengelolaan yang dikerjasamakan dengan institusi non pemerintah.

3.5.2.1 *Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan*

Jaringan jalan di Kota Cimahi sepanjang 118,873 Km, terdiri dari jalan Nasional 4,320 Km, Jalan Provinsi 9,360 Km, jalan kota 105,193 Km. Tingkat kemantapan jalan sampai tahun 2016 adalah sebesar 95,17 persen (menunjukkan kualitas jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional eksisting yang berada pada kondisi baik dan sedang), sisanya sebesar 4,83 persen berada pada kondisi rusak dan rusak berat. (Sumber : Data leger Jalan, DPU 2016).

Pola jaringan jalan di Kota Cimahi membentuk pola tulang ikan (*fishbone*), karena memiliki jaringan jalan yang memusat ke Jalan Raya Cimahi/ Nasional Kota Cimahi sebagai jalan utama. Jalan ini harus menampung muara pergerakan internal/ lokal dan juga pergerakan menerus. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan beban penggunaan jalan di jalan protokol tersebut terutama pada jam puncak.

3.5.2.2 *Ketaatan terhadap RTRW*

Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, karena jika dilihat dari peta eksisting maka rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kota Cimahi dibuat cenderung mengikuti kondisi eksisting. Pelanggaran umumnya hanya terjadi pada kawasan lindung seperti kawasan resapan air dan sempadan sungai.

3.5.2.3 *Luas Wilayah Industri*

Kawasan industri adalah merupakan salah satu kawasan yang menyerap tenaga kerja yang besar di Kota Cimahi. Terbukti sumbangan terhadap PDRB yang terbesar adalah pada sektor industri. Dimasa yang akan datang peranan dan keberadaan sektor industri perlu dipertahankan. Sejalan dengan krisis ekonomi dan krisis global, industri di Kota Cimahi juga terganggu dimana sejak krisis ekonomi kontribusi

sektor industri terhadap prekonomian Kota Cimahi terus menurun. Kelemahan industri manufaktur yang berada di Kota Cimahi adalah menggunakan bahan baku yang bukan berasal dari Kota Cimahi.

Faktor lain yang mempengaruhi kemunduran sektor industri besar di Kota Cimahi adalah sumber daya pendukung industri terus mengalami penurunan, seperti ketersediaan air tanah, tuntutan upah untuk ditingkatkan, keterbatasan energi. Sehingga produksi harus dibatasi, dan produksi tidak kompetitif. Upaya mendorong sektor industri besar kembali pada masa perkembangan dengan laju pertumbuhan positif, diperlukan langkah kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang diharapkan, diantaranya :

- a. Industri yang dikembangkan dimasa yang akan datang adalah industri dengan pemanfaatan air yang terbatas
- b. Industri yang dikembangkan adalah industri yang mendukung perwujudan Kota Cimahi sebagai Kota *Cyber*
- c. Peningkatan pelayanan energi dan sumberdaya air untuk kawasan industri

3.5.2.4 Luas Wilayah Perkotaan

Luas lahan di Kota Cimahi yang terbatas memerlukan pengaturan dan sistem pembagian wilayah kota yang benar-benar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dan dapat dipergunakan dengan optimal untuk terlaksananya program pembangunan yang akan dijalankan, baik program yang bersifat perencanaan, pembangunan fisik ataupun program ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya.

Terkait dengan Kota Cimahi sebagai pendukung Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya *second home* akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya.

Struktur Ruang Kota Cimahi sendiri diarahkan untuk mewujudkan Kota Cimahi sebagai *Cyber City*, yaitu dengan mendorong kawasan Baros menjadi pusat primer sebagai upaya mengantisipasi terbatasnya daya dukung pusat kota dan untuk mendukung perkembangan yang pesat di Kota Cimahi, maka pelayanan utamanya dialihkan pada kawasan Baros. Di bagian utara Kota Cimahi adalah terlingkup pada Kawasan Bandung Utara (KBU), dimana yang merupakan kawasan konservasi (resapan air) dan rawan bencana alam (seperti longsor). Oleh karena itu, pada kawasan ini perlu dikendalikan perkembangannya, sehingga hanya dilayani oleh pusat tersier saja dan lebih banyak lagi memberikan disinsentif, yaitu dengan membatasi pelayanan sarana dan prasarana kota di kawasan ini.

Secara umum rencana struktur ruang Kota Cimahi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendorong kawasan Baros menjadi Pusat Primer;
- b. Kawasan pusat kota ditetapkan sebagai pusat sekunder;
- c. mendorong kawasan pusat sekunder di sekitar kawasan-kawasan perbatasan dan kawasan komuter antara Kota Cimahi dan Kota Bandung;
- d. Mengendalikan kawasan Utara Kota Cimahi yang masuk ke dalam kawasan Bandung Utara, sehingga pusat wilayah hanya dilayani oleh pusat tersier;
- e. Meningkatkan sistem jaringan jalan, yaitu jalan lingkar dalam, jalan lingkar luar, jalan poros utara - selatan dan jalan alternatif.

Adapun rencana penetapan pusat-pusat pelayanan di Kota Cimahi adalah yaitu sebagai berikut :

- a. Penentuan Pusat Pemerintahan, yang diarahkan di Jalan Cihanjuang Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- b. Penentuan Pusat Primer, yang diarahkan di Alun-Alun Kota Cimahi;

- c. Penentuan Pusat Kegiatan Baru Kota yang diarahkan di Kawasan Baros yang mencakup wilayah Kelurahan Baros, Kelurahan Utama, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Leuwigajah;
- d. Penetapan Pusat Sekunder yang diarahkan di masing-masing pusat Bagian Wilayah Kota (BWK).

Merujuk pada karakteristik wilayah dan untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan dan menyeimbangkan pembangunan serta pelaksanaan program pembangunan. Maka Kota Cimahi dapat dibagi kedalam 5 (lima) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP), antara lain :

- a. BWP A : Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Sebagian Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Cimahi;
- b. BWP B : Kelurahan Cibabat Dan Kelurahan Pasirkaliki;
- c. BWP C : Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibeureum, Sebagian Kelurahan Karang Mekar, Dan Sebagian Kelurahan Baros;
- d. BWP D : Kelurahan Utama Dan Kelurahan Melong; dan
- e. BWP E : Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, Sebagian Kelurahan Karang Mekar, Sebagian Kelurahan Baros, Kelurahan Cibeber Dan Kelurahan Leuwigajah.

Kawasan Staregis Industri meliputi Kelurahan Utama, sebagian Kelurahan Cigugur Tengah dan sebagian Kelurahan Melong. Sebaran kawasan industry kurang lebih 436 Ha.

3.5.3 Iklim Berinvestasi

3.5.3.1 Angka Kriminalitas

Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari kepolisian *resort* Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi. Ada enam titik rawan kriminalitas di Kota Cimahi, dimana semuanya berada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara.

Tabel 3-25 Lokasi Rawan Konflik di Kota Cimahi

No	Lokasi Titik Rawan Kriminalitas
1	Jalan Pesantren, Cimahi Utara
2	Jalan Sentral, Cimahi Utara
3	Jalan Permana, Cimahi Utara
4	Jalan Cipageran, Cimahi Utara
5	Jalan Setiamah, Cimahi Utara
6	Jalan Padasuka, Cimahi Utara

Sumber : Pemerintah Daerah Kota Cimahi, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih berpotensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminalitas. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesiapsiagaan dan pengawasan dari aparat keamanan Kota Cimahi, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi

berkembang di Kota Cimahi adalah konflik antar buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya.

3.5.3.2 Lama Proses Perijinan

Dalam rangka perkembangan iklim investasi di Kota Cimahi, maka dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Waktu penyelesaian izin ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi. BPMPTSP Kota Cimahi melayani 60 jenis izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya diperkenankan menarik tiga jenis izin, yakni izin mendirikan bangunan, izin trayek dan izin gangguan, sedangkan untuk izin-izin lainnya tidak dipungut biaya retribusi.

3.5.3.3 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Sektor pajak menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar untuk Kota Cimahi. Ada 9 (sembilan) jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Adapun rincian jenis pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3-26 Jenis Pajak Daerah Kota Cimahi

NO	JENIS PAJAK	URAIAN
1	Pajak Hotel	Hotel Melati Satu
		Hotel Bintang Dua
		Losmen /Rumah Penginapan /Pesanggrahan /Hoste /Rumah Kos
2	Pajak Restoran	Rumah Makan
		Katering
3	Pajak Hiburan	Tontonan Film/Bioskop
		Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
		Permainan Ketangkasan
		Kolam Renang
4	Pajak Reklame	Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ megatron
		Reklame Kain
		Reklame Melekat/Stiker
		Reklame Berjalan
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan PLN
		Pajak Non PLN/Gen Set
6	Pajak Parkir	Pajak Parkir
7	Pajak Air	Pajak Air
8	Pajak BPHTB	Pajak BPHTB
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Pajak PBB

3.5.3.4 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Pada kurun waktu 2013 - 2016, tren realisasi investasi mengalami fluktuasi. Belum optimalnya investasi disebabkan kurang kondusifitas iklim investasinya. Hingga saat ini terdapat 14 peraturan daerah yang mendukung iklim usaha, tetapi belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang investasi.

Selain itu, kurangnya kondusifitas iklim investasi disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA. Faktor determinan lain yang berpengaruh langsung adalah belum optimalnya investasi yang disebabkan oleh sulitnya proses perijinan investasi. Hambatan proses perijinan berkaitan dengan izin bangunan. Kebijakan tata ruang tentang proporsi bangunan untuk usaha menyebabkan kesulitan para investor mendapatkan IMB.

3.5.4 Sumber Daya Manusia

Penduduk yang dimiliki Kota Cimahi memiliki komposisi yang cukup baik, dimana sebagian besar penduduknya ada di usia produktif (usia kerja) dan sekitar dua pertiganya angkatan kerja. Jumlah penduduk yang memiliki keunggulan komparatif tentu ini merupakan sumber daya manusia yang baik dan potensi konsumen bagi para pelaku usaha kreatif.

3.5.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kota Cimahi termasuk kota yang memiliki angka TPAK yang sangat besar yang seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi, sesuai dengan arah prediksi dari bonus demografi. Peningkatan kuantitas tenaga kerja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Kota Cimahi salah satunya dapat terlihat dari latar belakang pendidikan pencari kerja. Menurut data pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan paling banyak memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA/ SMK, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3-27 Banyaknya Pencari Kerja di Kota Cimahi Tahun 2012-2017

Tahun	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan						Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	SI/S2	
2012	8	183	1,885	173	317	358	2,924
2013	2	274	2,193	12	194	318	2,993
2014	8	180	2,288	15	235	587	3,313
2015	17	143	2,208	138	1,478	1,491	5,475
2016	20	149	1,714	16	317	443	2,659
2017	6	110	1,705	20	172	244	2,257

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2017

Akan tetapi, kondisi yang diharapkan ternyata belum bisa terwujud karena kemungkinan adanya ketidaksesuaian (*non matching*) antara karakteristik angkatan kerja dengan karakteristik jenis pekerjaan yang ada. Latar belakang pendidikan saja belum menjadi syarat cukup untuk dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan dan keahlian yang bersertifikasi telah menjadi syarat penting bagi tenaga kerja untuk dapat memasuki pasar kerja. Kurangnya sinergi antara para pelaku industri seperti perusahaan, Apindo, Badan Latihan Kerja (BLK) mengenai kesesuaian kompetensi dan penyerapan langsung tenaga kerja yang telah siap pakai juga menjadi salah satu penyebab kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kota Cimahi.

4 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cimahi

Dalam mencapai tujuan pembangunan, ketergantungan antara manusia dan alam harus diperhatikan. Manusia hidup dan sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh alam dalam biosfer. Demikian pula, proses ekologis juga tidak dapat dijelaskan tanpa mempertimbangkan pengaruh manusia (Folke dkk., 2016). Pada **Gambar 4.1**, diilustrasikan bahwa kondisi lingkungan dalam biosfer merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, disertai dengan daya dukung lingkungan yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia. Kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia akan mendukung aktivitas manusia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan hidup manusia yang berkelanjutan.



Gambar 4. 1 Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB

(Sumber: Folke, dkk., 2016)

Kaitan antara aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Keempat pilar tersebut diuraikan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan untuk menjadi target

bagi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indikator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

Analisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi di Kota Cimahi saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai, dilakukan sebagai bentuk integrasi penilaian pencapaian target TPB dalam perumusan KRP. Analisis kesenjangan (*gap*) biasanya diawali dengan proses identifikasi isu-isu strategis. Kaitannya dengan TPB yang memiliki empat pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, serta hukum dan tata kelola kelembagaan, maka identifikasi isu-isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan empat pilar utama TPB tersebut. Pilar sosial terdiri dari TPB 1, 2, 3, 4, dan 5; pilar ekonomi terdiri dari TPB 7, 8, 9, 10, dan 17; pilar lingkungan terdiri dari TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan terdiri dari TPB 16. Tidak semua indikator TPB menjadi kewenangan di tingkat kota, seperti TPB 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta TPB 14 tentang Ekosistem Laut yang kewenangannya berada di tingkat provinsi. Maka, kedua TPB tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis capaian TPB di Kota Cimahi.

4.1 Kondisi Umum Capaian Target TPB

Di Indonesia, terdapat 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 TPB. Upaya pencapaian indikator TPB tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 183 indikator TPB yang relevan bagi Kota Cimahi. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kota Cimahi dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB). Rangkuman capaian indikator TPB di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 4-1**. Secara lebih lengkap, capaian setiap indikator TPB di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Lampiran C** dan rekap capaian per target TPB pada **Lampiran D**.

Tabel 4-1 Rangkuman Capaian TPB di Kota Cimahi

TPB	Telah mencapai target nasional		Belum mencapai target nasional		Belum dilaksanakan		Tidak ada data		Jumlah per-TPB
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	
1. Tanpa Kemiskinan	8	19	13	4	3	1	1	1	25
2. Tanpa Kelaparan	6	10	3	1	0	0	2	0	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	27	9	1	0	0	4	3	31
4. Pendidikan Berkualitas	5	10	5	2	1	0	2	1	13
5. Kesenjangan Gender	4	7	5	1	1	0	1	3	11
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	5	6	7	1	0	1	0	12
7. Energi Bersih dan Terjangkau	Bukan Kewenangan Kota Cimahi								
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	5	9	3	0	0	3	6	14
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	5	4	0	0	0	2	2	7
10. Berkurangnya Kesenjangan	2	3	2	1	0	0	1	1	5
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	2	4	5	4	3	1	1	2	11
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	2	2	0	1	1	1	1	4
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	2	1	1	0	0	0	0	3
14. Ekosistem Lautan	Bukan Kewenangan Kota Cimahi								
15. Ekosistem Daratan	0	0	2	2	0	0	0	0	2
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	3	9	9	1	0	1	9	10	21
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	2	4	3	3	2	2	6	4	13
TOTAL	59	112	78	31	12	6	34	34	183

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Dari 183 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Cimahi, terdapat 81,42% indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan 18, 58% sisanya masih belum dapat diketahui capaiannya karena tidak tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, “belum dilaksanakan”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum dilaksanakan” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum dilaksanakan atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kota Cimahi. Kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data capaiannya.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

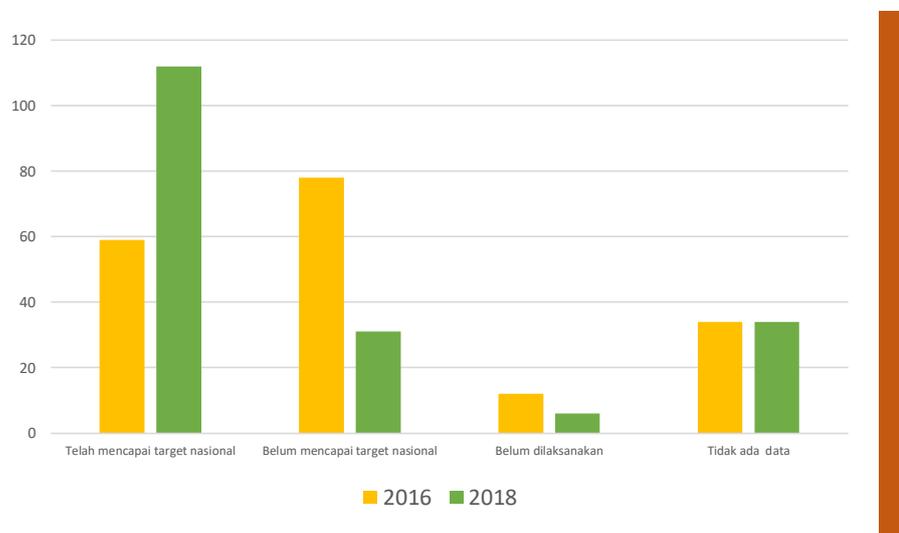
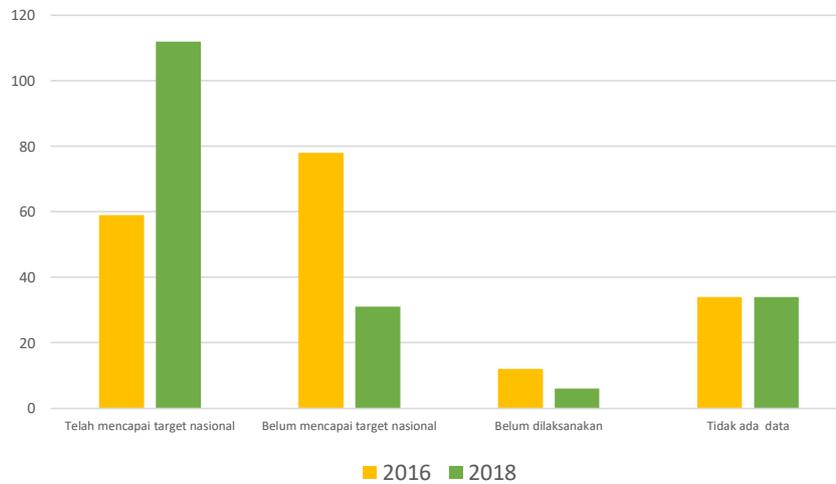
Terdapat 61,20% dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional pada tahun 2018, atau 75,17% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Kondisi ini lebih baik dari capaian tahun 2016, dimana hanya 32,24% dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional, atau 39,60% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Sedangkan indikator TPB yang belum mencapai target nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 16,94% dari 183 indikator TPB atau 20,80% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya. Kondisi ini juga lebih baik dari capaian tahun 2016, dimana terdapat 42,62% indikator dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang belum mencapai target nasional, atau 52,35% dari indikator yang tersedia datanya.

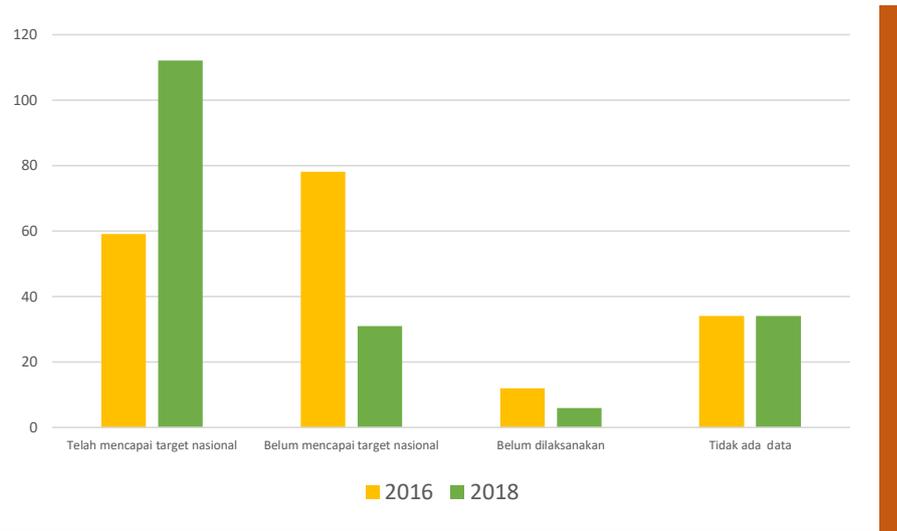
Sementara itu, indikator TPB yang belum dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 3,28% dari 183 indikator TPB atau 4,03% dari indikator TPB yang tersedia data capaiannya, lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dimana terdapat 6,56% dari 183 indikator TPB atau 8,05% dari indikator yang tersedia datanya.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022

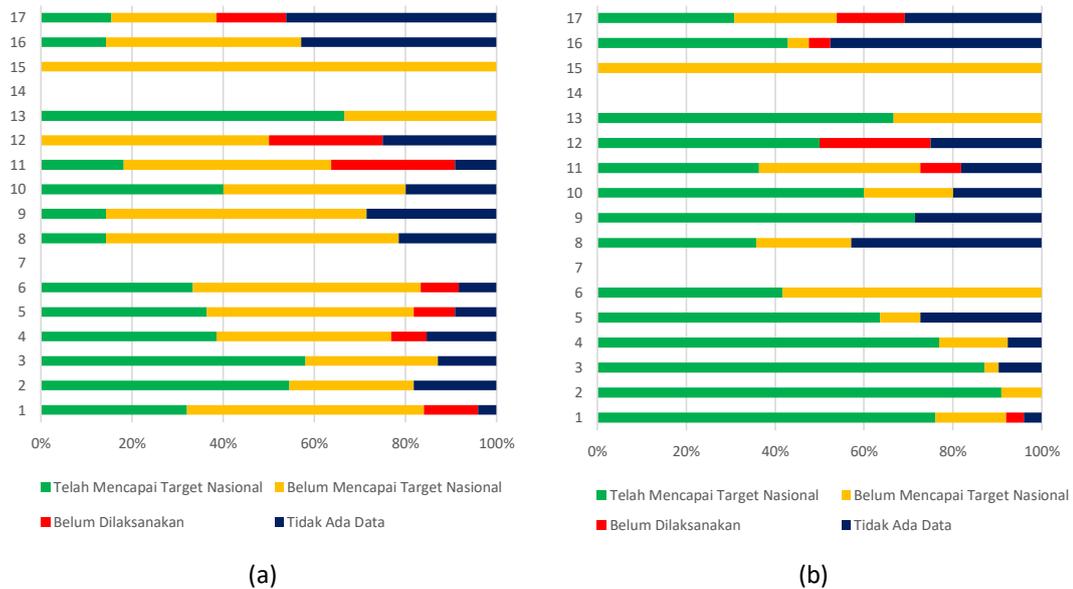
Adapun kondisi capaian indikator TPB tahun 2016 dan 2018 terhadap 183 indikator yang menjadi kewenangan Kota Cimahi dapat dilihat pada





Gambar 4. 2 Capaian Indikator TPB di Kota Cimahi terhadap Target Nasional
(Sumber: hasil analisis, 2020)

TPB 2 (Tanpa Kelaparan) memiliki persentase indikator TPB paling banyak yang telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 10 dari 11 indikator (90,91%); sebaliknya TPB 15 (Ekosistem Daratan) memiliki persentase indikator TPB paling sedikit yang telah mencapai target nasional, yaitu keseluruhan dari 2 indikator (0%). Ditinjau dari indikator yang belum mencapai target nasional, TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) memiliki jumlah indikator TPB paling banyak, yaitu sebanyak 7 indikator. Secara lebih lengkap, persentase capaian indikator setiap TPB di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 4.3**. Berdasarkan kondisi ini, terlihat bahwa TPB 6 berpotensi menjadi isu di Kota Cimahi.



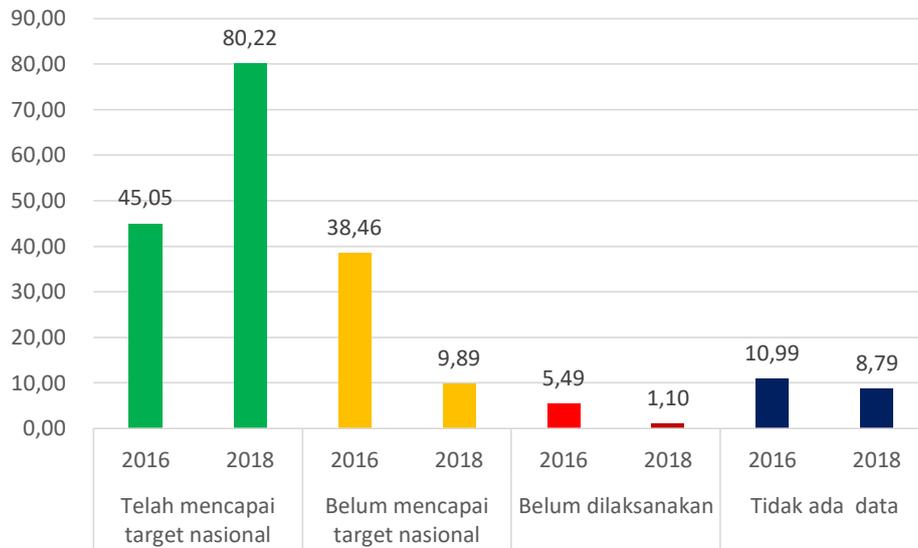
Gambar 4. 3 Persentase Capaian Indikator Setiap TPB di Kota Cimahi (a) Tahun 2017 (b) Tahun 2019

(Sumber: hasil analisis, 2020)

4.2 Capaian Target Indikator TPB berdasarkan Pilar

4.2.1. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

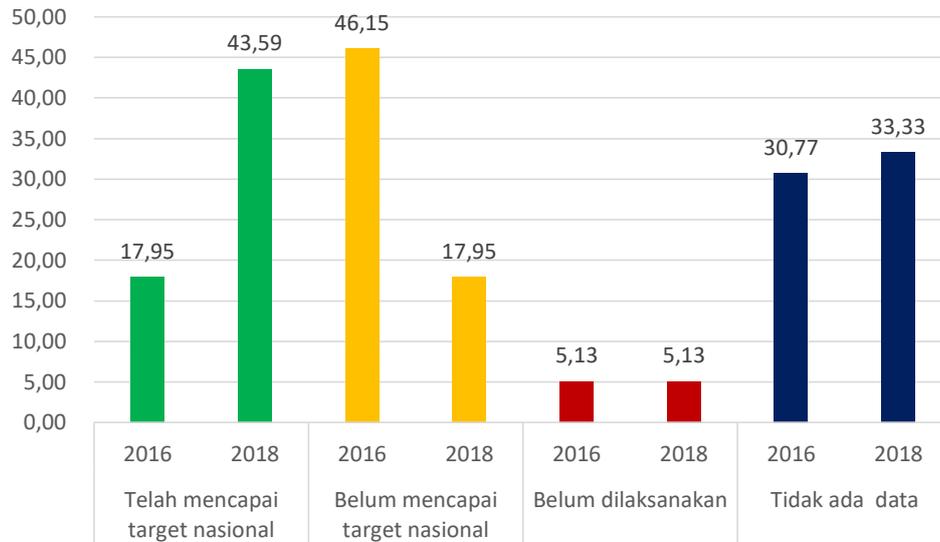
Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar sosial, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 91 indikator yang menjadi kewenangan Kota Cimahi. Persentase capaian indikator TPB pilar sosial di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 4-1**. Sebagian besar indikator TPB pilar sosial di Kota Cimahi telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 80,22%. Namun, masih terdapat 9,89% indikator TPB pilar sosial di Kota Cimahi yang belum mencapai target nasional, 1,10% yang belum dilaksanakan, dan 8,79% yang belum ada data. Indikator TPB pilar sosial yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan, dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan *gap*/permasalahan di Kota Cimahi.



Gambar 4-1 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Sosial di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

4.2.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

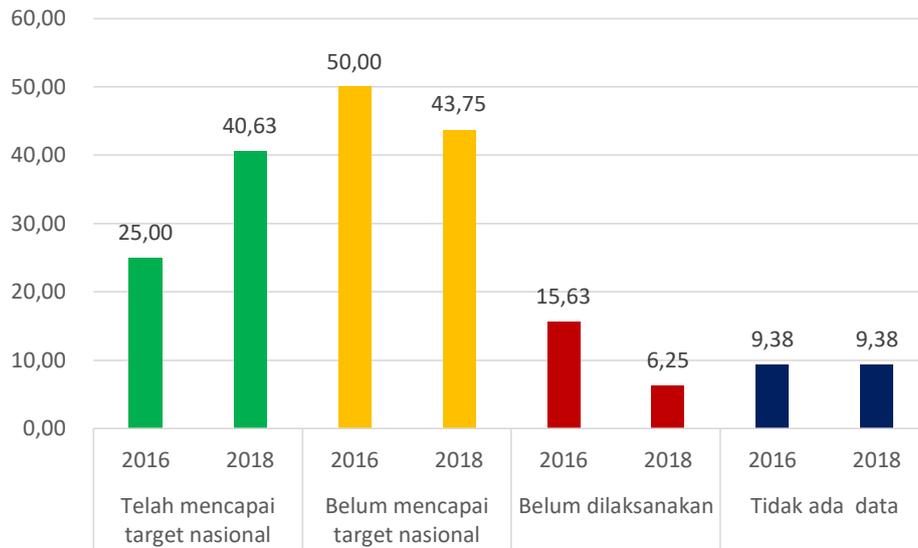
Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Namun, TPB 7 tidak menjadi kewenangan Kota Cimahi, melainkan merupakan kewenangan provinsi, sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Keempat TPB dalam pilar ekonomi tersebut terdiri dari 39 indikator yang menjadi kewenangan Kota Cimahi. Persentase capaian indikator TPB pilar ekonomi di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 4-2**. Indikator TPB pilar ekonomi di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional sebanyak 43,59%; sedangkan sebanyak 17,95% indikator TPB pilar ekonomi belum mencapai target nasional. Ada pula sebanyak 5,13% indikator TPB yang belum dilaksanakan dan 33,33% indikator TPB pilar ekonomi di Kota Cimahi yang tidak tersedia data capaiannya. Indikator TPB pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan perlu menjadi perhatian karena merupakan *gap*/permasalahan di Kota Cimahi. Selain itu, indikator TPB pilar ekonomi yang tidak tersedia data capaiannya juga perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kurang dapat diketahui kondisi terkait pilar ekonomi di Kota Cimahi secara utuh.



Gambar 4-2 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

4.2.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

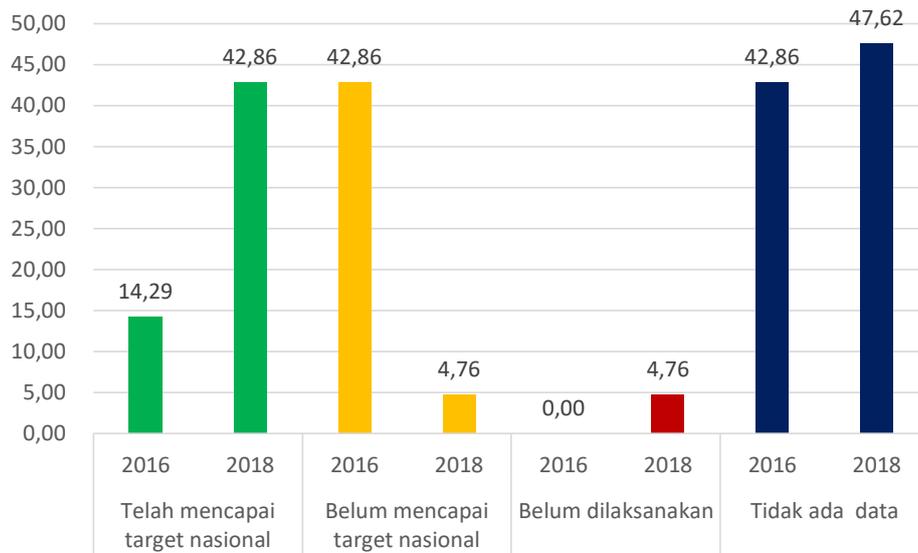
Terdapat 6 TPB yang termasuk dalam pilar lingkungan hidup, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Lautan), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Namun, TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kota Cimahi, melainkan merupakan kewenangan provinsi dan secara geografis Kota Cimahi juga tidak memiliki wilayah laut, sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kelima TPB dalam pilar lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Cimahi terdiri dari 32 indikator. Persentase capaian indikator TPB pilar lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 4-3**. Sebagian besar indikator TPB pilar lingkungan hidup di Kota Cimahi belum mencapai target nasional, yaitu sebanyak 43,75%, belum dilaksanakan 6,25%, dan yang belum tersedia datanya 9,38%. Sedangkan indikator TPB pilar lingkungan hidup di Kota Cimahi yang telah mencapai target nasional persentasenya lebih sedikit, yaitu 40,63%. Kondisi ini tentu harus diperhatikan, bahwa kondisi lingkungan hidup menjadi *gap*/permasalahan di Kota Cimahi.



Gambar 4-3 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

4.2.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) merupakan satu-satunya TPB yang termasuk dalam pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. TPB 16 ini terdiri dari 21 indikator. Persentase capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola kelembagaan di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 4-4**. Sebagian besar indikator TPB pilar hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi tidak tersedia data capaiannya, yaitu sebanyak 47,62%. Sementara itu, pada indikator yang tersedia data capaiannya, sebagian besar telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 42,86%, belum tercapai 4,76% dan belum dilaksanakan 4,76%. Banyaknya indikator yang tidak tersedia data capaiannya ini perlu diperhatikan karena jumlahnya mendominasi sehingga kondisi terkait pilar hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi kurang dapat diketahui secara utuh.



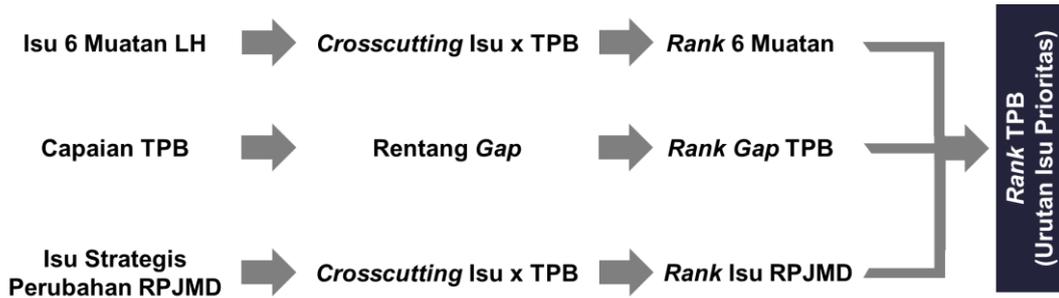
Gambar 4-4 Persentase Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

4.3 Rumusan Isu Prioritas di Kota Cimahi

4.3.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

Pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan pencapaian target TPB, keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal (*baseline*) dalam mencapai target dari setiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Cimahi. Berdasarkan kajian pada 4, sebanyak 51,37% indikator TPB di Kota Cimahi telah mencapai target nasional, sedangkan masih terdapat 22,40% indikator TPB yang belum mencapai target nasional, 4,37% yang memerlukan peningkatan, 1,64% yang memerlukan penurunan, dan 20,22% tidak dapat dianalisis capaiannya karena kendala ketersediaan data.

Adanya kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan *gap* capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, dan isu dari masukan uji publik. Kerangka analisis dan pemeringkatan isu TPB untuk menentukan isu prioritas di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Gambar 4.4**.



Gambar 4. 4 Kerangka Analisis dan Pemingkatan Isu TPB di Kota Cimahi

4.3.1.1 Analisis Data

4.3.1.1.1 Gap Capaian TPB

Analisis capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih antara capaian indikator TPB di Kota Cimahi terhadap target capaian RPJMN tahun 2019. Semakin besar selisih/gap capaian indikator (belum mencapai target nasional), maka semakin berpotensi menjadi isu prioritas. Secara lengkap, hasil analisis capaian TPB di Kota Cimahi dapat dilihat kembali pada 4, dan uraian capaian per indikator pada **Lampiran C**. Hasil analisis gap capaian per tujuan pada TPB Kota Cimahi ditunjukkan pada **Tabel 4-2**.

Tabel 4-2 Analisis Gap Capaian TPB di Kota Cimahi

TPB	Jumlah Indikator	Rentang GAP	Persentase Data	Rank Gap Data
1 Tanpa Kemiskinan	25	61,54%	92,00%	9
2 Tanpa Kelaparan	11	35,34%	100,00%	12
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	31	60,82%	90,32%	10
4 Pendidikan Berkualitas	13	53,20%	92,31%	11
5 Kesetaraan Gender	11	100,00%	63,64%	1
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	100,00%	100,00%	1
7 Energi Bersih dan Terjangkau				
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	30,78%	57,14%	13
9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7	0,00%	71,43%	14
10 Berkurangnya Kesenjangan	5	100,00%	80,00%	1
11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11	100,00%	81,82%	1
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	4	100,00%	75,00%	1
13 Penanggulangan Perubahan Iklim	3	100,00%	100,00%	1
14 Ekosistem Laut				
15 Ekosistem Darat	2	0,00%	100,00%	14
16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	21	100,00%	52,38%	1
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	13	100,00%	61,54%	1

Sumber: hasil analisis (2020)

4.3.1.1.2 *Isu Muatan Kondisi Lingkungan Hidup*

Penelaahan kondisi lingkungan hidup di Kota Cimahi telah diuraikan pada 3. Berdasarkan hasil kajian 6 muatan lingkungan hidup tersebut, berikut merupakan kondisi yang menjadi isu di Kota Cimahi:

- 1) Rendahnya daya dukung penyediaan pangan;
- 2) Rendahnya daya dukung penyediaan air;
- 3) Tekanan penduduk di pusat Kota Cimahi dan perbatasan Kota Bandung;
- 4) Peningkatan timbulan sampah dan lumpur tinja;
- 5) Tingginya potensi beban pencemar air sungai;
- 6) Penurunan muka tanah dan kondisi air tanah yang kritis;
- 7) Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air;
- 8) Perlunya perlindungan fungsi ekosistem yang masih tinggi;
- 9) Kurang terhubungnya petak-petak ekosistem; dan
- 10) Rawan terhadap bencana yang terkait perubahan iklim.

Setiap isu berdasarkan muatan kondisi lingkungan hidup tersebut selanjutnya disilangkan (*crosscutting*) dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu kondisi lingkungan hidup lebih menjadi prioritas. Hasil *crosscutting* TPB dengan isu kondisi lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjukkan pada **Tabel 4-3**.

4.3.1.1.3 *Isu Strategis Perubahan RPJMD*

Proses penyusunan KLHS berlangsung sebelum dan bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD, sehingga isu strategis pada Perubahan RPJMD dijadikan sebagai bahan analisis KLHS. Pada dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, dinyatakan terdapat 13 isu strategis di Kota Cimahi, yaitu:

- 1) Penanggulangan kemiskinan;
- 2) Penanggulangan pengangguran;
- 3) Peningkatan upaya pemerataan pendapatan;
- 4) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 5) Peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bertransportasi;
- 6) Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 8) Optimalisasi kualitas pendidikan;
- 9) Optimalisasi kualitas kesehatan;
- 10) Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 11) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat;
- 12) Pengendalian pertumbuhan penduduk; dan
- 13) Optimalisasi tata kelola pemerintahan.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Sama halnya dengan analisis pada isu muatan lingkungan hidup, setiap isu strategis Perubahan RPJMD selanjutnya disilangkan (*crosscutting*) dengan 17 TPB. TPB yang memiliki hubungan paling banyak dengan isu strategis Perubahan RPJMD lebih menjadi prioritas. Hasil *crosscutting* TPB dengan isu strategis Perubahan RPJMD Kota Cimahi ditunjukkan pada **Tabel 4-3**.

Analisis *crosscutting* ini dimaksudkan untuk melihat TPB yang paling berhubungan/berpengaruh/saling terkait dengan isu strategis. Dalam hal ini, setiap TPB dinilai apakah memiliki dampak/pengaruh terhadap isu strategis, baik isu strategis dari hasil analisis kondisi lingkungan hidup, maupun isu strategis dari Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Tabel 4-3 Analisis *Crosscutting* TPB dengan Isu Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Cimahi

TPB	Rendahnya daya dukung penyediaan pangan	Rendahnya daya dukung penyediaan air	Tekanan penduduk di pusat Kota Cimahi dan perbatasan Kota Bandung	Peningkatan timbunan sampah dan lumpur tinja	Tingginya potensi beban pencemar air sungai	Penurunan muka tanah dan kondisi air tanah yang kritis	Kurang optimalnya efisiensi pengaturan tata air	Perluanya perlindungan fungsi ekosistem yang masih tinggi	Kurang terhubungnya petak-petak ekosistem	Rawan terhadap bencana yang terkait perubahan iklim	Hasil 6 Muatan	Rank 6 muatan
1 Tanpa Kemiskinan			*								1	11
2 Tanpa Kelaparan	*	*	*					*		*	5	4
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*	*	*	*						5	4
4 Pendidikan Berkualitas			*								1	11
5 Kesetaraan Gender											0	16
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak		*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	1
7 Energi Bersih dan Terjangkau			*					*		*	3	8
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi			*								1	11
9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur					*	*					2	10
10 Berkurangnya Kesenjangan			*								1	11
11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan		*	*	*	*	*			*	*	7	3
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	*			*	*	*					4	6
13 Penanggulangan Perubahan Iklim			*			*				*	3	8
14 Ekosistem Laut											0	16
15 Ekosistem Darat			*	*	*	*	*	*	*	*	8	1
16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh			*								1	11
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan			*	*	*				*		4	6

Tabel 4-4 Analisis *Crosscutting* TPB dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022

TPB		Penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan pengangguran	Peningkatan upaya pemerataan pendapatan	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana	Peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan transportasi	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi kualitas pendidikan	Optimalisasi kualitas kesehatan	Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	Isu Strategis Perubahan RPJMD	Rank Isu RPJMD
1	Tanpa Kemiskinan	*	*	*			*		*	*	*		*		8	1
2	Tanpa Kelaparan	*		*				*		*	*		*		6	7
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*	*	*			*		*	*	*		*		8	1
4	Pendidikan Berkualitas	*	*	*	*				*		*	*	*		8	1
5	Kesetaraan Gender		*								*	*			3	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*					*	*		*			*		5	8
7	Energi Bersih dan Terjangkau	*					*	*					*		4	9
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	*	*	*					*		*	*	*		7	4
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur				*	*			*			*			4	9
10	Berkurangnya Kesenjangan	*	*	*			*		*		*		*		7	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan				*	*	*	*		*	*		*		7	4
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab							*							1	16
13	Penanggulangan Perubahan Iklim				*			*	*						3	11
14	Ekosistem Laut														0	17
15	Ekosistem Darat				*			*							2	14
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh									*	*		*	*	3	11
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan										*	*		*	2	14

4.3.1.2 Pemeringkatan Isu TPB

Hasil analisis *gap* capaian TPB **Tabel 4-2**, *crosscutting* TPB dengan isu lingkungan hidup **Tabel 4.3**, dan *crosscutting* TPB dengan isu strategis Perubahan RPJMD **Tabel 4.4** kemudian disintesis, dengan menjumlahkan peringkat dari ketiga aspek tersebut. Jumlah peringkat yang terkecil menjadi peringkat isu TPB yang paling prioritas. Hasil pemeringkatan isu TPB di Kota Cimahi ini ditunjukkan pada **Tabel 4-5**.

Tabel 4-5 Peringkat Isu TPB di Kota Cimahi

	TPB	Rank 6 muatan	Rank GAP Data	Rank Isu RPJMD	Skor	Ranking Akhir
1	Tanpa Kemiskinan	11	9	1	21	6
2	Tanpa Kelaparan	4	12	7	23	8
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	4	10	1	15	3
4	Pendidikan Berkualitas	11	11	1	23	8
5	Kesetaraan Gender	16	1	11	28	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	1	8	10	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau	8	14	9	31	15
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11	13	4	28	12
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	10	14	9	33	16
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	1	4	16	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	1	4	8	1
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	6	1	16	23	8
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	8	1	11	20	5
14	Ekosistem Laut	16	14	17	47	17
15	Ekosistem Darat	1	14	14	29	14
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	11	1	11	23	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	6	1	14	21	6

Sumber: hasil analisis (2020)



4.3.2 Analisis *Gap* dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada Perubahan RPJMD terhadap Pencapaian TPB

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi *gap* atau kesenjangan, berupa target TPB yang menjadi isu, tetapi belum diakomodasi oleh kebijakan dan strategi pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022. **Tabel 4.6** merupakan hasil analisis kebijakan dan strategi Perubahan RPJMD terhadap TPB di Kota Cimahi.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Tabel 4-6 Analisis *Gap* Kebijakan dan Strategi pada RPJMD terhadap TPB

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	<i>Gap</i> /Masalah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	1.4 Menjamin semua laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi dalam hal: memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro .	Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat miskin.
			Belum optimalnya keterjangkaun sumber penerangan utama listrik baik dari PLN dan bukan PLN ke semua masyarakat miskin dan rentan.
		1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana di Kota Cimahi.	Perlunya penurunan indeks risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan.
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula di Kota Cimahi.	Belum optimalnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	3.2 Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 di Kota Cimahi.	Perlunya peningkatan tingkat imunisasi dasar lengkap pada bayi.
		3.3 Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya di Kota Cimahi.	Tingginya tingkat Insiden Tuberkulosis (ITB).
		3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang di Kota Cimahi.	Tingkat <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan perlu diturunkan dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditingkatkan.
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. (Sasaran pada Visi Misi dalam perubahan RPJMD) Indeks kesehatan belum mencapai target.	Indeks kesehatan belum mencapai target.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	4.1 Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian	Belum optimalnya persentase SD/MI dan SMP/MTs yang berakreditasi minimal B serta angka Partisipasi Kasar (APK)



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		pembelajaran yang relevan dan efektif di Kota Cimahi.	SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat.
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun di Kota Cimahi.	Belum adanya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua di Kota Cimahi.	Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.
		6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan di Kota Cimahi.	Belum optimalnya akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.
			Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
			Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global di Kota Cimahi.	Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
		6.4 Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air di Kota Cimahi.	Belum adanya insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	-	-
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang di Kota Cimahi.	Rendahnya PDB per kapita dan laju pertumbuhannya.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Telah tercapai	Telah tercapai
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk Kota Cimahi yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Angka koefisien gini yang masih perlu penurunan
		10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Belum adanya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	11.1 Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh di Kota Cimahi.	Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		11.2 Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua di Kota Cimahi.	Belum optimalnya pengembangan sistem angkutan rel
		11.3 Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara oleh Kota Cimahi.	Perlu adanya pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur
		11.5 Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan di Kota Cimahi	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih perlu diminimalisir
			Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana yang perlu diturunkan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		11.b Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman di Kota Cimahi yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Belum dibentuk dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	12.4 Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan di Kota Cimahi.	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
		12.5 Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali di Kota Cimahi.	Belum optimalnya proses daur ulang sampah



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (<i>Green Public Procurement</i>) masih rendah
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di Kota Cimahi.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih perlu diminimalisir
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	-	-
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	15.1 Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya di Kota Cimahi, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan
		15.3 Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi di Kota Cimahi.	Luasan lahan kritis yang belum banyak berkurang, terutama di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di Kota Cimahi.	Perlu penurunan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
	keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	16.9 Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran di Kota Cimahi	Perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah Perlu adanya peningkatan persentase anak yang memiliki akte kelahiran
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik di Kota Cimahi, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Perlu ditingkatkannya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
		17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada di Kota Cimahi	Akses bergerak pita lebar (<i>mobile broadband</i>) perlu diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh populasi di perkotaan dan sebagian pedesaan
		17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama di Kota Cimahi.	Perlu disediakan alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
		Meningkatnya profesionalitas aparatur. (Sasaran pada Visi Misi dalam perubahan RPJMD)	Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN.

Sumber: hasil analisis (2020)

Berdasarkan proses identifikasi, analisis dan pemeringkatan, serta uji publik yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020, telah dirumuskan dan disepakati tujuh (7) isu prioritas di Kota Cimahi, yaitu:

1. TPB 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
2. TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
3. TPB 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. TPB 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
5. TPB 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
6. TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
7. TPB 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.4 Monitoring dan Evaluasi TPB

Dari 183 indikator TPB di Kota Cimahi yang telah dianalisis capaiannya, kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi dari keberjalanannya. *Monitoring* dan evaluasi ini di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan, keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), kaitan dengan risiko bencana, kebutuhan daerah, dan skenario tentang upaya pencapaian indikator TPB tersebut.

Monitoring dan evaluasi dari setiap indikator TPB diringkas sesuai dengan tujuan pada TPB yang ditunjukkan oleh Error! Reference source not found., sedangkan rincian per indikator TPB disampaikan pada **Lampiran E**. Keterkaitan dengan DDDT, potensi daerah, dan risiko bencana direpresentasikan dengan (+) yang berarti memiliki keterkaitan dan (-) yang berarti tidak terkait. Sementara untuk skenario upaya pencapaian, 'Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan' digunakan apabila kondisi capaian indikatornya telah tercapai atau belum tercapai namun *gap* ketercapaiannya kecil, sedangkan skenario 'Dengan Upaya Tambahan' digunakan apabila indikator TPB belum tercapai dengan *gap* ketercapaian besar atau untuk indikator dengan kondisi tidak ada data namun dibutuhkan oleh daerah.



Tabel 4-7 Rekapitulasi TPB Hasil Monitoring dan Evaluasi

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
1	25	88,0% Sudah Dilaksanakan	68,0% Telah Mencapai Target Nasional	32,0% +		100,0% Butuh	76,0% +	64,0% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 36,0% Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
		4,0% Belum Dilaksanakan	24,0% Belum Mencapai Target Nasional	68,0% -		0,0% Tidak Butuh	24,0% -		
		8,0% Tidak Ada Data	0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 8,0% Tidak Ada Data						
2	11	100,0% Sudah Dilaksanakan	90,9% Telah Mencapai Target Nasional	18,2% +		90,9% Butuh	45,5% +	90,9% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 9,1% Dengan Upaya Tambahan	
		0,0% Belum Dilaksanakan	9,1% Belum Mencapai Target Nasional	81,8% -		9,1% Tidak Butuh	54,5% -		
		0,0% Tidak Ada Data	0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 0,0% Tidak Ada Data						
3	31	90,3% Sudah Dilaksanakan	77,4% Telah Mencapai Target Nasional	16,1% +		93,5% Butuh	12,9% +	80,6% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 16,1% Dengan Upaya Tambahan 3,2% Tidak Menjadi Indikator	Prioritas
		0,0% Belum Dilaksanakan	12,9% Belum Mencapai Target Nasional	83,9% -		6,5% Tidak Butuh	87,1% -		
		9,7% Tidak Ada Data	0,0% Perlu Peningkatan						



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
			0,0% Perlu Penurunan 9,7% Tidak Ada Data						
4	13	92,3% Sudah Dilaksanakan 0,0% Belum Dilaksanakan 7,7% Tidak Ada Data	61,5% Telah Mencapai Target Nasional 30,8% Belum Mencapai Target Nasional 0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 7,7% Tidak Ada Data	7,7% + 92,3% -		100,0% Butuh 0,0% Tidak Butuh	30,8% + 69,2% -	76,9% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 23,1% Dengan Upaya Tambahan	
5	11	72,7% Sudah Dilaksanakan 0,0% Belum Dilaksanakan 27,3% Tidak Ada Data	45,5% Telah Mencapai Target Nasional 18,2% Belum Mencapai Target Nasional 0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 36,4% Tidak Ada Data	0,0% + 100,0% -		81,8% Butuh 18,2% Tidak Butuh	9,1% + 90,9% -	36,4% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 45,5% Dengan Upaya Tambahan 18,2% Tidak Menjadi Indikator	
6	12	100,0% Sudah Dilaksanakan 0,0% Belum Dilaksanakan	33,3% Telah Mencapai Target Nasional 41,7% Belum Mencapai Target Nasional	100,0% + 0,0% -		100,0% Butuh 0,0% Tidak Butuh	100,0% + 0,0% -	58,3% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 41,7% Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
		0,0% Tidak Ada Data	25,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 0,0% Tidak Ada Data	0,0% 0,0% 0,0%					
8	14	57,1% Sudah Dilaksanakan 0,0% Belum Dilaksanakan 42,9% Tidak Ada Data	35,7% Telah Mencapai Target Nasional 14,3% Belum Mencapai Target Nasional 7,1% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 42,9% Tidak Ada Data	7,1% + 92,9% -		100,0% Butuh 0,0% Tidak Butuh	0,0% + 100,0% -	42,9% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 57,1% Dengan Upaya Tambahan 0,0%	
9	7	71,4% Sudah Dilaksanakan 0,0% Belum Dilaksanakan 28,6% Tidak Ada Data	57,1% Telah Mencapai Target Nasional 14,3% Belum Mencapai Target Nasional 0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 28,6% Tidak Ada Data	0,0% + 100,0% -		85,7% Butuh 14,3% Tidak Butuh	42,9% + 57,1% -	57,1% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 28,6% Dengan Upaya Tambahan 14,3% Tidak Menjadi Indikator	1 indikator menjadi prioritas
10	5	80,0% Sudah Dilaksanakan	40,0% Telah Mencapai Target Nasional	0,0% +		100,0% Butuh	80,0% +	60,0% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
		0,0% Belum Dilaksanakan 20,0% Tidak Ada Data	40,0% Belum Mencapai Target Nasional 0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 20,0% Tidak Ada Data	100,0% -		0,0% Tidak Butuh	20,0% -	40,0% Dengan Upaya Tambahan	
11	11	72,7% Sudah Dilaksanakan 9,1% Belum Dilaksanakan 18,2% Tidak Ada Data	9,1% Telah Mencapai Target Nasional 45,5% Belum Mencapai Target Nasional 9,1% Perlu Peningkatan 18,2% Perlu Penurunan 18,2% Tidak Ada Data	90,9% + 9,1% -		100,0% Butuh 0,0% Tidak Butuh	90,9% + 9,1% -	18,2% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 81,8% Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
12	4	50,0% Sudah Dilaksanakan 25,0% Belum Dilaksanakan 25,0% Tidak Ada Data	25,0% Telah Mencapai Target Nasional 25,0% Belum Mencapai Target Nasional 25,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 25,0% Tidak Ada Data	100,0% + 0,0% -		100,0% Butuh 0,0% Tidak Butuh	100,0% + 0,0% -	50,0% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 50,0% Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
13	3	100,0% Sudah Dilaksanakan	33,3% Telah Mencapai Target Nasional	100,0% +		100,0% Butuh	100,0% +	33,3% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
		0,0% Belum Dilaksanakan	33,3% Belum Mencapai Target Nasional	0,0% -		0,0% Tidak Butuh	0,0% -	66,7% Dengan Upaya Tambahan	
		0,0% Tidak Ada Data	0,0% Perlu Peningkatan						
15	2	100,0% Sudah Dilaksanakan	0,0% Telah Mencapai Target Nasional	100,0% +		100,0% Butuh	100,0% +	100,0% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
		0,0% Belum Dilaksanakan	0,0% Belum Mencapai Target Nasional	0,0% -		0,0% Tidak Butuh	0,0% -	0,0% Dengan Upaya Tambahan	
		0,0% Tidak Ada Data	100,0% Perlu Peningkatan						
16	21	47,6% Sudah Dilaksanakan	38,1% Telah Mencapai Target Nasional	0,0% +		81,0% Butuh	0,0% +	38,1% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
		4,8% Belum Dilaksanakan	14,3% Belum Mencapai Target Nasional	100,0% -		19,0% Tidak Butuh	100,0% -	42,9% Dengan Upaya Tambahan	
		47,6% Tidak Ada Data	0,0% Perlu Peningkatan					19,0% Tidak Menjadi Indikator	
			0,0% Perlu Penurunan						



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	Jumlah Indikator	Pelaksanaan	Kondisi Capaian	Kaitan dengan DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
						Kebutuhan Daerah	Kaitan dengan Risiko Bencana		
			47,6% Tidak Ada Data						
17	13	53,8% Sudah Dilaksanakan 15,4% Belum Dilaksanakan 30,8% Tidak Ada Data	30,8% Telah Mencapai Target Nasional 30,8% Belum Mencapai Target Nasional 0,0% Perlu Peningkatan 0,0% Perlu Penurunan 38,5% Tidak Ada Data	0,0% + 100,0% -		76,9% Butuh 23,1% Tidak Butuh	30,8% + 69,2% -	46,2% Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan 30,8% Dengan Upaya Tambahan 23,1% Tidak Menjadi Indikator	Prioritas

Sumber: hasil analisis (2020)

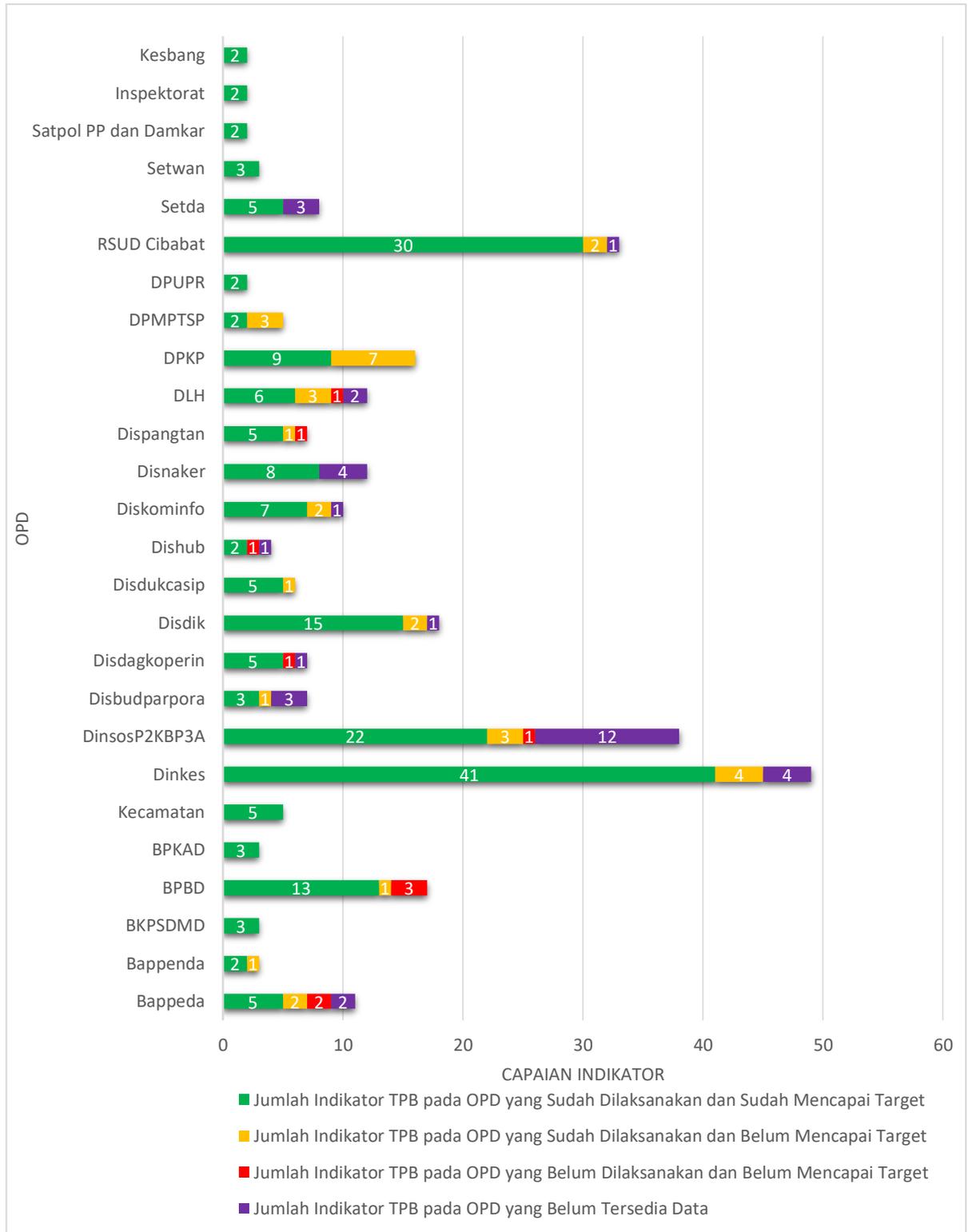
5 Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD, berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD, dimana hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kota Cimahi yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Berikut ini merupakan ringkasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 5.1**. Sedangkan capaian indikator TPB oleh OPD di Kota Cimahi yang dibagi berdasarkan kategori dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.

Tabel 5-1 Pelaksanaan Indikator TPB pada Setiap OPD

OPD	TPB																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bappeda						1		4								2	4
Bappenda																2	1
BKPSDMD																3	
BPBD	8										5		2			2	
BPKAD																2	1
Kecamatan	1							1	1							2	1
Dinkes	6	7	28		2	4										2	
DinsosP2KBP3A	10		4		8					4	1					11	
Disbudparpora								5								2	
Disdagkoperin						1		1	3							2	
Disdik	4			13												2	
Disdukcasip	1															5	
Dishub											2					2	
Diskominfo					1				3							2	4
Disnaker	2							6	1	1						2	
Dispangtan		4				1										2	
DLH						2					1	4	1		2	2	
DPKP	3					10					1					2	
DPMPTSP								2			1					2	
DPUPR																2	
RSUD Cibabat	4	4	22		1											2	
Setda	1									1						5	
Setwan																2	

(Sumber: hasil analisis, 2020)

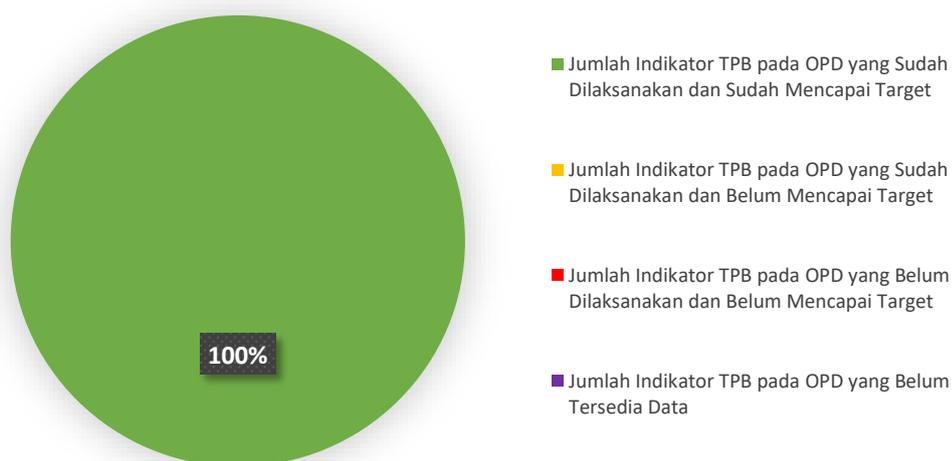


Gambar 5-1 Grafik Capaian Indikator TPB per OPD di Kota Cimahi

(Sumber: hasil analisis, 2020)

5.1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kesekretariatan DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, tetapi secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD memiliki 2 indikator yang menjadi kewenangannya, yang keduanya merupakan indikator dari TPB nomor 16, dimana kedua indikator itu seluruhnya telah mencapai target RPJMN sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 5-2**.



Gambar 5-2 Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Sekretariat DPRD secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-2**.

Tabel 5-2 Capaian Indikator TPB pada Sekretariat DPRD

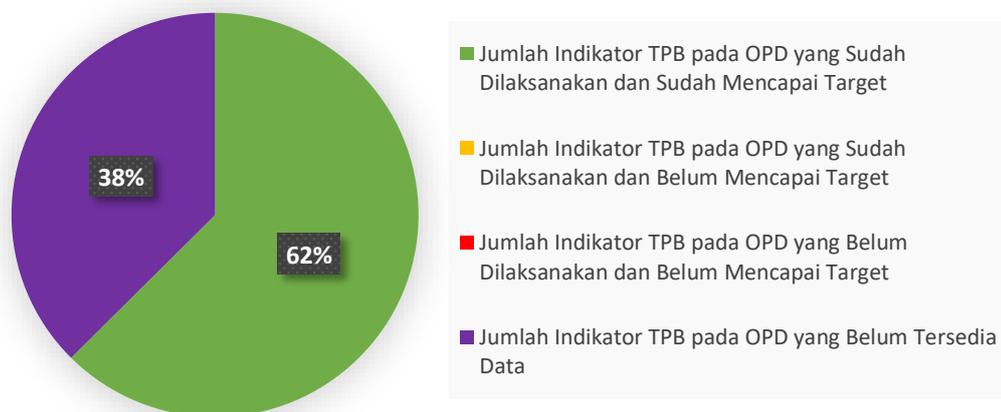
No.	Indikator TPB Indikator	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Indeks B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Sudah dilaksanakan dan sudah

No.	Indikator TPB Indikator	Capaian (<i>existing</i>)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	mencapai target

Pada tahun 2018 Sekretariat DPRD telah menganggarkan Rp 365.493.000; atau sebesar 1% dari total anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 72.787.795.832; untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.2 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Setda memiliki 8 indikator yang menjadi kewenangannya, yaitu pada TPB 1, 10, dan 16 dimana 5 indikator telah mencapai target, sedang 3 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-3 Persentase Capaian Indikator TPB pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Sekretariat Daerah secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-3**.

Tabel 5-3 Pelaksanaan Indikator TPB pada Sekretariat Daerah

No.	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator				
1.3.1.(a)	Meningkatnya kesempatan kerja		96,04%	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		tidak ada kebijakan yang diskriminatif	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.		data belum tersedia	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	Data belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Skor B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		91,25%	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik		Data belum tersedia	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Data belum tersedia



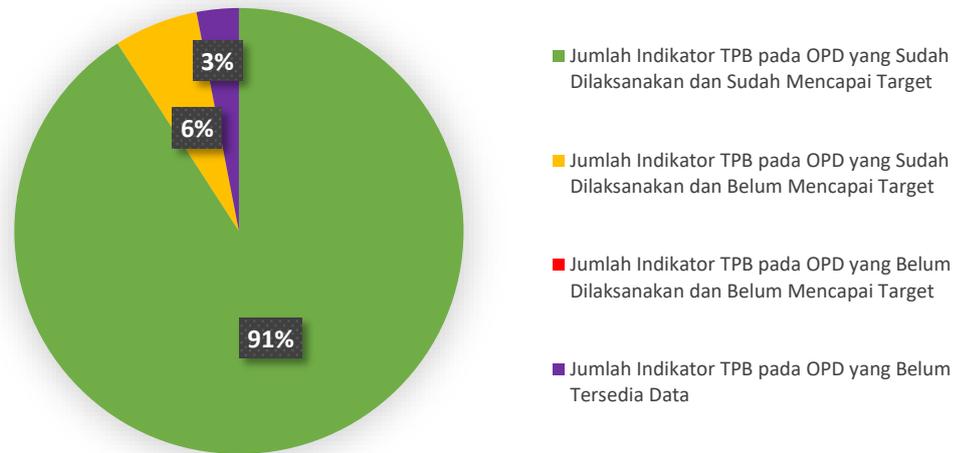
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Data belum tersedia	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Data belum tersedia

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah telah menganggarkan Rp 1.433.302.220; atau sebesar 35% dari total anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp 4.106.925.445; untuk pelaksanaan 8 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.3 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat merupakan organisasi perangkat daerah di Kota Cimahi yang menangani urusan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan lanjutan sebagai Rumah Sakit Tipe B. Pelayanan kesehatan tersebut berkaitan dengan indikator-indikator yang terdapat pada tujuan 1, 2, 3, 5, 10, dan 16. RSUD Cibabat memiliki 33 indikator yang menjadi kewenangannya, dengan 30 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 2 indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan 1 indikator belum tersedia datanya.



Gambar 5-4 Persentase Capaian Indikator TPB pada RSUD Cibabat Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada RSUD Cibabat secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-4**.

Tabel 5-4 Capaian Indikator TPB pada RSUD Cibabat

No.	Indikator TPB	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96,24%	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	93,6%	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,60%	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp. 444.816.2 60.855,47	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	9,75%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	7,06%	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	8,00%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	3,15%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	103 per 100.000 KH	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	96,24%	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	96,24%	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,18 per 1000 KH	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3,34 per 1.000 KH	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	4.18 per 1000 KH	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	93,59%	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,096	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	394 per 100.000	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	22 per 1000 orang	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1 Kota Cimahi	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1 Kota Cimahi	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0 filariasis dan 1 kusta	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).; Meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	23%	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	6,07%	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	78,60%	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,60%	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

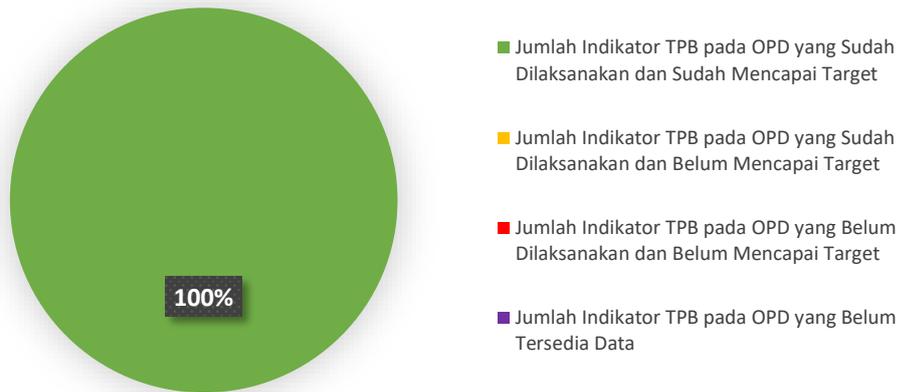
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	34,50%	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	data belum tersedia	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Belum ada data
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	78,99%	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	11,74%	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	62,5 per 100.000 penduduk (dokter)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,59%	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Skor B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat telah menganggarkan Rp 183.043.770.581; atau sebesar 100% dari total anggaran Rumah Sakit Umum

Daerah Cibabat sebesar Rp 183.043.770.581; untuk pelaksanaan 33 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. DPUPR Kota Cimahi memiliki tanggung jawab terhadap 2 indikator pada TPB nomor 16 yang keseluruhannya telah memenuhi target RPJMN 2019.



Gambar 5-5 Persentase Capaian Indikator TPB pada DPUPR Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada DPUPR secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-5**.

Tabel 5-5 Capaian Indikator TPB pada DPUPR

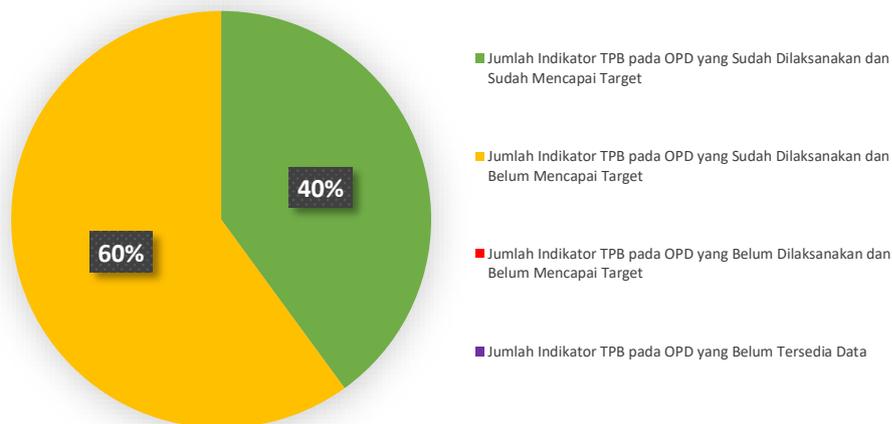
No.	Indikator TPB	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%,	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menganggarkan Rp 166.923.100; atau sebesar 0,19% dari total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 85.615.584.026; untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.5 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan organisasi perangkat daerah di Kota Cimahi yang menangani urusan penanaman modal dan perizinan. DPMPTSP memiliki 5 indikator yang menjadi kewenangannya. Indikator tersebut merupakan indikator dari TPB nomor 8,11, dan 16. Dari 5 indikator yang sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP, 2 indikator telah mencapai target, sedangkan 3 indikator lagi belum mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-6 Persentase Capaian Indikator TPB pada DPMPTSP Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada DPMPTSP secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-6**.

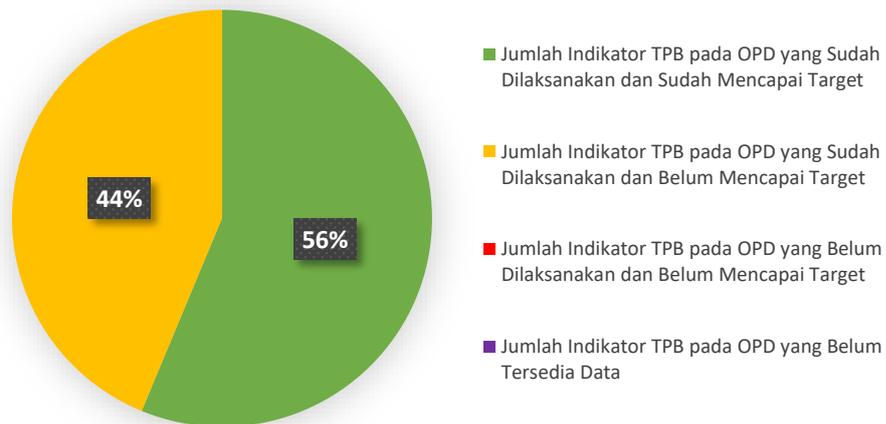
Tabel 5-6 Capaian Indikator TPB pada DPMPTSP

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Pertumbuhan (ADHK): 3,36% PDRB Per Kapita: Rp 34,61 juta (ADHK)	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB Per Kapita: Rp 34,61 juta (ADHK)	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan Rp 824.062.430; atau sebesar 18% dari total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu pintu sebesar Rp 4.654.310.731; untuk pelaksanaan 5 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.6 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) telah menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. DPKP Kota Cimahi bertanggung jawab atas 16 indikator TPB yang tersebar pada tujuan nomor 1, 6, 11, dan 16. Dari keseluruhan indikator tersebut, DPKP telah mencapai target RPJMN 2019 pada 9 indikator TPB, sedangkan 7 indikator TPB lainnya telah dilaksanakan namun belum mencapai target.



Gambar 5-7 Persentase Capaian Indikator TPB pada DPKP Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada DPKP secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-7**.

Tabel 5-7 Capaian Indikator TPB pada DPKP

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	87,51%	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	72,60%	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	4,39%	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			penduduk berpendapatan terbawah.	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	80,78%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	312 l/dt	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik (2015: 51,44 m ³ /detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	80,78%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	72,70%	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	15 kelurahan	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	1 Kelurahan (Cibeber)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	5,21%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	101 Rumah	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	9 Rencana	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



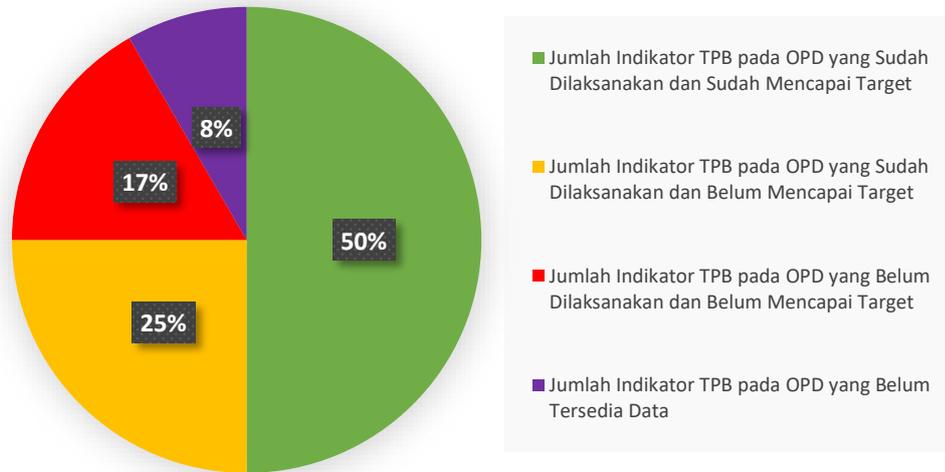
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	21,96%	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Skor B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menganggarkan Rp 41.725.074.516; atau sebesar 28% dari total anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 149.258.980.899; untuk pelaksanaan 16 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.7 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memegang tanggung jawab sebesar 12 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 6, 11, 12, 13, 15, dan 16. Dari 12 indikator yang telah dilaksanakan oleh DLH, 6 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 3 target telah dilaksanakan namun belum mencapai target, 2 indikator belum dilaksanakan, dan 1 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-8 Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada DLH secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-8**.

Tabel 5-8 Capaian Indikator TPB pada DLH

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	belum ada insentif	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	95,00%	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	26.486,36 ton/tahun	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	perundangan (sektor industri).			
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	29,4 ton/hari	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Tidak ada	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	1 dokumen RAD-GRK	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	4,2% (data DIKPLHD 2018)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	567,63 Ha	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP atas Laporan Keuangan tahun 2019	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



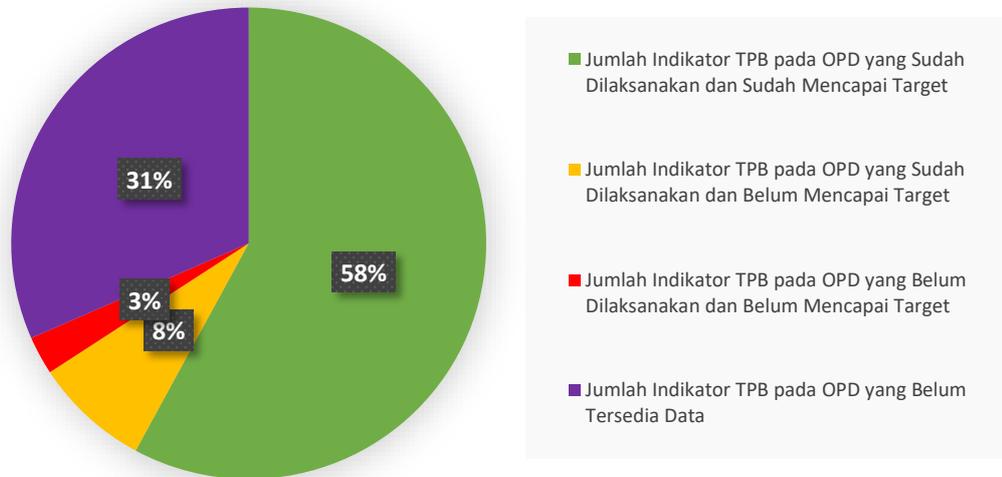
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Skor B atas SAKIP tahun 2019	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup telah menganggarkan Rp 11.219.741.640; atau sebesar 26% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 42.902.725.388; untuk pelaksanaan 12 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.8 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) adalah merupakan organisasi perangkat daerah di Kota Cimahi yang menangani urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DinsosP2KBP3A memiliki tanggung jawab sebanyak 38 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 1, 3, 5, 10, 11, dan 16. Dari 38 indikator yang telah dilaksanakan oleh DinsosP2KBP3A, 22 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 3 target telah dilaksanakan namun belum mencapai target, 1 indikator belum dilaksanakan, dan 12 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-9 Persentase Capaian Indikator TPB pada DinsosP2KBP3A Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada DinsosP2KBP3A secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-9**.

Tabel 5-9 Capaian Indikator TPB pada DinsosP2KBP3A

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	4,94%	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	23,59%	Meningkatnya persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Data belum tersedia
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	9279 (satuan kk)	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)	78,6%	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua	Sudah dilaksanakan dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	sudah mencapai target
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Daerah blm ada penerangan: Leuwigajah, Cibeber, Cipageran (KCDA 2017)	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100)	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Rp. 87.882.868.811	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Rp. 444.816.260.855,47	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	78,6%	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	78,6%	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	34,5%	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	88,26%	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Belum ada kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19)	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	100% cek data	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0,97%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	25%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Eselon 2 18,52%, Eselon 3 42,27 %	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
10.1.1*	Koefisien Gini	0,37	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	4,94%	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	172.457 Penerima Upah 14.704 Bukan Penerima Upah	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak ada konflik	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

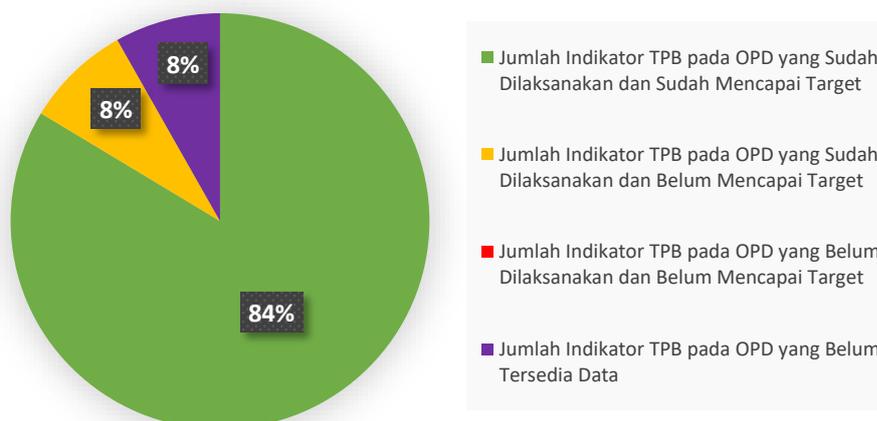
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	data belum tersedia	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Data belum tersedia
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	data belum tersedia	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	Data belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	menurut hukum HAM Internasional.			

Pada tahun 2018 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) telah mengalokasikan Rp 7.658.574.946; atau sebesar 75% dari total anggaran DinsosP2KBP3A sebesar Rp 10.165.843.605; untuk pelaksanaan 38 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.9 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan (Dinkes) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dinkes Kota Cimahi memiliki tanggung jawab terhadap 49 indikator yang tersebar pada TPB nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 16. Dari keseluruhan indikator tersebut, 41 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 4 target telah dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 4 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-10 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinkes Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinkes secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-10**.

Tabel 5-10 Capaian Indikator TPB pada Dinkes



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	96,24%	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	93,6%	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	78,6%	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	87,51%	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	72,6%	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp. 444.816.260.855,47 (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	6,26% (2018)	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	2,74%	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	9,75% (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	7,06% (2018)	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	8%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	3,15%	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	70,89 % (2018)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	103 per 100.000 KH	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	96,24%	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	96,24%	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,18 per 1000 KH	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3,34 per 1.000 KH (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	4.18 per 1000 KH	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	93,59%	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,096%	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	394 per 100.000	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	22 per 1000 orang	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1 kota Cimahi	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1 Kota Cimahi (905 orang bumil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini hepatitis B)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	0 filariasis dan 1 kusta	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).; Meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	1 Prov Jawa Barat	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Tidak ada kejadian filariasis	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	data belum tersedia	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Data belum tersedia
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	23% (2018)	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	6,07%	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	
3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	13 (100%)	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	13 orang	Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	data belum tersedia	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Data belum tersedia
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	78,99%	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	11,74%	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	11,74%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	88,26%	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	13,6 % (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	62,5 per 100.000 pddk (2018) (dokter)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

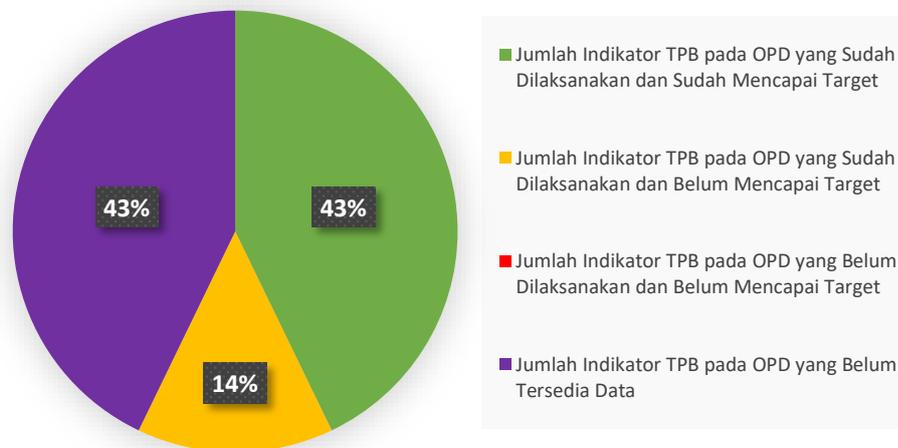
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,59%	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	data belum tersedia	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Data belum tersedia
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	95,38 % (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	72,7%	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	15 kelurahan	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	1 Kelurahan (Cibeber)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan telah menganggarkan Rp 41.393.731.685; atau sebesar 56% dari total anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 73.718.429.391; untuk pelaksanaan 41 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.10 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Disbudparpora Kota Cimahi memiliki tanggung jawab terhadap 7 indikator yang tersebar pada TPB nomor 8 dan 16. Dari keseluruhan indikator tersebut, 3 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 1 target telah dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 3 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-11 Persentase Capaian Indikator TPB pada Disbudparpora Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Disbudparpora secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-11**.

Tabel 5-11 Capaian Indikator TPB pada Disbudparpora

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	data belum tersedia (PDRB di Bapeda	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Data belum tersedia



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

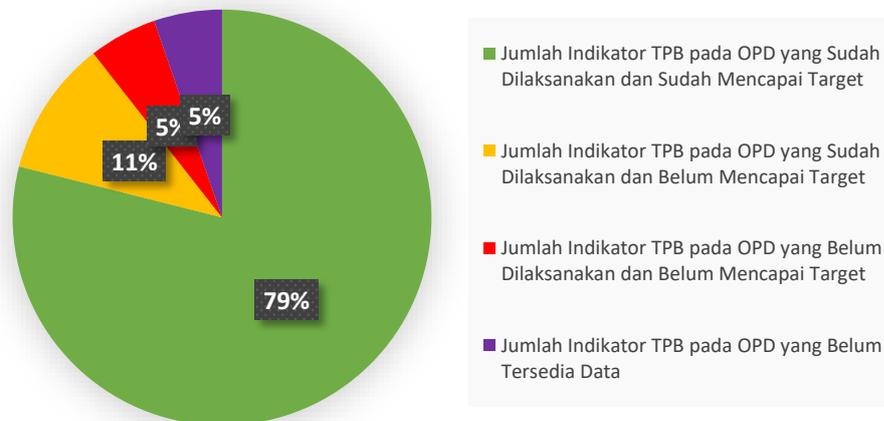
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
		atau diskominfo)		
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	392 orang	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	5852 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) telah menganggarkan Rp 930.024.100; atau sebesar 3% dari total anggaran Disbudparpora sebesar Rp 35.749.333.985; untuk pelaksanaan 7 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.11 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan (Disdik) mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Disdik Kota Cimahi memiliki tanggung jawab terhadap 19 indikator yang tersebar pada TPB nomor 1, 4, dan 16. Dari keseluruhan indikator tersebut, 15 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 2 indikator telah

dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMN, 1 target belum dilaksanakan, dan 1 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-12 Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdik Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Disdik secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-12**.

Tabel 5-12 Capaian Indikator TPB pada Disdik

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	98,6 (2018)	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	82,3%	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp. 444.816.260.855,47 (2018)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9	70%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	42,4% SD akreditasi A dan 52,0% SD Akreditasi B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 86% (2015:72,5%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	66,7% Terakreditasi A dan 27,8% akreditasi B	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	105,6%	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	99,60%	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	10,93%	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	81,40%	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD/ MI : 98,60% LK dan 98,60% Pr, SMP/ MTs : 82,3% LK dan 83,3% Pr, SMA/ SMK/ MA : 77,49% LK dan 77,50% Pr	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

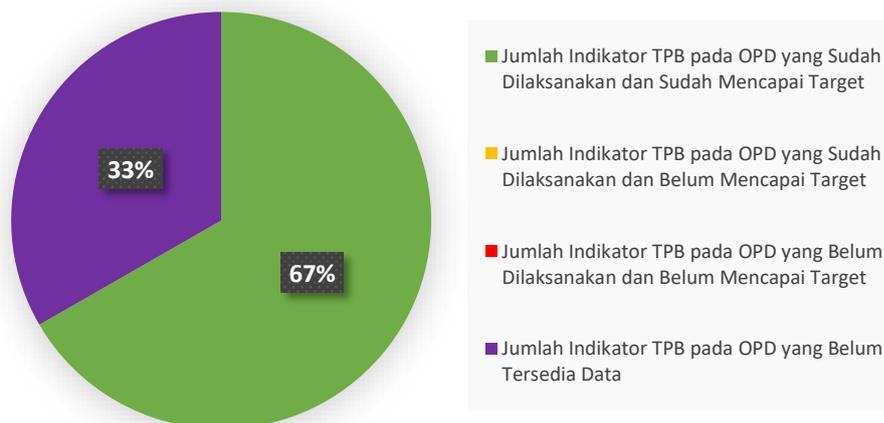
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,98%	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,98%	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	100%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	PAUD ; 35,5% SD : 60.8% SMP : 75,1% SMA : 76,5% SMK : 45,1%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L:	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	

Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan telah menganggarkan Rp 77.227.042.484; atau sebesar 76% dari total anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 101.754.026.623; untuk pelaksanaan 19 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.12 Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Disnaker melaksanakan sebanyak 12 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 1, 8, 9, 10, dan 16. Dari 12 indikator yang telah dilaksanakan oleh Disnaker, 8 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 4 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-13 Persentase Capaian Indikator TPB pada Disnaker Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Disnaker secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-13**.

Tabel 5-13 Capaian Indikator TPB pada Disnaker

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.3.1.(a)	Meningkatnya kesempatan kerja	96,04%	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	172.457 Penerima Upah 14.704 Bukan Penerima Upah	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	data belum tersedia	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Data belum tersedia
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	68.738 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	57,96%	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp 16.738;	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	data belum tersedia	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Data belum tersedia
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	172.457 Penerima Upah 14.704 Bukan Penerima Upah	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah menganggarkan Rp 3.806.857.800; atau sebesar 77% dari total anggaran Disnaker sebesar Rp 4.959.340.000; untuk pelaksanaan 12 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.13 Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan

Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Diskominfoarpus melaksanakan sebanyak 10 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 5, 9, 16, dan 17. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan oleh Diskominfoarpus, 7 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 2 indikator belum mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 1 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-14 Persentase Capaian Indikator TPB pada Diskominfoarpus Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Diskominfoarpus secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-14**.

Tabel 5-14 Capaian Indikator TPB pada Diskominfoarpus

No.	Indikator TPB	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator			
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	97%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	98%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	97%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	78,75%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

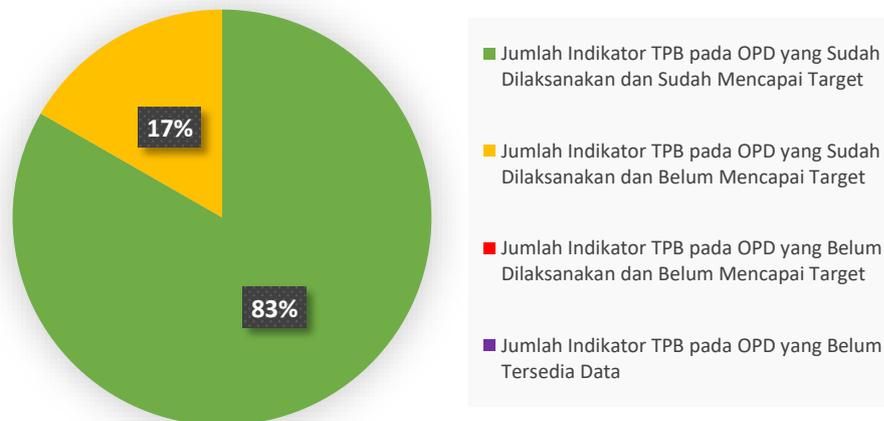
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			(2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak Ada Data	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Data belum tersedia
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (SAMA DG 9.c.1)	98%	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet (SAMA DG 9.c.1 (b))	78,75%	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi, Informasi, Arsip, dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) telah mengalokasikan Rp 1.259.429.200; atau sebesar 11% dari total anggaran Diskominfoarpus sebesar Rp 11.321.557.431; untuk pelaksanaan 10 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil melaksanakan sebanyak 6 indikator TPB. Indikator tersebut meliputi TPB nomor 1 dan 16. Dari 6 indikator yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil, 5 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, dan 1 indikator lainnya belum mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-15 Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdukcapil Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Disdukcapil secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-15**.

Tabel 5-15 Capaian Indikator TPB pada Disdukcapil

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	79,36 %	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



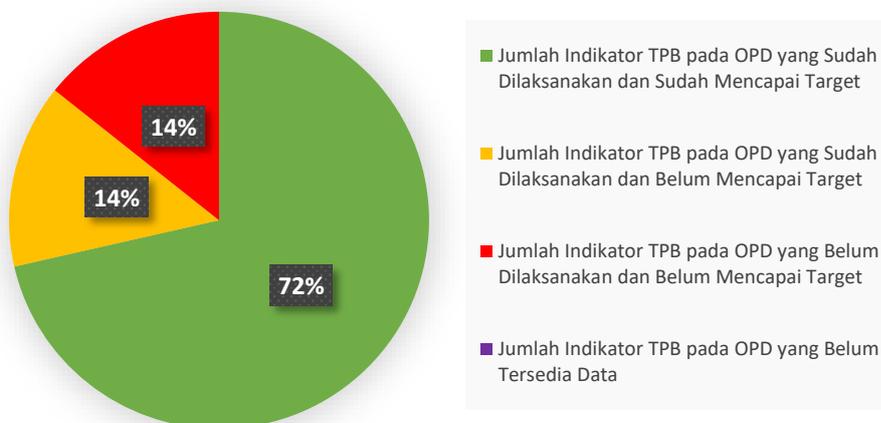
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	92,18%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	98,79% cek data (45,11%)	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	79,36 %	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menganggarkan Rp 1.123.623.900; atau sebesar 18% dari total anggaran Disdukcapil sebesar Rp 6.290.233.468; untuk pelaksanaan 6 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.15 Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pertanian. Dispangtan melaksanakan sebanyak 7 indikator yang tersebar pada TPB nomor 2, 6, dan 16. Dari 7 indikator yang telah dilaksanakan, 5 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 1 indikator lainnya belum mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 1 indikator lainnya belum dilaksanakan.



Gambar 5-16 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dispangtan Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Dispangtan secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-16**.

Tabel 5-16 Capaian Indikator TPB pada Dispangtan

No.	Indikator TPB	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator			
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	2,74%	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2,74%	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	83,8 dan 21,1 gr/kap/hari dan 31,16 kg/kap/tahun	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

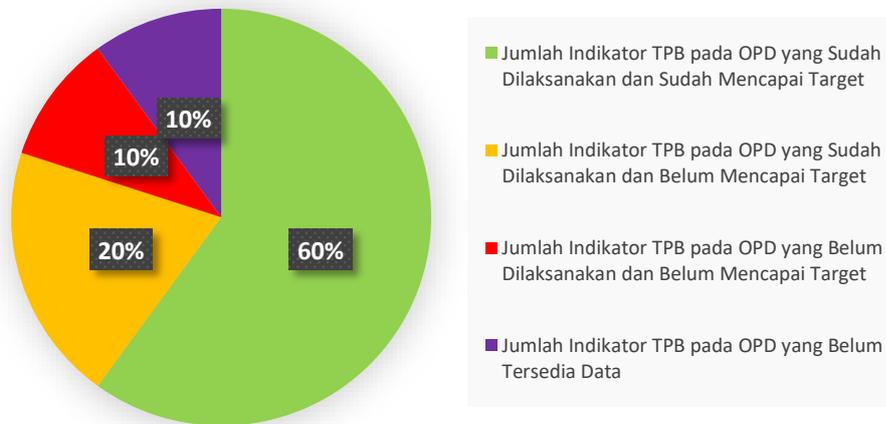
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	3,1%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	belum ada insentif	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) telah menganggarkan Rp 1.126.031.400; atau sebesar 16% dari total anggaran Dispangtan sebesar Rp 7.223.369.269; untuk pelaksanaan 7 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.16 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Dishub melaksanakan sebanyak 4 indikator TPB yang tersebar pada TPB nomor 11 dan 16. Dari 4 indikator yang telah dilaksanakan

oleh Diskominfoarpus, 2 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 1 indikator belum dilaksanakan, sedangkan 1 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-17 Persentase Capaian Indikator TPB pada Dishub Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Dishub secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-17**.

Tabel 5-17 Capaian Indikator TPB pada Dishub

No.	Indikator TPB	Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
	Indikator			
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	data belum tersedia	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Data belum tersedia
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Tidak ada	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%,	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

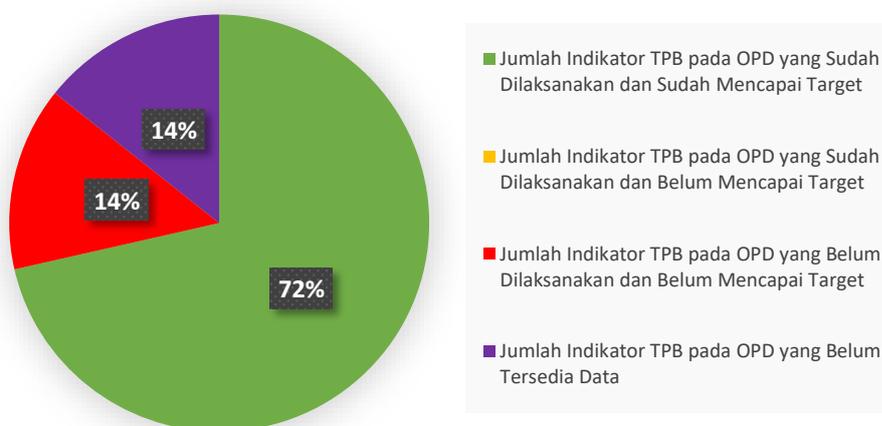
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan (Dishub) telah mengalokasikan Rp 56.384.000; atau sebesar 0,16% dari total anggaran Dishub sebesar Rp 34.915.427.774; untuk pelaksanaan 4 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.17 Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian

Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perindustrian. Disdagkoperin melaksanakan sebanyak 7 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 6, 8, 9, dan 16. Dari 10 indikator yang telah dilaksanakan oleh Disdagkoperin, 5 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 1 indikator belum dilaksanakan, sedangkan 1 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-18 Persentase Capaian Indikator TPB pada Disdagkoperin Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Disdagkoperin secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-18**.

Tabel 5-18 Capaian Indikator TPB pada Disdagkoperin

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	belum ada insentif	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	39,05% - 50%	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	45,69	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5,34	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

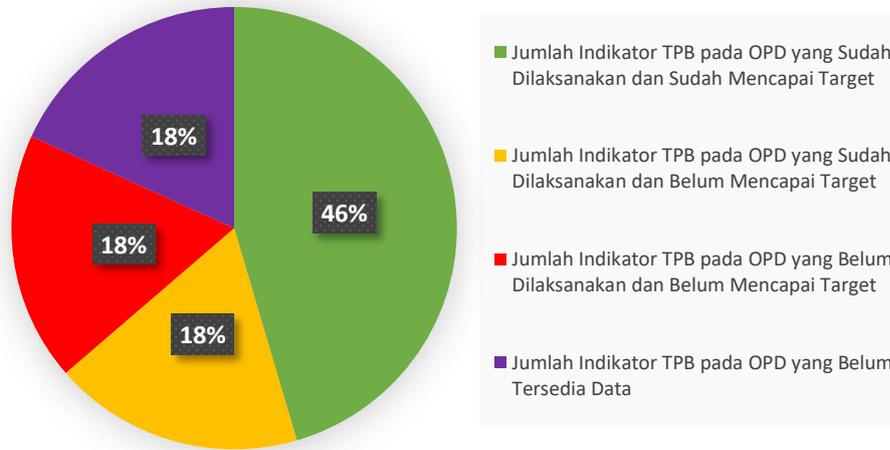
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) dan telah menganggarkan Rp 7.760.156.100; atau sebesar 10% dari total anggaran Disdagkoperin sebesar Rp 75.897.437.841; untuk pelaksanaan 7 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Bappeda melaksanakan sebanyak 11 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 5, 8, 16, dan 17. Dari 11 indikator yang telah dilaksanakan oleh Bappeda, 5 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 2 indikator belum mencapai target RPJMN 2019, 2 target belum dilaksanakan, sedangkan 2 indikator lainnya belum tersedia datanya.



Gambar 5-19 Persentase Capaian Indikator TPB pada Bappeda Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Bappeda secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-19**.

Tabel 5-19 Capaian Indikator TPB pada Bappeda

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	9	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Pertumbuhan (ADHK): 3,36%	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB Per Kapita: Rp 34,61 juta (ADHK)	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	data belum tersedia	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Data belum tersedia



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

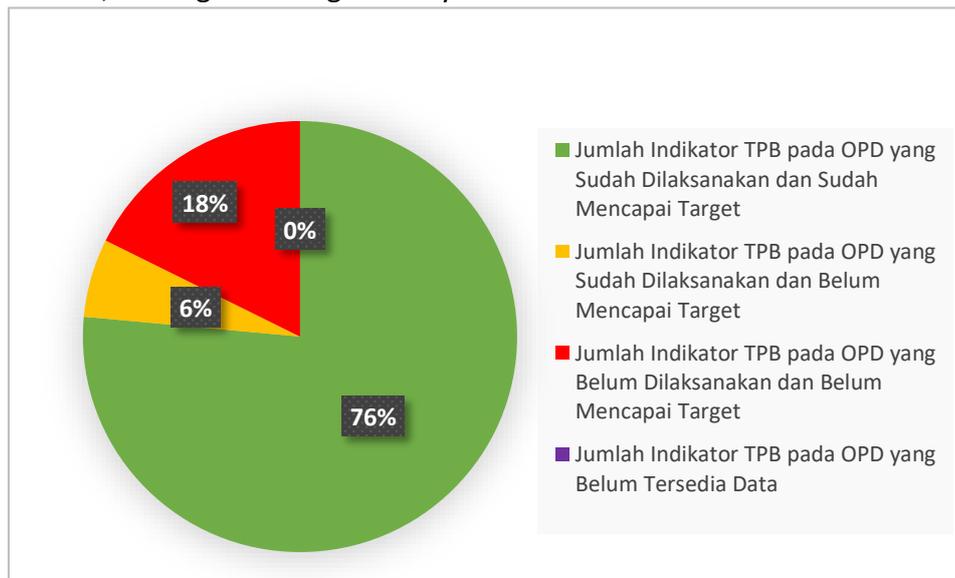
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
	pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	data belum tersedia	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Data belum tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	6,46%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	9,1%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak ada	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tidak ada	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target

Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menganggarkan Rp 48.002.000; atau sebesar 1% dari total anggaran Bappeda

sebesar Rp 6.973.962.087; untuk pelaksanaan 11 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana. BPBD melaksanakan sebanyak 17 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 1, 11, 13, dan 16. Dari 17 indikator yang telah dilaksanakan oleh BPBD, 13 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, 2 indikator belum mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 2 target lainnya belum dilaksanakan.



Gambar 5-20 Persentase Capaian Indikator TPB pada BPBD Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada BPBD secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-20**.

Tabel 5-20 Capaian Indikator TPB pada BPBD

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa (dibuat per	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
		100.000 penduduk)		
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	15 lokasi	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	120 (Kelas Risiko Sedang)	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 2.192.920.000;	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa (dibuat per 100.000 penduduk)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tidak ada sistem peringatan dini	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target



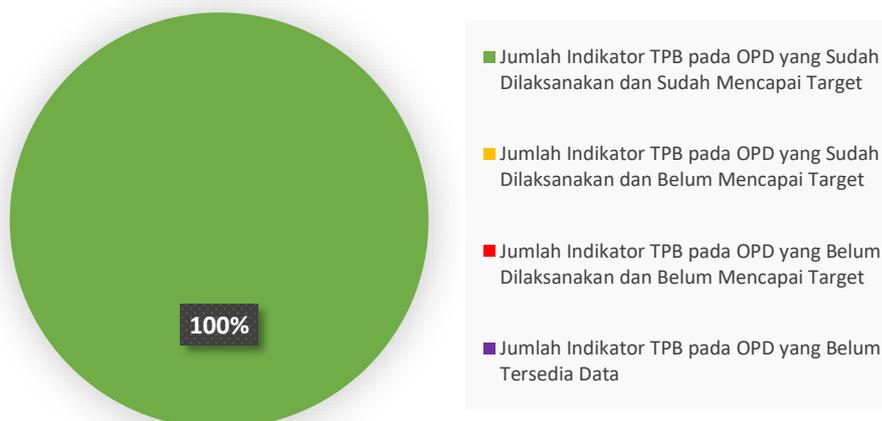
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 2.192.920.000;	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Ada	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Tidak Ada	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tidak Ada	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menganggarkan Rp 1.695.944.890; atau sebesar 53% dari total anggaran BPBD sebesar Rp 3.199.459.317; untuk pelaksanaan 17 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. BKPSDMD melaksanakan sebanyak 3 indikator TPB, yaitu TPB nomor 16. Dari 3 indikator yang telah dilaksanakan oleh BKPSDMD, seluruhnya telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-21 Persentase Capaian Indikator TPB pada BKPSDMD Kota Cimahi (Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada BKPSDMD secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-21**.

Tabel 5-21 Capaian Indikator TPB pada BKPSDMD

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

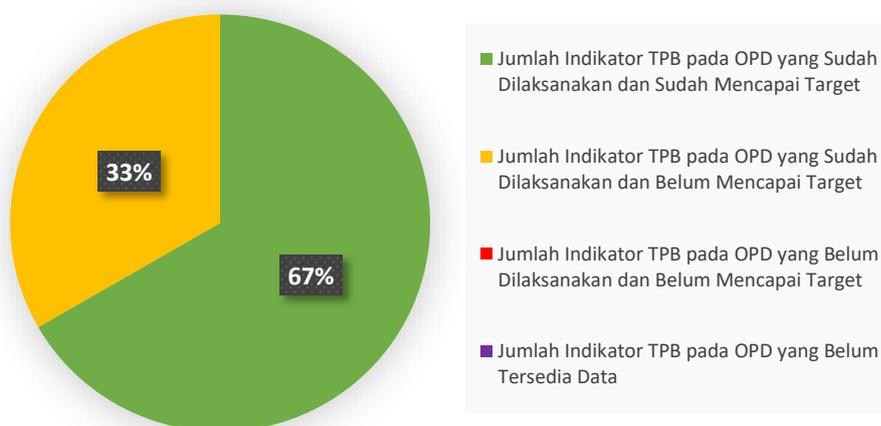
Tahun 2017 – 2022

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	26,32%	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah menganggarkan Rp 817.627.000; atau sebesar 10% dari total anggaran BKPSDMD sebesar Rp 8.180.844.872; untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.21 Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan daerah. Bappenda melaksanakan sebanyak 3 indikator TPB, yaitu TPB nomor 16 dan 17. Dari 3 indikator yang telah dilaksanakan oleh Bappenda, 2 indikator telah mencapai target RPJMN 2019, sedangkan 1 indikator lainnya belum mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-22 Persentase Capaian Indikator TPB pada Bappenda Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Bappenda secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-22**.

Tabel 5-22 Capaian Indikator TPB pada Bappenda

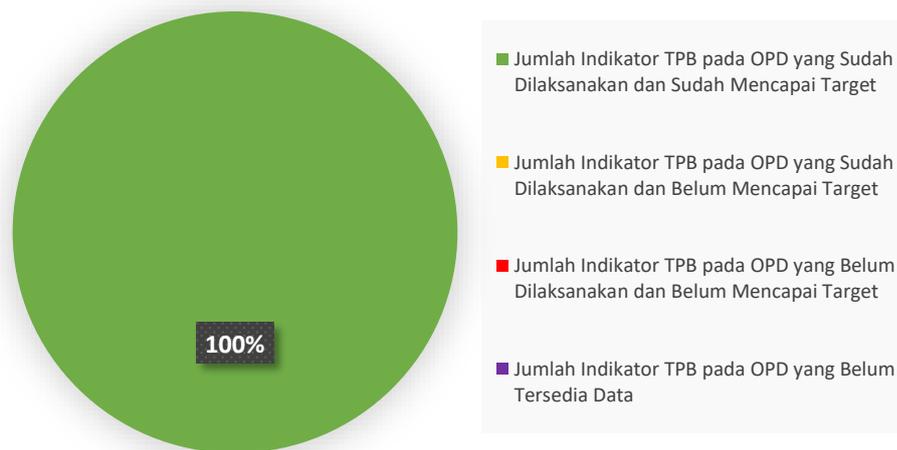
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,46%	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target

Pada tahun 2018 Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah menganggarkan Rp 3.050.864.516; atau sebesar 58% dari total anggaran Bappenda sebesar Rp 5.223.801.121; untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai bendahara daerah. BPKAD melaksanakan sebanyak 3 indikator TPB, yaitu nomor 16 dan 17. Dari 3 indikator yang dilaksanakan oleh BPKAD, seluruhnya telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-23 Persentase Capaian Indikator TPB pada BPKAD Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada BPKAD secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-23**.

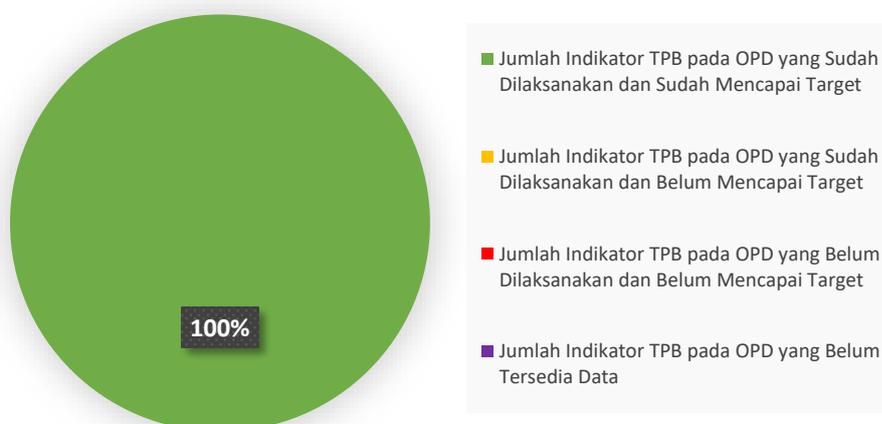
Tabel 5-23 Capaian Indikator TPB pada BPKAD

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	9,1%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menganggarkan Rp 150.000.000; atau sebesar 17% dari total anggaran BPKAD sebesar Rp 882.330.990; untuk pelaksanaan 3 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.23 Kecamatan

Kecamatan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Dalam analisa capaian TPB ini, dengan mempertimbangkan bahwa capaian yang dihitung adalah capaian Kota Cimahi secara keseluruhan, dan setiap Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama, maka analisa capaian TPB ini dilakukan terhadap capaian dari seluruh Kecamatan. Kecamatan melaksanakan sebanyak 5 indikator TPB. Indikator tersebut tersebar pada TPB nomor 1, 8, 9, dan 16. Dari 5 indikator yang dilaksanakan Kecamatan, seluruh indikator telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-24 Persentase Capaian Indikator TPB pada Kecamatan Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Kecamatan di Kota Cimahi secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-24**.

Tabel 5-24 Capaian Indikator TPB pada Kecamatan

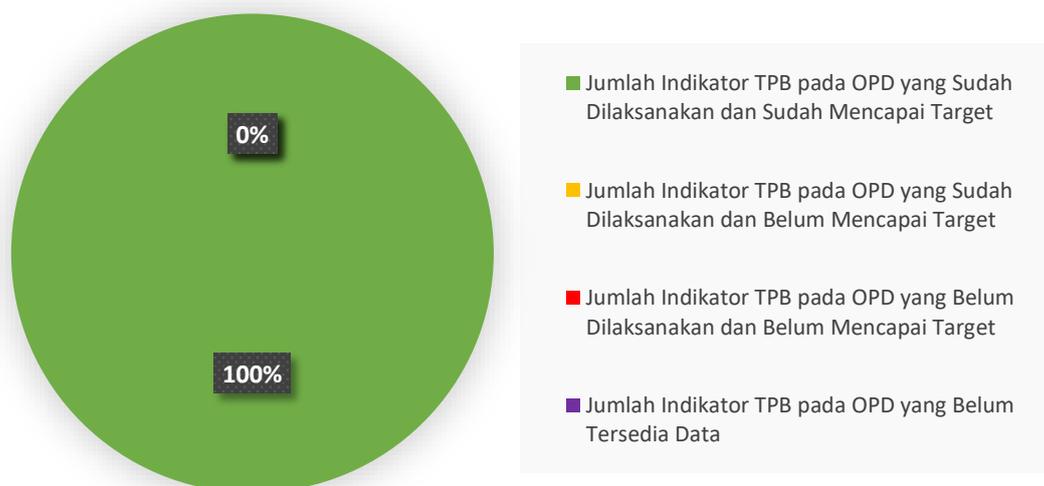
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,94%	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	39,05% - 50%	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	98%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%,	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Kecamatan telah menganggarkan Rp 23.486.769.465; atau sebesar 61,5% dari total anggaran Kecamatan sebesar Rp 38.205.534.350; untuk pelaksanaan 5 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.24 Inspektorat

Inspektorat melaksanakan sebanyak 2 indikator TPB, dari 2 indikator yang telah dilaksanakan oleh inspektorat, kedua indikator telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-25 Persentase Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Inspektorat secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-25**.

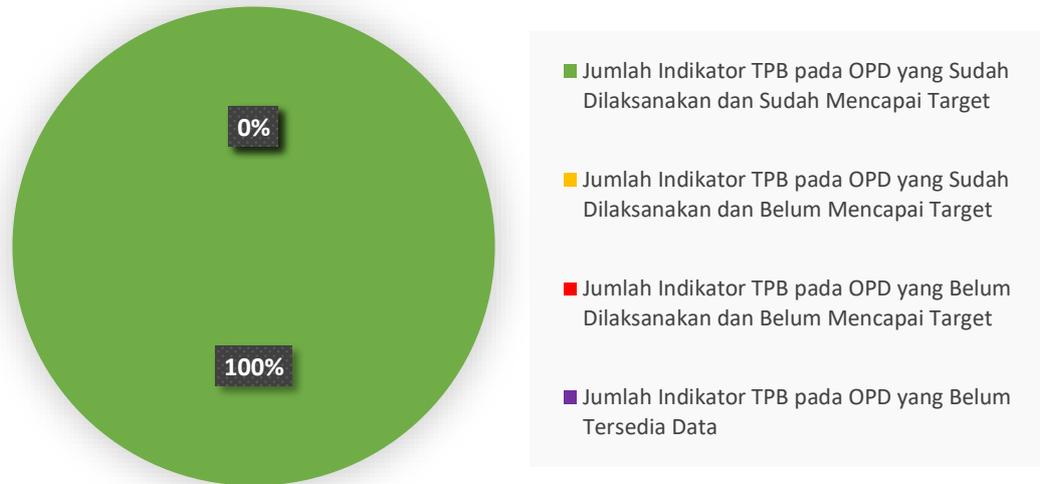
Tabel 5-25 Capaian Indikator TPB pada Inspektorat

Indikator TPB		Capaian (<i>existing</i>)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Inspektorat telah menganggarkan Rp 1.793.250.900; atau sebesar 41,38% dari total anggaran Inspektorat sebesar Rp 4.333.577.503; untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.25 Kesatuan Bangsa

Kesatuan bangsa melaksanakan sebanyak 2 indikator TPB, dari 2 indikator yang telah dilaksanakan oleh kesatuan bangsa, kedua indikator telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-26 Persentase Capaian Indikator TPB pada Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Kesatuan Bangsa secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-26**.

Tabel 5-26 Capaian Indikator TPB pada Kesatuan Bangsa

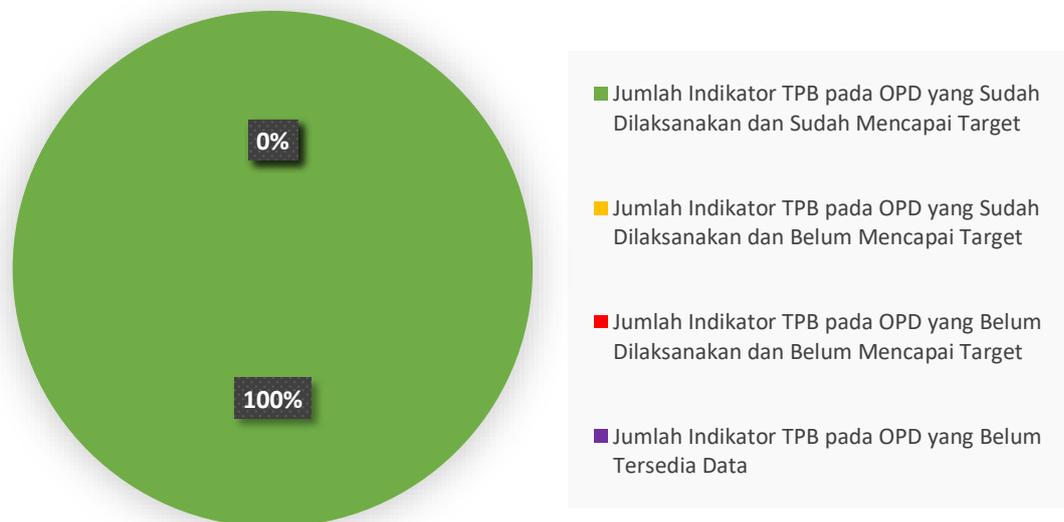
Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L:	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Indikator TPB		Capaian (existing)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
			60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	

Pada tahun 2018 Kesatuan Bangsa telah menganggarkan Rp 23.895.400; atau sebesar 1% dari total anggaran Kesatuan Bangsa sebesar Rp 4.549.188.900; untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

5.26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satpol PP dan pemadam kebakaran melaksanakan sebanyak 2 indikator TPB, dari 2 indikator yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan pemadam kebakaran, kedua indikator telah mencapai target RPJMN 2019.



Gambar 5-27 Persentase Capaian Indikator TPB pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Adapun capaian indikator TPB pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5-27**.

Tabel 5-27 Capaian Indikator TPB pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

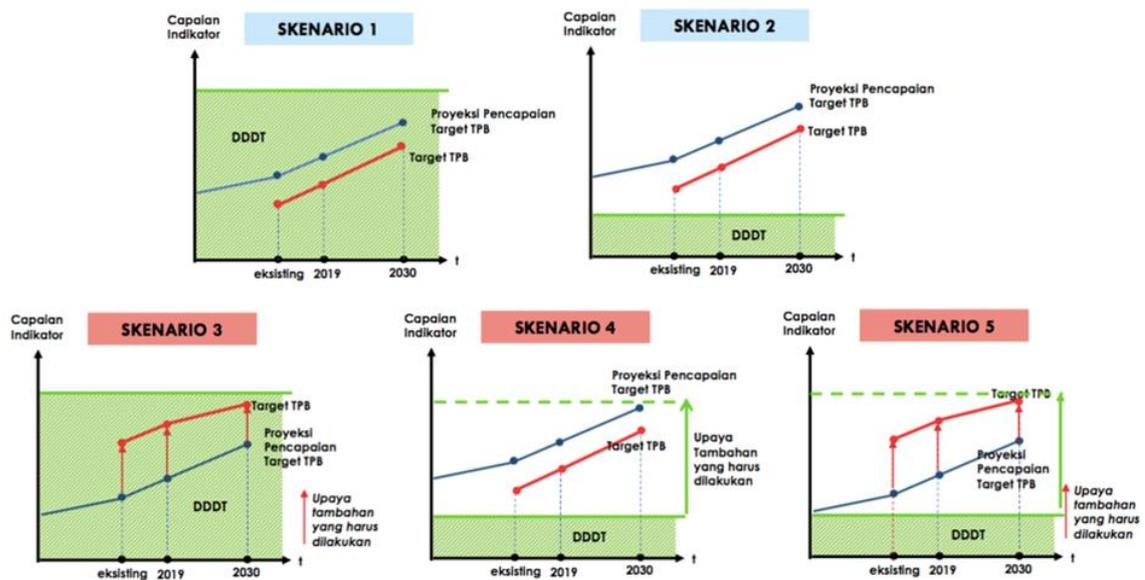
Indikator TPB		Capaian (<i>existing</i>)	Target RPJMN 2019	Gap Capaian dengan Target RPJMN 2019
No.	Indikator			
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indeks = B	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SatpolPP Damkar) telah mengalokasikan Rp 99.346.000; atau sebesar 1% dari total anggaran SatpolPP Damkar sebesar Rp 10.110.509.569; untuk pelaksanaan 2 indikator TPB sesuai kewenangannya.

6 Alternatif Skenario dan Rekomendasi

6.1 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Kota Cimahi

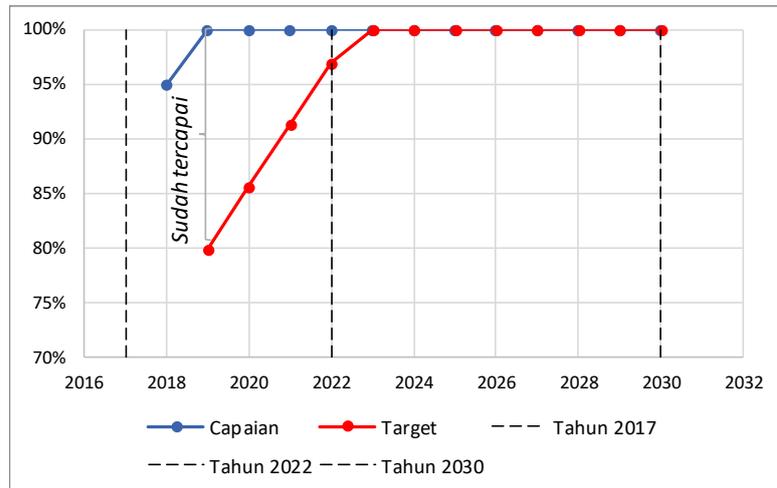
Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan dengan upaya tambahan pencapaian target TPB, seperti ditunjukkan pada **Gambar 6-1**. Pada sub-bab ini, akan diuraikan mengenai skenario pencapaian target TPB pada setiap isu prioritas di Kota Cimahi.



Gambar 6-1 Skenario Pencapaian Target TPB
(Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2018)

6.1.1 Skenario Pencapaian Target Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (TPB 11)

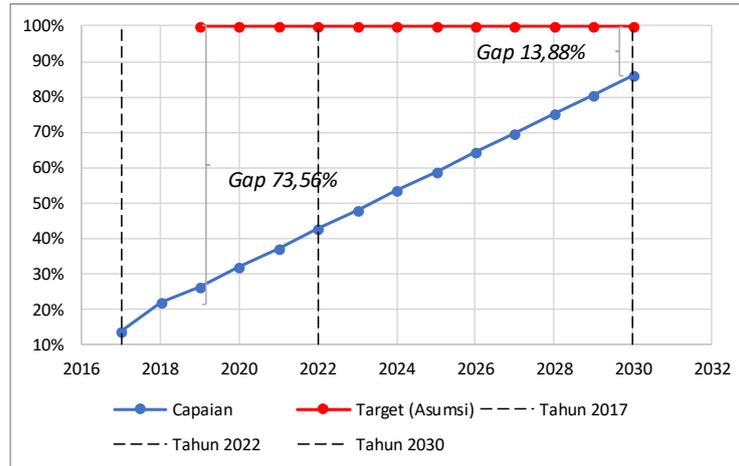
Umumnya, sampah menjadi salah satu permasalahan utama yang terdapat pada daerah perkotaan. Namun berdasarkan laporan dari hasil capaian terkait penanganan sampah, Kota Cimahi berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Target tahun 2019 adalah peningkatan cakupan penanganan sampah perkotaan hingga 80% dan hasil laporan capaian menunjukkan bahwa di tahun 2018, sebanyak 95% permasalahan persampahan dapat ditangani. Jika diproyeksikan dengan menggunakan skenario *Business as Usual* (BAU), penanganan masalah sampah di Kota Cimahi telah sepenuhnya dapat tercapai di tahun 2019 (**Gambar 6-2**).



Gambar 6-2 Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani
(Sumber: hasil analisis, 2020)

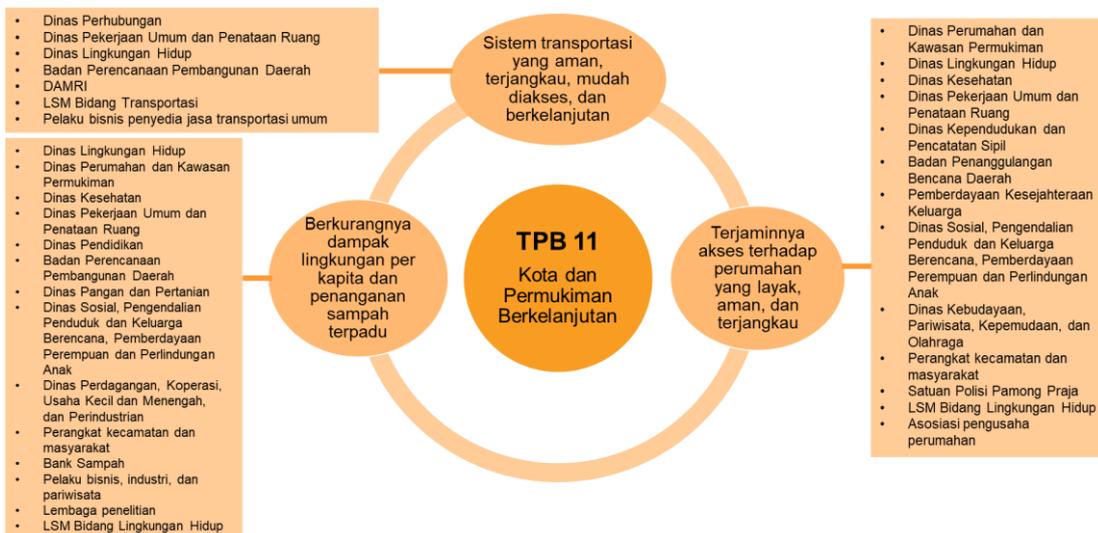
Meskipun indikator terkait penanganan sampah sudah tercapai dengan nilai yang baik, TPB 11 menjadi isu prioritas pertama di Kota Cimahi. Hal ini terkait dengan belum tercapainya indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Selain itu, belum tersedianya sistem dan infrastruktur yang baik bidang transportasi umum dan kebencanaan juga menjadi salah satu faktor pendorong TPB 11 menjadi isu prioritas pertama.

Pada tahun 2016, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Cimahi adalah 260 unit dari 2.339 unit. Sementara di tahun 2017 dan 2018, jumlah hunian yang belum layak mengalami penurunan. Pada tahun 2017, dari 2.079 unit hunian yang belum layak dapat diperbaiki sebanyak 285 unit dan di tahun 2018 terdapat 394 unit dari 1.794 unit. Pada PERPRES 59/2017 disampaikan bahwa salah satu target nasional adalah tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019. Jika menggunakan skenario BAU, target bahwa sebanyak 2.339 unit hunian yang belum layak di Kota Cimahi menjadi seluruhnya layak huni dan terjangkau masih belum dapat tercapai di tahun 2030 dengan gap sebesar 13,88% (**Gambar 6-3**). Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya lebih untuk membuat seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kota Cimahi.



Gambar 6-3 Proyeksi Capaian dan Target: Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kota dan permukiman berkelanjutan (TPB 11) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) berkurangnya dampak lingkungan per kapita dan penanganan sampah terpadu; (2) terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau; serta (3) sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-4**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 11 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada Error! Reference source not found..



Gambar 6-4 *Outcomes* dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 11 di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-1 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan Pencapaian TPB 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Berkurangnya dampak lingkungan per kapita dan penanganan sampah terpadu	a. Dinas Lingkungan Hidup	a. Peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota.	Program pengelolaan persampahan.
	b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	b. Pengelolaan persampahan perkotaan.	Program pengelolaan persampahan.
	c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.	Program penelitian dan pengembangan daerah.
	d. Bank Sampah	d. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah kota.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
	e. Pelaku bisnis, industri, dan pariwisata f. Lembaga penelitian g. LSM Bidang Lingkungan Hidup	e. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
	b. Dinas Lingkungan Hidup		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
	c. Dinas Kesehatan		Program pengelolaan persampahan.
	d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	e. Dinas		

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah g. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga h. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga j. Perangkat kecamatan dan masyarakat k. Satuan Polisi Pamong Praja l. LSM Bidang Lingkungan Hidup m. Asosiasi pengusaha perumahan		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Program penyelenggaraan jalan
		b. Peningkatan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.	Program penanggulangan bencana.
		c. Pengembangan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lainnya.	Program penyelenggaraan penataan ruang.
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
			Program kawasan permukiman
		d. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.	Program perencanaan lingkungan hidup
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
		e. Pengurangan dampak limbah berbahaya	Program pengendalian Bahan Berbahaya

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		terhadap kawasan permukiman.	dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).
		f. Pemeliharaan lingkungan permukiman dan perkotaan yang aman, sehat, dan bersih.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan	a. Dinas Perhubungan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Lingkungan Hidup d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. DAMRI f. LSM Bidang Transportasi g. Pelaku bisnis penyedia jasa transportasi umum	a. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan lalu lintas jalan baik di dalam kota maupun antar kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Bandung Raya.	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program penyelenggaraan jalan
		b. Pengembangan sistem transportasi umum dan sarana transportasi rendah emisi.	Program penelitian dan pengembangan daerah. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

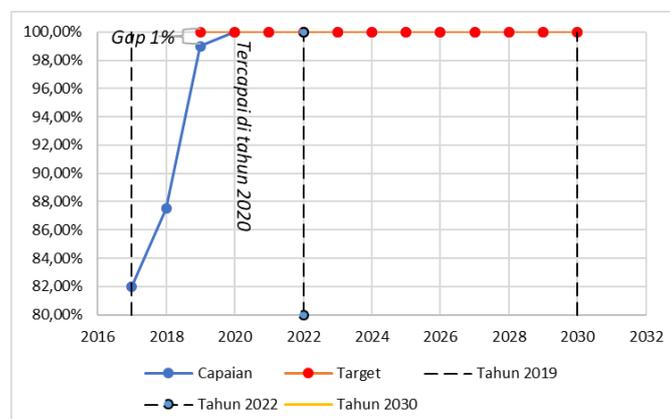
Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.2 Skenario Pencapaian Target Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)

Air bersih merupakan merupakan permasalahan yang cukup serius bagi Kota Cimahi. Sekitar 79,66% wilayahnya memiliki kondisi daya dukung penyedia air bersih yang telah melampaui ambang batas (**Gambar 3-23**). Kebutuhan air total di Kota Cimahi melebihi jumlah ketersediaan air permukaan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya kondisi defisit ketersediaan air pada tahun 2016. Berdasarkan proyeksi menggunakan skenario BAU (*business as usual*), hingga tahun 2030 Kota Cimahi masih memiliki kondisi defisit ketersediaan air (**Gambar 3-24**). Selisih atau defisit ketersediaan air ini semakin besar dari tahun ke tahun karena ketersediaan air permukaan semakin berkurang, sementara kebutuhannya terus meningkat. Namun pada tahun 2070, jumlah kebutuhan air untuk lahan dapat melebihi jumlah ketersediaan air atau mengalami kondisi surplus. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk mengefisienkan penggunaan air untuk kebutuhan lahan dan kebutuhan domestik (skenario non-BAU).

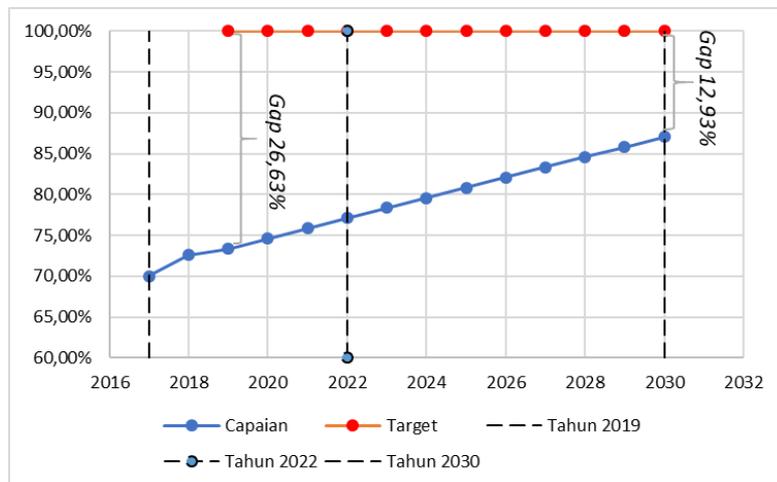
Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, Kota Cimahi juga dihadapkan dengan permasalahan belum optimalnya akses terhadap air bersih dan kualitas layanan air bersih yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Pada tahun 2018 hanya terdapat 87,51% rumah tangga di Kota Cimahi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan. Capaian ini masih belum mencapai target nasional pada tahun 2019 yakni 100%, sehingga masih terdapat *gap* sekitar 14,74%. Dengan menggunakan skenario BAU dan diproyeksikan hingga tahun 2030, Kota Cimahi mampu mencapai target 100% pada tahun 2020 (

Gambar 6-5). Maka, diperlukan adanya upaya lebih untuk dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.



Gambar 6-5 Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Selain air bersih, sanitasi juga termasuk indikator yang masih memiliki gap besar dalam TPB 6. Pada tahun 2018, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak berkelanjutan adalah sekitar 72,70%. Dengan target nasional 100% pada tahun 2019, maka masih terdapat gap sebesar 27,30%. Dengan skenario BAU, jumlah persentase yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak semakin meningkat. Namun hasil capaian proyeksi masih belum mampu mencapai target nasional pada tahun 2030. Dengan target sebesar 100% pada tahun 2030, nilai capaian proyeksi hanya mencapai 87,07% dan masih terdapat gap sebesar 12,93% (**Gambar 6-6**). Sehingga sangat diperlukan adanya upaya lebih agar dapat mencapai akses universal dan merata terhadap sanitasi yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Gambar 6-6 Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi yang Layak di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target air bersih dan sanitasi layak (TPB 6) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air; (2) pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai; serta (3) pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-7**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 6 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada Error! Reference source not found..



Gambar 6-7 Outcomes dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 6 di Kota Cimahi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-2 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau.	a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Perusahaan Daerah Air Minum f. Perangkat kecamatan dan masyarakat g. LSM Bidang Kesehatan h. LSM Bidang Lingkungan Hidup	a. Pengelolaan peyediaan air minum.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
		b. Pengelolaan sumber air bersih.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		c. Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
			Program pengelolaan dan pengembangan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			sistem penyediaan air minum
2. Pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Perangkat kecamatan dan masyarakat h. LSM Bidang Kesehatan i. LSM Bidang Lingkungan Hidup	a. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah kota.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Program penelitian dan pengembangan daerah.
		b. Peningkatan pelayanan sanitasi bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	Program Kawasan Permukiman
		c. Edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya perilaku hidup sehat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS).
		d. Pengelolaan sampah dan peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota.	Program pengelolaan persampahan.
		e. Pengelolaan sistem drainase perkotaan.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
Program penyelenggaraan jalan			

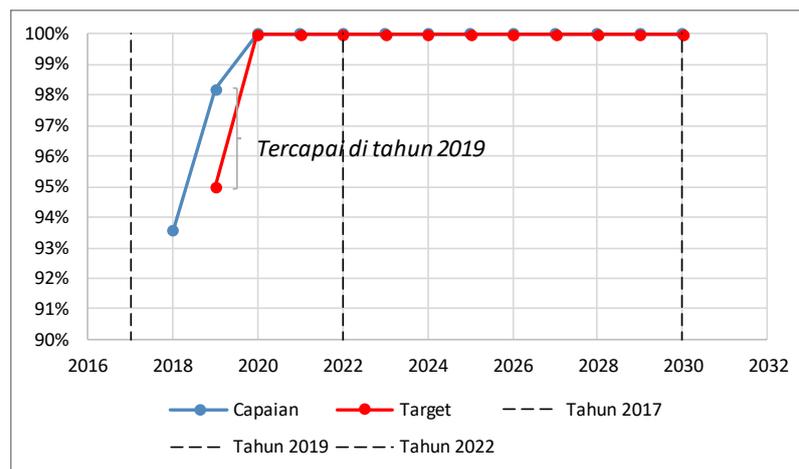
Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Dinas Pendidikan e. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) f. Perangkat kecamatan dan masyarakat g. Pelaku usaha h. LSM Bidang Lingkungan Hidup 	a. Pengelolaan sumber air bersih.	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Koordinasi vertikal dengan Provinsi, untuk melaksanakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
		b. Peningkatan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
		c. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
		d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber air bersih.	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.3 Skenario Pencapaian Target Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)

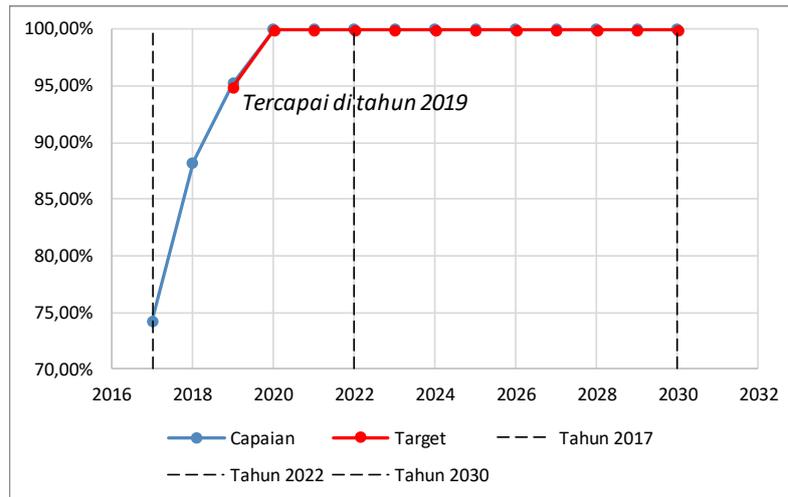
Imunisasi adalah salah satu upaya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang penting untuk dilakukan sejak dini. Salah satu indikator yang belum mencapai

target pada TPB 3 terkait kehidupan sehat dan sejahtera di Kota Cimahi pada tahun 2018 adalah imunisasi dasar lengkap pada bayi. Pada tahun 2018, presentasi imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah sebesar 93,59%, sementara target untuk tahun 2019 adalah 95% sehingga masih perlu peningkatan sebesar 1,41%. Jika diproyeksikan menggunakan BAU, nilai ini seharusnya sudah dapat tercapai di tahun 2019 (**Gambar 6-8**) dengan proyeksi capaian indikator imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kota Cimahi bernilai 98,19%.



Gambar 6-8 Proyeksi Capaian dan Target: Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
(Sumber: hasil analisis, 2020)

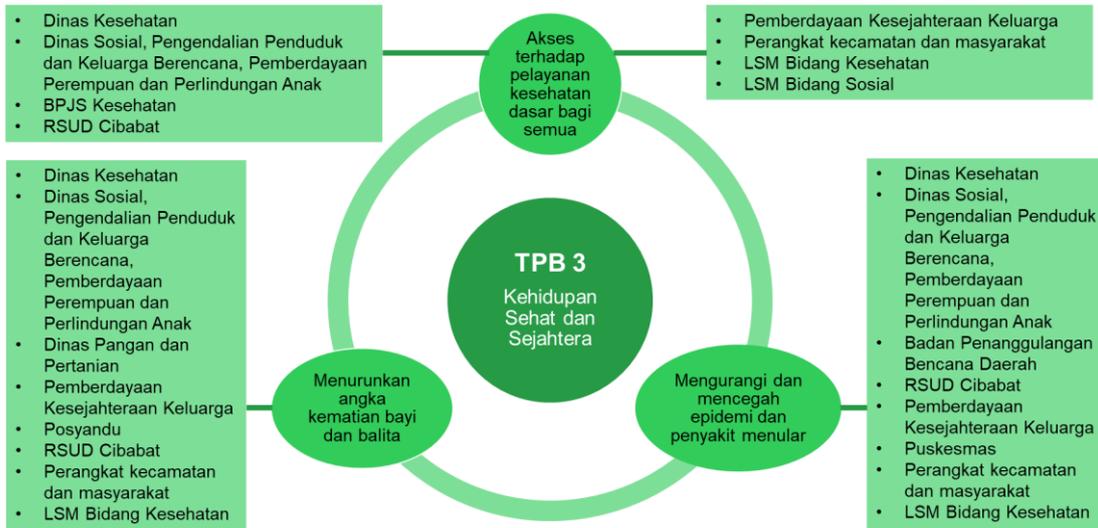
Terciptanya kehidupan yang sehat dan sejahtera juga akan bergantung kepada pelayanan kesehatan untuk masyarakat, seperti adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2018, cakupan JKN di Kota Cimahi adalah sebesar 88,26%. Nilai ini belum mencapai target nasional 2019 yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Dengan nilai capaian sebelumnya di tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 70,72% dan 74,26%, capain hingga tahun 2030 diproyeksikan dengan menggunakan skenario BAU (**Gambar 6-9**). Hasil proyeksi menunjukkan bahwa indikator cakupan JKN dengan target nasional tahun 2019 seharusnya sudah dapat terpenuhi di tahun 2019 dengan nilai capaian sebesar 95,29%.



Gambar 6-9 Proyeksi Capaian dan Target: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Skenario BAU yang memproyeksikan bahwa indikator tersebut diatas seharusnya dapat terpenuhi di tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian Kota Cimahi cukup bagus. Namun, hasil analisis isu menunjukkan bahwa TPB 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera termasuk dalam isu prioritas Kota Cimahi. Hal ini disebabkan hasil analisis isu menunjukkan bahwa masalah kesehatan menjadi salah satu isu utama dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 seperti belum optimalnya kualitas kesehatan dan masih tingginya pertumbuhan penduduk, dan beberapa isu lainnya yang berpengaruh terhadap kehidupan sehat dan sejahtera.

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) menurunkan angka kematian bayi dan balita; (2) mengurangi dan mencegah epidemi dan penyakit menular; serta (3) akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-10**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 3 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada Error! Reference source not found..



Gambar 6-10 Outcomes dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 3 di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-3 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera

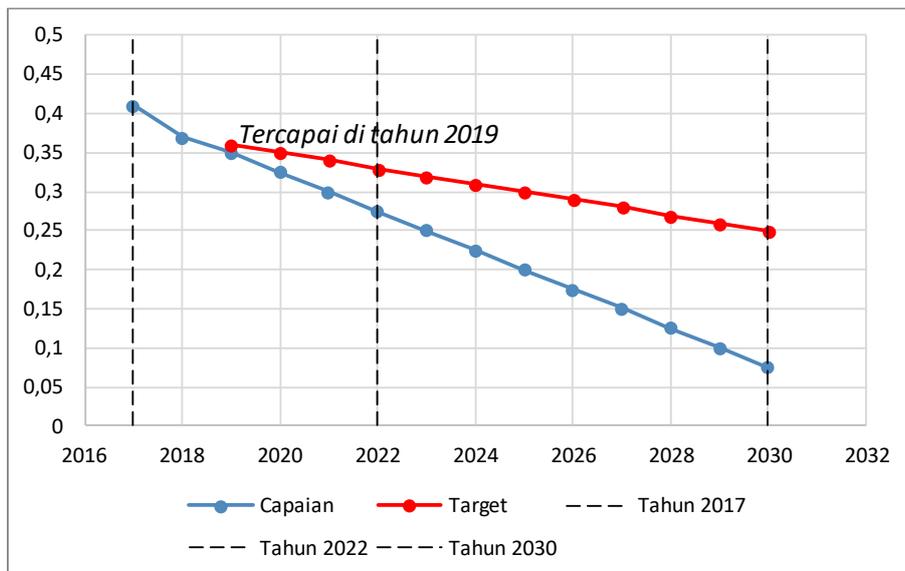
Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. BPJS Kesehatan d. RSUD Cibabat e. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga f. Perangkat kecamatan dan masyarakat g. LSM Bidang Kesehatan h. LSM Bidang Sosial	a. Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
Mengurangi dan mencegah epidemi dan	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial, Pengendalian	a. Peningkatan identifikasi dan pencegahan dari	Program pemenuhan upaya kesehatan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
penyakit menular.	Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. RSUD Cibabat e. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga f. Puskesmas g. Perangkat kecamatan dan masyarakat h. LSM Bidang Kesehatan	epidemi dan penyakit menular.	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program penelitian dan pengembangan daerah.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
		c. Pembinaan dan pemantauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Dinas Pangan dan Pertanian d. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga e. Posyandu f. RSUD Cibabat g. Perangkat kecamatan dan masyarakat h. LSM Bidang Kesehatan	a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
		c. Penyuluhan mengenai imunisasi dan kesehatan anak kepada masyarakat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.4 Skenario Pencapaian Target Berkurangnya Kesenjangan (TPB 10)

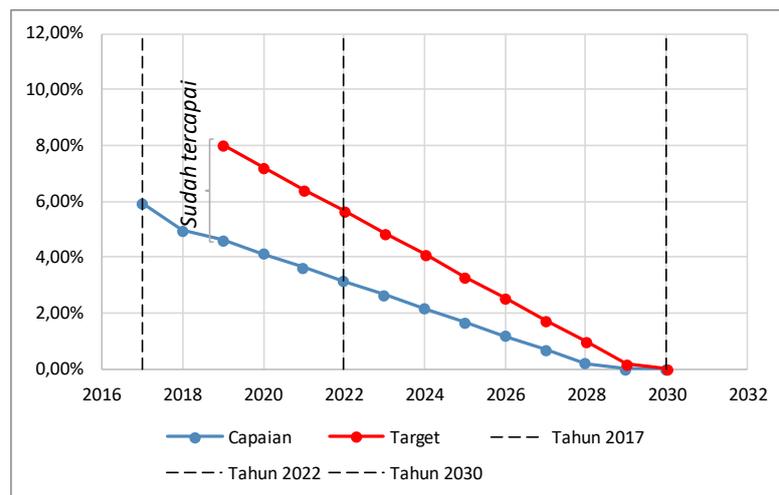
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan adalah koefisien gini. Semakin rendah nilai dari koefisien gini menunjukkan semakin rendah pula kesenjangan di suatu wilayah. Target koefisien gini pada tahun 2019 di Kota Cimahi adalah sebesar 0,36. Nilai ini belum dapat dipenuhi pada tahun 2018 karena capaian nilai ginya adalah 0,37, masih perlu penurunan sebesar 0,1%. Dengan kondisi BAU, target tahun 2019 tersebut seharusnya sudah dapat terpenuhi pada tahun 2019 dengan proyeksi capaian bernilai 0,35 (**Gambar 6-11**). Nilai dari koefisien gini di Kota Cimahi hasil proyeksi dengan skenario BAU menunjukkan nilai yang terus menurun dari tahun ke tahun.



Gambar 6-11 Proyeksi Capaian dan Target: Koefisien Gini
(Sumber: hasil analisis, 2020)

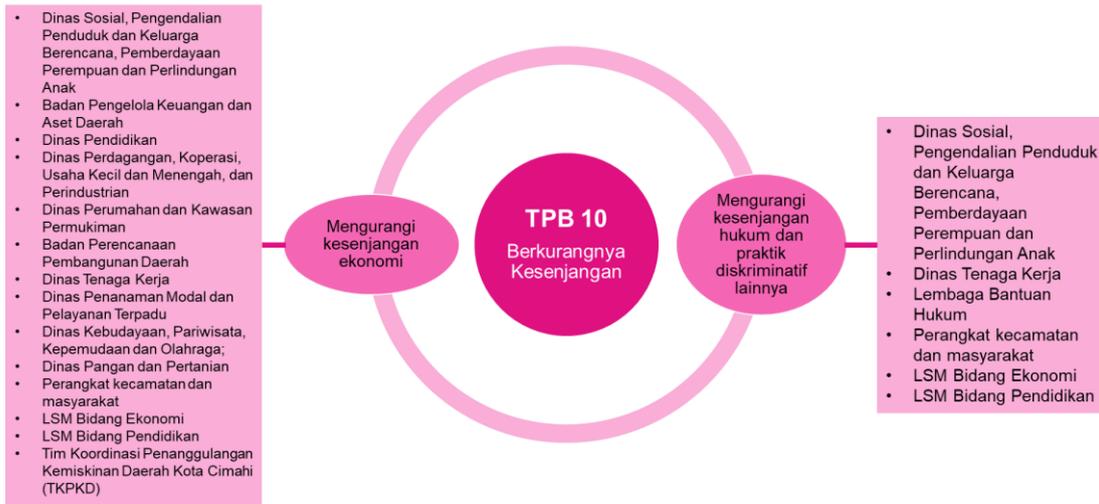
Koefisien gini yang menunjukkan nilai rendah dan proyeksi BAU yang terus menurun ini selaras dengan kondisi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Berdasarkan data capaian dan target terkait persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Cimahi, nilai target di tahun 2019 yaitu presentase dapat menurun hingga 8% bahkan sudah dapat dicapai pada tahun 2017 dengan presentase sebesar 5,92% dan terus menurun di tahun 2018 dengan angka 4,94%. Hasil proyeksi dengan kondisi BAU menunjukkan bahwa presentase kondisi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur akan terus mengalami penurunan dan dapat sepenuhnya diatasi pada tahun 2030 (**Gambar 6-12**).

Walaupun kondisi koefisien gini dan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur menunjukkan nilai capaian yang baik, TPB 10 terkait berkurangnya kesenjangan masih menjadi isu prioritas di Kota Cimahi karena terdapatnya gap antara capaian yang belum dapat memenuhi target pada tahun 2018 dan juga hasil analisis TPB dengan isu RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 menunjukkan nilai ranking yang cukup tinggi, seperti belum optimalnya kualitas pendidikan, masih tingginya angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka, dan beberapa isu lainnya yang berpengaruh terhadap kesenjangan.



Gambar 6-12 Proyeksi Capaian dan Target: Persentase Penduduk yang hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
(Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat dua *outcomes* yang berkaitan dengan target berkurangnya kesenjangan (TPB 10) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) mengurangi kesenjangan ekonomi; dan (2) mengurangi kesenjangan hukum dan praktik diskriminatif lainnya. Kedua *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-13**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 10 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada **Tabel 6-4**.



Gambar 6-13 Outcomes dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 10 di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-4 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Mengurangi kesenjangan ekonomi.	a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah c. Dinas Pendidikan d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman f. Badan Perencanaan	a. Peningkatan pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah.	Program pengelolaan keuangan daerah.
			Program perekonomian dan pembangunan.
		b. Peningkatan kesempatan kerja dan usaha.	Program penempatan tenaga kerja.
			Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
			Program pengembangan UMKM.
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program	
	Pembangunan Daerah g. Dinas Tenaga Kerja h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga j. Dinas Pangan dan Pertanian k. Perangkat kecamatan dan masyarakat l. LSM Bidang Ekonomi m. LSM Bidang Pendidikan n. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Cimahi (TKPKD)		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program Pelayanan Penanaman Modal	
		c. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyuluhan Pertanian.	
Mengurangi kesenjangan hukum dan praktik diskriminatif lainnya.		a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Dinas Tenaga Kerja c. Lembaga Bantuan Hukum d. Perangkat kecamatan dan masyarakat e. LSM Bidang Ekonomi	a. Peningkatan penegakkan hukum bagi seluruh masyarakat.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
				b. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat.
	Program Hubungan Industrial.			
	Program perlindungan perempuan.			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			

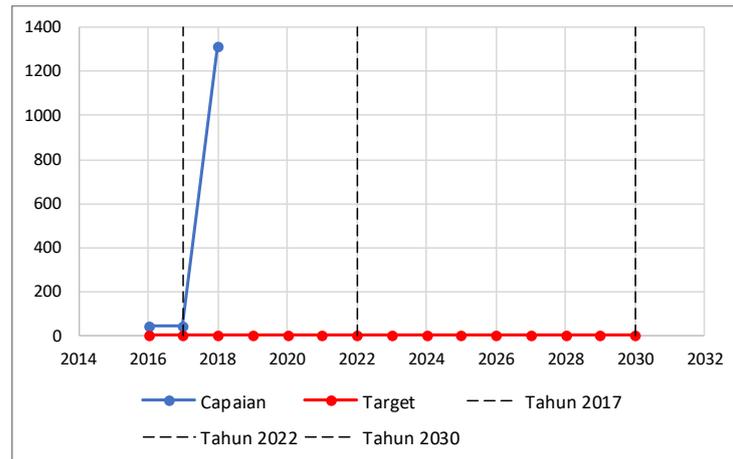
Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	f. LSM Bidang Pendidikan		Program pemberdayaan sosial.
			Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
		c. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.5 Skenario Pencapaian Target Penanggulangan Perubahan Iklim (TPB 13)

Permasalahan terkait perubahan iklim sedang banyak menjadi sorotan baik secara nasional maupun global. Beberapa target nasional terkait penanggulangan perubahan iklim adalah dibuatnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional maupun daerah dan dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan hasil laporan capaian, dokumen ini masih belum dimiliki oleh Kota Cimahi. Selain dibuatnya dokumen tersebut, terdapat pula target nasional berupa menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Hasil capaian di Kota Cimahi menunjukkan bahwa di tahun 2016 dan 2017 terdapat 42 per 100.000 orang korban terdampak bencana. Nilai ini mengalami kenaikan menjadi 1.313 korban di tahun 2018. Sementara itu, pada dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Cimahi 2017-2022 disampaikan bahwa target Kota Cimahi adalah 100% korban dapat dievakuasi. Pada dokumen tersebut disampaikan pula bahwa jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana perlu diminimalisir seiring dengan target di tahun 2030 yaitu secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Berbeda dengan indikator lainnya, karena kejadian bencana merupakan kejadian tidak terduga maka skenario proyeksi menggunakan BAU tidak dapat digunakan. Grafik yang dibuat (**Gambar 6-14**) bertujuan untuk menunjukkan pola bahwa korban yang terdampak bencana mengalami peningkatan di tahun 2018.



Gambar 6-14 Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat satu *outcome* yang berkaitan dengan target penanggulangan perubahan iklim (TPB 13) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam. *Outcome* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-15**. Untuk mewujudkan *outcome* pada TPB 13 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada **Tabel 6-5**.



Gambar 6-15 *Outcome* dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 13 di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-5 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 13 tentang Penanggulangan Perubahan Iklim

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Dinas Kesehatan e. Dinas Pendidikan f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman h. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i. LSM Bidang Lingkungan Hidup j. LSM Bidang Pendidikan k. LSM Bidang Kebencanaan l. Perangkat kecamatan dan peran masyarakat	a. Pengembangan dan penyusunan perencanaan kegiatan dan program terkait pengurangan risiko bencana.	Program penanggulangan bencana.
			Program penanganan bencana.
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Program pengembangan perumahan
			Program perencanaan lingkungan hidup
			Program penyelenggaraan penataan ruang
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
		b. Pengembangan infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim.	Program pengelolaan sumber daya air.
			Program kawasan permukiman
			Program pengembangan keanekaragaman hayati (kehati).
		c. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana.	Program pengembangan perumahan
			Program penyelenggaraan penataan ruang

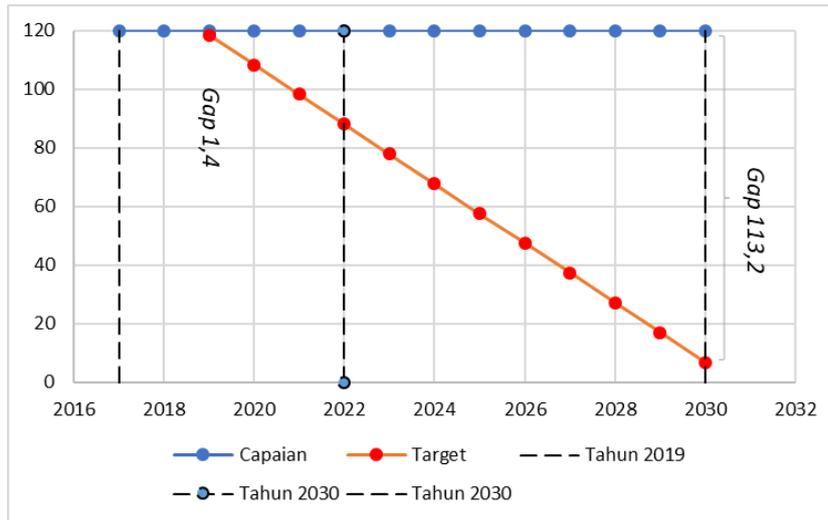
<i>Outcomes</i>	<i>Para Pihak</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>
		d. Peningkatan anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	Program penanganan bencana

Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.6 Skenario Pencapaian Target Tanpa Kemiskinan (TPB 1)

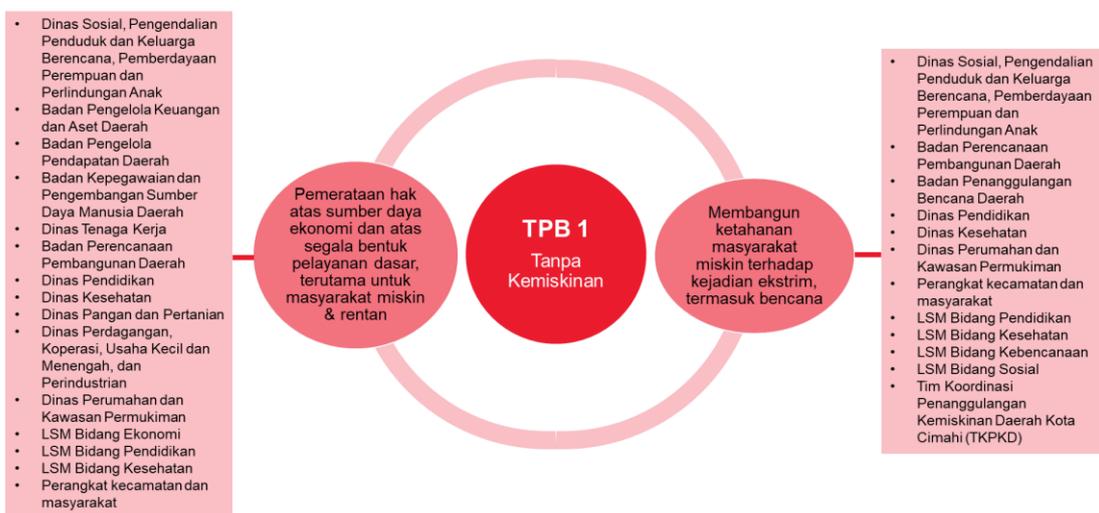
Dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 disebutkan bahwa Kota Cimahi menghadapi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kota Cimahi masih sangat tinggi yaitu sebanyak 29.940 jiwa. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional cukup bagus yaitu sekitar 4.94%. Dengan target menurut Perpres 59/2017 yaitu menurun menjadi 7-8%, maka nilai capaian tersebut sudah mencapai target nasional. Berdasarkan skenario BAU, nilai proyeksi capaian terus semakin menurun dan selalu berada di bawah proyeksi target (Gambar 6-12). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tahun tingkat kemiskinan semakin berkurang dan selalu mencapai target nasional. Mulai tahun 2029, diprediksi persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah 0% atau dengan kata lain tidak ada penduduk miskin. Meskipun capaian untuk indikator ini cukup bagus, namun pemerintah harus tetap melakukan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih optimal agar tetap mencapai target atau bahkan semakin cepat dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Sebagian masyarakat miskin memiliki tingkat adaptasi dan mitigasi akan bencana yang rendah. Hal ini cukup menjadi masalah yang serius mengingat Kota Cimahi memiliki potensi bencana yang tinggi. Pada tahun 2018, capaian indeks risiko berencana adalah 120 (sedang) sedangkan target nasional pada tahun 2019 adalah 118,6. Sehingga masih terdapat gap sekitar 1,40 atau dapat dikatakan belum mencapai target nasional. Dengan skenario BAU, proyeksi target terus mengalami penurunan sementara (**Gambar 6-16**). Namun proyeksi capaian tetap stabil di angka 120 hingga tahun 2030. Hal ini disebabkan nilai capaian antara tahun 2016-2022 yang digunakan untuk proyeksi kedepan bernilai sama. Data *existing* capaian tahun 2016-2018 bernilai 120, sementara data proyeksi capaian 2018-2022 juga bernilai 120 (berdasarkan dokumen renstra BPBD tahun 2017-2018), sehingga diperoleh proyeksi yang bernilai tetap hingga tahun 2030. Kondisi mengakibatkan adanya gap yang cukup besar antara capaian dan target pada tahun 2030, yaitu mencapai 113,2. Sehingga sangat diperlukan upaya lebih untuk menurunkan target dan capaian indeks risiko bencana di Kota Cimahi.



Gambar 6-16 Proyeksi Capaian dan Target: Indeks Risiko Bencana pada Pusat-pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat dua *outcomes* yang berkaitan dengan target tanpa kemiskinan (TPB 1) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan; serta (2) membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana. Kedua *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-17**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 1 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada **Tabel 6-6**.



Gambar 6-17 *Outcomes* dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 1 di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-6 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Kemiskinan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program			
1. Pemerataan hak atas sumber daya ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin & rentan.	a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.			
			Program pendaftaran penduduk.			
			Program pengelolaan pendidikan.			
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah			
	b. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.			
			Program perencanaan tenaga kerja.			
			Program penempatan tenaga kerja.			
			Program hubungan industrial.			
			c. Optimalisasi program pengembangan UMKM.	Program pengembangan UMKM.		
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan		
				c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
						Program perencanaan tenaga kerja.
d. Dinas Tenaga Kerja	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program penempatan tenaga kerja.				
		Program hubungan industrial.				
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.				
		Program perencanaan tenaga kerja.				
f. Dinas Pendidikan	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program penempatan tenaga kerja.				
		Program hubungan industrial.				
g. Dinas Kesehatan	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.				
		Program perencanaan tenaga kerja.				
h. Dinas Pangan dan Pertanian	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program penempatan tenaga kerja.				
		Program hubungan industrial.				
i. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.				
		Program perencanaan tenaga kerja.				
j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program penempatan tenaga kerja.				
		Program hubungan industrial.				
k. LSM Bidang Ekonomi	b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.				
		Program perencanaan tenaga kerja.				

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	l. LSM Bidang Pendidikan m. LSM Bidang Kesehatan n. Perangkat kecamatan dan masyarakat		usaha mikro (UMKM).
		d. Pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok miskin dan rentan.	Program pemberdayaan sosial.
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		e. Peningkatan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Program Perekonomian dan Pembangunan.
2. Membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana	a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. Dinas Pendidikan e. Dinas Kesehatan f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman g. Perangkat kecamatan dan masyarakat h. LSM Bidang Pendidikan i. LSM Bidang Kesehatan j. LSM Bidang Kebencanaan k. LSM Bidang Sosial	a. Optimalisasi kebijakan perlindungan masyarakat miskin, rentan, difabel, anak yatim, dan lanjut usia.	Program perlindungan dan jaminan sosial.
			Program rehabilitasi sosial.
			Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
		b. Pengembangan rencana pengadaan perumahan bersubsidi yang layak huni, aman, murah, dan terjangkau.	Program pengembangan perumahan.
			Program kawasan permukiman
		c. Pengembangan kebijakan pengelolaan kawasan kumuh.	Program kawasan permukiman



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

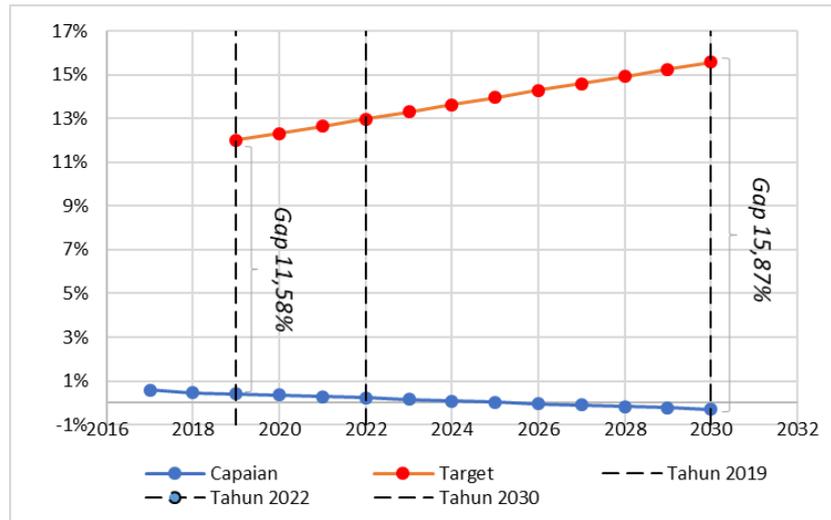
Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	I. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Cimahi (TKPKD)		

Sumber: hasil analisis (2020)

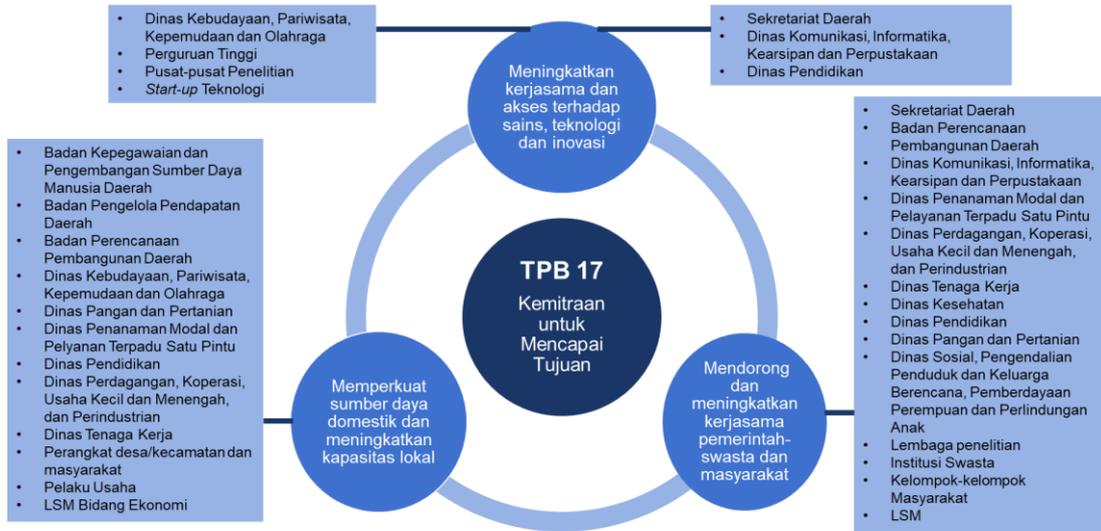
6.1.7 Skenario Pencapaian Target Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17)

Salah satu hal utama yang dibutuhkan dalam penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global adalah pajak. Pajak memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Masalah pajak perlu menjadi perhatian utama di Kota Cimahi. Pada tahun 2018, jumlah rasio penerimaan pajak terhadap PDB relatif sangat kecil yakni hanya mencapai 0,46%. Dengan target nasional sebesar 12% pada tahun 2019, nilai capaian tersebut memiliki *gap* relatif besar hingga 11,58%. Berdasarkan hasil proyeksi menggunakan skenario BAU, jumlah capaian rasio penerimaan pajak justru semakin menurun hingga tahun 2030 (**Gambar 6-18**). Pada tahun 2030 hasil proyeksi capaian menunjukkan nilai -0,30% dan proyeksi target sekitar 15,6%. Sehingga terdapat *gap* cukup besar mencapai 15,87%. Hal ini perlu menjadi perhatian utama yang cukup serius. Sangat diperlukan upaya tambahan agar jumlah rasio penerimaan pajak dapat mencapai target.



Gambar 6-18 Proyeksi Capaian dan Target: Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Terdapat tiga *outcomes* yang berkaitan dengan target kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17) dalam Perubahan RPJMD Kota Cimahi, yaitu (1) memperkuat sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal; (2) mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat; serta (3) meningkatkan kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi. Ketiga *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya sebagaimana yang diilustrasikan pada **Gambar 6-19**. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 17 ini, diperlukan kerjasama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program pada **Tabel 6-7**.



Gambar 6-19 Outcomes dan Para Pihak yang Terlibat dalam Mewujudkan TPB 17 di Kota Cimahi
 (Sumber: hasil analisis, 2020)

Tabel 6-7 Arahan Program dan Kebijakan dalam Mewujudkan TPB 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Memperkuat sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	a. Pengembangan sumber daya dari desa atau kecamatan sesuai potensi unggulan masing-masing.	Program penelitian dan pengembangan daerah.
	b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
	c. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
	d. Dinas Pangan dan Pertanian		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
	e. Dinas Pendidikan		Program pemasaran pariwisata.
	f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	Menengah, dan Perindustrian g. Dinas Tenaga Kerja h. Perangkat desa/kecamatan dan masyarakat i. Pelaku Usaha j. LSM Bidang Ekonomi		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
		b. Peningkatan sinergitas dengan wilayah lain di Kota Cimahi agar dapat saling mendukung kemajuan wilayah.	Program peningkatan kerjasama desa.
2. Meningkatkan kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi	a. Sekretariat Daerah b. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan c. Dinas Pendidikan d. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga e. Perguruan Tinggi f. Pusat-Pusat	a. Peningkatan kerjasama dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi, baik didalam Kota Cimahi maupun keluar Kota Cimahi.	Program penelitian dan pengembangan daerah
		b. Peningkatan akses terhadap teknologi dalam pelayanan publik guna meningkatkan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	Penelitian g. Start-up Teknologi	kepuasan masyarakat.	
3. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat	a. Sekretariat Daerah b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian f. Dinas Tenaga Kerja g. Dinas Kesehatan h. Dinas Pendidikan i. Institusi Swasta j. Dinas Pangan dan Pertanian k. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak l. Lembaga penelitian m. Kelompok-Kelompok Masyarakat n. LSM	a. Peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan.	Program pengelolaan persampahan
			Program Penyuluhan Pertanian.
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
			Program penelitian dan pengembangan daerah.
		b. Peningkatan kerjasama daerah baik dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memajukan Kota Cimahi.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
			Program hubungan industrial.
			Pelibatan komunitas dalam koordinasi vertikal dengan Provinsi terkait program pengelolaan ketenagalistrikan.
			Program pengelolaan persampahan
			Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pemasaran Pariwisata.
Program pengembangan iklim penanaman modal.			

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
			Program pelayanan penanaman modal.

Sumber: hasil analisis (2020)

6.1.8 Keterkaitan Antar TPB Prioritas dengan TPB lainnya

Beberapa tujuan TPB dapat saling berinteraksi satu sama lain (Griggs, et al., 2017). Tujuan-tujuan tersebut didesain sebagai seperangkat prioritas global dan tujuan yang saling bergantung secara fundamental. Interaksi dapat mengarah ke dampak negatif ataupun positif, sehingga TPB prioritas dapat saling berinteraksi dengan TPB prioritas maupun dengan TPB non-prioritas.

Tabel 6-8 Interaksi Antar TPB

TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
1. TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	a. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap bencana sehingga secara signifikan dapat mengurangi jumlah kematian dan orang terdampak serta kerugian ekonomi.
	b. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Kota dan permukiman berkelanjutan memusatkan pertumbuhan populasi global yang dapat memiliki pengaruh kritis terhadap kesehatan fisik dan mental. Perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau dapat mendukung kesehatan manusia dan akses layanan kesehatan, serta mengurangi penyakit tidak menular dan membatasi dampak lingkungan.
2. TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	a. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	Adanya akses layanan air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
	b. TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	Ketersediaan air bersih dapat berpengaruh pada produktivitas pertanian yang pada akhirnya mempengaruhi produksi pangan. Begitu juga sebaliknya, peningkatan produksi pertanian dapat meningkatkan pengambilan air dan memperburuk degradasi air dan tanah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan tata kelola air yang baik serta pengembangan sistem dan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih dan juga peningkatan produktivitas pertanian.
3. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	a. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	Adanya layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat menjamin hak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses pelayanan dasar.
	b. TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	Kesehatan dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa adanya layanan kuantitas dan kualitas makanan yang memadai. Kualitas makanan tergantung dengan produksi dan produktivitas pertanian.
	c. TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	Adanya layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat menciptakan perencanaan kota yang berkelanjutan.
	d. TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim)	Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Perubahan iklim dapat mendorong penyebaran penyakit, berkontribusi terhadap kerawanan pangan dan air, dsb.
4. TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	a. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	Mengurangi kesenjangan dapat menciptakan kebijakan terkait kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial khususnya untuk masyarakat miskin.
	b. TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)	Mengurangi kesenjangan dapat menjamin kesempatan dan mengurangi hukum, kebijakan, dan praktik diskriminasi.
5. TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim)	a. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Perubahan iklim dapat mendorong penyebaran penyakit, berkontribusi terhadap kerawanan pangan dan air, dsb.
	b. TPB 11 (Kota dan Permukiman)	Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam yang dapat menimbulkan korban, kerugian, dan kerusakan. Sehingga diperlukan untuk memperkuat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB Prioritas	Interaksi dengan TPB	Keterangan
	yang Berkelanjutan)	kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya yang terkait dengan perubahan iklim.
6. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	a. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar salah satunya layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
	b. TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar salah satunya layanan pendidikan.
	c. TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	Tanpa kemiskinan dapat menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses pelayanan dasar salah satunya akses layanan air bersih dan sanitasi.
	d. TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	Tanpa kemiskinan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat miskin menghadapi bencana melalui perencanaan kota yang berkelanjutan dan perumahan yang layak dan terjangkau.
7. TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)	a. TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)	Kemitraan dapat meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional terkait sains, teknologi dan inovasi.

Berdasarkan **Tabel 6-8** di atas, diketahui bahwa terdapat empat TPB non prioritas yang berkaitan dengan TPB prioritas yakni TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), dan TPB 16 (Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Arahan program terkait keempat TPB tersebut sudah tercakup pada TPB prioritas yang berkaitan.

6.2 Rekomendasi KLHS untuk Perubahan RPJMD Kota Cimahi

6.2.1 Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Cimahi

6.2.1.1 Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi yang memberikan arah pembangunan hingga tahun 2025 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi dilakukan secara bertahap yang dibagi kedalam rencana pembangunan lima tahunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang merupakan “Tahap Pencapaian”. Berdasarkan evaluasi hasil RPJMD tahun 2019, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu mutatis mutandis dengan penyusunan RPJMD. Tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Pendekatan yang digunakan pada perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

6.2.1.2 Visi Misi Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode

2017-2022 adalah “**MEWUJUDKAN CIMAHU BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA**” dengan pengertian sebagai berikut:

- a. **Maju** mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.
- b. **Agamis** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c. **Berbudaya** mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

- b. **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.**

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi Pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

c. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

d. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

e. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan



yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Selain berdasarkan RPJPD, RPJMD juga disusun dengan memerhatikan rencana tata ruang wilayah. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kota. Rencana tata ruang Kota Cimahi telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 sehingga kebijakan pembangunan disesuaikan dengan RTRW tersebut.

6.2.2 Rekomendasi Berdasarkan TPB Prioritas Kota Cimahi

Subbab ini memuat rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cimahi. Pemberian rumusan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai; hal tersebut disajikan pada **Tabel 6.9** hingga **Tabel 6.15**.

6.2.2.1 Rekomendasi TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tabel 6-9 Rekomendasi terhadap TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) di Kota Cimahi

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
1. Berkurangnya dampak lingkungan per kapita dan penanganan sampah terpadu	Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Cimahi agar dapat tertangani.	a. Peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota.	Program pengelolaan persampahan.	1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	<p>Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan pengadaan anggaran serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan sistem dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah; serta peningkatan upaya kerjasama dengan kabupaten/kota lain di sekitar Kota Cimahi dan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkat sumber (misalnya dengan upaya 3R), tingkat perkotaan (misalnya dengan</p>
		b. Pengelolaan persampahan perkotaan.	Program pengelolaan persampahan.	<p>1. Pengelolaan sampah.</p> <p>2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
						pembangunan TPS 3R, bank sampah, dll).
		c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.	Program penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. 3. Pengembangan inovasi dan teknologi.		Pemberian dukungan , baik fasilitas atau pendanaan, untuk penelitian dan pengembangan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup yang dapat diterapkan di Kota Cimahi sebagai solusi dari penurunan kualitas lingkungan
		d. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah kota.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.		Peningkatan penyediaan dan pengembangan sistem pengolahan limbah domestik yang terjangkau dan dapat digunakan oleh masyarakat , serta dilakukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala , sebagai bentuk pelayanan sanitasi dan pengurangan pencemaran lingkungan.
		e. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup.	Program pengendalian pencemaran dan/atau	1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.		Penerapan kebijakan terkait pengendalian pencemaran sebagai



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			kerusakan lingkungan hidup.	2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		upaya mengurangi penurunan kualitas lingkungan; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melakukan pengendalian pencemaran.
2. Terjaminnya akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau	Cakupan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau masih memerlukan peningkatan sehingga pelayanan dapat secara merata diperoleh oleh masyarakat.	a. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.	1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi (Note: Terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi)	Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk kawasan permukiman sehingga layak huni di Kota Cimahi.
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.		Pengadaan anggaran dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana kawasan permukiman; serta melakukan pemeliharaan atas infrastruktur dan sarana prasarana yang ada. Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan pengadaan anggaran



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program pengelolaan persampahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 		<p>serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan sistem dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan drainase; peningkatan pengawasan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase yang ada; serta peningkatan upaya kerjasama dengan kabupaten/kota lain di sekitar Kota Cimahi dan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkat sumber (misalnya dengan upaya 3R), tingkat perkotaan (misalnya dengan pembangunan TPS 3R, bank sampah, dll).</p>
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.		
			Program penyelenggaraan jalan	1. Peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase jalan.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
		b. Peningkatan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.	Program penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota. 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. 		<p>Pengurangan risiko akibat bencana yang rentan terjadi di Kota Cimahi melalui upaya preventif seperti kajian/pemetaan risiko bencana, mitigasi bencana, peningkatan kapasitas adaptasi daerah (pembangunan dan pengelolaan infrastruktur wilayah) maupun masyarakat (kesiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana), serta upaya penanganan bencana serta rehabilitasi pasca-bencana.</p>
		c. Pengembangan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lainnya.	Program penyelenggaraan penataan ruang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. 		<p>Kordinasi dan sinkronisasi pengembangan permukiman dengan penyelenggaraan tata ruang serta pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 3. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.		permukiman kumuh. Kajian penyusunan rancangan dan rekomendasi dalam melakukan pengendalian pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman kumuh .
			Program kawasan permukiman	1. Penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana dan utilitas permukiman		
			Program perencanaan lingkungan hidup	1. Penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi kualitas lingkungan 2. Perencanaan dan kajian pembangunan yang berkelanjutan		
		d. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.		Peningkatan penyediaan ruang hijau di Kota Cimahi dan pengendalian kegiatan di sekitar ruang hijau untuk mengurangi pencemaran yang berpotensi merusak ruang hijau.
			Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1. Penyelenggaraan infrastruktur penyediaan RTH di Kota Cimahi		Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan peningkatan infrastuktur



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		e. Pengurangan dampak limbah berbahaya terhadap kawasan permukiman.	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).	1. Penyelenggaraan perizinan penyimpanan sementara limbah B3		Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana dalam pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pengelolaan limbah B3 .
		f. Pemeliharaan lingkungan permukiman dan perkotaan yang aman, sehat, dan bersih.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1. Penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum. 2. Pemeliharaan sarana prasarana dan utilitas umum		Edukasi dan pembinaan terkait pelestarian lingkungan hidup dan pentingnya hidup sehat , baik dalam pendidikan formal maupun non-formal melalui sosialisasi. Pemberian dukungan , baik fasilitas atau pendanaan, untuk organisasi kepemudaan yang bergerah di bidang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup yang dapat diterapkan di Kota Cimahi sebagai solusi dari penurunan kualitas lingkungan.
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.		1. Penyebaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.			
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.		1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. 2. Penegakan Perda kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota.			
3. Sistem transportasi	Jaringan dan penataan	a. Peningkatan efektivitas	Program penyelenggaraan Lalu	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan	Pengadaan anggaran dalam pengembangan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>	
yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan	transportasi yang belum optimal di Kota Cimahi serta perlunya pengembangan sistem transportasi, terutama sistem transportasi angkutan rel	penyelenggaraan lalu lintas jalan baik di dalam kota maupun antar kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Bandung Raya.	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. 3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. 4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. 6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota. 7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.	di Kota Cimahi	sistem transportasi , dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi; serta melakukan pemeliharaan atas infrastruktur dan sarana prasarana yang ada.	
			Program penyelenggaraan jalan	1. Fasilitasi dan Monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan. 2. Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan.			
		b. Pengembangan sistem transportasi umum dan sarana transportasi rendah emisi.	Program penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. 3. Pengembangan inovasi dan teknologi.			Pengadaan anggaran dalam penelitian dan pengembangan sistem transportasi rendah emisi dan pengendalian pencemaran lingkungan.
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			Penerapan kebijakan dalam bertransportasi sebagai upaya dalam



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
				kabupaten/kota. 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		mengurangi emisi dari kendaraan bermotor.

Sumber: Hasil analisis (2020)

6.2.2.2 Rekomendasi TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tabel 6-10 Rekomendasi terhadap TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) di Kota Cimahi

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
1. Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau.	Pelayanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan perlu ditingkatkan, terutama terkait akses, sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.	a. Pengelolaan peyediaan air minum.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	Pengelolaan dan pengembangan jaringan air minum sehingga masyarakat Kota Cimahi mendapat pelayanan air minum secara merata dan kemudahan akses dengan memperhatikan keterjangkauan , dengan peningkatan, perluasan, dan pemeliharaan jaringan perpipaan; peningkatan instalasi pengelolaan air minum; peningkatan kerjasama pengelolaan air minum; serta survei dan
		b. Pengelolaan sumber air bersih.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1. Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
		c. Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota.		pengawasan pada jaringan air minum.
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota		Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana guna peningkatan pelayanan air minum di Kota Cimahi, baik peningkatan penyediaan air minum secara kuantitas dan kualitas. Pengadaan anggaran dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pengolahan air minum; serta melakukan pemeliharaan atas infrastruktur dan sarana prasarana yang ada.
2. Pemerataan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai.	Belum optimalnya akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.	a. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah kota.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	Peningkatan penyediaan fasilitas dan sarana pengolahan limbah domestik yang terjangkau dan dapat digunakan oleh masyarakat , serta
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Pengembangan inovasi dan teknologi.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		b. Peningkatan pelayanan sanitasi bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	Program Kawasan Permukiman	1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota.		dilakukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala , sebagai bentuk pelayanan sanitasi dan pengurangan pencemaran lingkungan. Pengadaan anggaran penyediaan dan pengembangan teknologi pengolahan air limbah, dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pengolahan air limbah; serta melakukan pemeliharaan atas infrastruktur dan sarana prasarana yang ada.
		c. Edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya perilaku hidup sehat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	1. Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promosi preventif tingkat daerah kabupaten/kota. 2. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota.		Sosialisasi, edukasi, dan pembinaan terkait penerapan PHBS untuk seluruh lapisan masyarakat melalui sekolah/institusi



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS).	1. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		pendidikan, LSM, serta perlibatan masyarakat.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		d. Pengelolaan sampah dan peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota.	Program pengelolaan persampahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan sampah. 3. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 		<p>Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan pengadaan anggaran serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan sistem dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan drainase; peningkatan pengawasan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase yang ada; serta peningkatan upaya kerjasama dengan kabupaten/kota lain di sekitar Kota Cimahi dan dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.</p> <p>Pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkat sumber (misalnya dengan upaya 3R), tingkat perkotaan</p>
		e. Pengelolaan sistem drainase perkotaan.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota. 		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
						(misalnya dengan pembangunan TPS 3R, bank sampah, dll).
3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan efisiensi penggunaan air.	Belum adanya insentif penghematan air pertanian atau perkebunan dan industri.	a. Pengelolaan sumber air bersih.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA).	1. Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi Berdasarkan pola ruang, kawasan industri berada di: 1. Kec. Cimahi Selatan (Kel. Utama, Kel. Cibeureum, Kel. Melong, dan Kel. Cibeber); 2. Kec. Cimahi Tengah (Kel. Cigugur Tengah).	Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan kab/kota di sekitar Kota Cimahi dalam melakukan pengelolaan DAS
			Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota		
			Koordinasi vertikal dengan Provinsi, untuk melaksanakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).	1. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		
		b. Peningkatan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) kabupaten/kota.		Peningkatan penyediaan ruang hijau di Kota Cimahi dan pengendalian kegiatan di sekitar ruang hijau untuk mengurangi pencemaran yang berpotensi merusak ruang hijau.
	c. Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.			



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber air bersih.	Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. 2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota		Edukasi dan pembinaan terkait pelestarian lingkungan hidup , baik dalam pendidikan formal maupun non-formal melalui sosialisasi.

Sumber: Hasil analisis (2020)

6.2.2.3 Rekomendasi TPB 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tabel 6-11 Rekomendasi terhadap TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) di Kota Cimahi

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar bagi semua.	Tingkat unmet need pelayanan kesehatan perlu diturunkan dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu ditingkatkan.	a. Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota. 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. 4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaen/kota.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	Pembangunan dan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan (Rumah Sakit, puskesmas, dll) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, balita dan anak, serta penderita penyakit lain, seperti HIV, Diabetes, TBC, dan kejadian luar biasa (misalnya COVID-
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan	1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			dan makanan minuman.	<p>Obat Tradisional (UMOT).</p> <p>2. Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga.</p> <p>3. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.</p> <p>4. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM).</p> <p>5. Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.</p> <p>6. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.</p>		19).
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	<p>1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia</p>		Pemenuhan dan distribusi secara merata kebutuhan SDM kesehatan; peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan; dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				<p>kehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.
Mengurangi dan mencegah epidemi dan penyakit menular.	Tingkat insiden Tuberkulosis (ITB) yang masih tinggi.	a. Peningkatan identifikasi dan pencegahan dari epidemi dan penyakit menular.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	<p>1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota.</p> <p>2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.</p> <p>4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaen/kota.</p>	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	Pembangunan dan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan (Rumah Sakit, puskesmas, dll) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, balita dan anak, serta penderita penyakit lain, seperti HIV, Diabetes, TBC, dan kejadian luar biasa (misalnya COVID-19).
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	<p>1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.</p> <p>2. Pengembangan inovasi dan teknologi.</p>		
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	<p>1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Perencanaan kebutuhan dan</p>		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
				<p>pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		<p>pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, balita dan anak, serta penderita penyakit lain, seperti HIV, Diabetes, TBC, dan kejadian luar biasa (misalnya COVID-19).</p>
		c. Pembinaan dan pemantauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	<p>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksadan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		<p>Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat dan bersih.</p>
Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	Perlunya peningkatan tingkat imunisasi dasar lengkap pada bayi.	a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	<p>1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota.</p> <p>2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.</p> <p>4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaen/kota.</p>	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	<p>Pembangunan dan pengembangan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan (Rumah Sakit, puskesmas, dll) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi, balita dan anak, serta penderita penyakit lain, seperti HIV, Diabetes,</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 2. Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga. 3. Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. 4. Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM). 5. Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan. 6. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga. 		TBC, dan kejadian luar biasa (misalnya COVID-19). Pemberian izin, pengendalian dan pengawasan opotek, toko obat, dan sejenisnya, serta produksi alat kesehatan dari perusahaan rumah tangga.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota. 2. Pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota. 		Pemenuhan dan distribusi secara merata kebutuhan SDM kesehatan; peningkatan kompetensi dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
				<p>3. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		<p>kualifikasi SDM kesehatan; dan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.</p> <p>Peningkatan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat dan bersih.</p>
		c. Penyuluhan mengenai imunisasi dan kesehatan anak kepada masyarakat.	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	<p>1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksadan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan terhadap kerawanan pangan.		

Sumber: Hasil analisis (2020)

6.2.2.4 Rekomendasi TPB 10 – Berkurangnya Kesenjangan

Tabel 6-12 Rekomendasi terhadap TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) di Kota Cimahi

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
Mengurangi kesenjangan ekonomi.	Angka koefisien gini yang masih perlu penurunan	a. Peningkatan pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah.	Program pengelolaan keuangan daerah.	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi.	Peningkatan pengelolaan keuangan dan perekonomian dalam hal mengurangi kesenjangan ekonomi dengan penyusunan rencana anggaran dan pengoptimalan kebijakan perekonomian.
			Program perekonomian dan pembangunan.	1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.		
		b. Peningkatan kesempatan kerja dan usaha.	Program penempatan tenaga kerja.	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan kesempatan kerja dan usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui membuka program penempatan kerja, pemberdayaan dan pengembangan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).	1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.		UMKM, dan usaha simpan pinjam.
			Program pengembangan UMKM.	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana perikanan		
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	1. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kawasan strategis pemasaran perikanan kabupaten/kota.		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		c. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.		
			Program Penyuluhan Pertanian	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai pertanian untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.		
Mengurangi kesenjangan hukum dan praktik	Belum adanya kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan	a. Peningkatan penegakkan hukum bagi seluruh masyarakat.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi.	Peningkatan penegakkan hukum melalui mengoptimalkan pelaksanaan dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
diskriminatif lainnya.	pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	b. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat.	Program perlindungan dan jaminan sosial.	1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		evaluasi kebijakan kesejahteraan rakyat. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial melalui meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar dan fakir miskin, perlindungan untuk anak dan perempuan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan keluarga sejahtera.
			Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Program perlindungan perempuan.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan. 2. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.		
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Program Pemberdayaan Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 		
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 		
		c. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. 		Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan penguatan kelembagan dan meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Sumber: Hasil analisis (2020)

6.2.2.5 Rekomendasi TPB 13 – Penanggulangan Perubahan Iklim

Tabel 6-13 Rekomendasi terhadap TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim) di Kota Cimahi

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih perlu diminimalisir	a. Pengembangan dan penyusunan perencanaan kegiatan dan program terkait pengurangan risiko bencana.	Program penanggulangan bencana.	1. Pelayanan informasi rawan bencana. 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi terutama wilayah rentan terhadap bahaya bencana.	Pengembangan dan penyusunan perencanaan pengurangan risiko bencana melalui penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana, perlindungan korban dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan meningkatkan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat.
			Program penanganan bencana.	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.		
			Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.		
			Program pengembangan perumahan	1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi.		
			Program perencanaan lingkungan hidup	1. Penyelenggaraan inventarisasi data dan informasi kualitas lingkungan 2. Perencanaan dan kajian pembangunan yang berkelanjutan		
			Program penyelenggaraan penataan ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.		
		b. Pengembangan infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.		Pengembangan infrastruktur untuk pengurangan dampak dari perubahan iklim dengan melakukan pengelolaan sistem drainase dan sumber daya air, pengembangan perumahan bagi korban bencana dan
			Program pengelolaan sumber daya air.	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			Program kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi. 		peningkatan pembangunan jalan.
			Program penyelenggaraan jalan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan. 2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan saluran drainase jalan 		
		c. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).	1. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota (sub kegiatan: pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH))		Pengembangan kota hijau dan tangguh bencana melalui pengelolaan keanekaragaman hayati dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
			Program pengembangan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi.		
			Program penyelenggaraan penataan ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota. 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. 4. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.		
		d. Peningkatan anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.	Program penanganan bencana	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.		Peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui penyusunan rencana anggaran daerah dan pengelolaan kas daerah.

Sumber: Hasil analisis (2020)

6.2.2.6 Rekomendasi TPB 1 – Tanpa Kemiskinan

Tabel 6-14 Rekomendasi terhadap TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) di Kota Cimahi

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
1. Pemerataan hak atas sumber daya	a. Belum optimalnya akses terhadap layanan	a. Peningkatan pelayanan dasar, terutama untuk	Program penyelenggaraan	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Seluruh kecamatan di Kota	Peningkatan pelayanan dasar khususnya untuk masyarakat miskin dan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
ekonomi dan atas segala bentuk pelayanan dasar, terutama untuk masyarakat miskin & rentan.	sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat miskin.	masyarakat miskin dan rentan.	pemerintahan dan pelayanan publik.	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cimahi, terutama wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi.	rentan seperti dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pendaftaran penduduk, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.
	b. Belum optimalnya keterjangkaun sumber penerangan utama listrik baik dari PLN dan bukan PLN ke semua masyarakat miskin dan rentan.		Program pendaftaran penduduk.	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penataan Pendaftaran Penduduk 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
			Program pengelolaan pendidikan.	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan kota 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kota. 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi. 4. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah	1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.		
		b. Pengembangan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja.	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan kebijakan untuk penyerapan tenaga kerja seperti pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.
			Program perencanaan tenaga kerja.	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
			Program penempatan tenaga kerja.	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			Program hubungan industrial.	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
		c. Optimalisasi program pengembangan UMKM.	Program pengembangan UMKM.	1. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.		Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
			Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).	1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.		
		d. Pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok miskin dan rentan.	Program pemberdayaan sosial.	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan.
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Koordinasi dan penyusunan rencana pendapatan daerah		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
		e. Peningkatan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian. 2. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan usaha simpan pinjam.
2. Membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim, termasuk bencana	Perlunya penurunan indeks risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan.	a. Optimalisasi kebijakan perlindungan masyarakat miskin, rentan, difabel, anak yatim, dan lanjut usia.	Program perlindungan dan jaminan sosial.	1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi yang berada di kawasan rentan bahaya bencana.	Optimalisasi perlindungan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian bencana melalui program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan PSU, penanggulangan dan penanganan bencana.
			Program rehabilitasi sosial.	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		
			Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	1. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan.		
			Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan	1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.	lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.		
			Program penanggulangan bencana.	1. Pelayanan informasi rawan bencana. 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 4. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.		
			Program penanganan bencana.	1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.		
		b. Pengembangan rencana pengadaan perumahan bersubsidi yang layak huni, aman, murah, dan terjangkau.	Program pengembangan perumahan.	1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. 4. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi.		Pengembangan rencana pengadaan perumahan bersubsidi melalui pengembangan perumahan dan permukiman.
			Program kawasan permukiman	1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/kota.		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
		c. Pengembangan kebijakan pengelolaan kawasan kumuh.	Program kawasan permukiman	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. 2. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 3. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.		Pengembangan pengelolaan kawasan kumuh melalui penerbitan izin pembangunan permukiman dan penataan kawasan kumuh.

Sumber: Hasil analisis (2020)



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

6.2.2.7 Rekomendasi TPB 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tabel 6-15 Rekomendasi terhadap TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) di Kota Cimahi

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi	
1. Memperkuat sumber daya domestik dan meningkatkan kapasitas lokal	Perlu ditingkatkannya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	a. Pengembangan sumber daya dari desa atau kecamatan sesuai potensi unggulan masing-masing.	Program penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. 3. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. 4. Pengembangan inovasi dan teknologi.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi, terutama kecamatan atau desa/kelurahan dengan potensi unggulan atau pariwisata	Pembinaan dalam peningkatan keahlian serta penggalian potensi desa atau kecamatan dalam melakukan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan.	
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.			
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.	1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. 2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. 3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. 4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota.			Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif dan pariwisata melalui pelatihan dasar, serta peningkatan peran serta masyarakat setempat dalam melakukan ekonomi kreatif dan pariwisata.
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penyediaan sarana prasarana pertanian			



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Program pemasaran pariwisata.	1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.		Melakukan penguatan promosi potensi unggulan daerah, salah satunya melalui peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pihak pemerintah daerah kab/kota lain atau swasta yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah .
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Pengelolaan daerah industri kabupaten/kota. 2. Evaluasi industri kabupaten/kota		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pengelolaan kawasan strategis kabupaten/kota. 2. Pengelolaan distribusi perdagangan kabupaten/kota.		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia		
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.	1. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota.		
		b. Peningkatan sinergitas dengan wilayah lain di Kota Cimahi agar dapat saling mendukung kemajuan wilayah.	Program peningkatan kerjasama desa.	1. Fasilitasi kerja sama antar desa.		Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar desa di Kota Cimahi sebagai strategi dalam melakukan pengembangan potensi



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
2. Meningkatkan kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi	Akses bergerak pita lebar (mobile broadband) perlu diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh populasi di perkotaan dan sebagian pedesaan.	a. Peningkatan kerjasama dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi, baik didalam Kota Cimahi maupun keluar Kota Cimahi.	Program penelitian dan pengembangan daerah	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. 3. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. 4. Pengembangan inovasi dan teknologi.	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	unggulan di masing-masing daerah (desa atau kecamatan).
		b. Peningkatan akses terhadap teknologi dalam pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. 3. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.		Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan memfasilitasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan, salah satunya melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
3. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat	Perlu disediakan alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	a. Peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan.	Program pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. 2. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota. 	Seluruh kecamatan di Kota Cimahi	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemberian penghargaan bagi individu atau LSM yang berkontribusi dan dapat memberikan inovasi dalam upaya pencapaian tujuan berkelanjutan. Penghargaan ini dapat berupa beberapa macam hal, seperti pendanaan pengembangan program usulan atau fasilitas yang dapat digunakan oleh individu/LSM ini.</p> <p>Peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan, kemitraan,</p>
			Program Penyuluhan Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. 2. Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. <p>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai pertanian untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.</p>		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi untuk diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan 		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Outcomes	Gap/Kekurangan	Arahan Kebijakan	Arahan Program	Keterangan Arahan Kebijakan/Program	Arahan Lokasi	Rekomendasi
			Ketahanan Pangan Masyarakat.			pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA , kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.
			Program penelitian dan pengembangan daerah.	1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. 2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. 3. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. 4. Pengembangan inovasi dan teknologi.		
		b. Peningkatan kerjasama daerah baik dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memajukan Kota Cimahi.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	1. Administrasi tata pemerintahan. 2. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. 3. Koordinasi penyusunan kebijakan daerah. 4. Fasilitasi kerjasama daerah.		Peningkatan kerjasama baik dalam kota (antar kecamatan/ desa) maupun terhadap kab/kota lain , serta dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu atau LSM dan juga kapasitas daerah .
			Program hubungan industrial.	1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.		
				Pelibatan komunitas dalam koordinasi vertikal dengan Provinsi terkait	1. Penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
			program pengelolaan ketenagalistrikan.	2. Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. 3. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penatausahaan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi. 4. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi. 5. Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 6. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.		
			Program pengelolaan persampahan.	1. Pengelolaan sampah. 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

<i>Outcomes</i>	<i>Gap/Kekurangan</i>	<i>Arahan Kebijakan</i>	<i>Arahan Program</i>	<i>Keterangan Arahan Kebijakan/Program</i>	<i>Arahan Lokasi</i>	<i>Rekomendasi</i>
				pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.		
			Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.		
			Program Pemasaran Pariwisata	1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	1. Penyelenggaraan perizinan secara dalam jaringan 2. Pengembangan database perizinan secara dalam jaringan		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan investasi		
			Program pelayanan penanaman modal.	1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.		

Sumber: Hasil analisis (2020)



6.2.3 Integrasi dengan RPJMD

Arahan kebijakan dan arahan program yang telah disusun kemudian diintegrasikan dalam Perubahan RPJMD, sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD. Integrasi sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada **Tabel 6.16**.



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Tabel 6-16 Matriks Integrasi KLHS dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
<p>Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p>	<p>4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</p> <p>4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.</p>	<p>Melakukan peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar; serta menyediakan bantuan operasional sekolah dan optimalisasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai upaya melakukan pemerataan akses pendidikan dasar untuk semua kalangan.</p>	<p>- Jika dibandingkan antara APK dan APM jenjang pendidikan SD maupun SMP terjadi gap yang jauh, hal ini disebabkan karena siswa dari jenjang pendidikan SD ada yang masih berusia tujuh tahun kurang sudah bersekolah di SD dan ada anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih duduk di jenjang SD serta kondisi ini disebabkan pula oleh letak geografis Kota Cimahi yang berdekatan dengan Kota/Kabupaten sekitar, sehingga banyak dari kota dan kabupaten sekitar yang bersekolah di Cimahi maupun sebaliknya, sehingga kondisi ini berpengaruh pada pencapaian APK dari Kota Cimahi.</p> <p>- Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi yang lulusan sarjana strata 1 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 93 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 89 persen. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun</p>	<p>- Masih terdapat angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP. Pada Tahun 2019 meski angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah angka putus sekolah masih ada untuk seluruh jenjang pendidikan.</p> <p>- Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan.</p> <p>- Pola pendidikan setelah adanya pandemi Covid-19 mengalami pergeseran, yang selama ini lekat dengan konsep belajar tatap muka dalam ruang kelas menjadi tatap muka secara online. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kesiapan metode pembelajaran online yang standar, masih ditemui beberapa anak didik yang kesulitan dalam</p>	<p>1. Masih rendahnya persentase pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Cimahi dengan akreditasi yang baik (minimal B).</p> <p>2. Masih ada anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), ditunjukkan dengan angka partisipasi kasar di Kota Cimahi yang belum mencapai target.</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</p> <p>Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan</p>	<p>Strategi : Peningkatan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <p>a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>b. Peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya dengan meningkatkan akreditasi sekolah.</p> <p>c. Pemerataan akses pendidikan bagi semua</p> <p>d. Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat</p> <p>e. Meningkatkan Mutu Pendidikan</p>	Dinas Pendidikan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>2019 terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 92,2 persen dan 93,7 persen.</p> <p>- Pada jenjang pendidikan SMP, kualifikasi guru menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Setiap guru di SMP dituntut fokus memberi pengajaran untuk satu mata pelajaran kepada siswa. Kualifikasi guru SMP di Kota Cimahi dengan lulusan sarjana strata 1 (S1) pada tahun 2015 sebesar 93 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 92,3 persen. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga menjadi 96,1 persen. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>	<p>penyediaan infrastruktur hardware belajar online seperti HP atau komputer/laptop. Selain itu keterbatasan ekonomi menyebabkan beberapa orang tua murid sulit menyediakan biaya untuk koneksi internet secara kontinu setiap hari kerja.</p>				
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang</p>	<p>3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. 5.6.1.(a) Unmet need KB</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p>	<p>- Pandemi Virus Corona pada awal tahun 2020 telah memporakporandakan perekonomian dunia dan dirasakan oleh semua kalangan terutama masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang rendah akan meningkatkan kembali angka</p>	<p>- Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal - Masih terjadi ketimpangan pendapatan - Belum optimalnya kualitas kesehatan, yang ditandai dengan: a. Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus</p>	<p>1. Belum optimalnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cimahi. 2. Tingkat unmet need pelayanan kesehatan di Kota Cimahi perlu diturunkan. 3. Tingginya insiden</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</p> <p>Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Strategi : Peningkatan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah terutama untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Sosial...</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	untuk mengurangi tingkat unmet need pelayanan kesehatan; serta menggalakkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat untuk mengurangi insiden berbagai jenis penyakit.	kemiskinan dan pihak yang akan sangat teras dampaknya adalah anggota masyarakat yang bekerja disektor informal dan kelompok masyarakat yang sebelumnya rentan untuk jatuh ke dalam garis kemiskinan. Fokus terhadap penanganan Corona tahun 2020 dan 2021 serta antisipasi berulangnya (munculnya) wabah menjadi perhatian yang sangat mendesak baru kemudian pemulihan perekonomian. - Pelayanan kesehatan untuk mencegah meluasnya virus Corona dinilai sangat penting saat ini. Demikian juga bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kelompok rentan jatuh kedalam garis kemiskinan. Perlu dilakukan perbaikan dan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan juga perlu diimbangi dengan kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, khususnya	Disease 2019 (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Kota Cimahi. b. Masih tingginya angka kematian ibu merupakan masalah yang cukup serius. c. Masih Tingginya Kasus Gizi Buruk di Kota Cimahi d. Masih tingginya kasus TB BTA Positif di Kota Cimahi, tahun 2019 penemuan pasien TB BTA Positif mencapai 100,24, angka ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang belum mencerminkan hidup sehat. e. Meningkatnya Total Kumulatif Kasus HIV/AIDS f. Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi g. Menurunnya Persentase Posyandu Aktif h. Meningkatnya Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit - Menurunnya Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif. Jumlah Peserta KB baru dan KB aktif tahun	Tuberkulosis (TB) di Kota Cimahi. 4. Perlu peningkatan jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Kota Cimahi, untuk mengurangi angka kematian bayi dan balita. 5. Indeks kesehatan di Kota Cimahi perlu ditingkatkan.		Arah Kebijakan : a. Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan c. Peningkatan identifikasi dan pencegahan dari epidemi dan penyakit menular. d. Pembinaan dan pemantauan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. e. Penyuluhan mengenai imunisasi dan kesehatan anak kepada masyarakat. f. Terjaminnya kesehatan bagi semua masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan. g. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan h. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan i. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka harapan hidup sebagai salah satu indikator pengukuran kualitas kesehatan di Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun mengalami perlambatan dari tahun 2015-2019. perlambatan tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). - Dalam upaya mencegah penyakit yang berbasis lingkungan perlu kiranya dilakukan upaya-upaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat. - Masih tingginya kasus gizi kurang di Kota Cimahi dimana pada tahun 2019 sebanyak 5,6%, disebabkan oleh rendahnya faktor ekonomi dari keluarga miskin, sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan asupan gizi pada balita. - Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2019 mencapai 9,07 persen. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebesar 7,59 persen, dan 	<p>2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB Baru mencapai 9.7% dan mengalami kenaikan pada pada tahun 2016 menjadi 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,8%. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2015 mencapai 77,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 78,2, namun pada tahun 2017 turun kembali hingga menjadi 75,9%.</p>			<ul style="list-style-type: none"> j. Meningkatkan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 k. Meningkatkan Pelayanan Rujukan 	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 10,56 persen.					
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</p>	<p>1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</p> <p>5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</p>	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keluarga berencana yang diiringi dengan peningkatan SDM.</p>	<p>- Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,07 persen, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2015 yang angkanya sebesar 1.31. Tren penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat merupakan kontribusi dari keberhasilan program Keluarga Berencana.</p> <p>- Jumlah Peserta KB baru dan KB aktif tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah peserta KB Baru mencapai 9,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 10,3%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,8%. Selanjutnya, untuk peserta KB Aktif tahun 2015 mencapai 77,7% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 78,2, namun pada tahun 2017 turun kembali hingga menjadi 75,9%. Rasio Akseptor KB mandiri di Kota Cimahi pada tahun 2017</p>	<p>Menurunnya persentase KB baru dan KB aktif</p>	<p>Laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi perlu dikendalikan secara terus-menerus.</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</p> <p>Sasaran : Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk</p>	<p>Strategi : Penguatan dan pemaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas</p> <p>Arahan Kebijakan : Mengembangkan inovasi promosi keluarga berencana</p>	DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			mencapai 80 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 82 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 79,92 persen					
Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatkan nilai SAKIP melalui optimalisasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dari setiap instansi pemerintah di Kota Cimahi, serta dilakukan penyelenggaraan dan pengelolaan arsip daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan lebih baik.	Hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari CC di Tahun 2016 menjadi B mulai Tahun 2017 sampai dengan 2019. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2019 adalah 1,268 '- Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2018 hanya 8 % dan pada tahun	- Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal. Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk di lingkup Pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks	Peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan meningkatkan indeks nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikator.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah	Strategi : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah Kebijakan : a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi c. Pengembangan program penyediaan data dan kearsipan antar lembaga yang terkait.	SETDA, Inspektorat, Diskominfoarpu s



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			2019 naik menjadi 18,50 persen	kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.				
Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatkan, memperbaiki dan/atau meninjau ulang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi, serta menciptakan sinergitas dan koordinasi di setiap tingkatan pemerintah daerah yang lebih baik sehingga tercipta Kota Cimahi yang bersih dari KKN, memiliki pelayanan publik yang baik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	- Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut meliputi: mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas	Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk di lingkup Pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih	1. Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan oleh instansi pemerintah yang memilikinya. 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori nilai sangat tinggi.	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan daerah	Strategi : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah Kebijakan : a. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. b. Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi	SETDA, Inspektorat, Bappeda



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. - nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi pada Tahun 2016 mendapatkan Skor 3,3590 dengan status Sangat Tinggi, pada Tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 3,3274 dengan status tetap Sangat Tinggi, dan Tahun 2018 meningkat menjadi 3,4624 dengan status Sangat Tinggi.	berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.				
Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi	16.6.1. (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur untuk kemudahan pengelolaan dana pengadaan infrastruktur	Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur	1. Meningkatkan dan mempertahankan laporan keuangan Kota Cimahi dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Strategi : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah Kebijakan : a. Peningkatan sistem tata kelola keuangan dan barang milik daerah beserta dengan pelaporannya menjadi	SETDA, Inspektorat, Diskominfoarp us



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level		untuk kemajuan Kota Cimahi.		daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk di lingkup Pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.			lebih efektif, akuntabel, dan transparan.	
Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Membentuk ASN dengan indeks profesionalitas yang tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur itu sendiri dan juga kinerja pemerintahan dengan menyeimbangkan kuantitas, kualitas, serta pendistribusian	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas	Terdapat beberapa hal dalam tata pemerintahan di Kota Cimahi yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi dan menjadi indikator dalam pembangunan yaitu: Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal; rendahnya kompetensi aparatur daerah; belum optimalnya pengawasan pemerintah	Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Sasaran : Meningkatnya profesionalitas aparatur	Strategi : Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik Arah Kebijakan : Pembentukan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah guna terciptanya profesionalisme dan integritas.	BPKAD, BKPSDMD, Setda, Inspektorat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
inklusif di semua level		sumber daya aparatur secara merata di Kota Cimahi	ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin.	daerah dikarenakan jumlah pengawas yang masih terbatas untuk di lingkup Pemerintahan Kota Cimahi; belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah, tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; indeks kapasitas fiskal masih berkategori sedang dan belanja daerah belum optimal merupakan beberapa tingkat kinerja perencanaan daerah yang belum optimal.				
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Tujuan 12 : Menjamin Pola	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kota Cimahi dengan mengoptimalkan teknologi untuk memperbaiki sistem pelayanan yang ada dan komunikasi antara pemerintah Kota Cimahi dengan masyarakat, serta penyediaan	- Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun nilai atau predikat Survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 76 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018	- Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal, yaitu tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan - Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 penduduk ataupun luas	1. Tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan. 2. Belum optimalnya akses terhadap pelayanan dasar, seperti kesehatan, kepemilikan akte lahir, listrik, air minum dan sanitasi. 3. Perlu pengadaan atau peningkatan fasilitas publik yang menerapkan Standar	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Meningkatkan kualitas permukiman Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatkan pelayanan air limbah domestik Meningkatkan pelayanan air bersih	Strategi : a. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik b. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Arah Kebijakan : a. Pengembangan kebijakan terkait standar pelayanan publik. b. Pengembangan sumber daya aparatur	DPKP, DPUPR....



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level	sumber air minum layak dan berkelanjutan. 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	sarana dan prasarana demi kemudahan akses pelayanan dasar.	menjadi 80,99 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 80,75 persen. - SPM Bidang Pekerjaan Umum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2019 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. untuk jenis pelayanan dasar tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator capaian adalah jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dari target 100% hanya tercapai 70,35%. - Untuk jenis pelayanan dasar tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik, dengan indikator capaian adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, dari target 100% hanya tercapai 75,98%. - Hal ini disebabkan karena	wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. - Belum optimalnya akses terhadap air bersih. Rendahnya akses air bersih masyarakat di Kota Cimahi lebih disebabkan karena rendahnya ketersediaan infrastruktur air bersih. Hal tersebut menyebabkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih menjadi kurang terpenuhi. Indikasi penyebab kualitas air bersih di Kota Cimahi masih rendah yang pertama adalah karena pembuangan limbah industri ke sungai dan saluran air. indikasi penyebab rendahnya	Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		dan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kemudahan akses informasi dan pelayanan publik. c. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik d. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal, sedangkan target SPM sektor air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 telah terlampaui tetapi masih harus memenuhi target universal akses tahun 2019 yaitu 100% pelayanan air limbah domestik.	akses air bersih masyarakat yang selanjutnya adalah karena belum maksimalnya kerjasama antar daerah terkait pengelolaan air baku masyarakat. Kerjasama tersebut adalah berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber air baku alternatif untuk mencukupi kebutuhan air bersih, mengingat Kota Cimahi memiliki sumber air yang terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.				
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p> <p>Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan</p>	<p>8.1.1.(a) PDB per kapita.</p> <p>8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.</p> <p>10.1.1* Koefisien Gini.</p> <p>1.3.1.(a) Meningkatkan Kesempatan Kerja</p> <p>1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber</p>	<p>Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan dan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin;</p> <p>meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;</p> <p>mengadakan pendidikan keterampilan dan pelatihan usaha bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda</p>	<p>- Perkembangan PDRB per kapita Kota Cimahi secara riil dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang selama periode tahun 2015 - 2019 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar 30,48 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 36,86 juta rupiah.</p> <p>- Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita selama periode 2015 - 2019 pun cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71 persen.</p>	<p>- Upaya pengentasan kemiskinan belum optimal</p> <p>- Masih terjadi ketimpangan pendapatan</p> <p>- Kurangnya penyerapan tenaga kerja</p> <p>- Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>- Belum optimalnya kinerja investasi</p> <p>- Belum optimalnya perkembangan Usaha Mikro</p> <p>- Masih Rendahnya persentase pasar tradisional yang Bestandar SNI</p> <p>- Masih rendahnya kualitas</p>	<p>1. Pemulihan Ekonomi Daerah Masih rendahnya PDB per kapita di Kota Cimahi jika dibandingkan dengan target nasional.</p> <p>2. Penanggulangan Kemiskinan Laju pertumbuhan PDB per kapita di Kota Cimahi perlu ditingkatkan.</p> <p>3. Penanggulangan Pengangguran Perlu sedikit penurunan koefisien gini di Kota Cimahi, agar mencapai target nasional.</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi Meningkatkan kualitas permukiman Meningkatkan ketahanan bencana</p> <p>Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan 3. Menurunnya tingkat pengangguran</p>	<p>Strategi : 1. Pemulihan Ekonomi Daerah Peningkatan iklim dan realisasi investasi 2. Peningkatan daya saing industri kecil menengah 3. Pengembangan sektor perdagangan 4. Optimalisasi pengembangan UMKM 5. Menjaga ketersediaan dan konsumsi pangan serta meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat 6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas</p>	DPKP, ...



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
<p>Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p>Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara</p>	<p>penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN</p> <p>6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p> <p>6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</p>	<p>dan orang dewasa; peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin; meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait jaminan kesehatan dan sosial; serta pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.</p>	<p>- Seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah di Kota Cimahi, jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2015 - 2019 terus berkurang dan dapat dilihat dari Angka Kemiskinan yang semakin turun. Angka Kemiskinan Kota Cimahi pada tahun 2015 sebesar 5,84 persen turun menjadi 4,39 persen di Tahun 2019. Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir seluruh sektor perekonomian termasuk di Kota Cimahi. Banyak pekerja di PHK dan masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi dan meningkatkan Angka Kemiskinan menjadi 5,11 persen.</p> <p>- Indeks Gini merepresentasikan ketimpangan dalam pendapatan antar golongan pendapatan di Kota Cimahi. Selama periode tahun 2015 - 2019 Indeks Gini Kota Cimahi cenderung menurun yang menandakan bahwa ketimpangan pendapatan</p>	<p>perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.</p> <p>- Belum optimalnya akses terhadap air bersih.</p> <p>- Tingginya potensi bencana, karena Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana. Adapun bencana yang berpotensi besar</p>	<p>4. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan Tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi perlu diturunkan, karena selama ini Kota Cimahi lebih fokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi.</p> <p>5. Peningkatan Investasi Daerah, yang tidak hanya investasi padat modal juga investasi padat karya yang dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat</p> <p>4. Masih terdapat masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi yang belum mendapat akses pelayanan dasar, seperti sumber air minum dan sanitasi yang layak, serta sumber listrik.</p> <p>5. Perlunya menurunkan indeks risiko bencana, terutama di pusat-</p>	<p>4. Menurunnya kemiskinan</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan air limbah domestik</p> <p>6. Meningkatnya pelayanan air bersih</p> <p>7. Meningkatnya ketahanan bencana</p>	<p>koperasi</p> <p>7. Meningkatkan kesejahteraan petani/peternak</p> <p>8. Meningkatkan produk dan produktivitas pertanian/peternakan</p> <p>9. Meningkatkan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk turunan Pertanian</p> <p>10. Peningkatan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah</p> <p>11. Meningkatkan dan menciptakan kesempatan kerja</p> <p>12. Meningkatkan kesejahteraan buruh</p> <p>13. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial</p> <p>14. Pembangunan ekonomi yang inklusif terutama percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19</p> <p>15. Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan</p> <p>16. Penurunan tingkat kerentanan terhadap</p>	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>antar golongan pendapatan di Kota Cimahi semakin berkurang (kondisi membaik). Pada Tahun 2015 Indeks Gini Kota Cimahi mencapai poin 0,395 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,363. Capaian ini lebih rendah daripada Indeks Gini Nasional yang mencapai 0,382 maupun Indeks Gini Jawa Barat yang mencapai 0,398 di Tahun 2019.</p> <p>- Meningkatnya kesempatan kerja ditandai dengan meningkatnya TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) dan menurunnya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Perkembangan TPT Kota Cimahi pada periode tahun 2015 - 2018 cenderung mengalami penurunan dari 9 persen di tahun 2015 menjadi 7,93 persen di tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 TPT Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi 8,08 persen. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan TPT Kota Cimahi kembali meningkat cukup signifikan menjadi 13,30 persen. Hal ini tentunya menyebabkan Tingkat</p>	<p>melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir.</p>	<p>pusat pertumbuhan Kota Cimahi agar mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap kejadian bencana.</p>		<p>bencana</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.a Meningkatkan iklim penanaman modal 1.b. Meningkatkan pelayanan penanaman modal 1.c. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 1.d. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 2. Meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengendalian serta pengawasan industri kecil menengah <ol style="list-style-type: none"> 3. a. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas distribusi 3. b. Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk buatan dalam negeri 4.a. Meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM 4.b. Meningkatkan skala usaha UMKM 	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>Kesempatan Kerja bagi angkatan kerja di Kota Cimahi mengalami penurunan dari 91 persen di tahun 2015 menjadi 86,70 persen di tahun 2020.</p> <p>- Untuk jenis pelayanan dasar tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik, dengan indikator capaian adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, dari target 100% hanya tercapai 75,98%.</p> <p>- Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal, sedangkan target SPM sektor air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 telah terlampaui tetapi masih harus memenuhi target universal akses tahun 2019 yaitu 100% pelayanan air limbah domestik.</p> <p>- Data mengenai Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN belum ada.</p>				<p>5.a. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>5.b. Meningkatkan penanganan kerawanan pangan</p> <p>5.c. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan</p> <p>6.a. Meningkatkan sistem dan manajerial koperasi</p> <p>6.b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi</p> <p>7. Meningkatkan penyuluhan pertanian</p> <p>8.a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <p>8.b. Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>8.c. Meningkatkan budidaya perikanan</p> <p>9. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian</p> <p>10. Mengembangkan kawasan wisata berbasis pemberdayaan</p>	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>- SPM Bidang Pekerjaan Umum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2019 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Untuk jenis pelayanan dasar tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator capaian adalah jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dari target 100% hanya tercapai 70,35%.</p> <p>- Indeks Resiko Bencana di Kota Cimahi dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup banjir, gempa, longsor, puting beliung, kekeringan, vulkanologi, dan kebakaran. Indeks Resiko Bencana di Kota Cimahi pada periode tahun 2017-2019 berada pada Kelas Resiko Sedang. Beberapa indikator kebencanaan di Kota Cimahi selama 3 (tiga) tahun terakhir</p>				<p>masyarakat</p> <p>11. a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja</p> <p>11. b. Meningkatkan informasi pasar kerja</p> <p>11. c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja</p> <p>12. a. Mencegah dan mengatasi perselisihan</p> <p>12. b. Meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja</p> <p>12. c. Meningkatkan sarana hubungan industrial</p> <p>13. a. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terutama penerapan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial</p> <p>13. b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar terhadap sumber air minum, sanitasi yang layak dan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan.</p> <p>14. a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah domestik</p>	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			menunjukkan kinerja yang cukup baik.				14.b. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih 15.a. Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana	
Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan 11.2.1 (b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk pemerataan layanan di seluruh wilayah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait keselamatan lalu lintas, kelayakan kendaraan, menjaga kebersihan ruas jalan terhadap masyarakat. Selain itu, dilakukan optimalisasi penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan, serta pelayanan jasa sektor perhubungan.	- Belum ada data mengenai Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar, dan Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. - Persentase angkutan yang layak jalan di Kota Cimahi per tahun cenderung meningkat namun pada tahun 2019 mengalami perlambatan. Berdasarkan realisasi tahun 2017, Persentase angkutan yang layak jalan di Kota Cimahi mencapai 51,5 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 100 persen. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 98,14 persen. Ini menunjukkan bahwa target angkutan yang seharusnya melakukan KIR pada tahun 2019 tidak tercapai. - Persentase jaringan jalan	- Menurunnya Kualitas Jalan Dalam Kondisi Baik - Masih rendahnya tingkat pelayanan jalan di Kota Cimahi yang disebabkan oleh masih adanya beberapa luas jalan yang memiliki nilai F berdasarkan hasil perhitungan LoS (LOS F yaitu arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar) yaitu di jalan Daeng Muhammad Ardiwinata (Cihanjuang) dan ruas jalan Mahar Martanegara, terutama pada waktu atau jam sibuk. Adapun saat ini kedua jalan ruas tersebut merupakan jalur penghubung Kabupaten Bandung Barat-Kota Cimahi-Kota Bandung dan	1. Meningkatkan tingkat pelayanan jalan di Kota Cimahi. 2. Kurang meratanya pelayanan infrastruktur kota, khususnya sarana dan prasarana transportasi.	Tujuan : Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi Sasaran : Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Strategi : Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi Arah Kebijakan : a. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan lalu lintas jalan baik di dalam kota maupun antar kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Bandung Raya. b. Pengembangan sistem transportasi umum dan sarana transportasi rendah emisi (c) Meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan, sarana dan prasarana perhubungan (d) Meningkatkan pengendalian dan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>yang terlayani angkutan umum di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 11,94 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 51,58 persen.</p> <p>- Persentase tersedianya halte dan terminal di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai 57,69 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 91,30 persen.</p> <p>- Panjang jalan di Kota Cimahi pada akhir tahun 2019 adalah 118,873 KM. Angka ini sama dengan tahun sebelumnya, dimana jika dirinci menurut pengelolanya maka sebesar 3,74 persen dari total panjang jalan merupakan jalan nasional, 7,87 persen merupakan jalan provinsi, dan sisanya sebesar 88,39 persen merupakan jalan kota. Pada tahun 2019 persentase jalan kota dengan kondisi rusak berat sebesar 0,300 KM atau 0,29 persen. Artinya tahun 2019 masih terdapat jalan</p>	Kabupaten Bandung-Kota Cimahi-Kota Bandung.			<p>pengembangan lalu lintas angkutan jalan.(e) meningkatkan pelayanan angkutan umum (f) meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan</p>	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			kota di Kota Cimahi yang mengalami rusak berat. - Di bidang bina marga, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2017 berada di Kategori D dan pada tahun 2018 serta tahun 2019 berada di Kategori C.					
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua Tujuan 12 : Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Mengoptimalkan sistem pengelolaan daur ulang sampah dan limbah b3 dengan cara: penyusunan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah b3; meningkatkan jumlah, operasi kerja, dan pemeliharaan sarana dan prasarana; meningkatkan kemampuan aparat pengelola sampah dan limbah b3; kerja sama antar wilayah; pengembangan teknologi;	- Belum ada data Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dan Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). - Untuk pengelolaan sampah di Kota Cimahi secara umum sudah dikategorikan baik, melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pembuangan ke TPA, namun pengelolaan sampah melalui 3R, komposting dan pembuatan biogas. Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 87 persen, dan mengalami peningkatan di Tahun 2018 dan 2019 masing-	- Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang terkait dengan kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah kota; kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); kontradiksi antara kebutuhan air bersih melalui pengambilan air tanah oleh masyarakat dengan daya dukung lingkungan yang terbatas; rendahnya kualitas air tanah akibat limbah industri; belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; belum memadainya keberadaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Masih rendahnya proses daur ulang sampah. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.	Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman Sasaran : 1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan 2. Meningkatnya pelayanan air limbah domestik	Strategi : Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Arah Kebijakan : 1.a. Peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan antar kabupaten/kota. 1.b. Pengelolaan persampahan perkotaan. 1.c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan hidup. 1.d. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. 2.a. Pengelolaan air	DPKP, DLH, ...



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
		sosialisasi dan meningkatkan peran serta masyarakat.	masing 95 persen dan 96,06 persen. - Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 Persentase cakupan layanan air limbah domestik di Kota Cimahi sebesar 68,17 persen, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 76,50 persen dan 72,70 persen. Namun pada tahun 2019 Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik mengalami penurunan kembali hingga menjadi 75,98 persen, hal ini disebabkan jumlah unit IPAL yang di bangun tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, serta kendala pada ketersediaan lahan.				limbah domestik di wilayah kota. 2.b. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. 2.c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan hidup.	
Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan	11.5.1. (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Pengoptimalan kondisi drainase dengan cara: koordinasi perencanaan drainase perkotaan; peningkatan kapasitas,	- Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya genangan di Kota Cimahi salah satunya kondisi drainase yang terganggu baik oleh pola masyarakat yang masih membuang sampah maupun terhalangnya aliran drainase oleh bangunan. Persentase	- Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai	Masih rendahnya kondisi drainase. (permasalahan pada perubahan RPJMD)	Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman Sasaran : Meningkatnya pelayanan drainase permukiman	Strategi : - Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan - Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
		pemeliharaan, dan inspeksi saluran; serta kebijakan perlindungan drainase dari sampah dan bangunan liar.	luasannya terhadap luas kota di Kota Cimahi kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase luasan genangan terhadap luas kota mencapai 0,38 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 masing-masing 0,14 persen dan 0,07 persen. - Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana, yang tersebar di 15 kelurahan. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.	layanan lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. - Tingginya potensi bencana, karena Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana. Adapun bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir.			Arah Kebijakan : Peningkatan pengelolaan dan pengembangan drainase ramah lingkungan	
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun Tujuan 6 :	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses	Pengoptimalan akses layanan sumber air minum dan air bersih dengan cara: pengembangan, pengelolaan dan	- SPM Bidang Pekerjaan Umum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota	- Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Meskipun Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di	Belum optimalnya akses terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan	Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman Sasaran : Meningkatnya pelayanan air bersih	Strategi : - Peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	DPKP, DPUPR, DLH, ...



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	pemeliharaan kawasan sumber air; pembangunan sumur, reservoir, embung, bangunan penampung air; peningkatan akses layanan; peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air; pengembangan infrastruktur jaringan air terpadu; kerja sama antar daerah; kebijakan intensif penghematan air; kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah dan pembangunan infrastruktur pada kawasan jasa penyedia air bersih tinggi; dan peningkatan efisiensi pemanfaatan air.	Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2019 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Untuk jenis pelayanan dasar tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator capaian adalah jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dari target 100% hanya tercapai 70,35%. - Berdasarkan peta status daya dukung air diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air bersih. Daya dukung melampaui paling banyak tersebar di Kecamatan Cimahi Utara. Wilayah dengan daya dukung belum melampaui ambang batas relatif sedikit yakni sekitar 20,34% dari luas Kota Cimahi. Wilayah belum melampaui sebagian besar terdapat di Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Pasirkaliki.	Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.	masyarakat khususnya masyarakat miskin.		Arah Kebijakan : a. Pengelolaan sumber air bersih. b. Peningkatan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati c. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sumber air bersih. e. Pengelolaan peyediaan air minum. f. Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan dan perdesaan.	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan</p>	<p>1.4.1.(f) Presentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan</p> <p>11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</p>	<p>Mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau melalui penataan kawasan kumuh; penyediaan perumahan/rusun layak huni; peningkatan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, kebersihan, dan keamanan yang layak dan memadai; peningkatan RTH; peningkatan pelayanan bantuan teknis; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman.</p>	<p>- Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 4,39 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.51 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali hingga menjadi 2,63 persen. Total luas kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2017 s.d 2019 sebesar 150,52 Ha.</p> <p>- Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer, yang diharapkan dapat memenuhi salah satu dari 7 aspek dalam penilaian kekumuhan dan ditetapkan sebagai kawasan tidak kumuh.</p>	<p>- Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, menyebabkan banyaknya rumah atau lingkungan/kawasan permukiman yang tidak layak huni. Sebagian besar permukiman kumuh berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang tinggi berdampak terhadap tingginya jumlah kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan.</p>	<p>1. Tingginya jumlah kawasan kumuh. (permasalahan pada perubahan RPJMD)</p> <p>2. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan kualitas permukiman</p> <p>Sasaran : Mengurangi luas kawasan kumuh</p>	<p>Strategi : - Pengentasan permukiman kumuh perkotaan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan lainnya. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman. Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan. Pengurangan dampak limbah berbahaya terhadap kawasan permukiman. Pemeliharaan lingkungan permukiman dan perkotaan yang aman, sehat, dan bersih. Peningkatan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana. 	<p>DPKP, DPUPR, DLH, ...</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan</p> <p>Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p>	<p>1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</p> <p>1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</p> <p>11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</p> <p>13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</p> <p>11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.</p> <p>1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</p> <p>11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</p> <p>1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</p> <p>11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</p>	<p>Mengurangi risiko bencana melalui penyusunan kajian risiko dan strategi pengurangan risiko, peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana mitigasi bencana, peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan bahaya dan mitigasi bencana, serta kerja sama antar sektor dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana.</p>	<p>- Kota Cimahi mengalami rawan bencana tanah longsor di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Wilayah tanah longsor terjadi pada wilayah dengan kelerengan diatas 15 persen dengan luas mencapai 147 hektar. Selain itu, wilayah yang berpotensi banjir berlokasi di Cimahi Selatan. Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dengan luas mencapai 98 hektar. Selanjutnya, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi sering kali menghadapi bencana kebakaran. Data menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar.</p> <p>- Kota Cimahi telah memiliki daerah evakuasi bencana dan rencana mitigasi bencana,</p>	<p>- Tingginya potensi bencana, karena Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana. Adapun bencana yang berpotensi besar melanda wilayah Kota Cimahi adalah tanah longsor dan banjir. Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dengan luas mencapai 98 hektar. Sementara itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penurunan indeks risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. 2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana yang masih tinggi. 3. Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 4. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana yang perlu diturunkan. 5. Belum dibentuk dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 	<p>Tujuan : Meningkatkan ketahanan bencana</p> <p>Sasaran : Meningkatnya ketahanan bencana</p>	<p>Strategi : - Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana</p> <p>Arah Kebijakan : a. Pengembangan dan penyusunan perencanaan kegiatan dan program terkait pengurangan risiko bencana. b. Pengembangan infrastruktur untuk mengurangi dampak perubahan iklim. c. Pengembangan kota hijau dan kota tangguh bencana. d. Peningkatan anggaran kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.</p>	<p>BPBD, untuk Kota Hijau dan dampak perubahan iklim ada di bidang fisik, DPKP</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>yang tersebar di 15 kelurahan. Daerah evakuasi bencana di Kota Cimahi direncanakan lebih difokuskan di ruang terbuka, seperti alun-alun, gedung, dan kawasan yang terbuka.</p> <p>- Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan longsor, yaitu: menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi</p>					



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			bencana di Kecamatan Cimahi Utara. - Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi dibatasi pada bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh faktor alam, yang mencakup banjir, gempa, longsor, puting beliung, kekeringan, vulkanologi, dan kebakaran. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Indeks Resiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang.					
<p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p> <p>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p> <p>Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan dan mendukung</p>	<p>1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p> <p>6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p> <p>6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</p> <p>15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap</p>	<p>1. Menyediakan dan memelihara akses sarana dan prasarana sanitasi yang layak, memadai, dan sesuai kebutuhan setiap gender lelaki dan perempuan secara mudah dan merata bagi semua kalangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar</p>	<p>- Untuk jenis pelayanan dasar tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik, dengan indikator capaian adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, dari target 100% hanya tercapai 75,98%.</p> <p>- Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal, sedangkan target SPM sektor air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 telah</p>	<p>- Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang terkait dengan kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah kota; kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); kontradiksi antara kebutuhan air bersih melalui pengambilan air tanah oleh masyarakat dengan daya dukung lingkungan yang terbatas; rendahnya kualitas air tanah akibat limbah industri; belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; belum memadainya</p>	<p>1. Belum optimalnya akses terhadap layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan ke semua kalangan masyarakat.</p> <p>2. Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</p> <p>3. Perlu ditingkatkannya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan</p>	<p>Tujuan : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan</p>	<p>Strategi : - Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan</p> <p>Arah Kebijakan : a. Penyusunan kebijakan rencana tata ruang. b. Pemantauan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. c. Peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan. d. Peningkatan dan pemeliharaan ruang</p>	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati	luas lahan keseluruhan. 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	sembarangan. 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan melalui mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang disertai penegakkan aspek legal bagi yang melanggar dan merusak kualitas lingkungan, meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan RTH, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup.	terlampau tetapi masih harus memenuhi target universal akses tahun 2019 yaitu 100% pelayanan air limbah domestik. - Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 11,65 persen, Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 11,16 persen.	keberadaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	lumpur tinja. 4. Perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan. 5. Luasan lahan kritis yang belum banyak berkurang, terutama di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.		terbuka hijau (RTH) perkotaan. e. Peningkatan pengelolaan dan konservasi ekosistem sumber daya alam hayati. f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang lingkungan hidup. h. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup.	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
<p>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p>	<p>6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</p>	<p>Memberikan pembinaan dan memberdayakan organisasi masyarakat, termasuk keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan dengan menciptakan integrasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan apresiasi bagi pihak yang berpengaruh dalam pembangunan di Kota Cimahi.</p>	<p>- Kondisi hidrogeologi Kota Cimahi secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan/ sungai yang melalui Kota Cimahi yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cisangkan, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum. - Mutu Air Sungai di Kota Cimahi berdasarkan perhitungan Metode Storet dari hulu ke hilir termasuk kedalam kategori Buruk. Mutu air sungai di Kota Cimahi menurun kualitasnya karena tingginya tingkat pencemaran yang didominasi oleh limbah domestik dan industri dari kawasan pemukiman disekitar daerah aliran sungai (DAS). Hampir disetiap analisa masing-masing sungai memberikan pola yang sama dari titik sampling hulu ke hilir, kualitas air sungai yang melebihi baku mutu seperti BOD5, COD, Minyak dan Lemak dan Detergen sebagai MB (DIKPLH, 2016).</p>	<p>- Menurunnya Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan, yang ditandai dengan jumlah Pemuda/Organisasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. - Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang ditandai dengan ada pencemaran lingkungan di Kota Cimahi yang terjadi pada lingkungan air dan udara. Pencemaran air ditunjukkan dengan menurunnya kualitas lingkungan air yang terjadi di Sungai Cisangkan, Sungai Cimahi, Sungai Cibaligo, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cibabat. Secara umum kualitas air di lima sungai menunjukkan besarnya pengaruh kegiatan manusia, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan industri dan rumah tangga.</p>	<p>Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p>	<p>Tujuan : - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender - Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Strategi : - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah - Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan</p> <p>Arah Kebijakan : a. Peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian tujuan berkelanjutan. b. Penyusunan program peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan. c. Perbaikan dan pengembangan sistem komunikasi sebagai jalur integrasi antara pemerintah dengan masyarakat.</p>	<p>DLH, DPKP,</p>



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kota Cimahi disertai dengan penyusunan dan penguatan kebijakan serta kelembagaan terkait pengarusutamaan gender.	- Peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi cukup strategis, baik perorangan maupun melalui organisasi-organisasi perempuan. Dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 pelatihan Manajemen Berusaha diberikan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di 15 kelurahan di Kota Cimahi dan 36 organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Pembinaan Posyandu dan Pokjanel dilakukan melalui pelatihan-pelatihan bagi kader posyandu dan penyelenggaraan lomba posyandu seta pembinaan kepada Kader PKK. - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 92,23 dan pada tahun 2018 naik menjadi 92,36. Namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 92,20. - Sama halnya dengan Indeks	- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, yang berkaitan dengan jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara optimal, kegiatan masih ceremonial dan perempuan belum mampu memahami dan mengaspresiasi isu-isu sensitif gender. - Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Urusan perempuan erat kaitannya dengan urusan perlindungan anak, yang masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpengaruh pada	1. Belum adanya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Diperlukan adanya peningkatan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 3. Diperlukan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Tujuan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender Sasaran : Meningkatnya pengarusutamaan gender	Strategi : - Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Arah Kebijakan : a. Penguatan kebijakan kesetaraan gender dalam pemerintah dan kehidupan. b. Optimalisasi program untuk mendukung peningkatan pengarusutamaan gender.	DINSOSP2KBP3 A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Tujuan PB	Indikator PB	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				Strategi dan Arah Kebijakan	SKPD
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran		
			<p>Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 angkanya sebesar 73,38 dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi 77,21. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 74,14.</p> <p>- Selanjutnya, untuk keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kota Cimahi pada tahun 2017 sebesar 24 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 29,87 persen.</p>	<p>kualitas tumbuh kembang anak.</p>				

Daftar Pustaka

- Abidin, H. Z., Andreas, H., Gamal, M., Wirakusumah, A. D., Darmawan, D., Deguchi, T., & Maruyama, Y. (2008). Land Subsidence Characteristic of The Bandung Basin, Indonesia, as Estimated From GPS and InSAR. *Journal of Applied Geodesy* 2, 167-177.
- Andreas, H., Abidin, H. Z., Gumilar, I., Sidiq, T. P., Sarsito, D. A., & Pradipta, D. (2018). Insight into the Correlation between Land Subsidence and the Floods in Regions of Indonesia. *Natural Hazards–Risk Assessment and Vulnerability Reduction*.
- Bappenas dan GGGI. (2018). *Background Studi Kehutanan RPJMN 2019-2014*.
- BPS. (2013). *Indonesia Population Projection*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Kota Cimahi Dalam Angka 2018*. Kota Cimahi: BPS Kota Cimahi.
- Diba, F. (2015). *Pemetaan pola distribusi dan aliran materi (studi kasus: penyediaan air di Kawasan Bandung Utara)*. Kota Bandung: ITB.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. (2019). *Dokumen Laporan Kegiatan Perhitungan Alokasi Beban Pencemar pad Sub DAS Citarum di Kota Cimahi*. Kota Cimahi: Dinas Lingkungan Hidup.
- DLH . (2019). *Laporan Pendahuluan FS/Dokumen Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2019*. Kota Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi Dinas Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan.
- DLH Provinsi Jawa Barat. (2019). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Pedoman Praktis Penyelenggaraan*. Bandung: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
- Folke, C., Biggs, R., Norstrom, A. V., Reyers, B., & Rockstrom, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), 41. doi:<http://dx.doi.org/10.5751/ES-08748-210341>
- Griggs, D., Nilsson, M., Stevance, A.-S., & McCollum, D. (2017). *A guide to SDG interactions: from science to implementation*. Paris: International Council for Science.



- Gumilar, I., Abidin, H. Z., Hutasoit, L. M., Hakim, D. M., Sarsito, D. A., Andreas, H., & Sidiq, T. P. (2012). Pemantauan Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung dengan Metode Survei GPS dan InSAR. *Indonesian Journal of Geospatial Vol. 1 No. 4*, 44-53.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Kesehatan. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia*. Retrieved from http://gizi.depkes.go.id/download/kebijakan_gizi/pmk_75-2013.pdf (2013)
- Lakitan, B. (2002). *Dasar-dasar Klimatologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystem and Human Well-being: A Framework for Assessment*. Washington: Island Press.
- Muta'ali, L. (2012). *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nengsih, S. R. (2015). Pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi untuk wilayah Indonesia dengan menggunakan sistem grid skala ragam. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 21(1), 31-36.
- Norvyani, D. A. (2016). *Pemetaan status daya dukung lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota menggunakan sistem grid skala ragam (studi kasus: wilayah administratif Cekungan Bandung)*. Institut Teknologi Bandung: Tugas Akhir.
- Pemerintah Daerah Jawa Barat. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023*. Jawa Barat: Pemerintah Daerah Jawa Barat.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Air Tanah No 43 Tahun 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara.



- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembar Negara RI Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI.
- Riqqi, A. (2014). Rancangan Konsep Teknik Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional Dan Pulau/Kepulauan Serta Provinsi. *Focus Group Discussion (FGD) Daya Dukung dan Daya Tampung*. Bali.
- Riqqi, A., Hendaryanto, H., Safitri, S., Mashita, N., Sulistyawati, E., Norvyani, D. A., & Afriyane, D. (2019). Pemetaan Jasa Ekosistem. *Seminar Nasional Geomatika*, 237-246.
- Siswanto. (2014). Kebutuhan Air Irigasi. In *Bahan Ajar Perkuliahan Agrohidrologi*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.
- Taradini, J. (2017). Optimisasi alokasi tutupan lahan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup di Pulau Jawa. *Tugas Akhir, Institut Teknologi Bandung*.



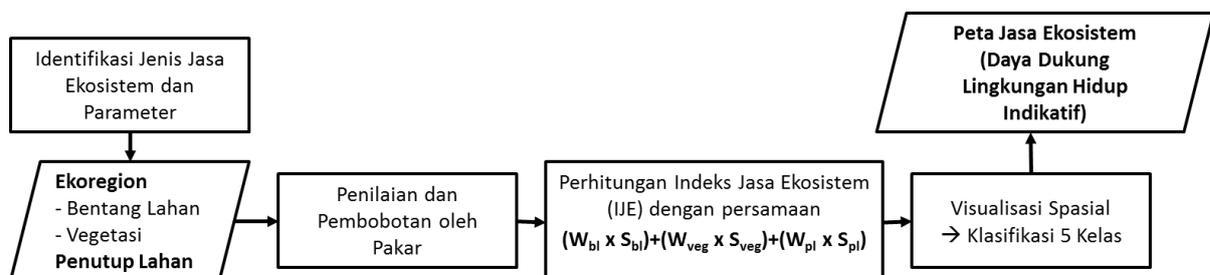
LAMPIRAN

Lampiran A

Metode Analisis Spasial Muatan Lingkungan Hidup

A.1. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan dapat mewakili DDDTLH dengan pemahaman bahwa daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas fungsi dan jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan manusia dan/atau makhluk lainnya di suatu ekoregion. Jasa pengaturan akan mendukung daya tampung, sementara ketiga jasa ekosistem lainnya (penyedia, pendukung, dan budaya) akan mendukung daya dukung (Riqqi A. , 2014). Oleh karena itu, peta DDDTLH dapat disusun berupa peta jasa ekosistem untuk masing-masing jenis jasa ekosistem. Penyusunan peta jasa ekosistem meliputi tahapan: (i) identifikasi jenis jasa ekosistem, data, dan parameter, (ii) penilaian dan pembobotan terhadap parameter yang menentukan jasa ekosistem, (iii) analisis spasial dan perhitungan indeks jasa ekosistem (IJE), dan (iv) visualisasi spasial IJE. Secara umum, tahap penyusunan dapat dilihat pada diagram berikut.



(i) Identifikasi jenis jasa ekosistem dan parameter

Data dasar yang digunakan dalam pembuatan peta jasa ekosistem, meliputi peta ekoregion dan peta penutup lahan. Peta ekoregion memuat data tentang bentang lahan dan vegetasi.

(ii) Penilaian dan pembobotan

Penilaian (skoring) dan pembobotan setiap parameter karakteristik bentang lahan, vegetasi, dan penutup lahan dilakukan oleh pakar (*expert judgement*) sesuai dengan bidang keahliannya. Penilaian dan pembobotan setiap parameter telah dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga pada penyusunan peta jasa ekosistem ini menggunakan nilai dan bobot tersebut.

(iii) Analisis dan perhitungan IJE

Perhitungan IJE dilakukan menggunakan metode *simple additive weight* (SAW). Berikut ini merupakan persamaan yang digunakan untuk perhitungan IJE:

$$IJE = (W_{bl} \times S_{bl}) + (W_{veg} \times S_{veg}) + (W_{pl} \times S_{pl}) \quad (\text{Pers. 1})$$

dengan:

- IJE* : indeks jasa ekosistem,
W : bobot (penilaian ahli),
S : skor (penilaian ahli), dan
bl, veg, pl : karakteristik bentang lahan (*bl*), vegetasi (*vg*), dan penutup lahan (*pl*).

Hasil perhitungan IJE kemudian dituangkan ke dalam informasi spasial berupa peta.

(iv) Visualisasi spasial IJE

Penilaian terhadap peta IJE digunakan untuk menentukan kelas kemampuan atau kinerja jasa lingkungan hidup. Muatan informasi peta jasa ekosistem dibagi ke dalam kelas ordinal, yaitu kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan rentang nilai indeks sebagai berikut:

- Sangat rendah : 1,0 – 1,8
- Rendah : 1,9 – 2,6
- Sedang : 2,7 – 3,4
- Tinggi : 3,5 – 4,2
- Sangat tinggi : 4,3 – 5,0

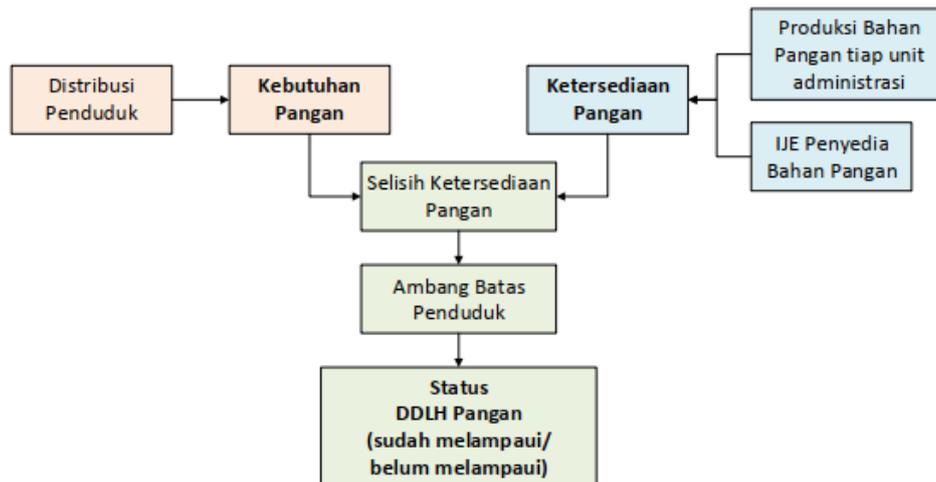
A.2. Kapasitas Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) berbanding lurus terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah konsumsi penduduk. Hal ini dinyatakan oleh Cloud (dalam Soerjani dkk., 1987), bahwa daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem (Norvyani, 2016). Perhitungan DDLH penyedia

pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 5"x5" ($\approx 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya. Alur pemodelan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dapat dilihat pada diagram berikut.



(i) Perhitungan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kota Cimahi dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kcal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPPB) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan ketersediaan pangan di setiap grid menggunakan persamaan:

$$KH_i = \frac{IJEPPB_i}{IJEPPB_{kab}} \times KH_{kab} \quad (\text{Pers. 2})$$

dengan:

- KH_i : ketersediaan bahan pangan pada grid i dalam satu tahun (kcal),
- $IJEPPB_i$: IJE penyedia bahan pangan pada grid i ,
- $IJEPPB_{kab}$: total IJE penyedia bahan pangan di setiap kabupaten, dan
- KH_{kab} : ketersediaan bahan pangan di setiap kabupaten dalam satu tahun (kcal).

(ii) Perhitungan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan

energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari (Kementerian Kesehatan, 2013). Barirotuttaqiyah (2015) menggunakan persamaan berikut untuk menghitung kebutuhan pangan di setiap grid.

$$KB_i = P_i \times AKE \times 365 \quad (\text{Pers. 3})$$

dengan, KB_i adalah kebutuhan pangan di grid ke- i selama setahun (kkal); P_i adalah jumlah penduduk grid ke- i (orang); dan AKE adalah angka kecukupan energi per kapita (kkal/orang/hari).

(iii) Perhitungan ambang batas penduduk

Status DDLH ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk merupakan jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya oleh ketersediaan pangan yang ada di suatu area. Ambang batas DDLH dinyatakan dalam bentuk jumlah penduduk. Perhitungan ambang batas penduduk untuk DDLH penyedia pangan menggunakan persamaan:

$$TP_i = \frac{KH_i}{AKE \times 365} \quad (\text{Pers. 4})$$

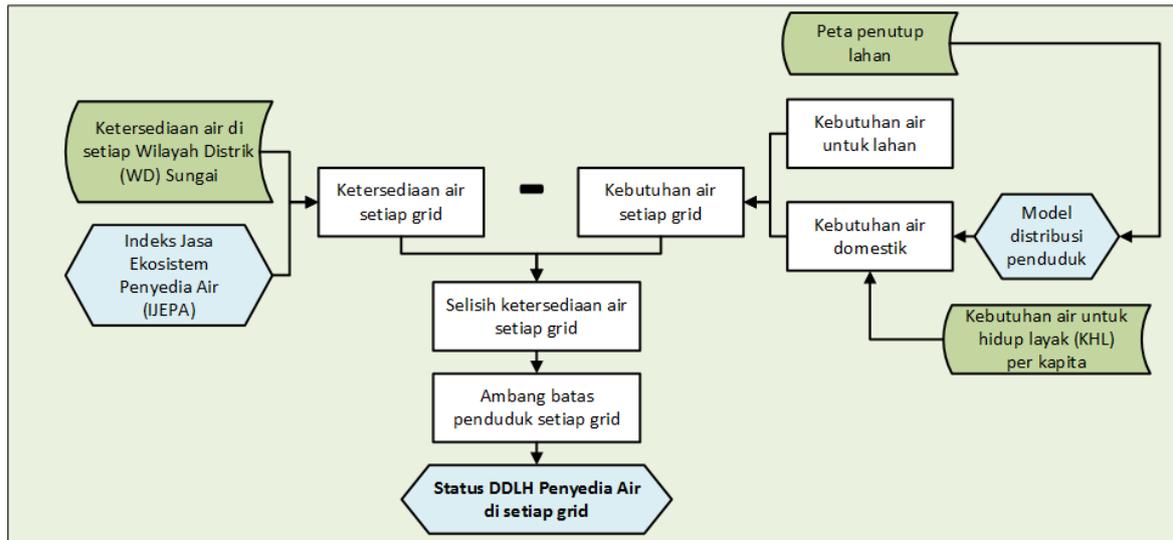
dengan, TP_i adalah ambang batas penduduk pada grid i (orang), KH_i adalah ketersediaan pangan pada grid i dalam satu tahun (kkal), dan AKE adalah angka kecukupan energi yaitu 2.150 kkal/orang/hari.

(iv) Penentuan status DDLH penyedia pangan

Status DDLH penyedia pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

2. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5”x5” ($\pm 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$). Diagram alir dari tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.



(i) Perhitungan ketersediaan air

Ketersediaan air di setiap grid dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap wilayah distrik (WD) sungai dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Data ketersediaan air di setiap wilayah distrik (WD) sungai diperoleh dari Neraca Air yang disusun oleh Kementerian PUPR. Persamaan matematis yang digunakan yaitu:

$$\text{Ketersediaan air} = \text{Air}_{WD} \times \frac{IJEPA_i}{IJEPA_{WD}} \quad (\text{Pers. 5})$$

dengan:

- Ketersediaan air* : ketersediaan air di setiap grid (m³/tahun),
- Air_{WD}* : ketersediaan air di setiap wilayah distrik (WD) sungai (m³/tahun),
- IJEPA_i* : indeks jasa ekosistem penyedia air di grid-*i*, dan
- IJEPA_{WD}* : jumlah indeks jasa ekosistem penyedia air di wilayah sungai.

(ii) Perhitungan kebutuhan air

Perhitungan kebutuhan air terbagi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutup lahan. Penutup lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Perhitungan kebutuhan air lahan pertanian (selain tambak) dihitung menggunakan persamaan:

$$Q_i = A_i \times I \times q \quad (\text{Pers. 6})$$

dengan:

Q_i : kebutuhan air untuk penutup lahan dalam setahun untuk grid ke- i (m^3/tahun),

A_i : luas lahan grid ke- i (Ha),

I : intensitas tanam dalam persen (%) musim per tahun, dan

q : standar penggunaan air (1 liter/detik/Ha)

: $0,001 \text{ m}^3/\text{detik}/\text{Ha} \times 3600 \times 24 \times 120$ hari per musim

Untuk tanaman padi, intensitas tanam diasumsikan 200%, yaitu dua musim per tahun. Tanaman padi ini mewakili penggunaan air pada lahan sawah. Kemudian, untuk menghitung kebutuhan air tebu dan palawija, digunakan angka perbandingan umum padi : tebu : palawija, yaitu 4 : 1,5 : 1 (Siswanto, 2014). Dengan menggunakan asumsi umum, lahan penanaman tebu di perkebunan dan palawija di pertanian lahan kering, maka untuk setiap kelas lahan diperoleh perbandingan penggunaan air untuk sawah : perkebunan : pertanian lahan kering = 4 : 1,5 : 1. Untuk tambak, nilai q (pada Pers. 6) memiliki nilai yang berbeda karena standar penggunaan airnya $0,00491 \text{ m}^3/\text{detik}/\text{ha}$ dan per musim nya terdiri dari 150 hari.

Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar $43,3 \text{ m}^3/\text{tahun}$. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor*. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air domestik adalah:

$$\text{Kebutuhan air domestik} = \text{jumlah penduduk} \times 43,2 \times 2 \text{ m}^3/\text{tahun} \quad (\text{Pers. 7})$$

(iii) Perhitungan ambang batas penduduk

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan hidup (DDLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan (Muta'ali, 2012). Cloud (dalam Soerjani dkk., 1987) menggambarkan DDLH melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati

ambang batasnya. Dalam hal DDLH penyedia air, ambang batas penduduk di setiap grid dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Ambang batas} = \frac{\text{ketersediaan air} - \text{kebutuhan air lahan}}{43,2 \times 2} \quad (\text{Pers. 8})$$

(iv) Penentuan status DDLH Penyedia Air di setiap grid

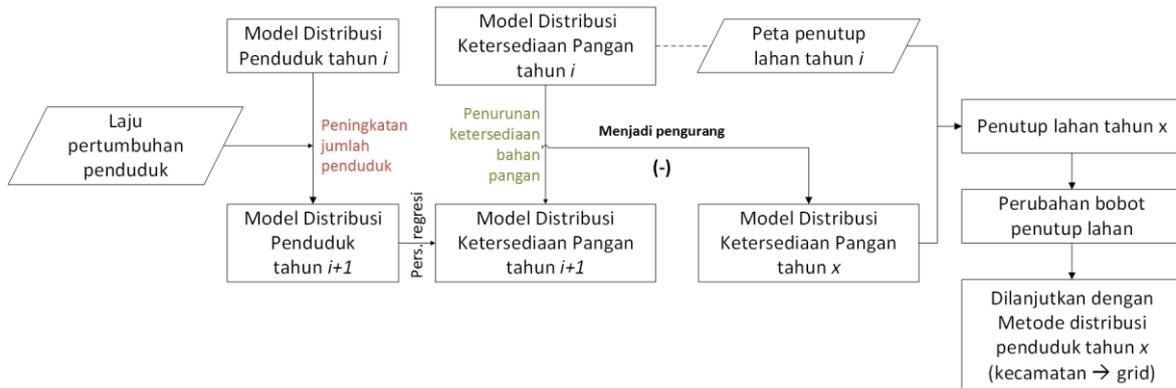
Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di grid tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH penyedia air “Melampaui”, dan jika sebaliknya maka grid tersebut memiliki status DDLH penyedia air “Belum Melampaui”.

A.3. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk merupakan pertumbuhan jumlah penduduk di setiap grid 5”x5” antar periode tahun tertentu. Dalam penyusunan DDDTLH di Kota Cimahi, periode yang digunakan adalah setiap 10 tahun selama 30 tahun dari tahun dasar, yaitu tahun 2016, 2020, 2030, 2040, dan 2050. Model distribusi penduduk setiap grid pada tahun dasar didistribusikan dari jumlah penduduk setiap kabupaten di Kota Cimahi. Penutup lahan (khususnya lahan terbangun) dan kelas jalan menjadi bobot dalam pendistribusian penduduk ke setiap grid. Untuk model proyeksi penduduk pada tahun yang akan datang dimodelkan dengan metode berikut.

Model proyeksi penduduk di setiap grid prinsipnya sama dengan model distribusi penduduk, yaitu dengan mendistribusikan jumlah penduduk pada unit administratif kecamatan ke setiap grid, menggunakan jenis penutup lahan dan kelas jalan sebagai bobot pendistribusian. Namun, yang membedakan adalah jumlah penduduk pada setiap kecamatan yang meningkat dan adanya perubahan jenis penutup lahan pada tahun proyeksi yang berpengaruh terhadap bobot pendistribusian. Secara keseluruhan, pemodelan proyeksi penduduk di setiap grid dapat dilihat pada diagram berikut.



Pada prinsipnya, terdapat dua variabel yang berubah dalam pemodelan penduduk pada tahun proyeksi, yaitu (i) jumlah penduduk setiap kecamatan di tahun proyeksi dan (ii) jenis penutup lahan pada tahun proyeksi. Kemudian, setelah diketahui dua variabel tersebut pada tahun proyeksi, dilakukan pendistribusian penduduk setiap kecamatan pada tahun proyeksi ke setiap grid.

(i) Perhitungan jumlah penduduk setiap kecamatan di tahun proyeksi

Perhitungan jumlah penduduk di setiap unit administratif kecamatan pada tahun proyeksi menggunakan metode geometrik (BPS, 2013), yaitu:

$$P_t = P_0(1 + r)^t \quad \text{(Pers. 9)}$$

dengan:

P_t : jumlah penduduk pada tahun proyeksi t ,

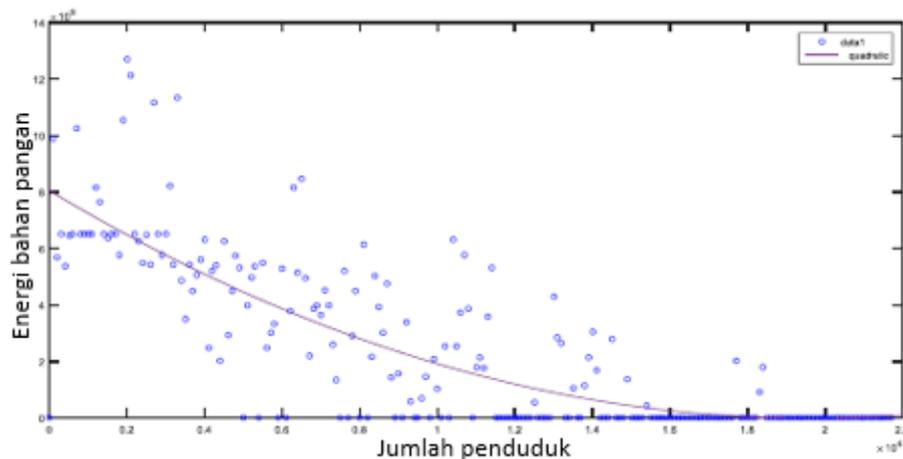
P_0 : jumlah penduduk pada tahun dasar,

r : laju pertumbuhan penduduk, dan

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t .

(ii) Penentuan jenis penutup lahan setiap grid pada tahun proyeksi

Penentuan jenis penutup lahan di tahun proyeksi dilakukan berdasarkan hubungan matematis antara jumlah penduduk dengan ketersediaan energi bahan pangan di suatu wilayah. Dasar pemikiran dari model ini adalah adanya hubungan berbanding terbalik antara jumlah penduduk dan ketersediaan bahan pangan di suatu area (Taradini, 2017), seperti diilustrasikan pada gambar di bawah. Wilayah dengan jumlah penduduk rendah umumnya menghasilkan bahan pangan dalam jumlah yang tinggi karena areanya digunakan untuk produksi bahan pangan, sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi menghasilkan sedikit bahan pangan karena areanya didominasi untuk tempat tinggal (lahan terbangun). Setiap kondisi wilayah tersebut merepresentasikan jenis penutup lahan tertentu.



Hubungan tersebut kemudian direpresentasikan dalam hubungan matematis, yaitu dengan analisis regresi, dengan jumlah penduduk menjadi variabel bebas (*independent variable*) dan ketersediaan energi bahan pangan menjadi variabel terikat (*dependent variable*). Persamaan polinomial hasil regresi untuk setiap wilayah yang dikaji akan berbeda-beda sesuai karakteristik kependudukan dan pangan di wilayah tersebut.

Model ketersediaan energi bahan pangan setiap grid di tahun proyeksi dihitung berdasarkan selisih ketersediaan energi bahan pangan dalam periode satu tahun. Perhitungan selisih ketersediaan energi bahan pangan dalam satu tahun ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$\Delta Km = Km_{i+1} - Km_i \quad (\text{Pers. 10})$$

dengan:

ΔKm : selisih ketersediaan energi bahan pangan antara tahun $n+1$ dan n di grid ke- i ,

Km_{i+1} : model ketersediaan energi bahan pangan tahun $n+1$ di grid ke- i ,

Km_i : model ketersediaan energi bahan pangan tahun n di grid ke- i , dan

n : tahun dasar.

Dengan mengetahui selisih/perubahan ketersediaan energi bahan pangan dalam satu tahun, maka model ketersediaan energi bahan pangan setiap grid di tahun proyeksi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Kmt = Km_i + (\Delta Km \times \Delta t) \quad (\text{Pers. 11})$$

dengan:

- Kmt : model ketersediaan energi bahan pangan grid ke- i pada tahun proyeksi,
 Km_i : model ketersediaan energi bahan pangan tahun n di grid ke- i ,
 ΔKm : selisih ketersediaan energi bahan pangan antara tahun $n+1$ dan n di grid ke- i ,
 Δt : selisih tahun pada tahun proyeksi dengan tahun n .

Model ketersediaan energi bahan pangan di setiap grid pada tahun proyeksi digunakan untuk menentukan jenis penutup lahan pada tahun proyeksi. Penentuannya didasarkan pada rentang nilai ketersediaan energi bahan pangan di setiap jenis penutup lahan pada tahun dasar sebagai acuan. Dengan begitu, adanya perubahan ketersediaan energi bahan pangan pada tahun proyeksi menyebabkan perubahan jenis penutup lahan. Perubahan jenis penutup lahan di setiap grid akan mengubah bobot pendistribusian penduduk di setiap grid yang bersangkutan.

(iii) Pendistribusian penduduk pada tahun proyeksi ke setiap grid

Setelah dilakukan perhitungan jumlah penduduk setiap kecamatan dan jenis penutup lahan setiap grid pada tahun proyeksi, maka selanjutnya dilakukan pemodelan distribusi penduduk pada tahun proyeksi tersebut. Tahapan pemodelan sama dengan metode pendistribusian penduduk pada tahun dasar, namun jumlah penduduk dan bobot pendistribusian penduduk berdasarkan jenis penutup lahan menggunakan angka hasil perhitungan di tahun proyeksi.

2. Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja

Potensi timbulan sampah dan lumpur tinja memiliki hubungan sebanding dengan jumlah penduduk di setiap grid. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula timbulan sampah dan lumpur tinja yang berpotensi ada di wilayah tersebut. Sampah dan lumpur tinja dihitung berdasarkan kajian jumlah sampah dan lumpur tinja yang dihasilkan per kapita di Kota Cimahi, dengan persamaan berikut:

$$T_i = P_i \times n \quad (\text{Pers. 12})$$

dengan:

- T_i : timbulan sampah atau lumpur tinja pada grid ke- i ,
 P_i : jumlah penduduk pada grid ke- i , dan
 n : timbulan sampah atau lumpur tinja per kapita.

3. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Potensi beban pencemar air sungai yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS dengan mempertimbangkan potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan lahan. Dalam perhitungannya, potensi beban pencemar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, kondisi lingkungan seperti daerah perkotaan atau pinggiran kota, dan jenis tutupan lahan.

Potensi beban pencemar total merupakan hasil dari akumulasi beban pencemar domestik, beban pencemar pertanian, dan beban pencemar penggunaan lahan di suatu wilayah. Persamaan berikut menunjukkan perhitungan potensi beban pencemar total.

$$PBP_{total} = PBP_{dom} + PBP_{tani} + PBP_{lahan} \quad (\text{Pers. 13})$$

Dengan PBP_{total} adalah nilai potensi beban pencemar total, PBP_{dom} adalah nilai potensi beban pencemar domestik; PBP_{tani} adalah nilai potensi beban pencemar pertanian; dan PBP_{lahan} adalah nilai potensi beban pencemar penggunaan lahan.

- Potensi Beban Pencemar Domestik

Pada perhitungan potensi beban pencemar domestik, jumlah dari populasi di suatu kawasan sangat berpengaruh. Nilai potensi tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$PBP_{dom} = P_i \times F_e \times R_e \times \alpha \quad (\text{Pers. 14})$$

Dengan, PBP_{dom} adalah besar beban pencemar domestik pada grid i ; P_i adalah jumlah populasi pada grid i ; F_e adalah faktor emisi penduduk terhadap jenis beban pencemar; R_e adalah rasio ekivalen suatu wilayah; dan α adalah koefisien transfer beban yang nilainya bergantung pada jarak terhadap sungai. Nilai koefisien dari F_e , R_e , dan α untuk domestik tercantum pada tabel berikut.

Zat pencemar	Faktor Emisi F_e (kg/org/hr)	Rasio Ekivalen Wilayah		Jarak terhadap Sungai	
		Jenis	R_e	Jarak (m)	α
BOD	0.04	Kota	1	0 – 100	1
COD	0.055	Pinggiran	0.8125	100 – 500	0.85
		Kota			
TSS	0.038	Pedalaman	0.625	> 500	0.3

Sumber: Ananda (2017)

- Potensi Beban Pencemar Pertanian

Potensi beban pencemar untuk pertanian hanya mempertimbangkan beberapa jenis tutupan lahan yang terkait dengan pertanian. Tutupan lahan ini dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sawah, palawija, dan kebun/ tegalan/ kebun campuran. Persamaan berikut digunakan untuk melakukan perhitungan beban pencemar pertanian.

$$PBP_{tani} = (L_i \times f_e \times M) / d_m \quad \text{(Pers. 15)}$$

Dengan, PBP_{tani} adalah potensi beban pencemar pertanian; L_i adalah luas tutupan lahan pada grid i ; f_e adalah faktor emisi beban pencemar; M adalah jumlah musim tanam; dan d_m adalah jumlah hari musim tanam. Nilai koefisien dari f_e untuk pertanian tercantum pada tabel berikut.

Parameter Zat Pencemar	Tutupan Lahan Pertanian		
	Sawah (kg/ha/msm tanam)	Palawija (kg/ha/msm tanam)	Kebun/ Tegalan (kg/ha/msm tanam)
BOD	225	125	32.5
COD	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)
TSS	0.46	2.4	1.6

Sumber: Ananda (2017)

- Potensi Beban Pencemar Penggunaan Lahan

Potensi beban pencemar penggunaan lahan dihitung untuk daerah dengan tutupan lahan berupa hutan dan lahan terbangun. Persamaan berikut digunakan untuk melakukan perhitungan beban pencemar penggunaan lahan.

$$PBP_{lahan} = (L_i \times f_e) / 365 \text{ hari} \quad \text{(Pers. 16)}$$

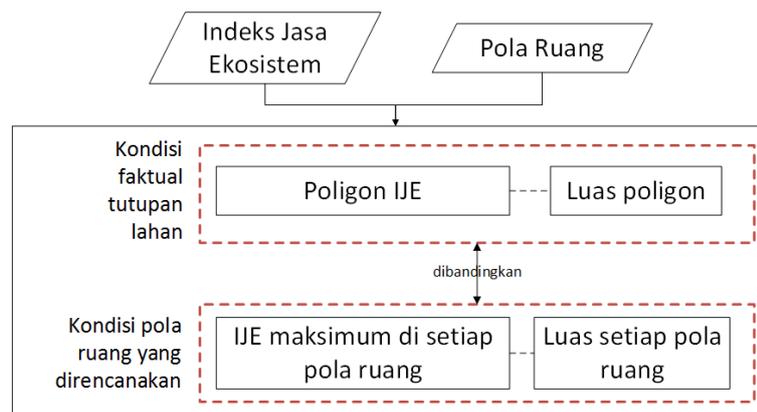
Dengan, PBP_{lahan} adalah potensi beban pencemar penggunaan lahan, L_i adalah luas tutupan lahan pada grid i ; dan f_e adalah faktor emisi beban pencemar. Nilai koefisien dari f_e untuk penggunaan lahan tercantum pada tabel berikut.

Parameter Zat Pencemar	Tutupan Lahan	
	Hutan (kg/ha)	Lahan Terbangun (kg/ha)
BOD	9.32	15.34
COD	(BOD * 1.5)	(BOD * 1.5)

Sumber: Ananda (2017)

A.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk menjelaskan seberapa optimal potensi sumber daya alam telah dimanfaatkan. Dalam hal ini, potensi sumber daya alam diwakili oleh jasa lingkungan/jasa ekosistem. Salah satu cara untuk menilai efisiensi adalah dengan membandingkan kondisi pola ruang yang direncanakan dengan kondisi faktual dari tutupan lahan, seperti diilustrasikan pada diagram berikut.



Efisiensi dinilai berdasarkan luasan tutupan lahan faktual dan nilai indeks jasa ekosistem (IJE) di setiap pola ruang di Kota Cimahi. Jasa lingkungan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah jasa lingkungan penyedia pangan, jasa penyedia air bersih, serta jasa pengaturan tata air dan banjir. Persamaan yang digunakan untuk menghitung efisiensi pada setiap pola ruang adalah:

$$Efisiensi = \frac{L_x \times IJE_x}{Luas\ pola\ ruang \times IJE_{max}} \quad (Pers. 17)$$

dengan:

- L_x : luas area yang dihitung,
- IJE_x : nilai IJE pada area yang dihitung, dan
- IJE_{max} : IJE maksimum di setiap jenis pola ruang.

Kemudian, efisiensi penyedia pangan, penyedia air bersih, serta pengaturan tata air dan banjir dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis pola ruang dengan melihat proporsi penutup lahan faktual pada masing-masing pola ruang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa sesuai penutup lahan faktual terhadap jenis pola ruang yang direncanakan.

A.5. Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Pada penyusunan DDDTLH di Kota Cimahi, potensi keanekaragaman hayati disampaikan secara deskriptif dan analitis. Potensi keanekaragaman hayati secara deskriptif mengacu pada kajian keanekaragaman hayati terkait flora dan fauna, serta potensi habitatnya di lingkungan Kota Cimahi. Secara analitis, potensi keanekaragaman hayati direpresentasikan pula dengan IJE Keanekaragaman Hayati yang dihitung dengan metode pada Lampiran A. Wilayah dengan IJE keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi pula.

Seiring dengan perkembangan wilayah, potensi keanekaragaman hayati yang tinggi ini dapat memiliki ancaman dari berbagai macam aktivitas. Untuk mengetahui ketahanan keanekaragaman hayati terhadap ancaman, salah satunya dapat dinilai berdasarkan bentuk geometris wilayahnya, yaitu nilai *shape index* yang dihitung dengan persamaan berikut:

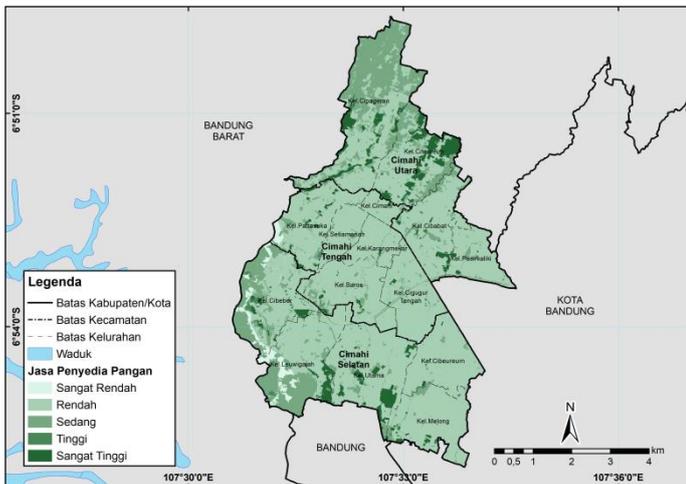
$$Shape\ Index = \frac{1}{Keliling} \times \sqrt{4\pi \times Luas} \quad (\text{Pers. 18})$$

Wilayah dengan bentuk yang *compact*, akan memiliki *shape index* yang tinggi dan artinya memiliki ketahanan yang tinggi karena tidak mudah terganggu akan adanya ancaman. Sebaliknya, wilayah dengan bentuk yang memanjang atau menjeri, akan memiliki *shape index* yang rendah dan artinya memiliki ketahanan yang rendah karena akan mudah terganggu terhadap adanya ancaman.

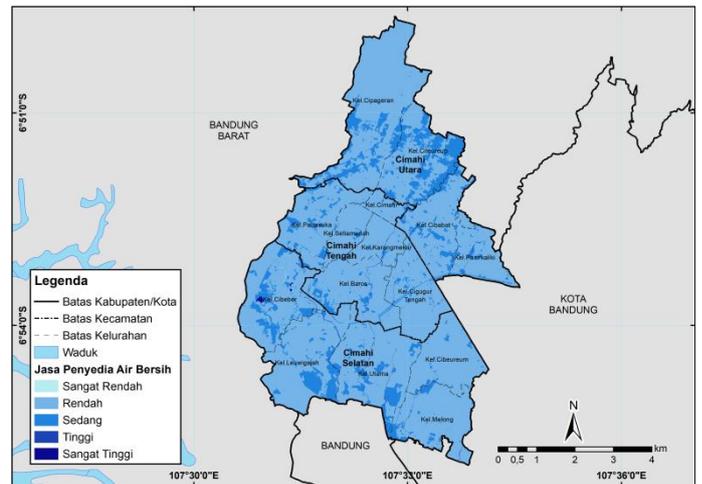
Lampiran B

Peta Jasa Ekosistem di Kota Cimahi

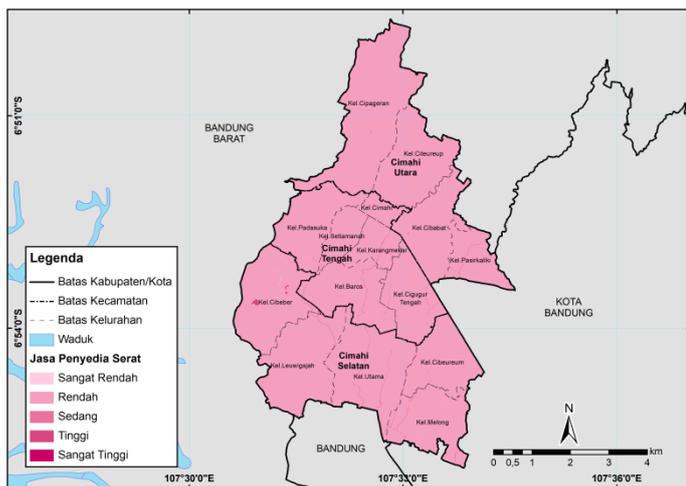
1. Jasa Ekosistem Penyedia



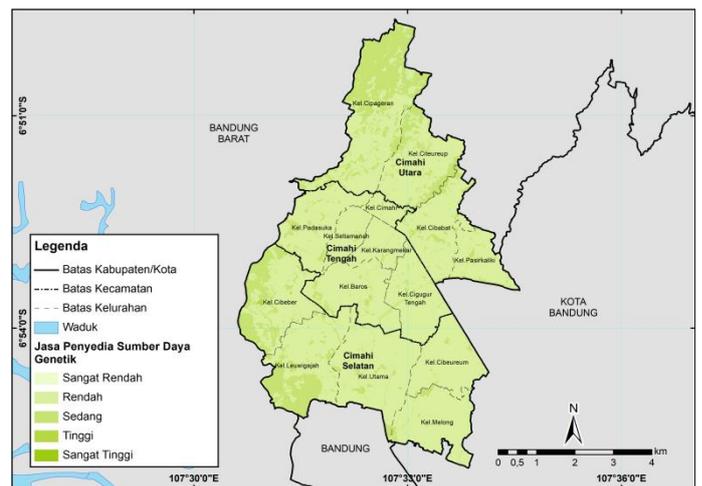
Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan



Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Jasa Ekosistem Penyedia Serat

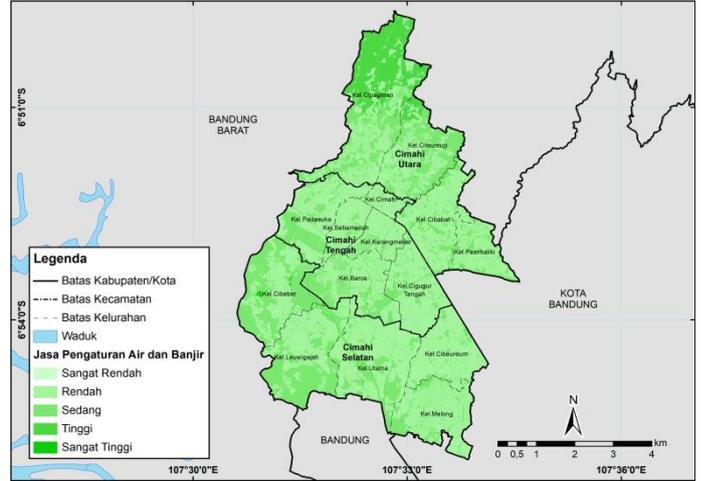
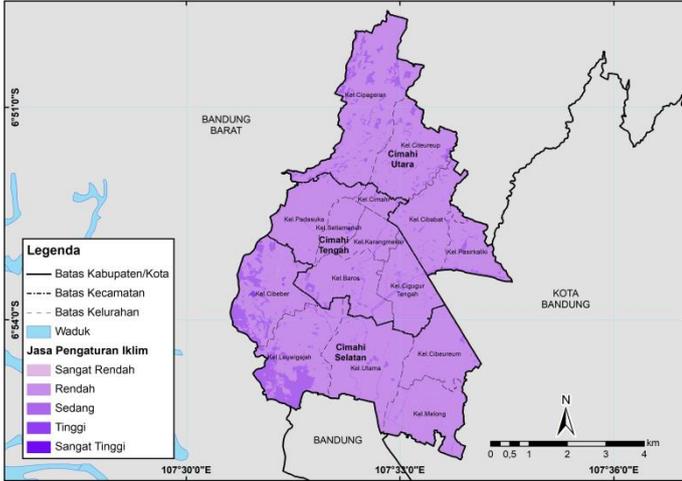


Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik



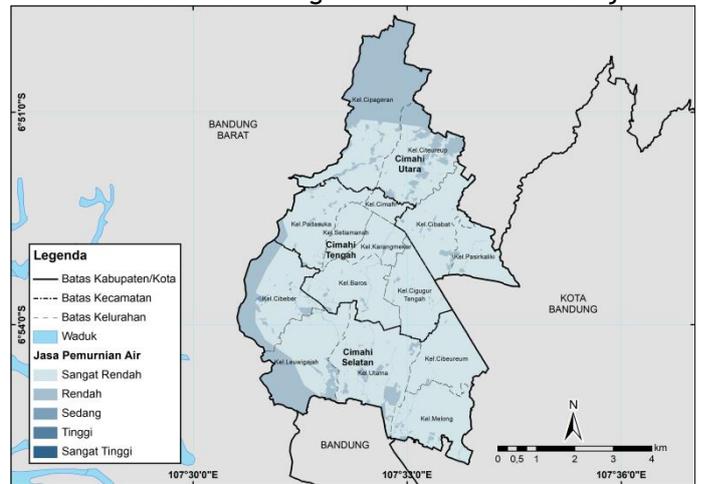
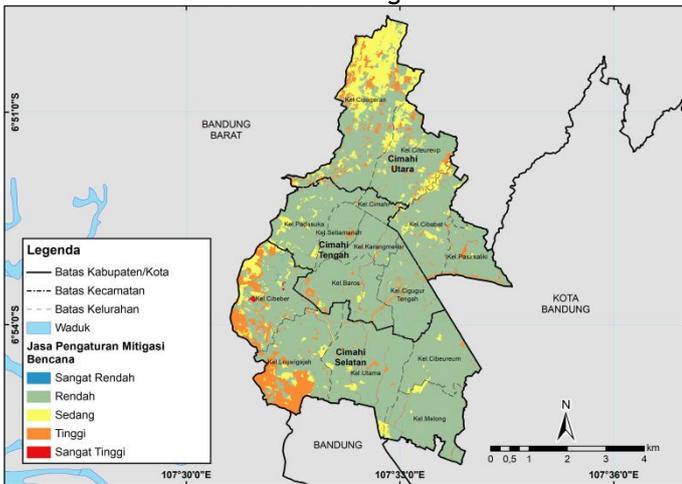
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

2. Jasa Ekosistem Pengaturan



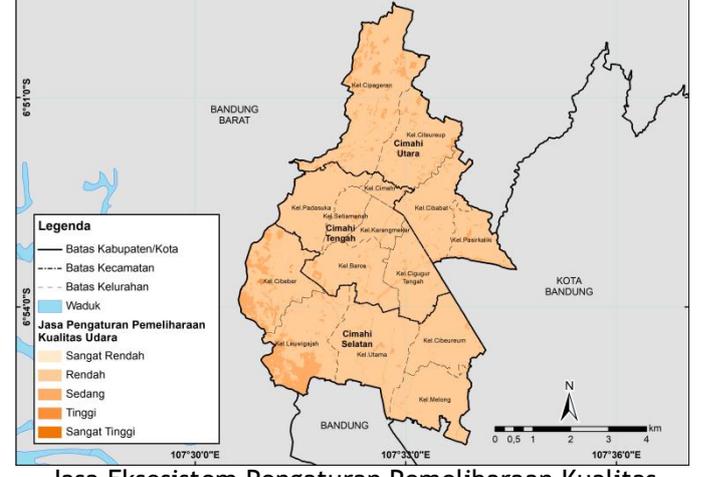
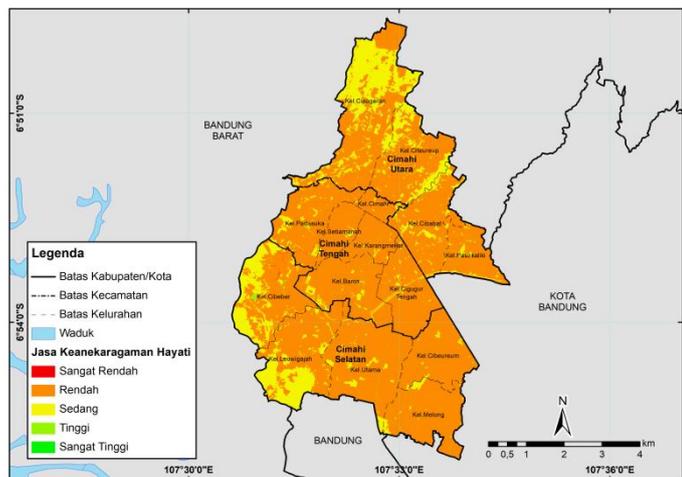
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir



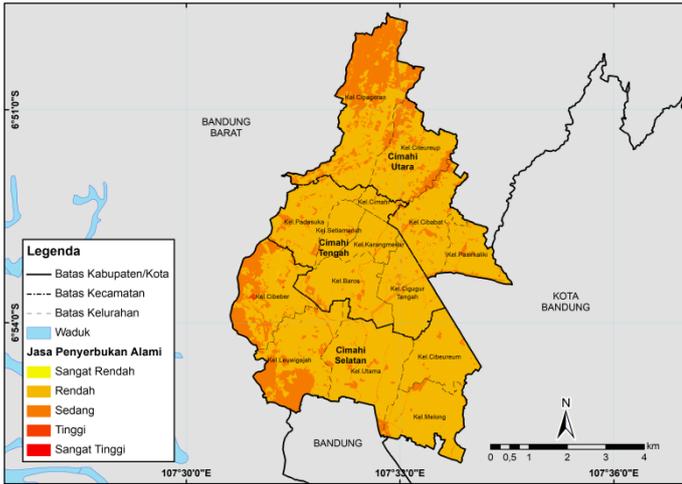
Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana

Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

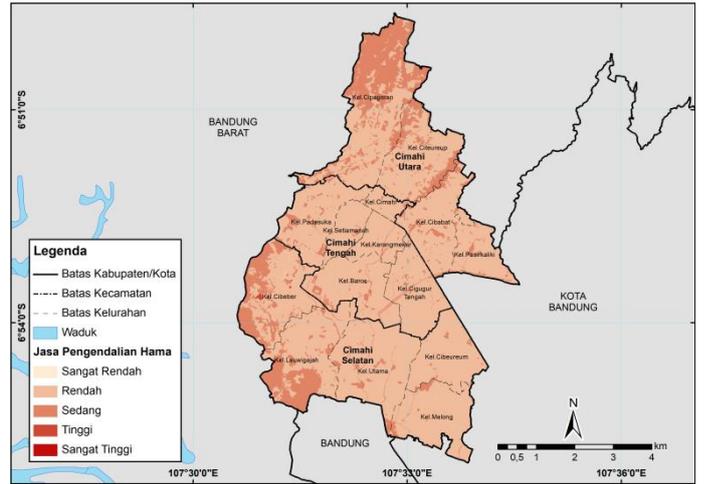


Jasa Ekosistem Pengaturan Keanekaragaman Hayati

Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

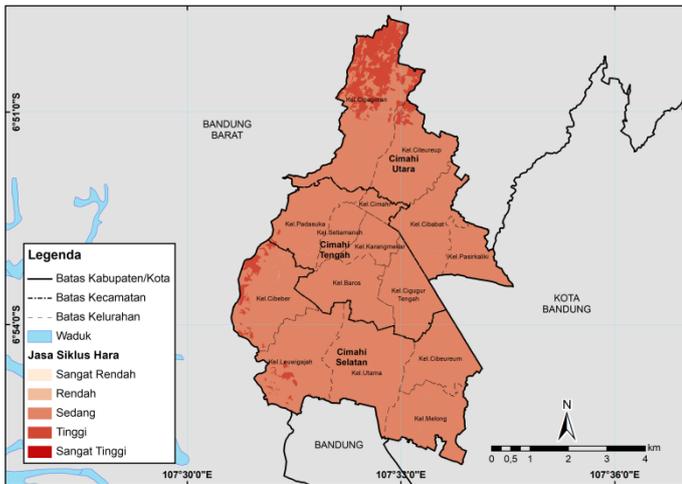


Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami

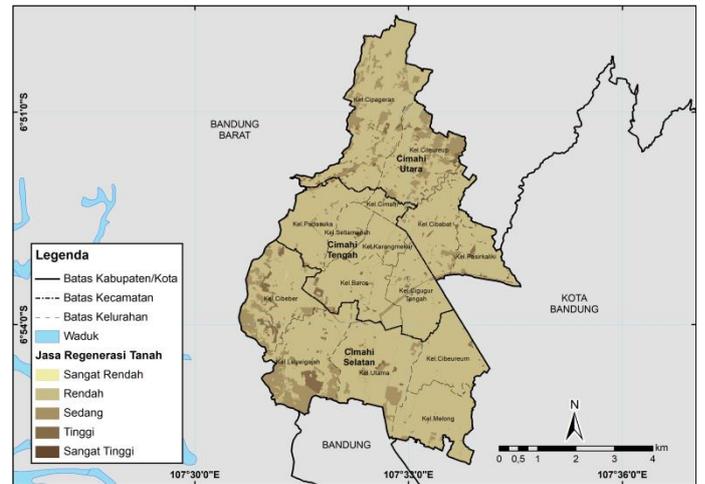


Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama

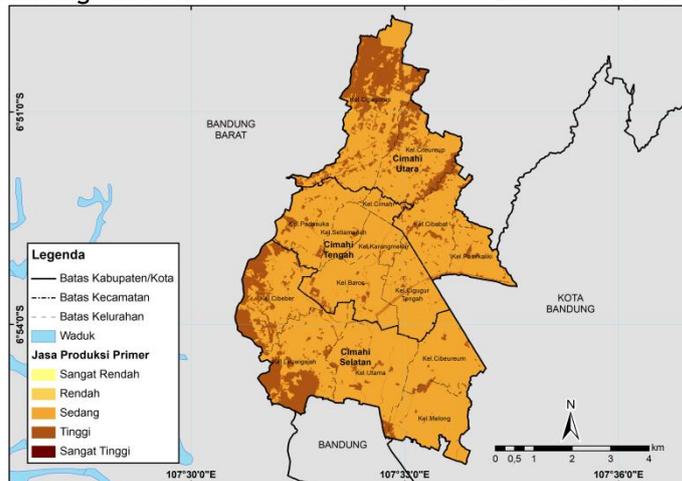
3. Jasa Ekosistem Pendukung



Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara



Jasa Ekosistem Pendukung Regenerasi Tanah



Jasa Produksi Primer



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer

Lampiran C

Capaian Indikator TPB di Kota Cimahi

C.1. Indikator TPB Pilar Sosial

TPB 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,94%	- 3,06%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	96,04%	- 1,04%

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	an sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	172.457 Penerima Upah, 14.704 Bukan Penerima Upah	0,00%
	mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%		0,00%
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	9279	- 99,97 %
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	96,24%	- 26,24 %
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima	Meningkat menjadi 63%.	93,60%	- 30,60 %

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPERS 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		imunisasi dasar lengkap.			
		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	78,60%	- 13,60 %
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	87,51%	12,49 %
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	72,60%	27,40 %
		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	4,39%	0,00%
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	98,60%	- 3,82%

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	82,30%	- 0,10%
		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	98,79%	- 21,39 %
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	80%	20,00 %
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1313	- 46,97 %
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	15 (Jumlah kelurahan: 15)	0,00%
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	0,00%
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	100,00 %
		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	120	1,18%
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	2192920000	0,00%
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	0	100,00 %
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat		0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Rp. 444.816.260.855,47 (2018) (Diisi persen dari jumlah anggaran total Disdik, Dinkes, Dinsos terhadap total APBD)	0,00%

TPB 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	2,74%	- 5,76 %
		2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	6,26%	- 21,74 %
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	2,74%	- 5,76 %
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari .	Menurun menjadi 8,5 %	2,74%	- 5,76 %
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi,	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	9,75%	0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

NO. TARG ET	TARGET	NO. INDIKAT OR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	7,06%	- 20,94 %
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	8,00%	0,00 %
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	3,15%	- 24,85 %
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	70,89%	- 20,89 %
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	83,8 dan 21,1 gr/kap/hari dan 31,16 kg/kap/tahun	35,34 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	3,10%	0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	nonpertanian.					

TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	103	- 66,34 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	96,24%	- 1,24%
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	96,24%	- 11,24 %
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	18	- 94,12 %
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	3,34 per 1.000 KH	0,00%
		3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	4,18	- 82,58 %
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	93,59%	1,41%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,096	- 80,80 %
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	394	60,82 %
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	22	- 92,67 %
		3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	1 kota Cimahi	0,00%
		3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	1 Kota Cimahi (905 orang bumil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini hepatitis B)	0,00%
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	Menurun	0 filariasis dan 1 kusta	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
			(Filariasis dan Kusta).			
		3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	1 Prov Jawa Barat	0,00%
		3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	Tidak ada kejadian filariasis	0,00%
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%		0,00%
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	23%	- 1,30%
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	6,07%	- 9,33%
		3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun		0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	kesehatan mental dan kesejahteraan .	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	100%	0,00%
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Menurun menjadi angka 0,02%	13 orang	0,00%
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana,	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	78,60%	- 12,60 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	78,60%	- 13,60 %
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	34,50%	- 11,00 %
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38		0,00%
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		78,99%	-13%
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	11,71%	1,80%
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan	Meningkat	11,71%	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		masyarakat per 1000 penduduk.			
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	88,26%	6,74%
3.a	Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	13,6 %	0,00%
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan Kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	62,5 per 100.000 pddk (dokter)	0,00%

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					

TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	70%	0,00%
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	52,00%	34,00%
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	27,80%	53,20%
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	105,60%	8,49%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	relevan dan efektif.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	99,60 %	7,34%
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,93 %	- 2,13%
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	81,40 %	- 4,20%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat		0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	SD/MI : 98,60 % LK dan 98,60 % Pr, SMP/MTs : 82,3% LK dan 83,3% Pr, SMA/SMK/MA : 77,49 % Lk dan 77,50 % Pr	0,00%
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,98 %	- 3,88%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPERS 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	99,98 %	- 3,88%
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	100%	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	PAUD ; 35,5% SD : 60.8% SMP : 75,1% SMA : 76,5% SMK : 45,1%	0,00%

TPB 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	0	100,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0,00%
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		0,00%
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0,00%
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100%	- 30,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,91%	0,00%
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	25,00 %	-9,00%
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	18,52 %	-2,14%
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi,	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	9,59%	0,31%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%		0,00%
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	97,00 %	- 40,49%

C.2. Indikator TPB Pilar Ekonomi

TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	34610000	30,78 %
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	34610000	30,78 %
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat		0



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	68,738	0,00%
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	57,96%	- 6,96%
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	"Khusus untuk modal kerja sebesar 3.186.890 Juta. Berdasar jumlah pinjaman tersebut, sebesar 50% atau senilai 1.593.445 juta dimanfaatkan oleh modal kerja. Sedangkan untuk kredit investasi dari total sebesar 1.244.682 juta rupiah atau sebanyak 39,05 %."	0



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Rp16.738	0,00%
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat		0,00%
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosika	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%		0,00%
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Meningkat	0,00%
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	5852	0,00%

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	n budaya dan produk lokal.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat		0,00%
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat		0,00%
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)		0,00%

TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	45,69 %	- 24,09 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	5,34	- 24,19 %
		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat		0,00%
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat		0
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi,	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	98,00 %	2,00%
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/mem	Meningkat	97,00 %	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.		iliki telepon genggam			
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	78,75 %	0,00%

TPB 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,37	2,78%
		10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,94%	-3,06%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun		0,00%
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	100,00 %

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	172.457 Penerima Upah, 14.704 Bukan Penerima Upah	0,00%

TPB 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat		0,00%
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,46%	11,54 %
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	9,10%	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi		0,00%
		17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	98%	2,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	78,75%	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	ada	100,00%	0,00%
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		0	100,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	0	100,00 %
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi,	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat		0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	1	0,00%
		17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat		0,00%



NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat		0,00%

C.3. Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup

TPB 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	80,78%	19,22 %
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik	Meningkat	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
			baku untuk pulau-pulau.			
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	80,78%	19,22 %
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	95,38%	0,00%
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	72,70%	27,30 %
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	15	0,00%
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	1	93,33 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Meningkat	0,00%
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	Meningkat	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0	100,00 %
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	9	0,00%

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)	0,00%

TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Meningkat	0,00%
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman,	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%		0



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARG ET	TARGET	NO. INDIKAT OR	INDIKATO R	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembang kan di kota besar.	ada	0	100,00 %
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaa n infrastruktur.	Ada	0	100,00 %
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena	Menurun	1313	Perlu Penurun an



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARG ET	TARGET	NO. INDIKAT OR	INDIKATO R	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		dampak bencana per 100.000 orang.			
		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencana an.	ada	0	100,00 %
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	2192920 000	Perlu Penurun an
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	95,00%	-15,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARG ET	TARGET	NO. INDIKAT OR	INDIKATO R	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ ada		0,00%
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ ada	0	100,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	0	100,00 %

TPB 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	26486,36 ton/tahun	0,00%
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Meningkat	0,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0	100,00 %
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat		0,00%

TPB 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	ada	0	100,00%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	bencana alam di semua negara.		nasional dan daerah.			
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1313	Perlu Penurunan
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).		1	0,00%

TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan



Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	Meningkat	0,00 %
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5,5 juta ha (skala nasional)	Meningkat	0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	bebas dari lahan terdegradasi.					

C.4. Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0	0,00 %
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		0,00 %
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun		0,00 %
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun		0,00 %
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun		0,00 %
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.			0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.			0,00 %
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0		0,00 %
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	0,00 %
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota : 50%	Indeks = B	0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	91,25 %	- 11,25 %
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota : 45%		0,00 %
		16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota : 80%		0,00 %
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	25%	- 8,84 %
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	26,32 %	0,00 %



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

NO. TARG ET	TARGET	NO. INDIKA TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	92,18 %	0,00 %
		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	98,79 %	- 21,39 %
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	79,36 %	5,64 %
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0	100,0 0%
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	ada	0	100,0 0%



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	Capaian 2018	Gap 2019
	f untuk pembangunan berkelanjutan.		HAM Internasional.			

Lampiran D

Rekap Capaian per Target TPB

D.1. Telah Mencapai Target Nasional

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2	1.2.1*	1
		1.3	1.3.1.(a)	3
			1.3.1.(b)	
			1.3.1.(d)	
		1.4	1.4.1.(a)	7
			1.4.1.(b)	
1.4.1.(c)				
1.4.1.(f)				
1.4.1.(g)				
1.4.1.(h)				
1.5	1.5.1*	5		
	1.5.1.(a)			
	1.5.1.(b)			
	1.5.1.(c)			
1.5.2.(a)				
1.a	1.a.2*	1		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1	2.1.1*	4
			2.1.1.(a)	
			2.1.2*	
			2.1.2.(a)	
		2.2	2.2.1*	5
			2.2.1.(a)	
2.2.2*				
2.2.2.(a)				
2.2.2.(b)				
2.3	2.3.1*	1		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1	3.1.1*	3
			3.1.2*	
			3.1.2.(a)	
		3.2	3.2.1*	3
3.2.2*				
3.2.2.(a)				



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
		3.3	3.3.1.(a) 3.3.3* 3.3.3.(a) 3.3.4.(a) 3.3.5* 3.3.5.(a) 3.3.5.(b)	7
		3.4	3.4.1.(b) 3.4.1.(c) 3.4.2.(a)	3
		3.5	3.5.1.(a)	1
		3.7	3.7.1* 3.7.1.(a) 3.7.1.(b) 3.7.2.(a)	4
		3.8	3.8.2*	1
		3.a	3.a.1*	1
		3.c	3.c.1*	1
		4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1 4.2 4.5 4.6 4.a 4.c
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2 5.3 5.5 5.b	5.2.2.(a) 5.3.1* 5.5.1* 5.5.2* 5.b.1* 1 1 2 1	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2 6.5	6.2.1.(a) 6.2.1.(c) 6.5.1.(a) 6.5.1.(f) 2 2	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3 8.5 8.9	8.3.1* 8.3.1.(a) 8.3.1.(c) 8.5.1* 8.9.1.(b) 3 1 1	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2	9.2.1* 9.2.1.(a)	2
		9.c	9.c.1.(a) 9.c.1.(b)	2
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1	10.1.1.(a)	1
		10.4	10.4.1.(b)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	11.6	11.6.1.(a)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4	12.4.2.(a)	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.2	13.2.1.(a)	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1	16.1.2.(a)	1
		16.6	16.6.1.(a)	3
			16.6.1.(b) 16.6.1.(c)	
		16.7	16.7.1.(a)	2
16.7.1.(b)				
16.9	16.9.1*	2		
	16.9.1.(a)			
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1	17.1.2*	1
		17.8	17.8.1*	2
			17.8.1.(a)	
17.19	17.19.2.(b)	1		

Jumlah TPB: 14

Jumlah Target: 46

Jumlah Indikator: 94

D.2. Belum Mencapai Target Nasional

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4	1.4.1.(d) 1.4.1.(e) 1.4.1.(k)	3
			1.5	1.5.1.(d) 1.5.1.(e) 1.5.3*
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,	2.2		2.2.2.(c)



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
	serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2	3.2.2.(b)	1
		3.3	3.3.2.(a)	1
		3.8	3.8.1.(a) 3.8.2.(a)	2
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1	4.1.1.(a) 4.1.1.(b) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e)	4
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1	5.1.1*	1
		5.6	5.6.1.(a)	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1	6.1.1.(a) 6.1.1.(c)	2
		6.2	6.2.1.(b) 6.2.1.(d)	2
		6.4	6.4.1.(b)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1	8.1.1* 8.1.1.(a)	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	1	9.c.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	10.1	10.1.1*	1
		10.3	10.3.1.(d)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	11.2	11.2.1.(b)	1
		11.3	11.3.2.(b)	1
		11.5	11.5.1.(c)	1
		11.b	11.b.1* 11.b.2*	2
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.7	12.7.1.(a)	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1	13.1.1*	1
16		16.9	16.9.1.(b)	1



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10	16.10.2.(c)	1
		16.b	16.b.1.(a)	1
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1	17.1.1.(a)	1
		17.6	17.6.2.(c)	1
		17.17	17.17.1.(a) 17.17.1.(b)	2

Jumlah TPB: 14

Jumlah Target: 28

Jumlah Indikator: 41

D.3. Perlu Peningkatan

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1	6.1.1.(b)	1
		6.2	6.2.1.(f)	1
		6.3	6.3.1.(b)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9	8.9.1.(a)	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	11.1	11.1.1.(a)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5	12.5.1.(a)	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1	15.1.1.(a)	1
		15.3	15.3.1.(a)	1

Jumlah TPB: 5

Jumlah Target: 8

Jumlah Indikator: 8

D.4. Perlu Penurunan

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
11		11.5	11.5.1*	2



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan		11.5.2.(a)	
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1	13.1.2*	1

Jumlah TPB: 2

Jumlah Target: 2

Jumlah Indikator: 3

D.5. Tidak Ada Data (N/A)

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3	1.3.1.(c)	1
		1.a	1.a.1*	1
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4	3.4.1.(a) 3.4.2*	2
		3.7	3.7.2*	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.4	4.4.1*	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2	5.2.1* 5.2.1.(a) 5.2.2*	3
		5.6	5.6.1.(b)	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2	8.2.1*	1
		8.6	8.6.1*	1
		8.9	8.9.1* 8.9.1.(c) 8.9.2*	3
		8.10	8.10.1.(a)	1
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2	9.2.2*	1
		9.3	9.3.1*	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	10.2	10.2.1*	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	11.2	11.2.1.(a)	1
		11.7	11.7.1.(a)	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.8	12.8.1.(a)	1
16		16.1	16.1.1.(a)	2



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB		Target	Indikator	Jumlah Indikator
			16.1.3.(a)	
	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2	16.2.1.(a) 16.2.1.(b) 16.2.3.(a)	3
		16.3	16.3.1.(a) 16.3.1.(b)	2
		16.5	16.5.1.(a)	1
		16.6	16.6.1.(d) 16.6.2.(a)	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1	17.1.1*	1
		17.6	17.6.2.(b)	1
		17.18	17.18.1.(a)	1
		17.19	17.19.2.(c) 17.19.2.(d)	2
Jumlah TPB: 11		Jumlah Target: 26		Jumlah Indikator: 37



Lampiran E

Monitoring dan Evaluasi TPB

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tidak Ada Data	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.							
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40%	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				penduduk berpendapatan terbawah.							
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Sudah Dilaksanakan	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Sudah Dilaksanakan	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Sudah Dilaksanakan	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Belum Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat	Telah mencapai	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	target nasional					Upaya Tambahan	
2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Sudah Dilaksanakan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).							
2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Tidak Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
3	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai	+		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
					target nasional					Upaya Tambahan	
3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Telah mencapai target nasional	+		Tidak Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Tidak Ada Data	Menurunnya persentase merokok	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).							
3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Sudah Dilaksanakan	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak Menjadi Indikator	
3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan,	Sudah Dilaksanakan	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkotika pada akhir	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		yang mengakses layanan rehabilitasi medis.		tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).							
3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19	Tidak Ada Data	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).							
3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	Sudah Dilaksanakan	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.							
4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).									
4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				tahun 2019 (2013: 20,48 %).							
5	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Telah mencapai target nasional	-		Tidak Butuh	-	Tidak Menjadi Indikator	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
5	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
5	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Tidak Ada Data	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Tidak Butuh	+	Tidak Menjadi Indikator	
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).							
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi	Telah mencapai	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	target nasional					Upaya Tambahan	
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Sudah Dilaksanakan	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				use of astewater in agriculture).							
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Sudah Dilaksanakan	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sudah Dilaksanakan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Tidak Ada Data	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Sudah Dilaksanakan	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Sudah Dilaksanakan	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tidak Ada Data	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tidak Ada Data	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya jumlah wisatawan	Perlu peningkatan	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).						Upaya Tambahan	
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
8	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak Ada Data	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).							
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Tidak Butuh	+	Tidak Menjadi Indikator	
9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
10	10.1.1*	Koefisien Gini.	Sudah Dilaksanakan	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sudah Dilaksanakan	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Sudah Dilaksanakan	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
11	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Tidak Ada Data	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Tidak ada data (N/A)	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Sudah Dilaksanakan	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Sudah Dilaksanakan	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perlu penurunan	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Belum Dilaksanakan	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perlu penurunan	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Tidak Ada Data	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Tidak ada data (N/A)	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).							
12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Belum Dilaksanakan	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Sudah Dilaksanakan	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	Belum mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
13	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perlu penurunan	+		Butuh	+	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
13	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Sudah Dilaksanakan	0	Telah mencapai target nasional	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Sudah Dilaksanakan	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	Perlu peningkatan	+		Butuh	+	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak menjadi indikator	
16	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak menjadi indikator	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Tidak Ada Data	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak Ada Data	0	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak menjadi indikator	
16	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Tidak Ada Data	0	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Tidak Ada Data	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				(IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).							
16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahakan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Tidak Ada Data	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Tidak Ada Data	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Telah mencapai target nasional	-		Tidak Butuh	-	Tidak Menjadi Indikator	
16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	
16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Belum mencapai	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
				menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	target nasional					Upaya Tambahan	
16	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Belum Dilaksanakan	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Sudah Dilaksanakan	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahakan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tidak Ada Data	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	+	Tidak menjadi indikator	
17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Sudah Dilaksanakan	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (<i>mobile broadband</i>) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahakan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahakan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Sudah Dilaksanakan	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	+	Dipertahakan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Belum dilaksanakan	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama	Belum Dilaksanakan	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Belum mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dengan Upaya Tambahan	Prioritas



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Pelaksanaan	Target Nasional	Kondisi Capaian TPB	DDDT	Potensi, Daya Saing, dan Inovasi Daerah	Pertimbangan Lain		Skenario	Status
								Kebutuhan Daerah	Risiko Bencana		
		Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									
17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak menjadi indikator	
17	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Sudah Dilaksanakan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Telah mencapai target nasional	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Butuh	-	Dipertahankan (BAU) Tanpa Upaya Tambahan	Prioritas
17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Tidak Ada Data	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada data (N/A)	-		Tidak Butuh	-	Tidak menjadi indikator	



Lampiran F Usulan Program dan Indikator

F.1. Tabel Target dan Indikator

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2016	5,92%	5,92%	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	1500RTS (APBD Kota dan 18724 (APBN)	DinsosP2KBP3A, Kecamatan,
Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkatnya kesempatan kerja	2016		88,26%	88,26%	90%	92%	95%	100%	Disnaker, Admirek (Setda)
Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	2016	70%	76,26%	172.457 Penerima Upah 14.704 Bukan Penerima Upah					Disnaker
Meningkatnya persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	23,59%	37,93%	38,31%	100,00%	100,00%	DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2016	97,4% (2016)*;	9279 (satuan kk)	9279 (satuan kk)	9279kk	9279kk	9279kk	9279kk	DinsosP2KBP3A
Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	2016	91,20%	91,82%	96,24%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	2016	92,50%	92,50%	93,6%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	2016	78,20%	78,51%	78,60%	78,70%	78,80%	78,90%	78,90%	Dinkes, DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat
Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	2016	62,17%	81,99%	87,51%	83%	84%	85%	86%	DPKP, Dinkes
Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	2016	72%	70,50% (2017)	70,50%	71,0%	71,5%	72,0%	72,5%	DPKP, Dinkes



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	2016	4,39%	63,90%	64,00%	65%	66%	67%	68%	DPKP
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	2016	91,50%	95,73%	96,00%	96.27%	96.54%	96.81%	97.04%	Disdik
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	2016	89,8% (2016)**	75,29%	75,83%	76.10%	76.37%	76.64%	76.64%	Disdik
Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	2016	72,64%	69,00%	73,00%	78%	82%	85%	90%	Disdukasip
Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	2016	Daerah blm ada penerangan: Leuwigajah, Cibeber, Cipageran (KCDA 2017)	Daerah blm ada penerangan: Leuwigajah, Cibeber, Cipageran (KCDA 2017)	Daerah blm ada penerangan: Leuwigajah, Cibeber, Cipageran (KCDA 2017)					DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	2016	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa (dibuat per 100.000 penduduk)	BPBD
Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	2016	15 lokasi	0	10	12	14	16	18	BPBD
Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	2016	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	BPBD, DinsosP2KBP3A
Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	2016	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	Tidak ada bencana sosial di Kota Cimahi	BPBD, DinsosP2KBP3A
Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	2016	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	Tidak/ belum ada pendidikan layanan khusus di Kota Cimahi	BPBD, DinsosP2KBP3A, Disdik



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	2016	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	120 (Kelas Risiko Sedang)	BPBD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	2.192.920.000	BPBD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	2016	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	BPBD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	2016	Rp 7.554.474.250 (pendidikan)	1.153.360.532	Diisi % anggaran pemberantasan kemiskinan (indikator 1.2.1*) terhadap total APBD	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	2016	459.593.548.436		Rp. 444.816.260.855,47 (2018) (Diisi persen dari jumlah anggaran total Disdik, Dinkes, Dinsos	Disdik, Dinkes, DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
					terhadap total APBD)					

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2016	data belum tersedia	96,20%	96,20%	96.4%	96.6%	96.8%	96.8%	Dispangtan
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2016	6,16%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2016	Tidak Ada Data	96.2%	96.2%	96.4%	96.6%	96.8%	96.8%	Dispangtan



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).										
Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	2016	2,74%	96.2%	96.2%	96.4%	96.6%	96.8%	96.8%	Dinkes
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	2016	14,16%	15,74%	9,75%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	2016	10,43%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	<12.04%	Dinkes, RSUD Cibabat
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia	2016	0,07%	0,07%	8,00%	Dinkes, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
	kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.									
Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	2016	1,25%	2,41%	2,40%	2.39%	2.38%	2.37%	2.36%	Dinkes, RSUD Cibabat
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	2016	69,30%	91,09%	100,00%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	2016	82,1 dan 32,5 gr/kap/hr	82,1 dan 32,5 gr/kap/hr	83,8 dan 21,1 gr/kap/hari dan 31,16 kg/kap/tahun					Dispangtan
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	2016	data belum tersedia	Tidak Ada Kenaikan	3,10%	N/A	Dispangtan

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Angka Kematian Ibu (AKI).	2016	77,36 per 100.000 KH	113,98 per 100.000 KH	102	101,5	101	100	99	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	2016	91,20%	91,82%	96,24%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	2016	97,40%	91,82%	96,24%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	2016	0,39 per 1000 KH		0,18 per 1000 KH	101,5	101	100	99	Dinkes, RSUD Cibabat
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	2016	4,8 per 1.000 KH	5,5 per 1.000 KH	3,34 per 1.000 KH	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2016	6,38 per 1000 KH	7,14	7,12	7,1	7	6,9	6,8	Dinkes, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	2016	86,70%	93,60%	93,59%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	2016	0,06%	28,35%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297)	Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk.	2016	258 per 100.000 pddk	312 per 100.000 pddk	394 per 100.000					Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Kejadian Malaria per 1000 orang.	2016	0 per 1000 orang	81,17%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	2016	1 kota Cimahi	1 kota Cimahi	1 kota Cimahi	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	Dinkes
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	2016	Belum dilaksanakan deteksi dini hepatitis B	Belum dilaksanakan deteksi dini hepatitis B	1 Kota Cimahi (905 orang bumil yang mendapatkan pelayanan deteksi dini hepatitis B)	Dinkes



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20); Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	2016	0 filariasis dan 0 kusta	0 filariasis dan 3 kusta	0 filariasis dan 1 kusta	0	0	0	0	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	2016	1 Prov Jawa Barat	1 Prov Jawa Barat	1 Prov Jawa Barat	tidak ada kejadian	tidak ada kejadian	tidak ada kejadian	tidak ada kejadian	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	2016	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Tidak ada kejadian filariasis	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	2016	data tidak tersedia untuk indikator ini	0%	5%	7%	9%	11%	13%	Dinkes
Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Prevalensi tekanan darah tinggi.	2016	7,50%	26,16%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, RSUD Cibabat
Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	2016	1,24%	NA	3	3	5	7	9	Dinkes, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).										
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	Dinkes
Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	2016	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	13 (100%)	Dinkes
Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	2016	data belum tersedia	12 orang	13 orang					Dinkes
Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2016	78,51%	78,51%	78,60%	78.70%	78.80%	78.90%	78.90%	DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	2016	78,51%	78,51%	78,60%	78.70%	78.80%	78.90%	78.90%	DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat
Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	2016	31,34%	31,03%	34,50%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat
Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum ada karena rata-rata kawin pertama di Cimahi 21,5 tahun	data belum ada karena rata-rata kawin pertama di Cimahi 21,5 tahun	data belum ada karena rata-rata kawin pertama di Cimahi 21,5 tahun	data belum ada karena rata-rata kawin pertama di Cimahi 21,5 tahun	Dinkes, RSUD Cibabat
Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Total Fertility Rate (TFR).	2016	77,71%	78,51%	78,99%	78.70%	78.80%	78.90%	78.90%	Dinkes, RSUD Cibabat
Menurunnya unmeet need pelayanan	Unmet need pelayanan kesehatan.	2016	29,28	95,91%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%)										
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	2016	70,72	25,74%	11,74%	Dinkes
Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	2016	70,72	74,26	88,26%	90%	92%	95%	100%	Dinkes, DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	2016	43,98% (2015) (Provinsi Jabar)	13,4	14%	Dinkes
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	2016	1,35 per 100.000 pddk	55,33 per 100.000 pddk	62,5 per 100.000 pddk	Dinkes, RSUD Cibabat

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	70%	Disdik



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
	minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.									
Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 86% (2015:72,5%).	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	2016	78,30%	40%	44,89%	52.80 %	60.80	60.80	76.00	Disdik
Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	2016	72,2% (2016)	61%	61,11%	63,89	66,67	69,44	72,22	Disdik
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	2016	97,33%	101,69%	101,96%	102.23	102.50	102.77	103.04	Disdik
Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	2016	98,62%	88,73%	89,00%	89,27	89,54	89,81	90,08	Disdik
Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	2016	10,75 th (2015)*** 10,98****	10.98%	11,10	11,2	11,3	11,4	11,5	Disdik
Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	2016	76%	76%	76,27	76,54	76,81	77,08	77,35	Disdik
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	Disdik



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	2016	SD/ MI : 78,64% lk & 78,76% pr, SMP/ MTs : 79,49% lk & 79,03% pr, SMA/ SMK/ MA : 75,49% lk & 74,37% pr (2016)	SD/ MI : 78,64% lk & 78,76% pr, SMP/ MTs : 79,49% lk & 79,03% pr, SMA/ SMK/ MA : 75,49% lk & 74,37% pr (2016). SD/ MI : 0, SMP/ MTs : 75.29%, SMA/ SMK/ MA : 0. (2017)	SD/ MI : 98,60% LK dan 98,60% Pr, SMP/ MTs : 82.3% LK dan 83,3% Pr, SMA/ SMK/ MA : 77,49% Lk dan 77,50% Pr					Disdik
Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	2016	99,98% (2014)	99,98%	99,98%	99,984	99,986	99,988	99,988	Disdik
Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	2016	100% dan 99,98%	100% dan 99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	Disdik
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas	2016	100%	100%	100%	Disdik



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
	cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).									
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	2016	SD: 53,9%, SMP: 60,1%, SMA: 71,7%, SMK: 23,1%	SD: 53,9%, SMP: 60,1%, SMA: 71,7%, SMK: 23,1%	PAUD ; 35,5% SD : 60.8% SMP : 75,1% SMA : 76,5% SMK : 45,1%	Disdik

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2016	Belum ada kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	70	70	80	90	100	100	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2016	0.0076% (16 kasus)	0.0076% (16 kasus)	data belum tersedia	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	DinsosP2KBP3A
Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	2016	0.0052% (4 kasus)	100%	100% cek data	100	100	100	100	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2016	100% (dari 22 kasus)	100% (dari 22 kasus)	data belum tersedia	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	100% mendapatkan pelayanan	DinsosP2KBP3A
Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang	2016	100% dari 22 kasus	100% dari 22 kasus	100%	100%	100%	100%	100%	DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	mendapat layanan komprehensif.									
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	2016	2,53%	21,5%	0,97%	DinsosP2KBP3A
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	2016	24,44%	24,00%	20%	20	20	20	20	DinsosP2KBP3A
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	2016	58,48%	45,94%	46,00%	46,30	46,50	46,75	46,75	DinsosP2KBP3A
Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	2016	11%	9,8%	9,59%	100%	100%	100%	100%	DinsosP2KBP3A, RSUD Cibabat



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	11142	12142	13142	14142	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2016	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	97,00%	Diskominfo

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	2016	68,42%;	69,17%	70,52%	72,02	79,29	86,49	93,25	DPKP
Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	2016	250 l/dt	250 l/dt	312 l/dt					DPKP



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	2016	68,42%;	69,17%	70,52%	72,02	79,29	86,49	93,25	DPKP
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	2016	91,99%	data tidak tersedia	95,38%	Dinkes
Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	2016	69%	70,10%	76,45%	83,41	90,06	92,81	95,56	Dinkes, DPKP
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	2016	15 kelurahan	87	98	100	100	100	100	Dinkes, DPKP, DLH
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	2016	Tidak ada ODF di Kota Cimahi	Tidak ada ODF di Kota Cimahi	1 Kelurahan (Cibeber)	Dinkes, DPKP
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	2016	4,23%	4,54%	5,21%	DPKP
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	2016	16	78	101	DPKP



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of astewater in agriculture</i>).	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	2016	belum ada insentif	belum ada insentif	belum ada insentif					Dispangtan, DLH, Disdagkoperin
Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	2016	9	9	9					DPKP, Bappeda
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2016	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)	2 (Curug Layung/ S. Cimahi & Situ Lembang)					DPKP, DLH

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	2016	Pertumbuhan (ADHK): 2,99% PDRB Per Kapita: Rp 31,79 juta (ADHK)	Pertumbuhan (ADHK): 2,96% PDRB Per Kapita: Rp 33,12 juta (ADHK)	Pertumbuhan (ADHK): 3,36% PDRB Per Kapita: Rp 34,61 juta (ADHK)					DPMPPTSP, Bappeda
Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	PDB per kapita.	2016	PDRB Per Kapita: Rp 31,79 juta (ADHK)	PDRB Per Kapita: Rp 33,12 juta (ADHK)	PDRB Per Kapita: Rp 34,61 juta (ADHK)					DPMPPTSP, Bappeda
Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2016	0,58	0,58	data belum tersedia					Disnaker, Bappeda
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	2016	data belum tersedia	68.999 orang	68.738 orang	Disnaker
Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	Persentase tenaga kerja formal.	2016	73,41%	178.644 orang	57,96%					Disnaker



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2016	16,42%	16,42%	Khusus untuk modal kerja sebesar 3.186.890 Juta. Berdasar jumlah pinjaman tersebut, sebesar 50% atau senilai 1.593.445 juta dimanfaatkan oleh modal kerja . Sedangkan untuk kredit investasi dari total sebesar 1.244.682 juta rupiah atau sebanyak 39,05 %.					Disdagkoperin, Cimteng, Cimut, Cimsel
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Upah rata-rata per jam pekerja.	2016	Rp15.250	Rp15.397	Rp16.738	Disnaker
Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2016	5%	5%	data belum tersedia					Disnaker
Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	2016	18,98%	18,98%	data belum tersedia (PDRB di Bapeda atau diskominfo)	N/A	N/A	N/A	N/A	Disbudparpora
Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Jumlah wisatawan mancanegara.	2016	653 jiwa	3626	3880	4270	4700	5160	5680	Disbudparpora



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2016	6367 jiwa	3526 orang (2017)	5852 orang	Disbudparpora
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	2016	Rp 9,4 M	Rp 9,4 M	data belum tersedia	Disbudparpora				
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	Disbudparpora, Disnaker
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	Bappeda

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

9. Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	2016	46.61	45.88	45.69		N/A	N/A	N/A	Disdagkoperin
Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	2016	4,31	4,13	5,34		N/A	N/A	N/A	Disdagkoperin



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

9. Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2016	63840 jiwa pekerja* 34,79%**	data belum tersedia	data belum tersedia	Disnaker
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	Disdagkoperin
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	98,00%	Diskominfo, Cimteng, Cimut, Cimsel
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	97,00%	Diskominfo
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi individu yang menggunakan internet	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	78,75%	Diskominfo

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Koefisien Gini.	2016	0,42	0,41	0,37	0,39	0,39	0,39	0,39	DinsosP2KBP3A
Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	2016	5,92%	5,92%	4,94%	4,39	5,39	5,07	5,02	DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	2016	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	Bag Hukum (Setda)
Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2016	70%	76,60%	172.457 Penerima Upah 14.704 Bukan Penerima Upah					DinsosP2KBP3A, Disnaker

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

11. Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	2016	260 Unit/2339 unit (Jml rumah tidak layak huni yg siap direhab pd th 2016) = 11,11%	285 Unit/2079 unit = 13,71%	394 Unit/1794 unit = 21,96%	1,09	0,78	0,5	0,26	DPKP
Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia					Dishub
Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	2016	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada					Dishub
Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	2016	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	DPMPTSP
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	2016	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang. 100%	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa (dibuat per 100.000 penduduk)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BPBD
Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	2016	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	Tidak ada sistem peringatan dini	BPBD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	2016	Rp 3,4281 Milyar	Rp 2,2145 M	Rp2.192.920.000	BPBD



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

11. Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	2016	79,50%	N/A	44,10%	80,31%	80,31%	81,50%	90,75%	DLH
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	2016	100%	100%	data belum tersedia	DinsosP2KB P3A, Kepolisian
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	2016	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	2016	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	BPBD

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	2016	Industri yg memiliki cerobong 56, batubara 81, dan limbah 59	44,67%	66,67%	75%	87,50%	100%	100%	DLH



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
	perundangan (sektor industri).									
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2016	Tereduksi 17,6 ton/hr (6%)	8,22%	8,22%	23,23%	61,29%	82,22%	100,00%	DLH
Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (<i>Green Public Procurement</i> , GPP) hingga tahun 2019.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	2016	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada					DLH
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	DLH

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	2016	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPBD



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	2016	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang	Meninggal: 0 jiwa, hilang: 0 jiwa, dan terdampak: 42 per 100.000 orang. 100% (2017)	Meninggal 5 jiwa, Hilang 0 jiwa, Terdampak 1308 Jiwa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BPBD
Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga tahun 2019 (2015: dokumen BUR ke-1).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	2016	1 dokumen RAD-GRK	0	7	7	13	13	20	DLH

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2016	6,55% (kebun)	N/A	15000	30000	30000	30000	30000	DLH
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	2016	285 ha (sumber data: Dishut Jabar)	285 ha (sumber data: Dishut Jabar)	567,63 Ha					DLH



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).										

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A, Kepolisian
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	2016	Tidak ada konflik	Tidak ada konflik	Tidak ada konflik	DinsosP2KBP3A, Kepolisian
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	2016	7 orang	7 orang	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A, Kepolisian
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	2016	4 kasus	4 kasus	data belum tersedia	100	100	100	100	DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	2016	7 orang	7 orang	data belum tersedia	DinsosP2KBP3A, Kepolisian
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	5	5	5	5	DinsosP2KBP3A, Bagian Hukum
Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia					BPS



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)						Instansi Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	2016	skor 3,0759/ WTP (2016)	skor 3,0759/ WTP (2016)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua OPD (Disdik, Dinkes, DPUPR, DPKP, DinasLH, Dishub, DinsosP2KBP3A, Disnaker, Disdukcasip, Disbudparpora, Dispangtan, Setwan, Setda, Inspektorat, SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA, DPMPSTP, BKPSDMD, BPBD, CIMUT, CIMTENG, KESBANG)



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)						Instansi Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	2016	meningkat sebesar 2,16% pada 2016	meningkat sebesar 2,16% pada 2016. Indeks = CC (2017)	Indeks = B	BB	BB	A	A	Semua OPD (Disdik,DLH, DPKP,Dishub, Dinkes, DinsosP2KBP3A, Disnaker, Disdukasip, Disbudparpora, Disdagkoperin, Dispangtan, Setda, Setwan, Inspektorat, KESBANG, SATPOL PP, BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA, DPMPPTSP, BKPSDMD, BPBD, CIMUT, CIMTENG, CIMSEL)
Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	91,25%					Sekretariat Daerah Bagian PBJ



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi (Setda)
Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi (Setda)
Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	2016	24%	24%	20%	20%	20%	20%	20%	Setwan
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2016	58,48%	45,94%	46%	46,3%	46,5%	46,75%	46,75%	BKPSDMD
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2016	85%	85,38%	92,18%	Disdukcasip



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	2016	41%	69%	73%	78%	82%	85%	90%	Disdukcasip
Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran.	2016	73%	95,2%	79,36%	80,00%	81,00%	82,00%	83%	Disdukcasip
Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2016	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	2016	tidak ada kebijakan yang diskriminatif	DinsosP2KBP3A, Komnas HAM						

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2016	6,46%	6,46%	data belum tersedia	Bappeda
Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	2016	0,59%	165395183082	132108046123.69	245821741388	301348881692.82	369418701473.52	452864388385.2	Bapenda
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	2016	23%	23%	9,10%	Bappeda, BPKAD
Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	2016	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data					Diskominfo



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband (SAMA DG 9.c.1)	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	98%					Diskominfo
Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	Proporsi individu yang menggunakan internet (SAMA DG 9.c.1 (b))	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	78,75%					Diskominfo
Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi	2016	100,00%	100,00%	100,00%					Diskominfo



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	universal dan internet.									
Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	2016	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Bappeda
Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	2016	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Bappeda



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan										
Target TPB	INDIKATOR TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian (4)							Instansi Pelaksana
(1)	(2)	(3)	2016*	2017*	2018*	2019	2020	2021	2022	(5)
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia					BPS
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2016	Ada	Ada	Ada	BPS
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	BPS
(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	2016	data belum tersedia	data belum tersedia	data belum tersedia	BPS

Keterangan:

*) data merupakan angka capaian



F.2. Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
		2018	2019	2020	2021	2022				
PROGRAM PEMERINTAH (organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya)										
INDIKATOR : Persentase PMKS yang direhabilitasi										
PROGRAM : Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Tersedianya data BDT yang valid dan akurat		6,29%	6,42%	6,54%	6,67%	6,16%	Rp 1.194.571.680	APBD	DinsosP2KBP3A
INDIKATOR: Persentase PMKS yang diberdayakan			6,49%	6,79%	7,10%	7,40%	7,70%	Rp 445.201.300	APBD	DinsosP2KBP3A
PROGRAM: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS									APBD	
Kegiatan: Fasilitasi PKH (program keluarga harapan)	Terfasilitasinya dan terlayannya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)								APBD	
INDIKATOR :									APBD	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS lainnya		%						Rp 445.201.300	APBD	DinsosP2KBP3A
Penunjang Program Keluarga Harapan	Terfasilitasinya dan terlayannya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak dan rumah tangga sangat miskin (RTSM)								APBD	
Peningkatan kemampuan capacity buliding petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	a. Terlaksananya kegiatan pendampingan BPNT b. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi c. Pelatihan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial d. Pelatihan Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam KUBE								APBD	
Pelatihan keterampilan bagi PMKS	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui monev KUBE, penyuluhan dan bimbingan bagi PMKS								APBD	
INDIKATOR : Persentase LKS yang terakreditasi			28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	Rp 13.990.314.447		DinsosP2KBP3A



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial										
INDIKATOR : Persentase LKS yang terakreditasi		%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	Rp 532.336.700	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									APBD	
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	a.Terlaksananya penilaian KARTA, PSM dan Orsos berprestasi tingkat Kota Cimahi b.Terlaksananya Bimtek Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial c.Terfasilitasinya Hari Besar (HKS, Hari Pahlawan, HLUN) d.Terlaksananya Sosialisasi Psikososial yang dihadapi keluarga								APBD	
Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Terfasilitasinya Puskesmas								APBD	
Indikator Persentase PMKS yang direhabilitasi		%	6,29%	6,42%	6,54%	6,67%	6,16%	Rp 150.446.500	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pembinaan Anak Terlantar									APBD	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	Terlaksananya pendataan anak jalanan di Kota Cimahi								APBD	
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pembinaan anak terlantar								APBD	
									APBD	
Indikator: Persentase LKS yang terakreditasi		%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	60,00%	Rp 108.127.000	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo									APBD	
Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih Dan Pendidik	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan LKSA terhadap penerima manfaat LKSA								APBD	
									APBD	
Indikator: Persentase PMKS yang direhabilitasi		%	6,29%	6,42%	6,54%	6,67%	6,16%	Rp 308.255.000	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma									APBD	
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	Terlaksananya Kegiatan pembinaan disabilitas dan terapi anak disabilitas								APBD	
									APBD	
Indikator: Rasio akseptor KB mandiri		%	80	-	-	-	-	Rp 93.080.000	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri									APBD	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Bertambahnya jumlah kampung KB							APBD		
								APBD		
Indikator: Angka Kesempatan Kerja (Orang)			282.366	291,115	300,209	309,563	319,159	Rp 10.779.551.189	APBD Disnaker	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja								APBD		
Penyebarnya luasan informasi bursa tenaga kerja	1. Terfasilitasi informasi lowongan kerja 2. Tersusunnya Data Informasi Ketenagakerjaan							APBD		
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja yang terserap dunia kerja							APBD		
Indikator: Cakupan Bina Kelompok pedagang			2 kelompok	-	-	-	-	Rp 677.615.500	APBD DPKUKMP	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM								APBD		
Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Data tidak tersedia							APBD		
								APBD		
Indikator: Angka Kesempatan Kerja (Orang)			282.366	291,115	300,209	309,563	319,159	Rp 1.641.140.000	APBD Disnaker	
Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja								APBD		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Tersedianya pencari kerja terlatih								APBD	
									APBD	
Indikator: Angka Kesempatan Kerja (Orang)			282.366	291,115	300,209	309,563	319,159	Rp 166.591.500	APBD	Disnaker
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									APBD	
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi SDM	a. Tersampainya informasi tentang program transmigrasi b. Monev								APBD	
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terciptanya Perlindungan Ketenagakerjaan di Perusahaan								APBD	
Soialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya keberpihakan Perusahaan terhadap pekerja								APBD	
									APBD	
Indikator: Persentase kenaikan UMK		%	8,90%	9,10%	9,29%	9,49%	9,89%	Rp 1.125.124.000	APBD	Disnaker
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
Optimalisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan	Meningkatnya kinerja kelembagaan yang berfungsi secara efektif									
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan	Upah minimum kota (UMK)									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan										
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Upah Minimum Kota (UMK)									
Indikator: Persentase PMKS yang diberdayakan		%	6,49%	6,79%	7,10%	7,40%	7,70%	Rp 445.201.300	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
Penunjang Program Keluarga Harapan	Terfasilitasinya dan terlayannya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)									
Peningkatan kemampuan capacity buliding petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	a. Terlaksananya kegiatan pendampingan BPNTb. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial, TKSK dan pendamping PKH dalam verifikasi dan validasi datac. Pelatihan pemberdayaan Wanita									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	Rawan Sosial. Pelatihan Pemberdayaan Keluarga Miskin dlm KUBE									
Indikator: Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional		%	88,26%	90%	92%	95%	100%	Rp 91.115.600.000	APBD Dinkes	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pasirkaliki	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di puskesmas									
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan									
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah RW yang belum ODF									
Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase penanggulangan masalah gizi mikro di Kota Cimahi									
Jaminan Kesehatan Nasional Kota Cimahi	Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Cimahi yang bersumber anggaran dari APBD Kota									
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	101,96	102,23	102,500	102,77	103,04	Rp 27.041.413.399	APBD	Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun									
Pembangunan Gedung Sekolah Jenjang SD	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SD								
Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary Jenjang SD	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SD								
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir Jenjang SD	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SD								
Penambahan Ruang Kelas Baru SD/Mi/SDLB	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SD								
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Meningkatnya jumlah lulusan setara SMP								
Perluasan Akses Program Inklusif Jenjang SD	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan jenjang SD								
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jenjang SD/Mi/SDLB	Terwujudnya pendidikan gratis jenjang SD/MI								
Penyediaan Beasiswa Transisi Jenjang SD	Meningkatnya akses layanan pendidikan SD								
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Jenjang SD	Meningkatnya persentase kelulusan siswa kelas VI SD								
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jenjang SD	Meningkatnya mutu pembelajaran di SD								



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Di Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD	Tercapainya standar pengelolaan pendidikan								
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatnya capaian 8 SNP								
Ujian Sekolah/ Madrasah Dan Ujian Nasional Jenjang SD	Meningkatnya capaian standar pendidikan								
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Jenjang SMP	Meningkatnya mutu pembelajaran di SMP								
Penyelenggaraan Akreditasi Jenjang SMP	Meningkatnya capaian 8 Standar Pendidikan								
Ujian Sekolah/Madrasah Dan Ujian Nasional Jenjang SMP	Meningkatnya jumlah lulusan siswa kelas IX SMP								
Pembangunan Gedung Sekolah Jenjang SMP	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SMP								
Pembinaan SMP Terbuka	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan jenjang SMP								
Pengadaan Mebeleur Sekolah Jenjang SMP	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan SMP								
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Meningkatnya jumlah lulusan setara SMP								
Perluasan Akses Program Inklusif Jenjang SMP	Data tidak tersedia								



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jenjang SMP/Mts Serta Pesantren Salafiyah Dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP	Terwujudnya pendidikan gratis jenjang SMP/MTs									
Indikator:			12 bulan	-	-	-	-	Rp 20.725.045.004		Disdukcapil
1. Penyelenggaraan penataan administrasi kependudukan										
2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk			0,96	0,97	0,98	0,99	99.9%			
3. Cakupan penerbitan akte kelahiran			0,73	0,78	0,82	0,85	0,9			
4. Cakupan penerbitan akte kematian			0,65	0,7	0,75	0,8	0,85			
5. Cakupan penerbitan kartu keluarga			0,96	0,97	0,98	0,99	99.9%			
6. Validitas database pelayanan kependudukan			0,75	0,78	0,81	0,82	0,85			
7. Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan			91%	92%	93%	94%	95%			
Program Penataan Administrasi Kependudukan										
Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Kelancaran penyelenggaraan pelayanan adm kependudukan									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi Pencatatan Sipil									
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi Pendaftaran Penduduk									
Indikator:			100%	100%	100%	100%	100%	Rp 13.624.739.125	APBD	BPBD
1. Persentase Korban Bencana yang di evakuasi		%								
2. Waktu tanggap bencana			15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit			
Program Dukungan Manajemen Koordinasi Pra bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana										
Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Aparatur Terhadap Potensi Bencana Alam di Kota Cimahi									
Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Terfasilitasinya rumah layak huni pasca bencana bagi masyarakat Kota Cimahi yang menjadi korban bencana									
Pengelolaan Logistik Bagi Korban Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana									
Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan kemampuan dasar pada									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	penanggulangan bencana									
Indikator: Persentase PMKS yang direhabilitasi		%	6,29%	6,42%	6,54%	6,67%	6,16%	Rp 1.194.571.680	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Tersedianya data BDT yang valid dan akurat									
Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	Penanganan Tanggap Cepat Darurat									
Indikator: Persentase Korban Bencana yang di evakuasi		%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp 1.181.802.000	APBD	BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan lingkungan daerah pasca bencana									
Kajian Mitigasi Kebencanaan	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: Persentase PMKS yang direhabilitasi		%	6,29%	6,42%	6,54%	6,67%	6,16%	Rp 308.255.000	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma										
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	Terlaksananya kegiatan pembinaan disabilitas dan terapi anak disabilitas									
Indikator:1. Pola Pangan Harapan ketersediaan		%	96,4	-	-	-	-	Rp 1.171.510.600		Dispangtan
2. Tingkat stabilitas harga beras dan bahan pangan pokok lainnya			kenaikan harga beras maksimum 10%, kenaikan harga pangan pokok lainnya maksimum 30%							
3. Persentase bahan pangan segar yang aman di konsumsi			61							
4. Tingkat Konsumsi Ikan oleh Masyarakat			11							
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)										
Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan	Tersedianya angka pola pangan harian 100 persen (PPH) konsumsi Kota Cimahi dan rancangan kebijakan									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	mengenai pola konsumsi dan suplai pangan									
Operasional Dewan Ketahanan Pangan	Fasilitasi pertemuan dewan ketahanan pangan Kota Cimahi									
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan									
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya informasi pengembangan 100 persen Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)									
Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan pangan di Kota Cimahi									
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang menu B2SA dan sumber pangan alternatif									
Indikator: 1. Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat		%	3	-	-	-	-	Rp 1.371.261.000	Dinkes	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
2. Prevalensi stunting pada baduta										
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Peningkatan Imunisasi	Kelurahan UCI									
Penanggulangan HIV AIDS	Prevalensi kasus HIV AIDS pada penduduk usia 15 - 49 tahun kurang dari									
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Case Notification Rate (CNR) TB									
Indikator: 1. Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat			3	-	-	-	-		Dinkes	
2. Prevalensi stunting pada baduta			<12.04					Rp 1.198.022.000		
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat										
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Persentase RW siaga aktif dengan strata Mandiri									
Indikator: Rasio Akseptor KB		%	78,51%	78,70%	78,80%	78,90%	79,00%	Rp 4.615.000.000	APBD DinsosP2KBP3A	



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Program Keluarga Berencana										
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Bertambahnya jumlah kampung KB									
Pelayanan KB Medis Operasi	Data tidak tersedia									
Pelayanan KIE	Meningkatnya capaian program KB									
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Meningkatnya Akseptor MKJP									
Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang program KB di Kota Cimahi									
Promosi Pelayanan Khiba	Meningkatnya kualitas kelompok dan pengelola kelompok ketahanan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga di lokasi-lokasi lomba									
Indikator: 1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan TK yang memenuhi standar kompetensi		%	75	-	-	-	-	Rp 5.689.627.148	APBD	Disdik



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memenuhi standar kompetensi	%	75							
3. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang memenuhi standar kompetensi	%	75							
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan									
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD berprestasi Tingkat Provinsi								
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Jenjang SD	Persentase pendidik SD yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan								
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang telah mengikuti peningkatan kompetensi								
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang telah mengikuti peningkatan kompetensi								



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang telah mengikuti peningkatan kompetensi									
Indikator: Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi		%	23%	48%	60%	73%	85%	Rp 38.361.500.000	APBD	Disdik
Program Pendidikan Non Formal										
Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	Meningkatnya lembaga kursus dan PKBM yang terakreditasi									
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat									
Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	Meningkatnya lembaga kursus dan PKBM yang terakreditasi									
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Berkesinambungnya KUM yang dikembangkan									
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Meningkatnya kecakapan hidup masyarakat/IRT usia produktif									
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan	Data tidak tersedia								
Indikator: Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	%	76,27	76,54	76,81	77,08	77,35	Rp 38.361.500.000	APBD	Disdik
Program Pendidikan Anak Usia Dini									
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Meningkatnya kualitas layanan PAUD								
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas layanan PAUD								
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas layanan PAUD								
Indikator:									
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	%	76,27	76,54	76,81	77,08	77,35	Rp 38.361.500.000	APBD	Disdik
2. Persentase TK terakreditasi		10,71%	19,64%	28,57%	37,50%	46,43%			
3. Persentase PAUD terakreditasi		8,85%	17,70%	26,55%	35,40%	44,25%			
4. Angka Melek Huruf (AMH)		99,982	99,984	99,986	99,988	99,990			
5. Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal		23%	48%	60%	73%	85%			
Program Pendidikan Non Formal dan Informal									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota	%	78,7	78,7	78,8	78,8	78,9	Rp 3.590.000.000	APBD	Diskominfoarpus
Program Pengembangan Budaya Dan Pembinaan Perpustakaan									
Pengembangan Minat Dan Budaya Baca	Kegiatan peningkatan minat dan budaya baca								
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Dan Minat Baca Di Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyediaan sumber informasi dan pengetahuan untuk masyarakat Kota Cimahi secara bertahap								
Indikator: Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	70%	80%	90%	100%	47,50%	Rp 4.544.454.345	APBD	DinsosP2KBP3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak									
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya perencanaan penganggaran yang responsif gender di setiap SOPD								
Indikator: 1. Persentase sumberdaya pelayanan kearsipan	%	100	100	100	100	100	Rp 552.450.000	APBD	Diskominfoarpus



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
2. Persentase ketersediaan data statistik daerah			20%	35%	50%	65%	80%	Rp 4.004.717.566		
Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah										
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik	Ketersediaan data dan sumber informasi potensi daerah dan capaian pelaksanaan pembangunan									
Indikator: Persentase peningkatan layanan air bersih perpipaan		%	2,52%	-	-	-	-	Rp 15.751.185.100	APBD	DPKP
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya										
Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih	Organisasi KP2A yang sehat dan baik									
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Terwujudnya Sarana Air Bersih Yang Sesuai Dengan Perencanaan Pembangunan									
Promosi Air Bersih	Dukungan masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan air bersih di Kota Cimahi									
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Terbangunnya Sarana dan Prasarana air bersih bagi masyarakat di Kota Cimahi									
Pengelolaan jaringan air bersih dan air minum	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Air Bersih Bagi Masyarakat di Kota									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	Cimahi, Berupa Peningkatan Kompetensi Pegawai UPTD Air Minum									
Perencanaan Pembangunan Reservoir	Terwujudnya sarana air bersih yang sesuai dengan perencanaan pembangunan									
Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih	Terbangunnya Sarana dan Prasarana air bersih bagi masyarakat di Kota Cimahi									
Indikator: Persentase peningkatan kapasitas IPAL Komunal		%	4,03%	12,90%	17,14%	17,07%	17,07%	Rp 104.897.564.375	APBD DPKP	
Program Lingkungan Sehat Perumahan										
Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Menjamin terlaksananya kebijakan pembangunan perumahan/permukiman									
Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	Terpenuhinya pelayanan air limbah di Kota Cimahi									
Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Terpeliharanya Kualitas Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kota Cimahi									
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah	Berfungsinya sarana pengolahan air limbah secara optimal									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Promosi Sanitasi	Tersebar nya informasi dan promosi sanitasi									
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	Terwujud nya Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sesuai dengan Rencana atau Target (RPIJM)									
Indikator: Prosentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)		%	80%	-	-	-	-	Rp 16.242.811.240	APBD	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di TPA Regional Yang Memadai									
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Terwujud nya Pelayanan Persampahan yang optimal di Seluruh Kota Cimahi									
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Persampahan; Pengadaan Kompos, Peralatan Pengomposan, Daur Ulang; Pengadaan Biodegester; Pengadaan Mesin Pencacah; Pengadaan Mesin Pemadat Sampah; Pengadaan Peralatan dan	Terwujud nya Pelayanan Persampahan yang optimal di Seluruh Kota Cimahi									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Penunjang Bank Sampah; Sosialisasi Bank Sampah, Pelatihan daur Ulang, Sosialisasi dan pelatihan Pengomposan										
Indikator: Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM		%	145	165	185	205	225	Rp 1.380.372.840	APBD	DPKUKMP
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi										
Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yang memperoleh fasilitas perizinan pembangunan									
Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan	1. Tersusunnya Naskah Akademis Raperda Retribusi Perizinan Tertentu 2. Tersedianya Dokumen Regulatory Impact Assesment (RIA) Penerbitan Izin Reklame 3. Tersedianya Dokumen Inventarisasi KRK tahun 2017 4. Tersedianya dokumen Hasil Survey dan Pengolahan Data KRK tahun 2018									
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang berizinan									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
pelayanan penanaman modal									
Indikator: Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM	%	145	165	185	205	225	Rp 1.695.382.000	APBD	
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi									DPKUKMP
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan berizin yang memberikan laporan kegiatan penanaman modal dan data jumlah investasi di Kota Cimahi								
Indikator: Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	%	2999	3039	3121	3183	3247	Rp 360.337.000	APBD	
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif									DPKUKMP
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Terselenggaranya Kegiatan akselerasi UMKM								
Indikator: 1. Jumlah wirausaha baru	%	15 WUB	20 WUB	45 WUB	55 WUB	65 WUB	Rp 4.636.468.282	APBD	DPKUKMP
2. Jumlah UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil		2999	3039	3121	3183	3247			DPKUKMP



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah										
Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Berkembangnya kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM									
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya jumlah UMKM yang unggul dan berdaya saing di Kota Cimahi									
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Pelatihan dan Pembinaan Standarisasi Pelaku IKM Dengan Kemampuan Spesifik Transportasi IKM Kota Cimahi									
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya daya saing produk IKM di Pasar Lokal, Regional atau Ekspor									
Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan IKM dalam Teknologi Industri									
Indikator:										
1. Jumlah Wisatawan mancanegara (wisman)			575	600	635	670	700	Rp 78.267.264.100	APBD Disbudparpora	
2. Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)			3880	4270	4700	5160	5680			



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
3. Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik			0	0	1	2	3			
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Terpromosikannya potensi seni budaya dan pariwisata Kota Cimahi khususnya potensi wisata heritage Tematik militer melalui kegiatan Launching Cimahi Heritage									
Pelatihan Pemandu Wisata	Meningkatnya kompetensi pemandu wisata.									
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Tersedianya aplikasi web yang bisa dioperasikan									
Indikator: Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik			0	0	1	2	3	Rp 78.267.264.100	APBD	Disbudparpora
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		%								
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Tesedianya jenis dan paket wisata unggulan									
Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersusunnya Pemetaan Wisata Sejarah Tahap 2 (Buku Panduan Wisata)									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu			350 IKM	-	-	-	-	Rp 5.064.397.000	APBD	DPKUKMP
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi										
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Tersedianya sarana informasi, pelaporan dan penggabungan data yang terintegrasi di kawasan Cimahi Technopark									
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM IKM kluster telematika Teridentifikasinya kebutuhan alat/mesin TTG untuk IKM klaster mamin dan IKM klaster TPT, serta pelaku usaha dapat memanfaatkan dan menerapkan alat dan mesin TTG untuk meningkatkan kuatitas dan kualitas produknya									
Pengembangan Techopark	Meningkatnya Kesepemahaman Visi, Meningkatkan koordinasi antar tenant, dan terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antar tenant, dan antara tenant dengan manajemen Technopark									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan pendukung operasional Technopark Kota Cimahi	Tersedianya Operasional Technopark Gedung BITC dan Operasional Gedung CTP Kota Cimahi									
Indikator: Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu			350 IKM	-	-	-	-	Rp 695.667.600	APBD	DPKUKMP
Program pengembangan industri kecil dan menengah										
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya Daya Saing Produk IKM di pasar lokal, regional atau ekspor									
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SDM IKM Kluster TPT di Kota Cimahi; 2. Tersedianya data para pelaku IKM yang lebih valid dan dinamis di kota Cimahi									
Indikator: Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan standar mutu		%	350 IKM	-	-	-	-	Rp 254.652.000	APBD	DPKUKMP
Program peningkatan kemampuan teknologi industri		%								
Pembinaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya daya saing produk IKM di									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	Pasar Lokal, Regional atau Ekspor									
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan IKM dalam Teknologi Industri									
Indikator: Regulasi kebijakan pengembangan industri kota		%	1 naskah akademis	-	-	-	-	Rp 130.487.000	APBD	DPKUKMP
Program penataan struktur industri										
Pembinaan keterkaitan industri hulu hingga ke hilir	Terjalinya Kerjasama antara IKM Klaster Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan Perusahaan Swasta, Akademisi dan Praktisi TPT									
Indikator: Persentase data yang digunakan dalam perencanaan		%	100%	-	-	-	-	Rp 410.752.000	APBD	Diskominfoarpus
Pengembangan data/informasi										
Penyusunan dan Pengumpulan Data statistik	Ketersediaan data dan sumber informasi potensi daerah dan									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	capaian pelaksanaan pembangunan									
		%								
Indikator:			100%	-	-	-	-			
1. Persentase jalan setapak dan tembok penahan tanah dalam kondisi baik		%						APBD		
2. Tingkat keswadayaan masyarakat			30%	-	-	-	-	Rp 2.895.463.000	DPKP	
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan								Rp 23.226.888.065	APBD	
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Padasuka	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Setiamanah	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cimahi	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Karangmekar	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Baros	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Cigugur Tengah	Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni									
Indikator:										
1. Rasio Rumah Tidak Layak Huni		%	1,30%	1,04%	0,78%	0,52%	0,26%	Rp 339.560.820.000	APBD	DPKP
2. Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk			73,86	74,16	74,44	74,70	74,95			
3. Persentase luas taman terhadap luas kota			0,204%	0,216%	0,229%	0,241%	0,365%			
Program Pengembangan Perumahan										
Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Terlaksananya pembangunan perumahan layak huni									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: 1. Persentase pengaduan yang ditangani		%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp 20.303.263.624	APBD	DLH
2. Persentase perusahaan yang melakukan self monitoring			66,67%	75%	87,5%	100%	100%			
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kota cimahi melalui pengelolaan B3 dan Limbah B3									
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan									
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan (Proper) di Kota Cimahi									
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlindunginya lingkungan hidup melalui upaya pengendalian dampak perubahan iklim serta meningkatnya pengetahuan masyarakat									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
	tentang dampak perubahan iklim sehingga mendorong berubahnya prilaku masyarakat menjadi low emission carbon live sehingga dapat mengurangi Gas Rumah Kaca yang dapat memperbesar efek perubahan iklim.									
Indikator:										
1. Persentase kelurahan yang sudah pro klim		%	7%	7%	13%	13%	20%	Rp 53.945.666.300	APBD	DLH
2. Luas kawasan terkonservasi			15000 m2	32000 m2	30000 m2	30000 m2	30000 m2			
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem	Sebagai tempat koleksi tumbuhan & tanaman lokal/meningkatnya tutupan vegetasi									
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber Air	Ketersediaan air dalam tanah dapat dicukupi, serta terwujudnya konservasi serta sumber daya air dan lingkungan									
Indikator: Persentase Ruang Terbuka Hijau		%	11,15%	-	-	-	-	Rp 17.241.995.900	APBD	DLH



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										
Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH di wilayah Kota Cimahi sesuai fungsinya									
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terbangunnya RTH baru									
Indikator:										
1. Persentase pemilu yang difasilitasi		%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD Rp 1.500.320.377	SETDA	
2. Nilai komponen pelaporan LKIP kota			100%	100%	100%	100%	100%			
3. Persentase PD yang memiliki Evaluasi Jabatan yang baik			30%	35%	40%	45%	50%			
4. Persentase PD/Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			100%	100%	100%	100%	100%			
5. Persentase dokumen pertanggungjawaban pemerintah daerah yang bernilai baik			100%	100%	100%	100%	100%			
6. Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%			
7. Persentase produk hukum yang tersusun			100%	100%	100%	100%	100%			
8. Persentase kasus hukum terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%			
								Rp 15.462.432.421		



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
9. Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perekonomian			100%	100%	100%	100%	100%			
10. Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%			
11. Persentase pelaksanaan pekerjaan yang di Monev			100%	100%	100%	100%	100%		APBD	
12. Persentase kegiatan KDH dan WaKDH yang terfasilitasi			71%	71%	71%	71%	71%	Rp 4.550.089.200		
13. Persentase kegiatan kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial dan kepemudaan olahraga yang difasilitasi			97%	97%	97%	97%	97%			
14. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi										
Kebijakan daerah koordinasi pembinaan dukungan manajemen dan pelayanan administrasi									APBD	
Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Tertanganinya kasus dan Permasalahan Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2018	2019	2020	2021	2022			
Indikator: 1. Nilai LAKIP		70 (B)	75 (BB)	79 (BB)	85 (A)	85 (A)	Rp 35.003.241.479	APBD	Seluruh Perangkat Daerah
2. Persentase realisasi anggaran		85%	85%	85%	85%	85%			
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja SKPD								
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tercapainya kualitas informasi pelaporan keuangan semester BPKAD								
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	tercapainya kualitas informasi pelaporan keuangan tahunan Kota Cimahi								
Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan								
Indikator: Persentase pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	%	100%	-	-	-	-	Rp 1.247.144.250	APBD	Bappeda
Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Teknologi informasi dan pelaporan pengadaan	Pengelolaan fasilitasi teknologi informasi dan pelaporan PBJ									
Akuntabilitas kinerja Pemda	a. Terkelolannya pelaporan melalui sistem <i>E - Reporting</i> b. Terkelolanya pelaporan TEPR c. Terlaksananya pelatihan E - Reporting d. Terlaksananya Monev kegiatan pada Perangkat Daerah									
Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	a. Terlaksananya Bintek Anjab untuk Aparatur b. Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan									
Indikator: 1. Cakupan Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			12 bulan	-	-	-	-	Rp 34.300.288.775	APBD	
2. Persentase ASN yang kompeten			75%	76%	77%	78%	80%		BKPSDMD	
3. Penilaian kinerja pegawai (SKP)			76	79	81	83	85			
4. Persentase gap tunjangan kinerja dalam jabatan yang sama			0,3	0,27	0,25	0,22	0,2			
5. Persentase pelanggaran disiplin			0,1	0,08	0,07	0,06	0,05			



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
Penempatan PNS	Terwujudnya penempatan PNS yang memenuhi syarat kualifikasi dan syarat teknis pada jabatan tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah									
Indikator: Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah		%	100%	-	-	-	-	Rp 8.520.295.456	APBD BPKAD, Bapenda	
Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Keuangan Daerah										
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Cakupan Pelayanan Pajak Daerah dan Peningkatan penerimaan pajak daerah									
Pembinaan Dan Penyuluhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang mendapatkan pembinaan dan calon WP yang mendapatkan penyuluhan									
Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pengawasan penerimaan pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi									



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2018	2019	2020	2021	2022			
Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah pengembangan sistem aplikasi pajak daerah baru dan pemeliharaan (<i>Updating</i>) Aplikasi pajak daerah berjalan									
Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Persentase Kepatuhan rata-rata pajak daerah									
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah per tahun									
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi	Tersedianya peraturan-peraturan legalitas raperda tentang peningkatan penerimaan pendapatan daerah									
Penyusunan Target Pendapatan	Penetapan Target Pendapatan Daerah Kota Cimahi Murni dan Pendapatan									
Verifikasi Data Wajib Pajak	Pemutakhiran (<i>Update</i>) objek pajak/Wajib Pajak Daerah									
Indikator: Persentase kenaikan UMK		%	8,90%	9,10%	9,29%	9,49%	9,89%	Rp 4.228.312.539	APBD	Disnaker
Program Peningkatan Kesejahteraan Buruh										
Indikator: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			101,96	102,23	102,500	102,77	103,04	Rp 114.528.600.000	APBD	Disdik
Program Pendidikan Dua Belas Tahun										



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Perubahan RPJMD Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022



F.3. Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non Pemerintah

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019	2020				
PROGRAM NON PEMERINTAH (organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya)										
PERBANKAN										
INDIKATOR TPB :										
PROGRAM :Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)										
Kegiatan : Revitalisasi Taman Kartini	Taman					Rp1.450.000.000		CSR	Kota Cimahi	BJB
INDIKATOR TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak										
PROGRAM :Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)										
Kegiatan 1: Open Defecation Free (ODF)	Unit		Rp172.050.000					CSR	Kota Cimahi	BJB
FILANTROPI										
INDIKATOR TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
PROGRAM : Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)										
Kegiatan : Membantu Sarana dan Prasarana serta Kebutuhan Lain Bagi Panti/Yayasan	Paket	Rp900.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Anak Sholeh
	Paket	Rp6.000.000						CSR	Kota Cimahi	Panti Asuhan Ulul Azmi



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019	2020				
	Paket	1 buah white board+standing, 1 paket ATK, 10 buah meja lipat						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Swara Peduli Cimahi
	Paket	Rp8.000.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Darul Khusna Insan Barokah
	Paket	Rp5.800.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Dulur Salembur
	Paket	Rp7.000.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Badru
	Paket	Rp6.800.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasam Muhamad Iqbal
	Paket	Rp3.800.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan As Salam
	Paket	Rp9.600.000						CSR	Kota Cimahi	Yayasan Al Maqom
AKADEMISI										
INDIKATOR TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
PROGRAM : Penelitian										



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019	2020				
Konservasi Durian Kamarung	Kegiatan		v						Kota Cimahi	UNJANI
Summer Course Cireundeu									Kota Cimahi	UNPAD
SWASTA										
INDIKATOR TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak										
PROGRAM : Instalasi Pengolahan Air Limbah										
Kegiatan: bantuan hibah konstruksi IPAL dan jaringan IPAL serta air bersih			v						Kota Cimahi	DFAT
INDIKATOR TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
PROGRAM :										
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan			v						Kota Cimahi	Kepala Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi
			v						Kota Cimahi	Kepala Rumah MAL Kota Cimahi
			v						Kota Cimahi	Kepala Rumah Sakit Aviera Kota Cimahi
			v						Kota Cimahi	Kepala Rumah Sakit



Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 Perubahan RPJMD Kota Cimahi
 Tahun 2017 – 2022

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018	2019	2020				
										Kasih Bunda Kota Cimahi
LSM										
INDIKATOR TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
PROGRAM : Kesehatan										
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan			v						Kota Cimahi	Ketua PMI (Palang Merah Indonesia)